



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

**RANCANGAN AKHIR**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
(RPJPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2025-2045**

KALTIM SEJAHTERA 2045  
PENGGERAK SUPERHUB EKONOMI NUSANTARA YANG MAJU, ADIL DAN BERKELANJUTAN

SAMARINDA, 24 JULI 2024



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR        TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang    :
- a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional terdiri dari rencana Pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana Pembangunan tahunan;
  - a. bahwa Provinsi Kalimantan Timur memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas untuk menyusun, mengajukan dan menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun Terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

## Pasal 2

- (1) RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 terdiri atas:
  - BAB I. Pendahuluan;
  - BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis;
  - BAB IV. Visi dan Misi Daerah;
  - BAB V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;
  - BAB VI. Penutup.
- (2) RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

- (1) Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur adalah Kaltim Sejahtera 2045 : Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil dan Berkelanjutan.
- (2) Terwujudnya Kaltim Sejahtera 2045: Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil dan Berkelanjutan tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi terdiri atas:
  - a. peningkatan pendapatan per kapita dengan indikator PDRB per kapita sebesar Rp 850,00-1.289,73 juta,

Indeks Ekonomi Biru Indonesia pada angka 127,09 dan kontribusi PDRB industri pengolahan sebesar 32,30-44,10 persen;

- b. pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan indikator tingkat kemiskinan pada angka 0,07-0,32 persen, dan rasio gini pada angka 0,254-0,298;
  - c. peningkatan perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98-7,45 persen dan Indeks Daya Saing Daerah pada angka 4,08;
  - d. peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan indikator Indeks Modal Manusia pada angka 0,77;
  - e. penurunan emisi GRK menuju *net zero emission* dengan indikator penurunan intensitas emisi GRK sebesar 96,37 persen.
- (3) Misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur adalah:
- a. transformasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera;
  - b. transformasi ekonomi dengan mengoptimalkan peran sebagai superhub ekonomi ibu kota nusantara;
  - c. transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan berintegritas;
  - d. mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi daerah;
  - e. mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal;
  - f. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
  - g. mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
  - h. mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan.

#### Pasal 4

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 selanjutnya menjadi:

- a. acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi, misi dan program pada Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pedoman dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029, RPJMD Tahun 2030-2034, RPJMD Tahun 2035-2039, dan RPJMD Tahun 2040-2045, dan;
- c. pedoman dalam penyusunan RPJPD kabupaten/kota tahun 2025-2045.

## Pasal 5

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundangan, dan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

## Pasal 6

Pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2045.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal Agustus 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR .....





## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN .....	I-2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-3
1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .....	I-4
1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN .....	I-5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI .....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi .....	II-1
2.1.2 Aspek Demografi .....	II-19
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .....	II-24
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi .....	II-24
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya .....	II-54
2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH .....	II-72
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah .....	II-72
2.3.2 Daya Saing SDM .....	II-130
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah .....	II-150
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi .....	II-169
2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-174
2.5. EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025 .....	II-183
2.6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK .....	II-207
2.6.1 Proyeksi Demografi .....	II-207
2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana .....	II-211
2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH .....	II-215
2.7.1 Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur .....	II-216
2.7.2 Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur .....	II-217
2.7.3 Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur .....	II-224
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b> .....	<b>III-1</b>
3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	III-I
3.2. TELAAH KLHS RPJPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	III-6
3.2.1. Aspek Biogeofisik Kawasan .....	III-7



3.2.2. Rumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) .....	III-8
3.2.3. Usulan Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 Berdasarkan KLHS .....	III-8
3.2.4. Rekomendasi terhadap RPJPD Tahun 2025-2045 .....	III-18
3.3. ISU STRATEGIS .....	III-25
3.3.1. Isu Strategis Internasional .....	III-25
3.3.2. Isu Strategis Nasional .....	III-31
3.3.3. Isu Strategis Regional.....	III-37
3.3.4. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur .....	III-38
<b>BAB IV VISI DAN MISI KALIMANTAN TIMUR .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. VISI DAN MISI .....	IV-2
4.1.1. Visi.....	IV-2
4.1.2. Sasaran Visi .....	IV-3
4.1.3. Misi .....	IV-5
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....</b>	<b>V-1</b>
5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR 2025-2045 .....	V-1
5.1.1. Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan.....	V-1
5.2. UPAYA TRANSFORMATIF SUPER PRIORITAS ( <i>GAME CHANGER</i> ) ..	V-6
5.3. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2045 .....	V-8
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>VI-1</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. Rencana Pembangunan ini memiliki lingkup waktu jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode dua puluh tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. RPJPD disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 akan berakhir, dan selanjutnya akan memasuki periodisasi baru Tahun 2025-2045. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 18 yang menetapkan bahwa penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya. Sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Pemerintah Daerah diminta untuk menetapkan RPJPD Tahun 2025-2045 paling lambat di minggu pertama Bulan Agustus Tahun 2024.

Penyusunan RPJPD wajib mempedomani substansi RPJPN sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Target penyelesaian RPJPD di tahun 2024 memiliki kedudukan yang strategis sebagai pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Secara Serentak. Terkait hal tersebut, maka perlu disusun dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045.



## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Kalimantan Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Kalimantan Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1);
  9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  10. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka panjang daerah dalam 20 tahun mendatang. Selain itu, penyusunan RPJPD juga dimaksudkan untuk menjamin terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi para calon Kepala Daerah dalam menyusun program kerja yang akan disampaikan pada masa pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, RPJPD disusun dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan daerah; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam waktu lima tahunan.

## 1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

### 1. Hubungan RPJPD Kalimantan Timur dengan RPJP Nasional

Penyusunan RPJPD Kalimantan Timur mengacu kepada visi, misi, sasaran visi, arah pembangunan, dan arah kebijakan transformasi sebagaimana yang tercantum dalam RPJP Nasional termasuk penetapan jangka waktu dan tahapan pembangunan lima tahunan.

### 2. Hubungan RPJPD Kalimantan Timur dengan RPJMD

RPJPD Kalimantan Timur menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, serta menjadi acuan bagi Kepala Daerah terpilih dalam menyusun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahunan (RPJMD).

### 3. Hubungan RPJPD Kalimantan Timur dengan RPJPD Kabupaten/Kota

RPJPD Kalimantan Timur menjadi pedoman bagi penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota terutama untuk keselarasan visi, misi, sasaran visi, arah pembangunan, dan arah kebijakan transformasi pembangunan kabupaten/kota.

### 4. Hubungan RPJPD dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

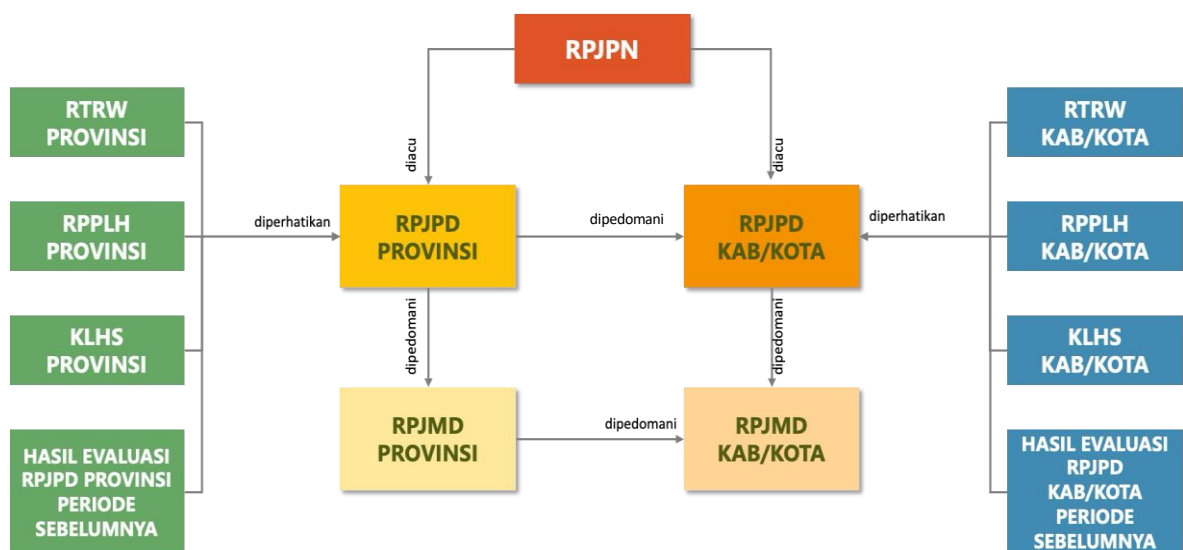
RPJPD Kalimantan Timur memuat arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah administrasi Kalimantan Timur dengan memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara. RTRW Provinsi Kalimantan Timur memuat rencana penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang menjadi pedoman dalam menetapkan arah pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur.

### 5. Hubungan RPJPD dengan KLHS dan RPPLH Provinsi Kalimantan Timur

KLHS dan RPPLH menjadi pedoman penyusunan RPJPD yang memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana dan/atau program pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

### 6. Hubungan RPJPD dengan Hasil Evaluasi RPJPD periode sebelumnya

Kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya menjadi hal utama yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam penyusunan visi, misi, sasaran pokok dan arah pembangunan periode jangka panjang berikutnya.

**Gambar I.1****Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

(Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024)

**1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, dan sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu pertimbangan perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, serta mencantumkan hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 dan tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Memuat tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia, serta memuat isu strategis daerah yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya



dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

#### **BAB IV**

#### **VISI DAN MISI**

Memuat visi daerah yang merupakan kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045, dan memuat misi daerah yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

#### **BAB V**

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

Memuat arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Arah kebijakan sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah. Selain itu juga memuat sasaran pokok RPJPD yang merupakan rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045. Sasaran pokok memuat 17 (tujuh belas) arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah.

#### **BAB VI**

#### **PENUTUP**

Memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.





## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki sumber daya mineral yang berlimpah dan lahan yang produktif. Lahan produktif Kalimantan Timur mencakup area perkebunan yang didominasi oleh tanaman kelapa sawit dan karet, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta areal hutan. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Kekayaan mineral di Kalimantan Timur terutama terkait dengan komoditi migas dan batubara perlu mendapat perhatian khusus agar dapat dikelola secara berkelanjutan, dengan terus mendorong upaya transisi energi ke sumber energi terbarukan. Secara keseluruhan, Kalimantan Timur tidak hanya menjadi kawasan yang kaya akan keindahan alam dan biodiversitas, tetapi juga menyimpan keberagaman nilai-nilai kultural dan tradisional budaya Indonesia.

Selain kekayaan alam dan warisan budaya yang melimpah, Kalimantan Timur sebagai wilayah yang berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), memegang peranan krusial dalam pembangunan nasional. Hal ini mewajibkan provinsi ini untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan nasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus merumuskan rencana kebijakan pembangunan yang efektif, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan sejalan dengan program pemerintah pusat. Penyusunan rencana kebijakan pembangunan ini perlu didasarkan pada kondisi eksisting daerah saat ini. Secara rinci gambaran umum kondisi daerah Provinsi Kalimantan Timur dijelaskan melalui beberapa aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum.

#### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1 Aspek Geografi

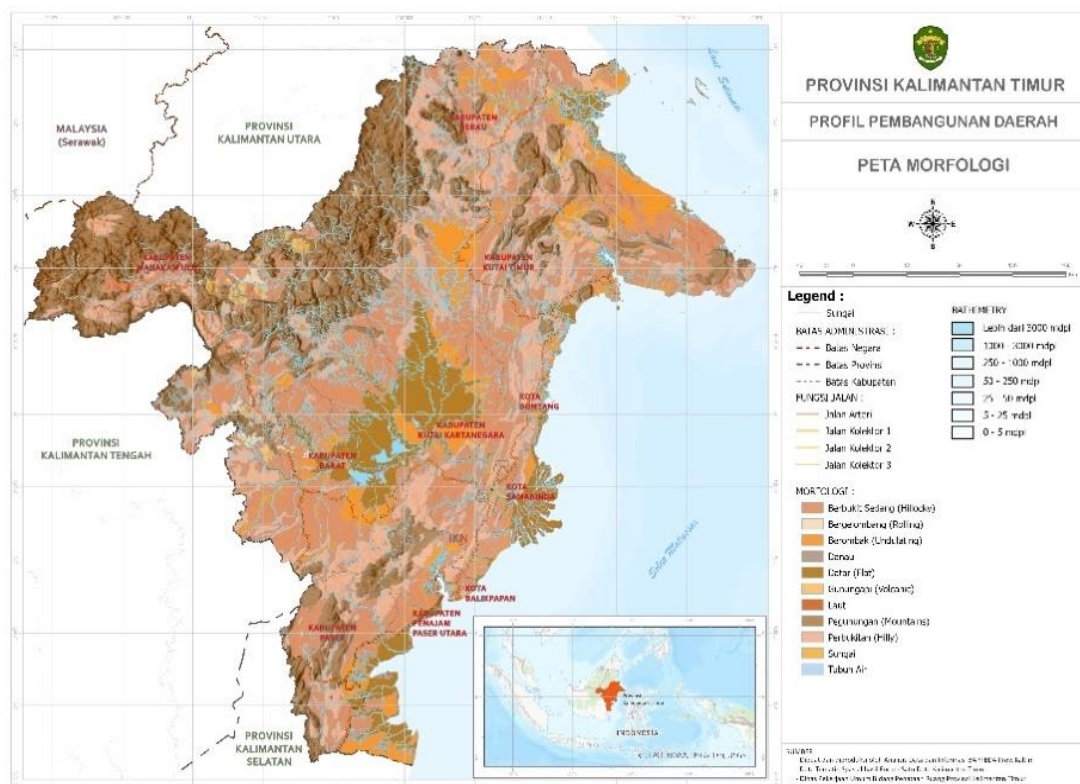
Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara  $2^{\circ} 37' 12.99''$  Lintang Utara (LU) dan  $-2^{\circ} 28' 19.31''$  Lintang Selatan (LS),  $113^{\circ} 50' 3.61''$ - $119^{\circ} 14' 13.06''$  Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Selat Makassar; dan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

### 1. Potensi Sumber Daya Alam

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 15.344.552 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.446.112 ha dan wilayah laut yang mencapai 2.898.439 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sumber daya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar diekspor keluar negeri, sehingga Provinsi Kalimantan Timur merupakan penghasil devisa utama bagi negara khususnya sektor pertambangan, kehutanan dan hasil lainnya. Komoditi yang menjadi unggulan dalam menarik investasi di Kalimantan Timur adalah kelapa sawit, karet, kakao, batubara dan migas.

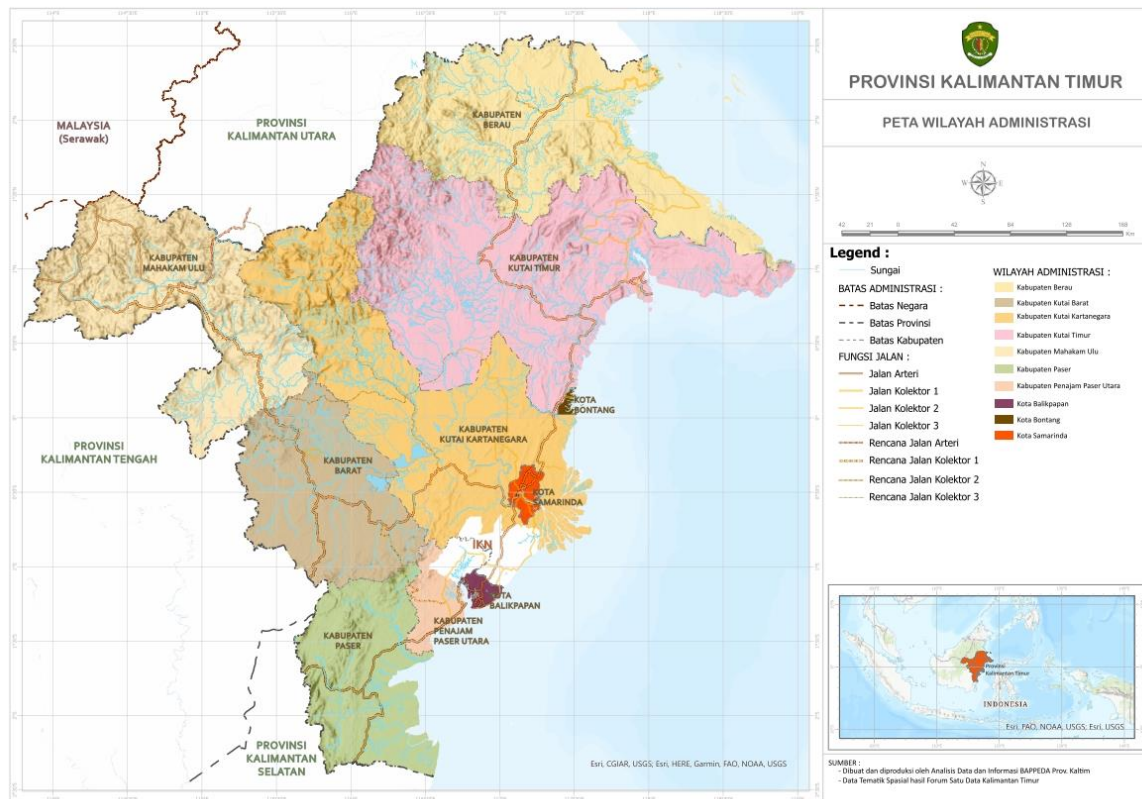


**Gambar II.1**  
**Peta Morfologi Provinsi Kalimantan Timur**  
*Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023*



Morfologi di Kalimantan Timur mengacu pada studi tentang struktur dan bentuk wilayah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur terletak di bagian timur pulau Kalimantan dan memiliki keunikan dalam segi geografi, geologi, dan topografi yang mempengaruhi morfologi wilayah. Secara umum, morfologi Kalimantan Timur terdiri dari dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Perbukitan ini menjadi batas alam antara Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Selanjutnya, terdapat pegunungan yang melintasi Kalimantan Timur, seperti Pegunungan Kayan-Mentarang di utara dan Pegunungan Schwaner di tengah. Pegunungan ini memiliki ketinggian yang bervariasi dan menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang endemik. Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur yang menjadi sumber air baku serta menjadi jalur transportasi vital bagi masyarakat.

Setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi berkurang. Luas wilayah IKN Nusantara mencapai 322.429 Ha yang terdiri dari luas wilayah daratan mencapai 252.660 ha dan wilayah laut mencapai 69.769 ha.



**Gambar II.2**  
**Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur**  
*Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023*

Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur**

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Paser	1.104.644	10	144
2	KUBAR	1.361.117	16	194
3	KUKAR	2.529.239	20	237
4	KUTIM	3.122.720	18	141
5	Berau	2.137.135	13	110
6	PPU	203.254	4	54
7	MAHULU	1.849.224	5	50
8	Balikpapan	51.023	6	34
9	Samarinda	71.678	10	59
10	Bontang	16.077	3	15
Luas Wilayah Laut 12 Mil		2.898.439	-	-
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>15.344.552</b>	<b>105</b>	<b>1.038</b>

*Sumber: RTRW Provinsi KALTIM 2023-2042*

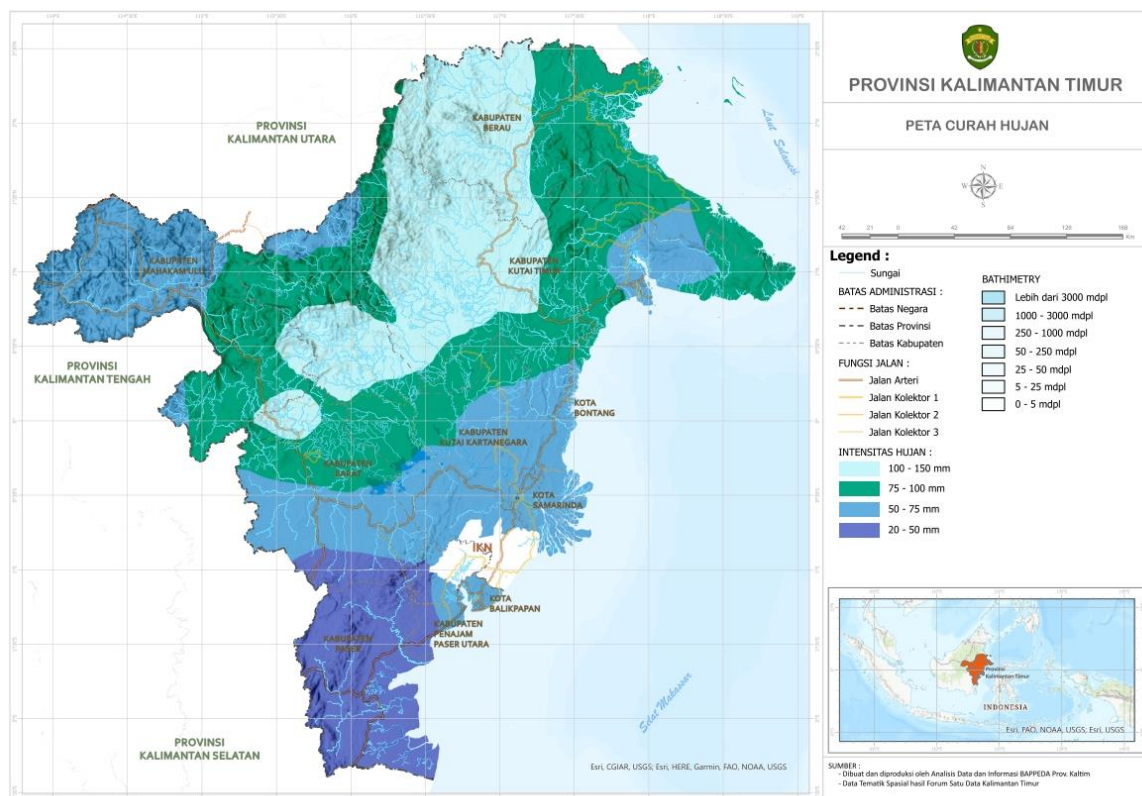
## 2. Klimatologi

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. Tabel II.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

**Tabel II.2**  
**Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	24,50	24,20	23,50
	- Maksimum	32,30	31,10	32,70
2	Kelembaban (%)	82	83,30	87
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.011,60	1.010,10	1.011,50
4	Kecepatan Angin (Knot)	4,00	3,00	3,50
5	Curah Hujan (mm)	2.599	2.947	2.312
6	Penyinaran Matahari (%)	42	46	49

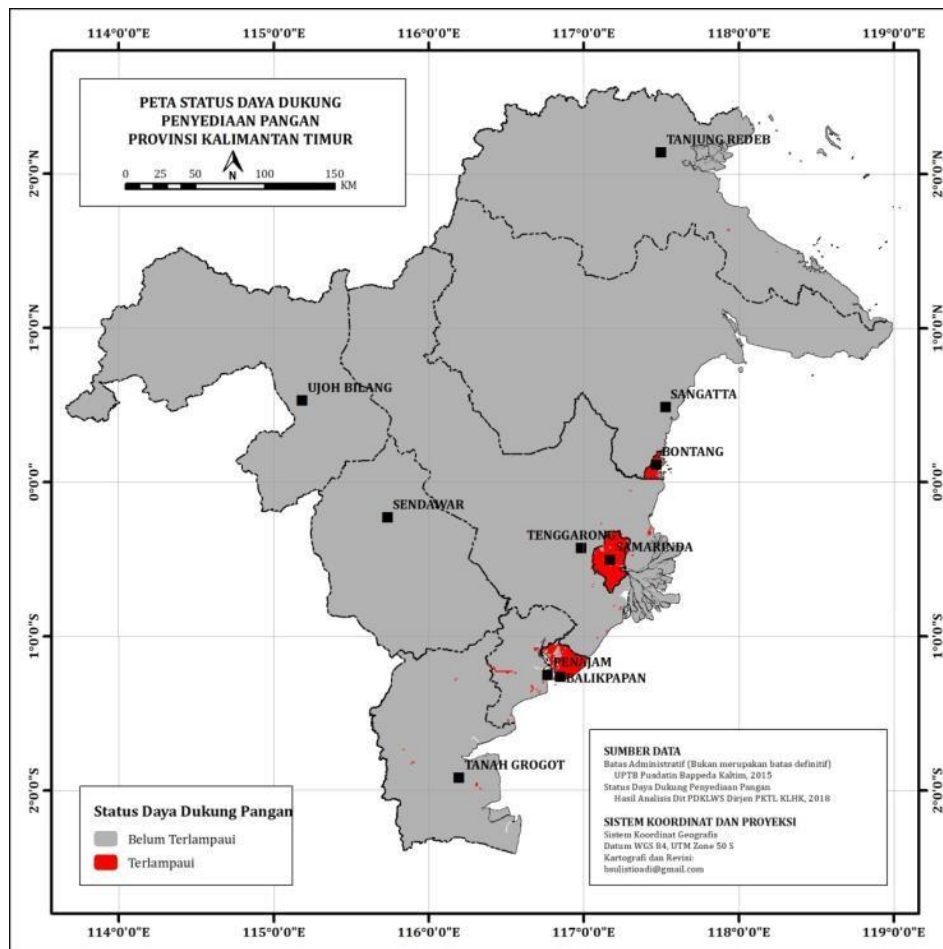
Sumber: BMKG Wilayah KALTIM, 2023



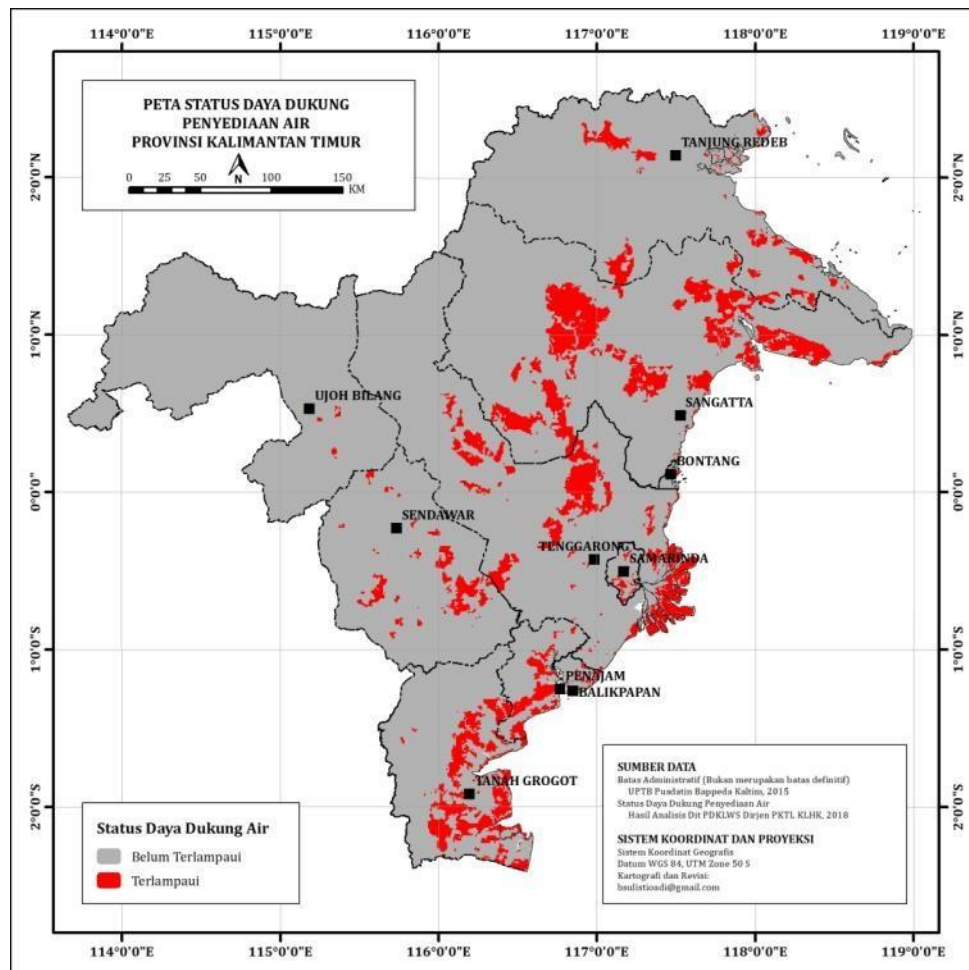
**Gambar II.3**  
**Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur**  
Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023

### 3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Untuk mengetahui indikatif status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terutama pada daya dukung penyediaan air dan daya dukung penyediaan pangan, adalah dari identifikasi jasa lingkungan di atas melalui perhitungan kebutuhan dan ketersediaan pangan dan air yang didasari pada data empiris yang telah diukur maupun dikumpulkan oleh otoritas pemerintah berwenang.



**Gambar II.4**  
**Peta Status Daya Dukung Penyediaan Pangan**  
**Provinsi Kalimantan Timur**

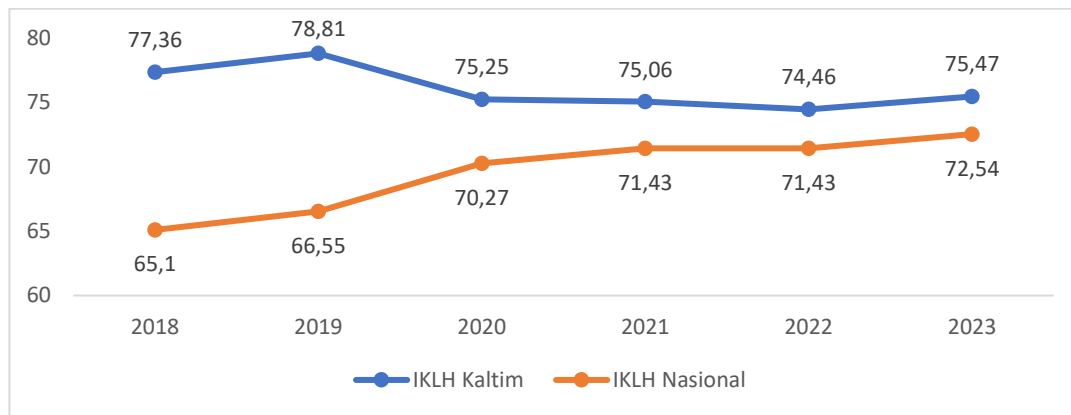
**Gambar II.5****Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air Provinsi Kalimantan Timur**

Dari kedua peta di atas, dapat disimpulkan bahwa status daya dukung penyedia pangan di wilayah perkotaan umumnya sudah terlampaui, mengingat pemusatan distribusi penduduk yang adadi wilayah tersebut, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sementara dari segi penyediaan air, terdapat cukup banyak wilayah yang telah melampaui daya dukungnya seperti Delta Mahakam, sebagai besar wilayah pesisir di Penajam Paser Utara dan Paser dan sebagian pesisir di Kabupaten Kutai Timur. Dengan kondisi sebagaimana disimpulkan dari studi awal status daya dukung daya tampung provinsi Kalimantan Timur ini, perlu perhatian yang lebih untuk wilayah-wilayah yang telah dideklarasikan sebagai wilayah yang defisit air dan pangan.

**4. Kualitas Lingkungan Hidup**

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat eksploitatif dan banyak menyebabkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang

digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup.



**Gambar II.6**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2023**

*Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024*

Pada tahun 2018, IKLH Kalimantan Timur mencapai 77,36 mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 75,47. Menurunnya IKLH tahun 2021 dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai. Capaian IKLH Tahun 2023 menurun dikarenakan adanya penurunan angka indeks pada Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Air Laut. Secara umum, IKLH Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional.

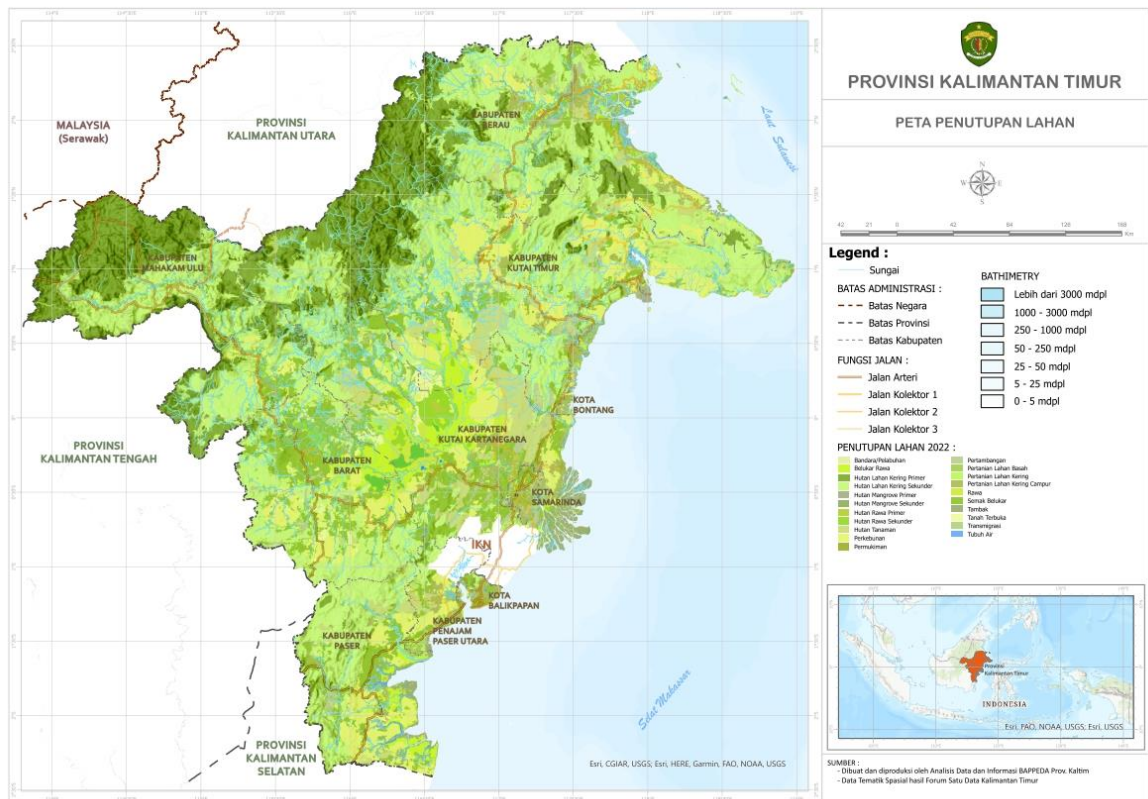
**Tabel II.3**  
**Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023**

INDEKS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IKA	57,73	77,09	53,7	51,92	53,02	52,64
IKU	83,36	89,42	89,06	88,84	87,59	89,64
IKL	87,59	72,12	79,76	82,21	81,85	83,86
IKAL	-	-	83,51	85,4	81,45	81,36

*Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024*

Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.





**Gambar II.7**  
**Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur**  
*Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023*

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak hanya diukur di tingkat Nasional dan Provinsi saja namun juga ada pada tingkat Kabupaten/Kota. Jika dilihat melalui capaian IKLH dari 10 Kabupaten/Kota di Tahun 2023 yang ada di Kalimantan Timur, Capaian IKLH Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten dengan capaian terbaik, yakni 83,19 dengan *Rating* Baik. Capaian ini didukung oleh Capaian Indeks Kualitas Lahan yang sempurna yakni 100 Indeks. Sementara Kabupaten/Kota dengan capaian *Rating* Sedang adalah Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Samarinda. Selengkapnya dapat terlihat di tabel berikut:

**Tabel II.4**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	IKA	IKU	IKL	IKLH	Rating
1	Paser	54,09	90,46	71,20	72,57	BAIK
2	KUBAR	53,08	91,80	70,30	72,53	BAIK
3	KUKAR	50,53	91,53	74,62	72,41	BAIK
4	KUTIM	49,47	87,00	83,48	72,12	BAIK
5	Berau	53,33	85,17	93,76	75,08	BAIK
6	PPU	50,95	90,96	65,10	70,25	BAIK
7	MAHULU	61,28	94,43	100	83,19	BAIK
8	Balikpapan	54,50	89,98	48,91	67,64	SEDANG



No	Kabupaten/Kota	IKA	IKU	IKL	IKLH	Rating
9	Samarinda	50,00	85,31	29,92	59,90	SEDANG
10	Bontang	52,22	89,74	49,44	66,81	SEDANG

Sumber: [ppkl.menlhk.go.id/iklh](http://ppkl.menlhk.go.id/iklh)

Kabupaten/kota yang memiliki capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang baik adalah kabupaten/kota yang menghasilkan capaian Indeks Kualitas Lahan yang baik pula. Hal ini disebabkan porsi perhitungan Indeks Kualitas Lahan yang lebih besar dalam rumus perhitungan IKLH, yakni 40%.

Indonesia dan Kalimantan Timur diakui turut berkontribusi terhadap pemanasan global melalui peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dimana Indonesia termasuk penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, sementara Kalimantan Timur sendiri penghasil emisi terbesar ke-6 secara nasional (WRI, 2016). Penyumbang emisi GRK di Kalimantan Timur sampai tahun 2015 didominasi oleh sektor berbasis lahan berupa alih guna dan degradasi hutan (64%), energi (17%), limbah (17%) dan pertanian (2%).

Strategi transformasi ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengarahkan pembangunan dengan cara meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sumber daya alam yang ada selama ini. Dengan melihat semakin menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan semakin menurunnya ekonomi dari sumber daya alam tak terbarukan, maka Pemprov Kaltim melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang, antara berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam yang terbarukan, yang dilakukan secara sistematis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengarahkan rencana pembangunan di Kalimantan Timur sejalan dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan strategi pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan disertai upaya mengarusutamakan ekonomi hijau ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota di Kaltim.

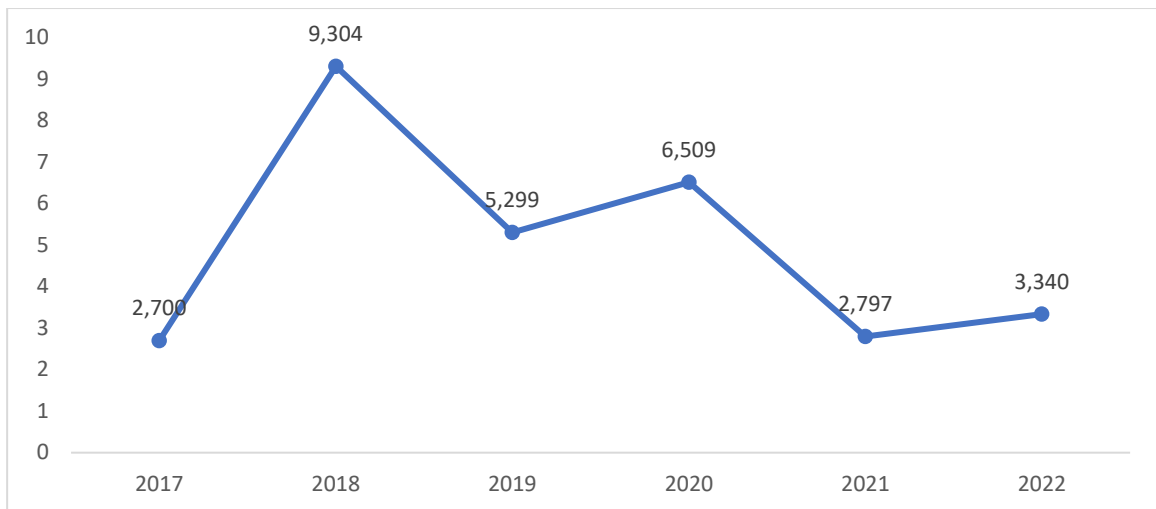
Dalam Konteks Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) adalah suatu keharusan untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar Pemerintah Daerah mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan RAD GRK, meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target penurunan emisi dan penyerapan GRK. Selain itu, tahapan PEP ini dapat menjadi momentum untuk penyiapan bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan/Tindakan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan RAD GRK di tahun-tahun berikutnya. Sejak Tahun 2017,



Kalimantan Timur tercatat sudah melakukan inventarisasi aksi mitigasi perubahan iklim dan di PEP kan. Hingga tahun 2022 total aksi yang sudah disetujui dan final di PEP/Aplikasi AKSARA Bappenas adalah sebanyak 836 aksi.

Kalimantan Timur sebagai Provinsi yang terpilih sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang baru juga memiliki masalah yang populer terjadi di Provinsi yang memiliki kota besar lainnya di Indonesia, yakni permasalahan pencemaran lingkungan. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan penanganan yang serius oleh semua pihak agar penanganannya dilakukan secara serius dan cepat tanggap. Maka dari itu dalam menentukan tingkat pencemaran lingkungan dilakukan pengukuran Indeks Pencemaran Lingkungan. Indeks Pencemaran Lingkungan adalah Indeks Pencemaran (IP) dari pemantauan Kualitas Air yang kemudian dilakukan penghitungan indeks pencemarannya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Tahun 2021 capaian Indeks Pencemaran 2,797 (Status Cemar Ringan) dari rata-rata 27 titik pemantauan kualitas air, sedangkan target yang ditetapkan adalah 8 (Status Cemar Sedang) artinya Indeks Pencemaran pada tahun 2021 masih dibawah status cemar sedang, yaitu cemar ringan. Tahun 2022 data Indeks Pencemar yang dihitung adalah 3,34 (Cemar ringan) dari 179 titik pemantauan kualitas air, sedangkan target tahun 2022 yang ditetapkan adalah 8 (cemar sedang) artinya capaian sementara tahun 2022 masih dibawah status mutu air cemar sedang. Jika dibandingkan dengan capaian IP tahun 2021 (2,797) dan IP sementara tahun 2022 (3,34) terdapat selisih nilai yaitu 0,543, hal ini disebabkan adanya pada Tahun 2022 nilai Indeks Pencemaran dilakukan perhitungan penggabungan titik pantau kualitas air sebanyak 179 titik pemantauan kualitas air antara titik KLHK, titik Provinsi Kaltim dan titik Kabupaten/Kota, sehingga nilai tersebut dapat mempengaruhi hasil perhitungan Indeks Pencemar pada Provinsi Kalimantan Timur.



**Gambar II.8**  
**Indeks Pencemaran Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017-2022**

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022

Selanjutnya, Kaltim telah dipilih sebagai lokasi Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) pada Oktober 2015. Program FCPF *Carbon Fund* dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim (12,7 juta hektar) untuk mempertahankan 6,5 juta hektar kawasan berhutan. Apabila dilihat dari pengurangan emisi gas rumah kaca, Provinsi Kaltim terus berusaha untuk melakukan upaya-upaya penurunan emisi.

**Tabel II.5**  
**Angka Penurunan Emisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Penurunan Emisi (juta ton co <sub>2</sub> eq)	11,76	10,21	27,73	25,22	26,24

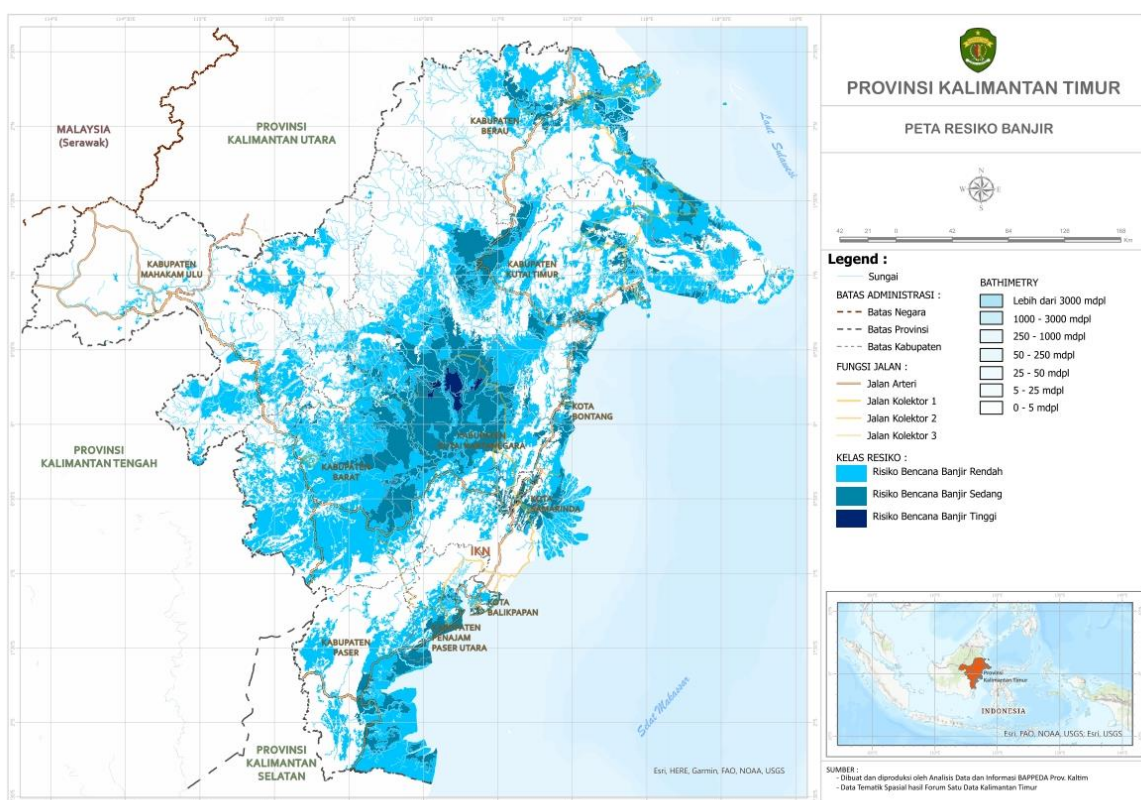
Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024

Kalimantan Timur berhasil menurunkan emisi sebanyak 26,24 Juta Ton CO<sub>2</sub> eq atau sebanyak 49,46 persen pada tahun 2023. Capaian persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian persentase penurunan emisi dari BAU (*Business As Usual*) di P-RPJMD Kaltim 2019-2023, yakni 29,33. Fluktuatif capaian penurunan emisi disebabkan tingginya capaian penurunan emisi dari sektor lahan.

## 5. Kebencanaan

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks

dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas daerah. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Namun, emisi gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur akibat dari perubahan iklim adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.



**Gambar II.9**

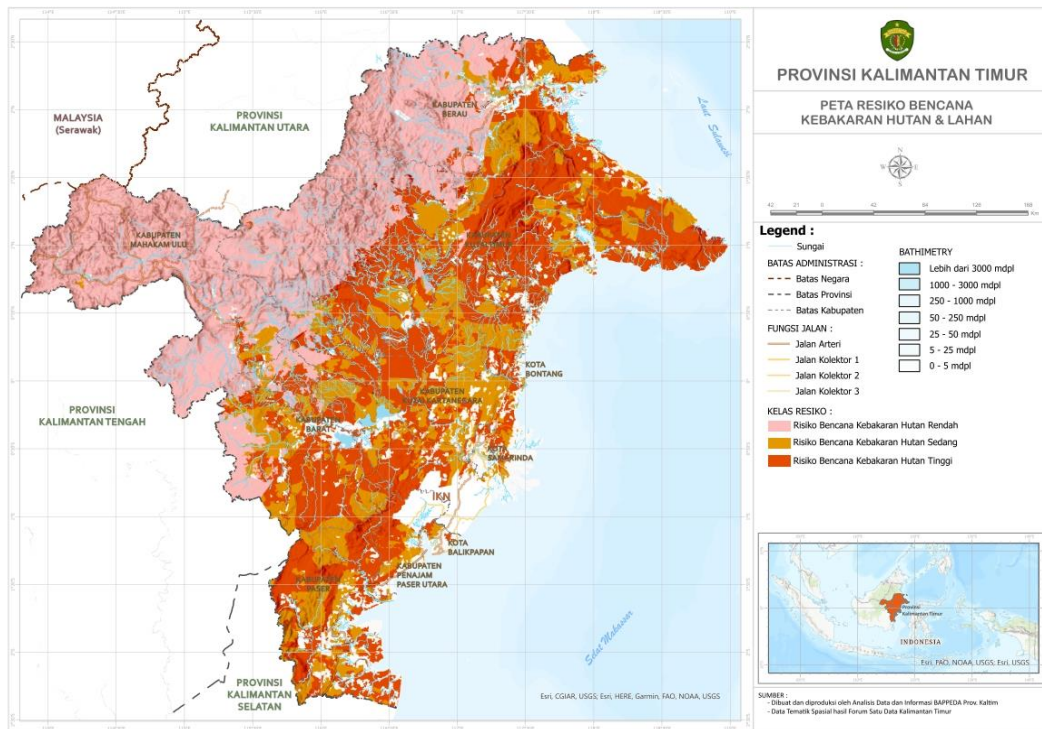
**Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Timur**

*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kaltim, diolah Bappeda Prov Kaltim 2022*

Aktivitas Manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana Banjir yakni pembudidayaan daerah dataran Banjir, peruntukan tata ruang di dataran Banjir yang tidak sesuai, belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran Banjir, permukiman di bantaran sungai, sistem drainase yang tidak memadai, terbatasnya tindakan mitigasi Banjir, kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai, penggundulan hutan di daerah hulu, terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali Banjir dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil Banjir.

Terjadinya bencana Banjir tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya bencana Banjir, antara lain:

1. Buruknya saluran air/drainase. Kota-kota besar hampir setiap tahun mengalami Banjir karena tidak terawatnya saluran air. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran air sangat rendah sehingga saluran air dipenuhi sampah dan akhirnya jalan untuk lalu lintas air menjadi kecil. Selain sampah, juga banyaknya bangunan-bangunan yang menyebabkan saluran air tertutup beton bangunan sehingga saluran dalam arti air tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya, air menggenang di jalan dan lama-lama menyebabkan Banjir.
2. Daerah resapan air yang kurang. Daerah resapan air merupakan suatu daerah yang ditanami pohon atau mempunyai danau yang berfungsi sebagai tampungan atau menyerap air ke dalam lapisan tanah kemudian disimpan sebagai cadangan air tanah. Masalah yang terjadi pada dewasa ini adalah semakin banyaknya bangunan yang didirikan terutama di kota-kota besar sehingga fungsi lahan hijau sebagai tempat resapan air mulai tergeser oleh adanya beton-beton bangunan yang berakibat terhambatnya air meresap ke dalam tanah, sehingga membentuk genangan dan akhirnya terjadi Banjir.
3. Penebangan pohon secara liar. Selain memiliki fungsi untuk mencegah longsor dengan mempertahankan kontur tanah tetap pada posisinya, pohon juga berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah melalui akar-akarnya. Dewasa ini, penebangan pohon secara liar kerap kali dilakukan sehingga ketika terjadi hujan deras air tidak mampu terserap ke tanah namun mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah seperti daerah pada hilir, perkotaan atau pedesaan yang menyebabkan Banjir.
4. Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan yang sangat besar ketika berbicara tentang Banjir karena semestinya menjadi tempat untuk mengalirnya air dari air hujan menuju ke laut. Ketika sungai tidak terawat, rusak atau menjadi tercemar maka keberlangsungan fungsi sungai juga kan terganggu. Dewasa ini, kerusakan sungai pada umumnya disebabkan karena pembuangan sampah sembarangan, atau tercemar karena adanya limbah pabrik yang menyebabkan terjadinya pendangkalan, bahkan ekosistem sungai itu sendiri menjadi rusak. Selain itu, warga sering menyalahgunakan sempadan atau bantaran sungai untuk dijadikan pemukiman.



**Gambar II.10**  
**Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Timur**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi KALTIM, Diolah Bappeda Prov Kaltim 2022

Faktor utama penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti El Nino yang didukung oleh kondisi lingkungan yang terdegradasi dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kerawanan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan tertinggi terjadi pada musim kemarau dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi. Kondisi ini pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga Oktober dan kadang pula terjadi pada bulan Mei sampai November. Kerawanan kebakaran semakin tinggi jika ditemukan adanya gejala El Nino.

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Rusaknya siklus hidrologi (menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke dalam tanah, mengurangi transpirasi vegetasi, menurunkan kelembaban tanah, dan meningkatkan jumlah air yang mengalir di permukaan (*surface run off*). Kondisi demikian menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah terbakar, terjadinya sedimentasi dan perubahan kualitas air serta turunnya

populasi dan keanekaragaman ikan di perairan. Selain itu kerusakan hidrologi di lahan gambut akan menyebabkan jangkauan intrusi air laut semakin jauh ke darat.

- 2) Hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan (berladang, beternak, berburu/menangkap ikan)
- 3) Penurunan produksi kayu, terganggunya kegiatan transportasi, dan meningkatnya pengeluaran akibat biaya untuk pemadaman.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas untuk melakukan penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dokumen informasi kebencanaan dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai dokumen rencana aksi penanggulangan bencana yang menjadi salah satu parameter dalam penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB).

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Di Tahun 2021 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memiliki indeks 153,28 dan ditahun 2022, Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan risiko bencana menjadi 146,47, atau penurunan sebesar 6.81 poin dari tahun 2021, tetapi Provinsi Kalimantan Timur masih berada dalam zona yang memiliki risiko yang tinggi. Capaian penurunan Indeks Risiko Bencana provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah keberhasilan pemerintah daerah dalam peningkatan Ketahanan Daerah. Ketahanan Daerah merupakan sebuah ukuran keberhasilan, yang ditandai dengan meningkatnya sebuah kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan menjadi salah satu parameter penting untuk menentukan



tingkat risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; Penanganan tematik kawasan rawan bencana; Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menjadi salah satu elemen penting bagi pemerintah untuk menghitung tingkat risiko bencana di masing-masing tiap daerah guna mendukung pengurangan Risiko Bencana yang berdampak pada kesejahteraan kehidupan masyarakat bahkan dapat menimbulkan korban bencana..

Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 sangat rendah yakni sebesar 0,37 persen. Demi meningkatkan IKD, maka harus ada kerja sama dari semua pihak yang melibatkan pemangku kepentingan serta awak media untuk mensosialisasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya bencana, mitigasi pencegahan termasuk program kebencanaan. Masyarakat diharapkan sadar akan bencana dengan mengikuti aturan yang dibuat pemerintah daerah seperti tidak membangun tempat tinggal di daerah rawan bencana, tidak menempati daerah rawan longsor, dan lain-lain.

Potensi total tahunan sumber daya air di Kalimantan Timur masih berlimpah, tetapi distribusinya tidak merata, baik ditinjau dari letak geografis maupun dari segi distribusi curah hujan bulanan.

Dinamika kependudukan dan pembangunan yang terus meningkat serta pergeseran musim yang setiap tahun semakin tidak menentu sebagai dampak perubahan iklim global menimbulkan situasi krisis sumber daya air dan peningkatan daya rusak air, baik yang terjadi saat ini maupun pada waktu yang akan datang

Peningkatan penduduk menyebabkan perubahan tata guna lahan sehingga berdampak langsung pada peningkatan timbulnya bencana, peningkatan kebutuhan air dan menurunnya kualitas air. Oleh karena itu perlu menyusun strategi untuk memperkuat ketahanan air, termasuk membangun ketahanan terhadap bencana yang ditimbulkan oleh air.

Indeks Ketahanan Air merupakan tingkat kemampuan menyediakan air untuk berbagai kebutuhan (Pertanian, Industri dan energi) serta tingkat kemampuan dalam menghadapi kondisi kritis air. Indeks Ketahanan Air Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,56 dengan skor 71,26 dengan kategori Moderat pada tahun 2023.

Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsi kawasan mengakibatkan berkurangnya kapasitas resapan air, peningkatan erosi lahan, sedimentasi pada sumber-sumber air, serta peningkatan kerentanan kawasan terhadap bahaya kekeringan, banjir dan tanah longsor, pencemaran air, intrusi air laut serta penurunan produktivitas lahan yang akan mengakibatkan kerugian ekonomi, kerawanan sosial dan kerusakan lingkungan.

## 6. Indeks Ketahanan Pangan

Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP (Indeks Ketahanan Pangan) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan, Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil *review* terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

**Tabel II.6**  
**Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2018-2023**

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Paser	72,76	72,25	82,26	80,48	81,76	83,70
2.	KUBAR	70,64	66,85	54,98	57,76	66,94	58,39
3.	KUKAR	79,50	84,51	84,28	84,73	84,44	85,53
4.	KUTIM	71,27	57,58	73,13	66,19	60,09	65,76
5.	Berau	79,47	84,19	85,34	86,77	86,16	85,33
6.	PPU	80,18	84,26	86,20	86,24	85,51	87,40
7.	MAHULU	68,88	58,73	63,17	52,75	53,29	57,68
8.	Balikpapan	83,62	88,74	87,66	88,68	89,47	91,40
9.	Samarinda	82,56	85,19	80,75	83,72	84,66	88,97
10.	Bontang	81,42	85,34	84,59	87,24	84,21	88,76
	Kalimantan Timur	77,03	76,90	78,24	77,46	77,65	79,29

Sumber: Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Bapanas, 2024



Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar 77,65 mengalami peningkatan dari IKP Tahun 2021 yang sebesar 77,46. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mulai mampu meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian, dari 7 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu dengan indeks ketahanan pangan 57,68 menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang tergolong sebagai wilayah rentan, dimana suatu kabupaten dinilai rentan mengalami kerawanan pangan apabila memperoleh skor indeks dibawah 59,98. Dengan kondisi seperti ini maka diperlukan pendalaman pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dan gizi terutama di Kabupaten Mahakam Ulu.

Seiring dengan meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, apabila dilihat hingga level desa ternyata terjadi penurunan yang sangat signifikan untuk jumlah desa rawan pangan. Pada Tahun 2022 desa di Kalimantan Timur yang masih termasuk dalam kategori rawan pangan sebanyak 411 desa, namun di Tahun 2023 hanya tersisa 229 desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sudah baiknya intervensi pemerintah terutama dalam menangani kerentanan pangan di desa-desa rawan pangan.

**Tabel II.7**  
**Jumlah Desa Rawan Pangan Berdasarkan Hasil FSVA**  
**Kabupaten/Kota Tahun 2021 dan 2022**

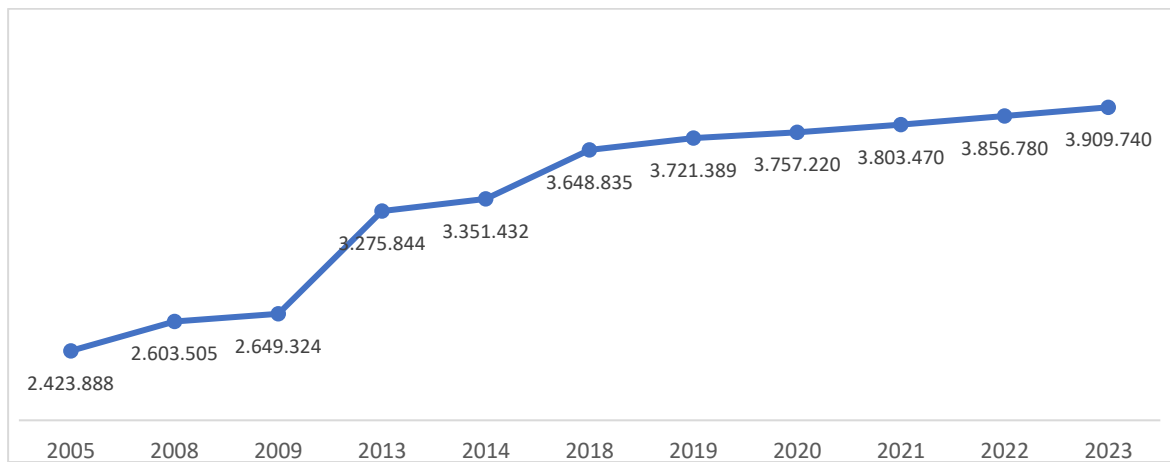
No	Kab/Kota	2021			2022			2023		
		Desa Rawan Pangan	% Per Kab/Kota	% Provinsi	Desa Rawan Pangan	% Per Kab/Kota	% Provinsi	Desa Rawan Pangan	% Per Kab/Kota	% Provinsi
1.	Paser	35	24,31	12,20	24	16,67	5,84	22	15,28	9,61
2.	KUBAR	50	25,77	17,42	62	31,96	15,09	48	24,74	20,96
3.	KUKAR	60	25,32	20,91	85	35,86	20,68	21	8,86	9,17
4.	KUTIM	44	31,21	15,33	96	68,09	23,36	72	51,06	31,44
5.	Berau	19	17,27	6,62	56	50,91	13,63	22	20,00	9,61
6.	PPU	11	20,37	3,83	20	37,04	4,87	1	1,85	0,44
7.	MAHULU	21	42,00	7,32	21	42,00	5,11	9	18,00	3,93
8.	Balikpapan	16	47,06	5,57	18	52,94	4,38	11	32,35	4,80
9.	Samarinda	26	44,07	9,06	23	38,98	5,60	13	22,03	5,68
10.	Bontang	5	33,33	1,74	6	40,00	1,46	0	00,00	0,00
	Kalimantan Timur	287	27,65	100,00	411	39,60	100,00	229	22,06	100,00

Sumber: Laporan FSVA Kab/Kota, 2023

### 2.1.2 Aspek Demografi

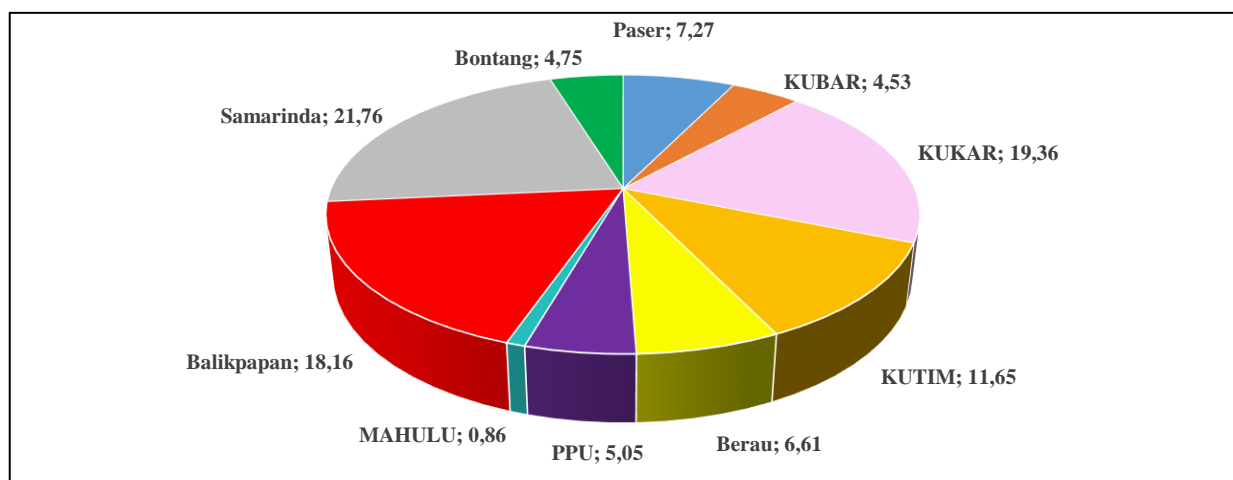
Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan

Timur pada tahun 2005 sebesar 2.423.888 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.909.740 jiwa pada tahun 2023 bertambah sebesar 1.485.852 jiwa.



**Gambar II.11**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023**  
*Sumber: BPS KALTIM, 2023*

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,76 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kota Bontang (4,75%), Kabupaten Penajam Paser Utara (5,05%), Kabupaten Kutai Barat (4,53%), dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,86%).



**Gambar II.12**  
**Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**  
*Sumber: BPS KALTIM, 2023*



Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 4,44 persen sejak tahun 2005–2023. Kabupaten Kutai Timur menjadi kabupaten yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya hingga mencapai 9,14 persen. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Kutai Barat dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,45 persen. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2013 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat.



**Tabel II.8**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2023**

No	Kab/Kota	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Laju Pertumbuhan Penduduk (2005-2023) (%)
1	Paser	174.420	182.745	184.402	249.991	256.175	279.975	285.894	274.890	278.040	281.140	284.110	4,54
2	KUBAR	151.227	159.852	161.778	144.018	144.892	147.598	148.020	171.940	173.750	175.470	177.130	1,45
3	KUKAR	491.607	528.702	538.529	683.131	700.439	769.337	786.122	727.610	735.970	746.370	756.790	4,00
4	KUTIM	174.018	191.728	196.738	294.216	306.974	361.670	376.111	432.550	440.290	447.940	455.500	9,14
5	Berau	148.437	169.793	176.422	197.388	203.223	226.509	232.287	247.210	250.950	254.660	258.290	5,16
6	PPU	120.508	126.354	127.532	150.205	152.119	159.386	160.912	178.060	180.590	188.900	197.630	4,60
7	MAHULU	-	-	-	25.678	25.894	26.347	26.375	32.420	32.870	33.320	33.770	2,73
8	Balikpapan	469.884	506.915	516.522	594.322	605.096	645.727	655.178	687.060	694.940	702.600	710.040	3,82
9	Samarinda	574.439	603.389	609.380	781.015	797.006	858.080	872.768	827.070	835.150	843.010	850.630	3,63
10	Bontang	120.348	134.027	138.021	155.880	159.614	174.206	177.722	178.410	180.920	183.370	185.850	4,03
Kalimantan Timur		2.423.888	2.603.505	2.649.324	3.275.844	3.351.432	3.648.835	3.721.389	3.757.220	3.803.470	3.856.780	3.909.740	4,44

Sumber: BPS KALTIM, 2023

Kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur terdapat di Kota Balikpapan mencapai 1.393,49 per km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 1,82 per km<sup>2</sup>. Dimana total kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 31,43 per km<sup>2</sup>.

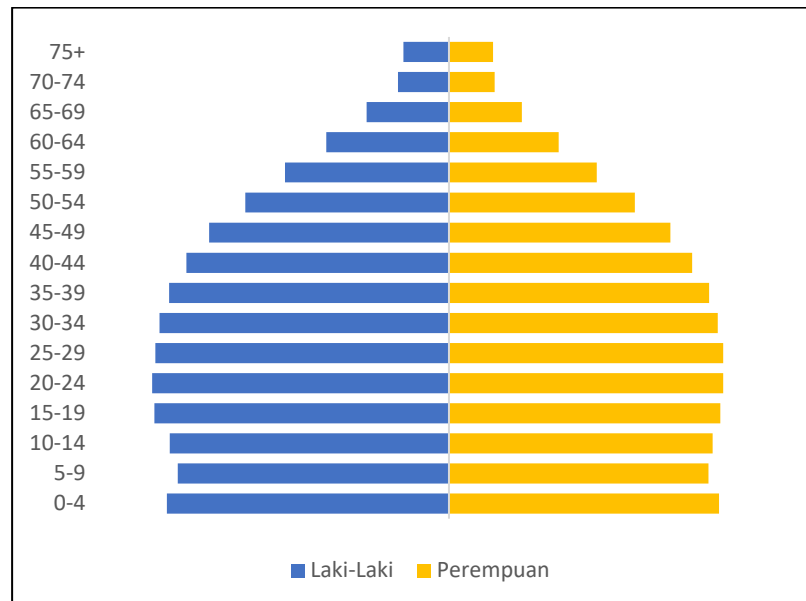
Berdasarkan *Sex Ratio*, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

**Tabel II.9**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km <sup>2</sup> )
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Paser	147.580	136.530	284.110	108,09	25,73
2	KUBAR	93.300	83.830	177.130	111,30	13,02
3	KUKAR	393.420	363.370	756.790	108,27	29,94
4	KUTIM	244.530	210.980	455.500	115,90	14,60
5	Berau	137.760	120.540	258.290	114,29	12,09
6	PPU	101.870	95.770	197.630	106,37	97,30
7	MAHULU	17.630	16.150	33.770	109,16	1,82
8	Balikpapan	362.770	347.270	710.040	104,46	1.393,49
9	Samarinda	432.640	417.990	850.630	103,50	1.187,67
10	Bontang	95.610	90.240	185.850	105,95	1.156,86
Kalimantan Timur		2.027.110	1.882.670	3.909.740	107,67	31,43

*Sumber: BPS KALTIM, 2023*

Dari sisi struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) yang mencapai 70,51 persen dari total penduduk Kalimantan Timur, sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Sehingga rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 tercatat sebesar 41,82 persen. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang tidak dan belum produktif.

**Gambar II.13****Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

*Sumber: BPS KALTIM, 2022*

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

#### 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada periode 2005-2008 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebanyak 1,73 poin atau naik sebesar 54,56 persen. LPE pada tahun 2005 sebesar 3,142 persen naik menjadi 4,90 persen di tahun 2008. Selama tahun 2005-2008, terjadi perlambatan LPE di tahun 2006 dan tahun 2007, dimana pada tahun tersebut LPE hanya sekitar 2,85 persen (2006) dan 1,84 persen (2007). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, LPE tahun 2006 turun sebesar 0,32 poin dari tahun 2005, dan kembali turun sebesar 1,01 poin di tahun 2007. LPE Kalimantan Timur mengalami peningkatan di tahun 2008 sebesar 3,06 poin menjadi 4,90 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada periode 2009-2013 berfluktuatif, dimana pada akhir periode mengalami penurunan sebanyak 0,03 poin atau turun sebesar 1,52 persen. LPE pada tahun 2009 sebesar 2,28 persen turun menjadi 2,25 persen di tahun 2013. Jika dibandingkan dengan akhir tahun (2008), LPE Kalimantan Timur turun sebesar 2,65 poin (54,08 persen). Selama tahun 2009-2013, terjadi perlambatan LPE dari tahun sebelumnya di tahun 2009, tahun 2011, dan tahun 2013, sedangkan tahun 2010 dan tahun 2012 mengalami peningkatan di tahun sebelumnya. Pada

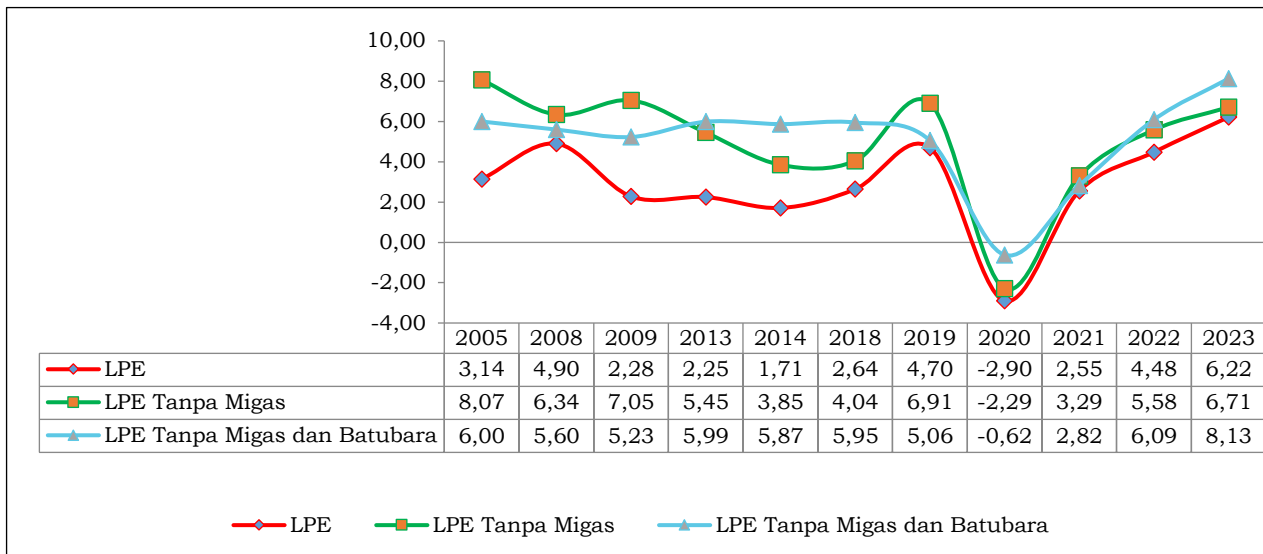


tahun 2013, Badan Pusat Statistik melakukan perubahan tahun dasar yakni menjadikan tahun 2010 sebagai tahun dasar serta mengimplementasikan SNA 2008. PDRB tahun dasar 2000 membagi lapangan usaha menjadi 9 kategori sedangkan PDRB tahun dasar 2010 terbagi menjadi 17 kategori.

Periode 2014-2018 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur berfluktuatif, dimana pada akhir periode mengalami peningkatan sebanyak 0,93 poin atau naik sebesar 54,39 persen. LPE pada tahun 2014 sebesar 1,71 persen naik menjadi 2,64 persen di tahun 2018. Jika dibandingkan dengan akhir tahun 2013, LPE Kalimantan Timur justru turun sebesar 6,41 poin (66,42 persen). Selama tahun 2014-2018, terjadi perlambatan LPE dari tahun sebelumnya di tahun 2014, 2015 dan tahun 2018, sedangkan tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami peningkatan di tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 2,67 persen pada tahun 2018, dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 4,04 persen serta laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 5,95 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada periode 2019-2023 mengalami fluktuasi, dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 4,70 persen dan pada tahun 2023 6,22 persen. Selama tahun 2019-2023, terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 menjadi negatif 2,90 persen. Hal ini disebabkan terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami kontraksi sebesar 0,62 persen. Dengan pulihnya perekonomian pasca COVID-19 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mulai meningkat kembali di tahun 2021 hingga 2023.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim tersebut utamanya bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan sejalan dengan tingginya pengiriman ekspor ke negara tujuan, disertai momen harga komoditas batu bara yang berada pada level tinggi. Di samping itu, berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kaltim, mobilitas masyarakat yang terus membaik, dan masa panen produk pangan dan pertanian menjadi penopang pertumbuhan.



**Gambar II.14**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2005-2023 (%)**

*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024*

Dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan banyak proyek pembangunan fisik di Provinsi Kalimantan Timur yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif mendatang didukung oleh peningkatan kinerja di industri pengolahan minyak yang diperkirakan akan lebih tinggi, seiring aktivitas masyarakat yang makin menggeliat. Tenaga kerja Kaltim akan terserap, kebutuhan ribuan pekerja di IKN pasti akan berhubungan dengan petani dan pedagang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk akomodasi baik hotel maupun penginapan juga akan laku karena banyak tamu untuk berbisnis maupun dinas, bahkan pelaku UMKM juga terkena dampak dalam penjualan produk.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada tahun 2020 dimana terlihat pertumbuhan negatif di beberapa lapangan usaha karena pandemi COVID-19 dan ditahun 2023 seiring dengan pulihnya perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan diikuti dengan pertumbuhan seluruh sektor lapangan usaha.

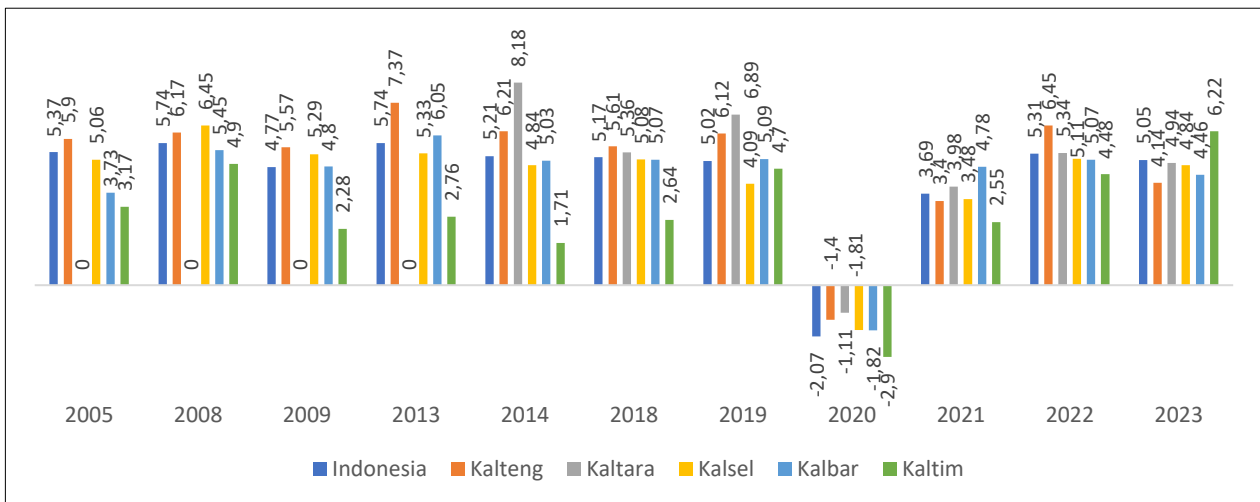
**Tabel II.10**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023 (persen)**

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,62	6,44	6,78	4,55	0,46	5,66	6,21	3,78	-0,98	-0,07	2,15	2,49
B	Pertambangan dan Penggalian	8,01	1,85	-0,40	-4,89	-3,52	1,79	1,03	6,86	-4,61	2,28	3,50	5,18
C	Industri Pengolahan	-3,49	-1,81	0,45	2,66	5,46	2,80	0,45	0,01	-2,99	2,45	3,57	4,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,27	3,56	21,24	30,43	8,32	6,78	9,77	8,74	11,47	2,34	3,84	16,05
E	Pengadaan Air	2,63	6,26	4,55	2,56	6,57	8,37	2,73	4,84	5,33	4,24	7,58	7,64
F	Konstruksi	6,21	4,91	6,33	-0,94	-3,86	5,76	8,15	6,39	-0,87	3,94	7,77	15,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,59	3,26	5,13	1,42	3,20	8,22	7,23	4,82	0,57	4,24	6,79	6,85
H	Transportasi dan Pergudangan	7,25	6,51	7,26	2,76	3,05	6,46	5,71	2,00	-6,58	2,91	11,76	9,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,68	3,34	5,65	7,74	6,79	8,37	8,70	6,37	-5,34	2,07	9,04	7,69
J	Informasi dan Komunikasi	12,10	9,11	8,45	7,66	7,45	7,79	4,38	6,27	7,56	7,86	7,65	6,88
K	Jasa Keuangan	12,46	14,37	2,41	2,05	1,84	-0,72	3,47	3,17	2,47	2,55	9,46	11,72
L	Real Estate	8,27	8,23	8,29	3,59	-0,83	3,35	4,83	1,52	0,69	-0,72	2,51	4,39
M,N	Jasa Perusahaan	8,54	8,22	8,29	-3,75	-4,25	3,54	4,96	2,48	-3,14	2,46	5,36	6,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,89	4,74	9,29	3,64	-3,27	-3,47	4,97	4,11	-3,83	1,98	7,63	8,03
P	Jasa Pendidikan	19,09	18,74	12,23	9,88	7,06	6,73	7,14	3,78	2,96	2,42	3,49	4,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,43	5,12	9,03	10,53	9,31	7,16	7,98	5,20	20,22	13,43	4,70	6,89
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,66	3,24	7,38	8,81	7,81	6,44	9,57	6,57	-3,01	1,17	6,96	7,97
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,26	2,25	1,71	-1,20	-0,38	3,13	2,64	4,70	-2,90	2,55	4,48	6,22

Sumber: BPS Kaltim, 2024

Secara regional, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mulai membaik. Provinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 6,22 persen, lalu diikuti Kalimantan Utara sebesar 4,94 persen, Kalimantan Selatan sebesar 4,84 persen, Kalimantan Barat sebesar 4,46 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 4,14 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, dengan pertumbuhan sebesar 5,05 persen, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga telah melampaui nilai tersebut.



**Gambar II.15**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)**

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2024

Tabel II.11

## Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023

No	Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8,00	5,21	3,63	1,46	1,56	2,58	3,14	3,15	(0,43)	1,23	3,41	4,99
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,95	25,61	10,90	8,30	-4,04	4,89	8,57	6,77	(0,99)	0,66	3,03	5,63
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,83	9,77	0,17	-4,93	-13,03	-9,79	7,91	8,11	(1,95)	3,03	8,48	36,40
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,59	1,37	4,70	-1,47	-6,04	2,75	7,54	4,81	(1,06)	7,74	5,47	11,48
5	Perubahan Inventori	54,53	-18,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang & Jasa	4,06	1,79	-0,62	-0,72	3,76	4,28	0,17	5,05	(4,61)	0,64	4,05	3,59
PDRB		5,26	2,25	1,71	-1,20	-0,38	3,13	2,64	4,70	-2,90	2,55	4,48	6,22

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2023 mencapai 6,22 persen. Dimana pertumbuhan terendah dicatat oleh Komponen Net Ekspor Barang & Jasa sebesar 3,59 persen. Sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 36,40 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai PDRB Kalimantan Timur dari sisi pertumbuhannya meningkat dikarenakan kegiatan Pemerintah.

**Tabel II.12**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi**  
**Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (%)**

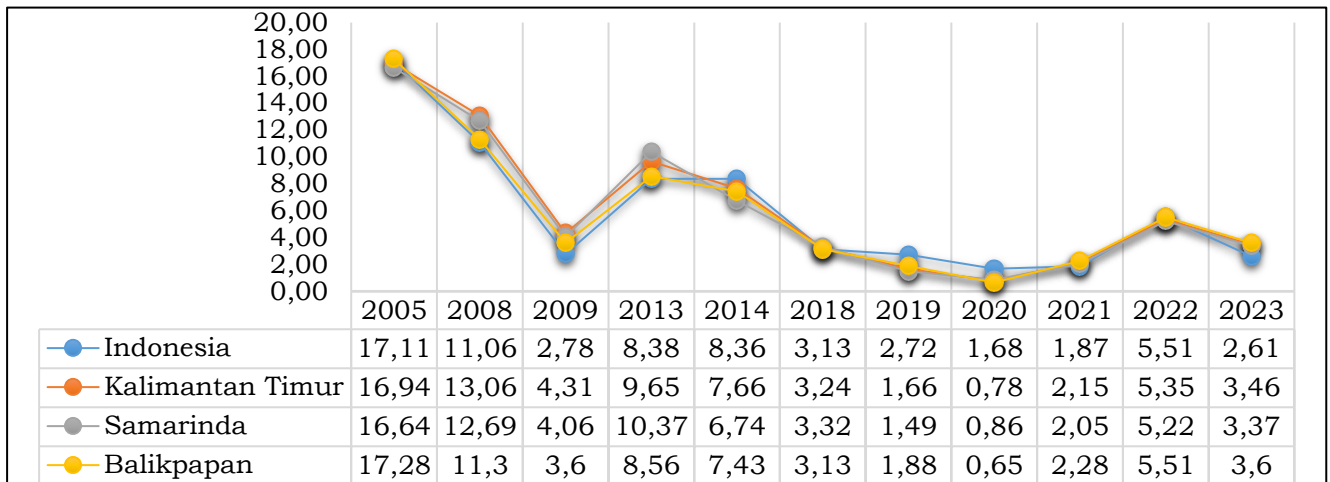
No	KAB/KOTA	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	26,85	7,10	7,74	6,81	4,51	3,69	3,99	-2,86	5,39	1,10	1,38
2	KUBAR	8,24	6,83	6,89	2,84	1,88	5,06	5,69	-2,87	4,19	4,78	5,82
3	KUKAR	2,67	4,67	2,08	0,04	-1,08	2,16	3,92	-4,21	2,68	3,70	5,13
4	KUTIM	20,86	-0,86	5,60	4,10	3,43	2,38	8,17	-3,08	-0,89	5,58	7,71
5	Berau	3,66	6,50	5,98	10,38	8,23	2,07	5,63	-3,32	5,36	3,95	5,44
6	PPU	4,16	4,99	3,51	7,46	2,76	1,28	2,61	-2,34	-1,69	14,49	29,85
7	MAHULU	-	-	-	0,69	4,94	5,40	5,52	-0,22	1,27	0,91	2,80
8	Balikpapan	3,21	12,37	1,70	3,60	4,64	4,97	4,99	-0,91	4,57	4,96	6,49
9	Samarinda	8,05	4,82	4,49	4,93	5,43	4,96	5,00	-0,99	2,78	6,60	8,62
10	Bontang	-0,26	0,52	-3,03	-5,72	-3,23	-4,08	-2,15	-2,74	1,60	2,46	4,16

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami peningkatan. Rata-rata kabupaten/kota mengalami pertumbuhan yang mengalami pertumbuhan yang cepat adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan capaian 29,85 persen dan tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga sektor konstruksi di Kab PPU mengalami peningkatan.

## 2. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

**Gambar II.16****Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (%)**

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Laju inflasi pada periode 2005-2008 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, hal ini disebabkan karena pada periode tersebut terjadi karena naiknya harga BBM yang menyebabkan meningkatnya harga barang dan jasa serta kelangkaan pasokan komoditas minyak tanah dan LPG.

Pada periode 2009-2013, kenaikan inflasi ditahun 2013 disebabkan meningkatnya UMP/UMK yang menyebabkan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, kelangkaan pasok makanan dari luar Kalimantan timur disebabkan intensitas curah hujan dan gelombang laut yang tinggi.

Inflasi yang terjadi pada periode 2014-2018 disebabkan beberapa faktor yaitu naiknya harga BBM, tarif dasar listrik, harga gas LPG 12 kg yang berimbas kepada naiknya harga pangan bahan makanan dan makanan jadi serta kenaikan biaya transportasi.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-2019 yang menyebabkan terjadi deflasi yang disebabkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Selain itu, pada periode 2019-2023, ada kebijakan pemerintah terkait tarif angkutan udara sehingga mampu mengendalikan laju inflasi pada tahun 2019. Tingginya inflasi pada tahun 2023 disebabkan adanya kenaikan harga BBM yang berimbas pada naiknya harga barang dan adanya peningkatan permintaan bahan pokok menjelang momen natal dan tahun baru.

Kota Balikpapan pada tahun 2023 mengalami inflasi lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi 3,60 persen, dan lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Samarinda sebesar 3,37 persen. Sehingga secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di atas inflasi nasional yang mencapai 2,61 persen.

### 3. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2008 secara keseluruhan mengalami penurunan sebanyak 1,06 poin atau turun sebesar 10,03 persen. Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan pada periode ini sebanyak 12,66 ribu jiwa (4,23 persen). Hal ini menggambarkan program pengentasan kemiskinan dan strategi serta arah kebijakan pembangunan daerah pada periode pertama pada pengembangan sumber daya manusia melalui pengembangan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu, dan pelayanan pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dan pelaksanaan subsidi silang bagi keluarga miskin dapat diwujudkan.

Pada periode 2009-2013 persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan sebanyak 1,35 poin atau turun sebesar 17,46 persen. Namun untuk jumlah penduduk miskin Kalimantan Timur mengalami kenaikan pada periode ini sebesar 3,96 persen atau bertambah sebanyak 9,47 ribu jiwa.

Secara keseluruhan, Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Timur periode 2014-2018 menurun sebanyak 0,25 poin atau turun sebesar 3,96 persen. Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan pada periode ini sebanyak 30,29 ribu jiwa atau turun sebesar 11,99 persen.

Periode 2019-2023, persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur mengalami peningkatan di akhir periode sebanyak 0,17 poin atau naik sebesar 2,86 persen. Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan sebanyak 11,15 ribu jiwa atau naik sebesar 5,07 persen. Meningkatnya penduduk miskin pada periode ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang melanda Kalimantan Timur yang masih berimbas sampai dengan tahun 2023.

**Tabel II.18**  
**Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023**

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2005	-	-	189.851	253,33	10,57
Maret 2008	-	-	237.979	189,79	9,51
Maret 2009	-	-	261.185	178,91	7,73
Maret 2013	-	-	381.706	237,96	6,06
Maret 2014	-	-	431.560	253,60	6,42
Maret 2018	405.108	169.596	574.704	218,90	6,03
Maret 2019	429.165	179.991	609.155	219,92	5,94
Maret 2020	463.823	198.479	662.302	230,26	6,10



Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2021	485.445	203.590	689.035	241,77	6,54
Maret 2022	513.874	214.334	728.208	236,25	6,31
Maret 2023	560.368	229.818	790.186	231,07	6,11

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Tingkat kemiskinan masyarakat di Kaltim juga tercermin dari peningkatan Garis Kemiskinan (GK) Kaltim dengan peningkatan GK di perdesaan yang lebih besar dibandingkan di perkotaan. GK meningkat dari Rp728.208/kapita/bulan pada bulan Maret 2022 menjadi Rp790.186/kapita/bulan pada Maret 2023. Peningkatan garis kemiskinan Kaltim bersumber dari peningkatan garis kemiskinan baik dari perkotaan maupun perdesaan. Komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKM di perkotaan dan perdesaan utamanya disebabkan oleh komoditas beras dan rokok kretek filter. Komoditas beras merupakan penyumbang terhadap GKM di perkotaan dan perdesaan dengan masing-masing tercatat sebesar 15,65% dan 17,01%. Selanjutnya, rokok kretek filter merupakan komoditas yang menyumbang GKM terbesar kedua yang tercatat sebesar 11,54% di perkotaan dan 14,89% di perdesaan. Komoditas lainnya yang memberi sumbangan GKM adalah daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, ikan tongkol, kue basah, kopi bubuk & kopi instan, bawang merah, ikan kembung, dan susu bubuk.

**Tabel II.19**

**Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan Menurut Daerah Tahun 2023**

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	15,65	Beras	17,01
2	Rokok Kretek Filter	11,54	Rokok Kretek Filter	14,89
3	Daging ayam ras	5,04	Telur ayam ras	4,09
4	Telur ayam ras	4,15	Daging Ayam Ras	3,82
5	Mie Instan	2,91	Mie Instan	3,17
6	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,54	Gula Pasir	2,46
7	Kue Basah	2,37	Kopi Bubuk & Kopi Instan (sachet)	2,09
8	Bawang Merah	1,87	Bawang merah	2,03
9	Gula Pasir	1,86	Tongkol/Tuna/Cakalang	1,98
10	Susu Bubuk	1,85	Bandeng	1,84
11	Tempe	1,84	Tempe	1,55
12	Tahu	1,57	Cabe Rawit	1,55
13	Roti	1,56	Kue Basah	1,37

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

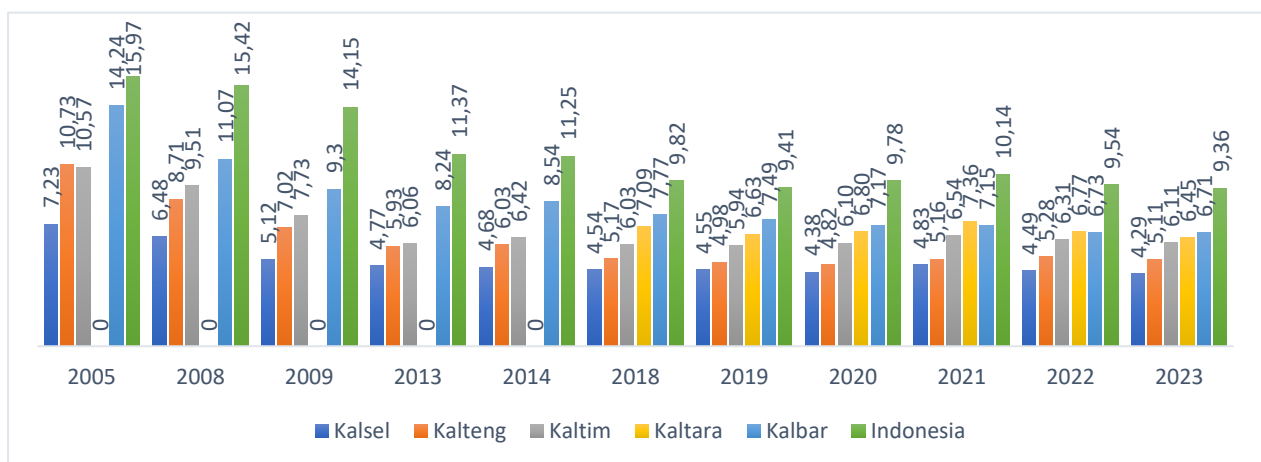
Bila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2023 masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,38 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,31 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Mahakam Ulu.

**Tabel II.20**  
**Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (persen)**

No	KAB/KOTA	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	14,74	10,97	10,11	7,94	7,87	9,03	8,95	9,23	9,73	9,43	9,11
2	KUBAR	13,25	10,60	8,97	7,70	7,53	9,15	9,09	9,29	10,24	10,20	9,72
3	KUKAR	14,72	9,29	8,03	7,52	7,43	7,41	7,20	7,31	7,99	7,96	7,61
4	KUTIM	15,08	13,20	11,88	9,06	9,10	9,22	9,48	9,55	9,81	9,28	9,06
5	Berau	7,44	5,81	5,90	4,83	4,76	5,04	5,04	5,19	5,88	5,65	5,54
6	PPU	14,96	12,99	11,38	7,70	7,56	7,40	7,18	7,36	7,61	7,25	6,97
7	MAHULU	-	-	-	-	-	11,62	11,25	11,44	11,90	11,55	11,38
8	Balikpapan	3,96	3,49	3,58	2,48	2,46	2,64	2,42	2,57	2,89	2,45	2,31
9	Samarinda	5,78	4,67	4,84	4,63	4,56	4,59	4,59	4,76	4,99	4,85	4,81
10	Bontang	6,23	7,26	6,66	5,16	5,10	4,67	4,22	4,38	4,62	4,54	4,11

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, pada tahun 2023 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Regional Kalimantan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,36 persen.



**Gambar II.17**  
**Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2005-2023**

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2024

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 60.860 jiwa, Kota Samarinda sebanyak 41.890 jiwa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 37.040 jiwa. Disisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah *share* PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

**Tabel II.21**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (Ribu Jiwa)**

No	KAB/KOTA	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	25,90	19,70	18,37	20,14	20,34	25,14	25,45	26,77	27,56	27,02	26,39
2	KUBAR	20,10	16,65	14,30	13,20	12,92	13,49	13,45	13,78	15,38	15,38	14,69
3	KUKAR	73,00	48,16	42,48	52,14	52,53	56,56	56,34	58,42	62,36	62,87	60,86
4	KUTIM	26,60	24,76	22,89	27,17	28,30	33,02	35,31	36,98	37,78	36,84	37,04
5	Berau	11,30	9,63	10,13	9,69	9,77	11,33	11,62	12,30	13,62	13,31	13,26
6	PPU	18,10	16,13	14,30	11,69	11,58	11,76	11,52	11,93	12,13	11,59	11,19
7	MAHULU	-	-	-	-	-	3,25	3,19	3,26	3,18	3,10	3,06
8	Balikpapan	17,30	17,57	18,44	14,92	15,02	17,01	15,78	17,02	18,53	15,83	14,99
9	Samarinda	33,60	27,65	28,97	36,61	36,65	39,23	39,80	41,92	42,84	41,95	41,89
10	Bontang	7,60	9,54	9,03	8,15	8,21	8,10	7,46	7,91	8,41	8,39	7,71

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Tabel II.22**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah Tahun 2005-2023**

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2005	1,280	3,830	2,440
Maret 2008	1,010	2,600	1,610
Maret 2009	0,630	2,960	1,510
Maret 2013	0,420	1,500	0,828
Maret 2014	0,703	1,683	1,077
Maret 2018	0,656	1,229	0,846
Maret 2019	0,610	1,530	0,910



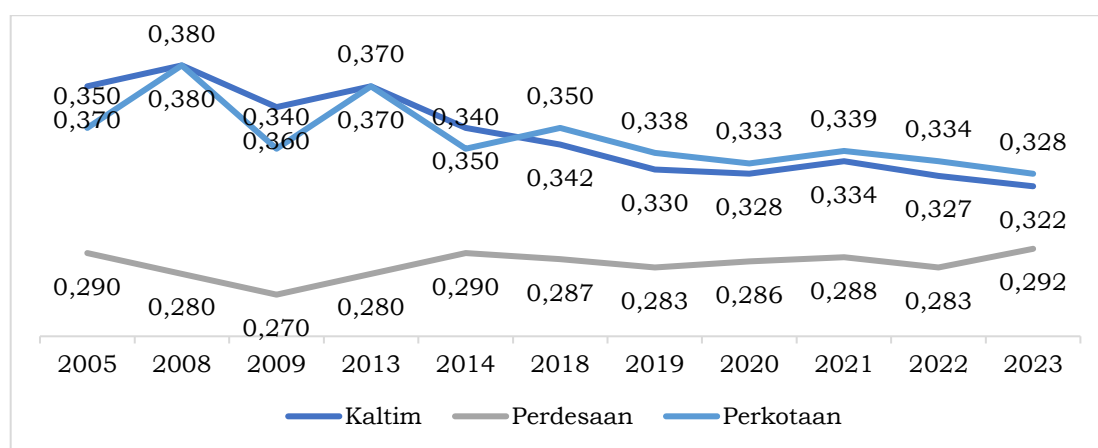
Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Maret 2020	0,664	1,743	1,015
Maret 2021	1,017	1,673	1,223
Maret 2022	0,672	1,687	0,989
Maret 2023	0,602	1,150	0,771
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2005	0,350	1,170	0,730
Maret 2008	0,240	0,650	0,390
Maret 2009	0,130	0,920	0,430
Maret 2013	0,100	0,330	0,188
Maret 2014	0,188	0,427	0,279
Maret 2018	0,161	0,270	0,197
Maret 2019	0,130	0,380	0,210
Maret 2020	0,157	0,412	0,240
Maret 2021	0,303	0,413	0,337
Maret 2022	0,149	0,395	0,226
Maret 2023	0,113	0,199	0,140

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) atau *Poverty Gap Index* digunakan untuk mengetahui ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai indeks yang semakin tinggi menggambarkan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan terus meningkat dari tahun 2019-2021 dalam 3 tahun ini (2019, dengan nilai 0,910 di tahun 2021 tercatat berada pada nilai 1,223. Sempat menyentuh nilai 1,015 (2020) dan 1,223 (2021) yaitu pada masa Pandemi COVID-19. Serupa dengan Tingkat Keparahan kemiskinan yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kalimantan Timur. Sejak tahun 2019 dengan nilai 0,197 meningkat menjadi 0,337 di tahun 2021. Bahkan pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan pernah berada di nilai 0,303 di tahun 2021, yaitu pada masa Pandemi COVID-2019. Kondisi yang tidak baik tersebut akan dipadukan dengan Program Pemerintah Pusat yaitu Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada tahun 2023 dalam upaya penanganan pengentasan kemiskinan di wilayah Perkotaan dan wilayah perdesaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kalimantan Timur menurun 0,771 dan 0,140. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati batas garis kemiskinan serta ketimpangan pengeluaran penduduk miskin menjadi semakin kecil.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Timur yang diukur dengan Indeks Gini, selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pengalaman performa baik pada tahun 2018 ke 2020 yaitu kondisi penurunan pernah ditunjukkan pada nilai 0,342 menjadi 0,328. Pada tahun 2021 Indeks Gini mengalami peningkatan menjadi 0,334. Rasio gini di Kalimantan Timur tahun 2023 menunjukkan penurunan sebesar 0,322 hal ini menunjukkan geliat usaha yang semakin adaptif pasca Pandemi COVID-19. Hal tersebut yang menjadi faktor utama membaiknya kinerja aktivitas ekonomi di berbagai lapangan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari perputaran roda perekonomian, sehingga terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kalimantan Timur.



**Gambar II.18**

**Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023**

*(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)*

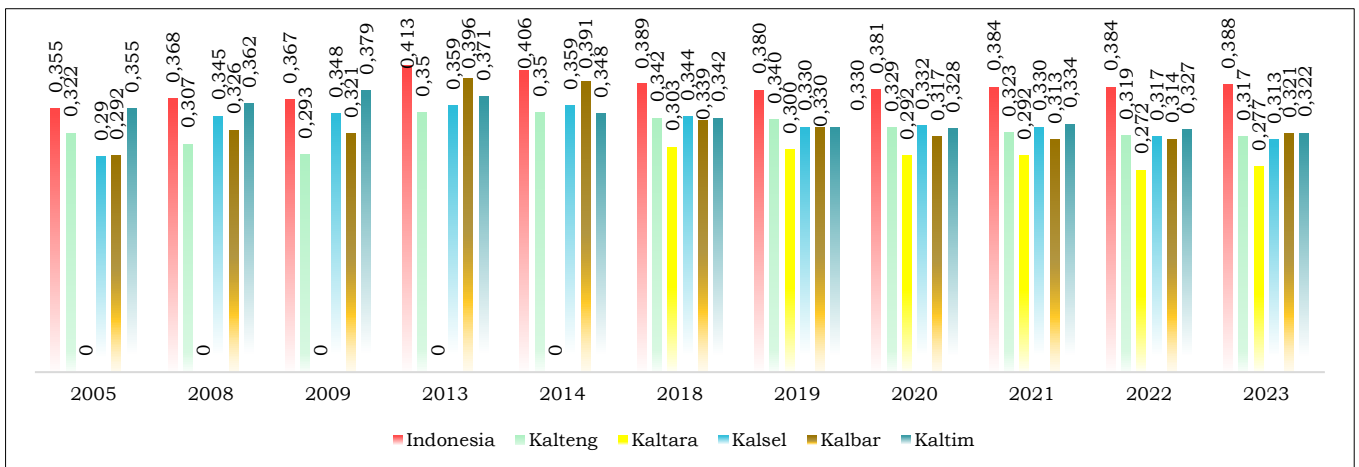
Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Sedangkan kabupaten/kota yang indeks gininya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Bontang. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki indeks gini paling rendah dengan capaian 0,277. Kabupaten Kutai Timur memiliki Indeks Gini tertinggi dengan capaian 0,336.

**Tabel II.23**  
**Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2005-2023 (jiwa)**

No	Kab/Kota	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	0,330	0,283	0,266	0,276	0,307	0,299	0,262	0,290	0,288	0,282	0,292
2	KUBAR	0,300	0,247	0,261	0,286	0,285	0,311	0,334	0,338	0,317	0,300	0,277
3	KUKAR	0,290	0,249	0,222	0,307	0,312	0,302	0,278	0,294	0,283	0,269	0,284
4	KUTIM	-	0,204	0,235	0,311	0,305	0,326	0,346	0,325	0,328	0,304	0,336
5	Berau	0,230	0,219	0,186	0,331	0,320	0,303	0,345	0,300	0,377	0,352	0,327
6	PPU	-	0,245	0,229	0,326	0,326	0,313	0,322	0,292	0,263	0,274	0,299
7	MAHULU	-	-	-	-	-	0,334	0,302	0,259	0,270	0,288	0,330
8	Balikpapan	0,090	0,150	0,135	0,306	0,337	0,356	0,302	0,311	0,325	0,334	0,323
9	Samarinda	0,290	0,189	0,151	0,311	0,308	0,317	0,341	0,324	0,322	0,346	0,323
10	Bontang	-	0,175	0,194	0,356	0,353	0,376	0,338	0,405	0,340	0,324	0,299

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2023 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,277. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,31-0,32. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,388 pada tahun 2023. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.



**Gambar II.19**

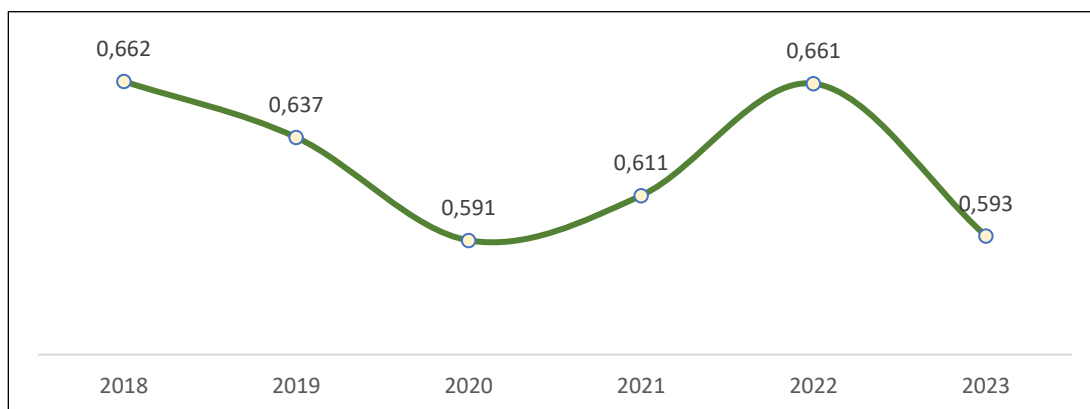
**Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2005-2023**

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

**4. Ketimpangan Antar Wilayah**

Ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah. Terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan

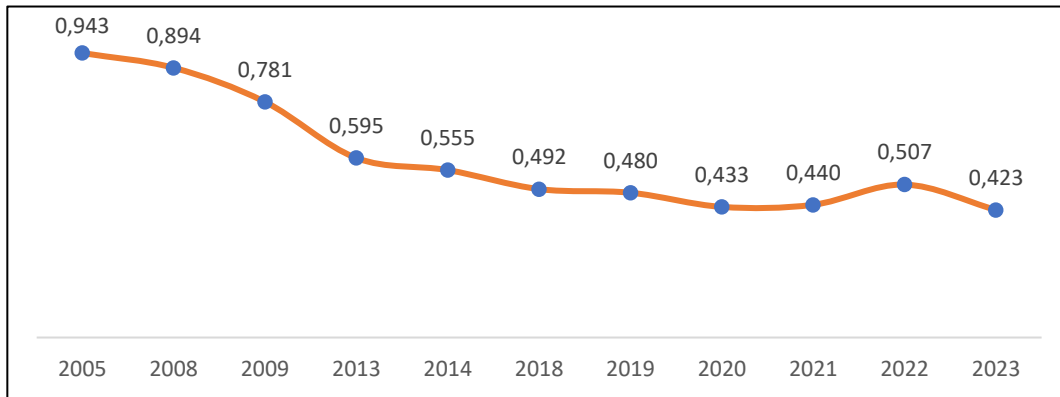
aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan penghitungan Indeks Williamson, kesenjangan antar wilayah dalam regional Kalimantan juga tercatat masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran angka Indeks Williamson yang selalu berada di atas angka 0,60, namun di tahun 2023 angka Indeks Williamson mengalami penurunan yang mencapai 0,593.



**Gambar II.20**  
**Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)**  
**Regional Kalimantan Tahun 2018-2023**  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Secara umum, struktur perekonomian di pulau Kalimantan masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Sektor Pertanian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ketimpangan yang cukup tinggi pada regional Kalimantan ini disebabkan perbedaan potensi dan produktivitas hasil sumber daya alam pada masing-masing provinsi.

Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, kondisi ketimpangan di wilayah ini relatif moderat, bahkan termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai Indeks Williamson di dalam wilayah Kalimantan Timur yang berada pada kisaran 0,40-0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ekonomi yang relatif homogen. Namun, disisi lain besaran yang relatif sama tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengindikasikan bahwa masih diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat yang dapat lebih menurunkan ketimpangan antara kabupaten/kota yang terjadi.



**Gambar II.21**

**Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023**

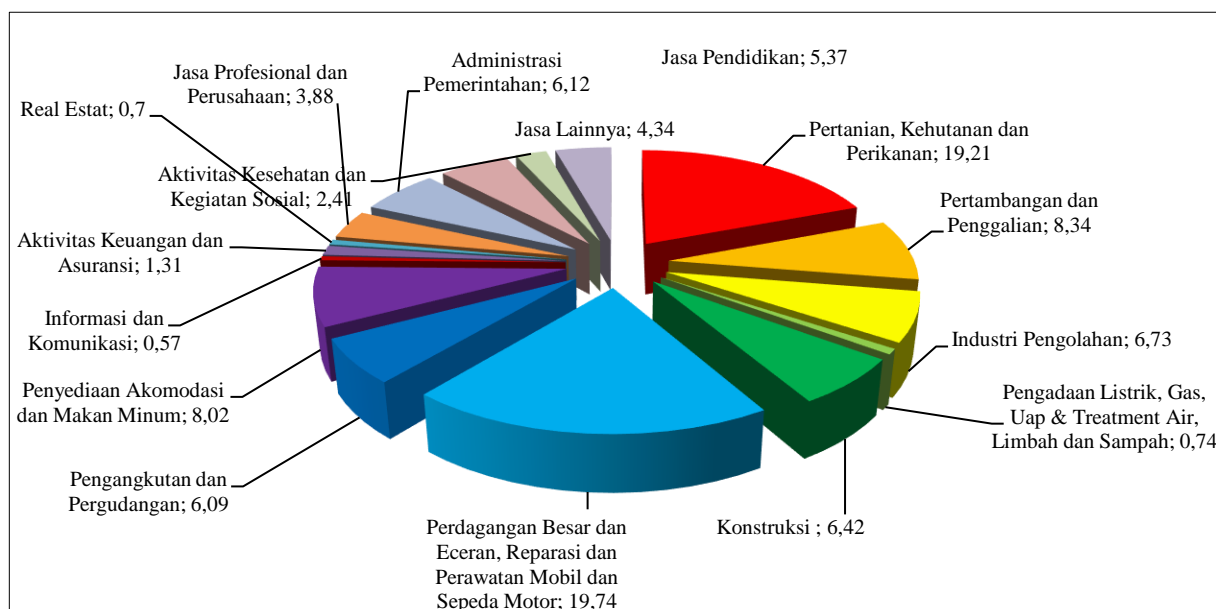
*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024*

Kondisi perekonomian kabupaten/kota yang hampir homogen tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki struktur ekonomi yang hampir sama. Sebagian besar perekonomian di kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengandalkan sumber daya alam atau memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis sektor primer. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang perekonomian terbesar di Kalimantan Timur, disusul oleh Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sangat mengandalkan perekonomiannya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sedangkan Kota Balikpapan mengandalkan industri pengolahan, khususnya industri pengilangan migas sebagai sumber perekonomian.

## 5. Ketenagakerjaan

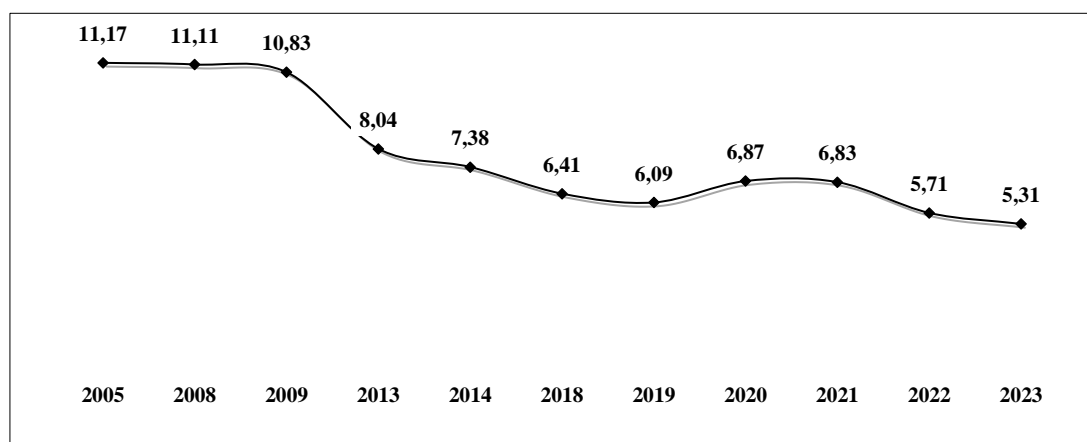
Tahun 2023, penduduk bekerja di Kalimantan Timur memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 19,74 persen diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 19,21 persen, dan yang paling sedikit bekerja di sektor informasi dan komunikasi mencapai 0,57 persen.





**Gambar II.22**  
**Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (%)**  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Keadaan ketenagakerjaan Kalimantan Timur Tahun 2023 semakin membaik ditandai dengan TPT yang berada pada level terendah selama dekade terakhir. Pasar tenaga kerja Kalimantan Timur mampu menyerap 100,38 ribu orang tambahan pekerja di tahun 2023. Pembangunan IKN menambah serapan tenaga kerja pada sektor Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Transportasi & Pergudangan, serta berdampak positif pada kondisi ketenagakerjaan di kabupaten/kota sekitarnya.



**Gambar II.23**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (persen)**  
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2005 sebesar 11,17 persen dan terus menurun hingga tahun 2019 mencapai 6,09 persen. Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan di tahun 2020 mencapai 6,87 persen, hal ini diperkirakan akibat dampak dari Pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di dunia pada akhir tahun 2019 dan mulai terasa dampaknya di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur pada awal tahun 2020 terutama pada sektor transportasi dikarenakan beberapa negara memberlakukan pembatasan berskala besar bahkan ada yang memberlakukan karantina wilayah. Sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja pada sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate* dan jasa perusahaan. Pada tahun 2021, pandemi Covid-19 mulai berkurang dengan adanya vaksinasi dan pulihnya perekonomian Kalimantan Timur sehingga tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan mencapai 5,31 persen pada tahun 2023.

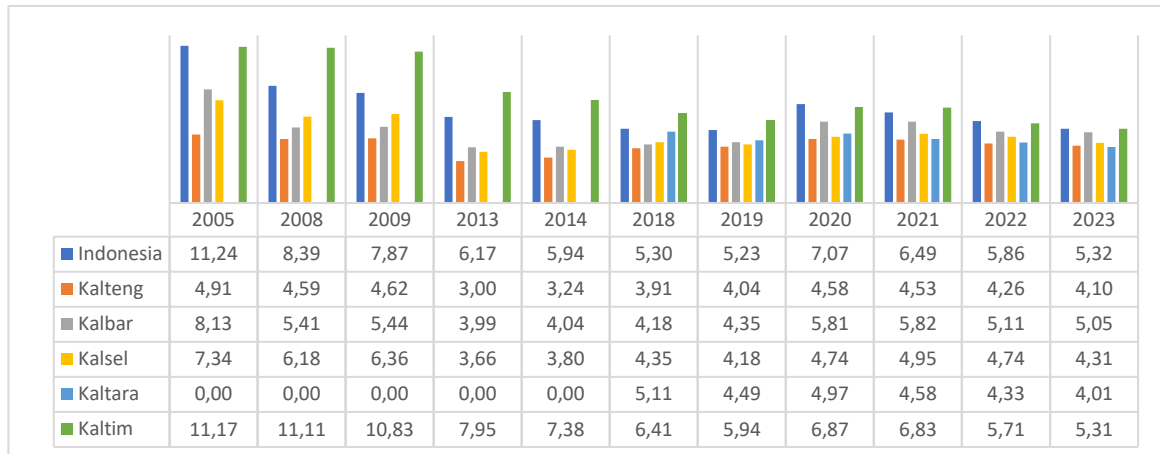
**Tabel II.24**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2023 (persen)**

No	KAB/KOTA	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	7,76	7,64	9,25	6,69	5,00	4,55	4,52	5,70	4,88	4,72
2	KUBAR	9,82	7,37	8,03	6,84	4,86	5,08	4,97	5,14	4,62	6,16
3	KUKAR	6,83	11,38	7,37	7,65	5,96	5,98	5,70	5,66	4,14	4,05
4	KUTIM	5,09	14,59	6,09	5,65	5,93	5,53	5,45	5,35	6,48	5,93
5	Berau	10,07	9,37	5,85	10,05	5,62	5,08	5,08	5,82	5,02	4,95
6	PPU	10,74	10,87	7,97	7,52	4,76	6,26	6,22	2,95	2,12	2,07
7	MAHULU	-	-	-	-	4,17	3,69	3,49	3,14	2,44	2,09
8	Balikpapan	16,06	13,70	7,95	7,56	9,52	7,29	9,00	8,94	6,90	6,09
9	Samarinda	12,31	10,19	8,57	7,56	6,16	5,87	8,26	8,16	6,78	5,92
10	Bontang	16,32	14,66	11,19	9,38	9,61	9,19	9,46	9,92	7,81	7,74

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Pada tahun 2023 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur paling tinggi terdapat di Kota Bontang sebesar 7,74 persen, Kota Balikpapan sebesar 6,09 persen, dan Kabupaten Kutai Timur sebesar 5,93 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terendah ditorehkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,07 persen. Jika dilihat dari perbandingan regionalnya, maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur tahun 2023 masih menjadi yang tertinggi diantara provinsi lainnya di regional Kalimantan dan berada di atas tingkat pengangguran

terbuka nasional sebesar 5,32 persen. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, jika mengingat Kalimantan Timur sebagai penghasil nilai tambah ekonomi terbesar di Regional Kalimantan.



**Gambar II.24**

**Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia**

(Sumber: BPS RI, 2023)

Salah satu upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan memberikan kemudahan akses informasi kepada pencari kerja terutama yang telah mendaftarkan ke dalam database pada Disnakertrans. Untuk kemudian akan disesuaikan dengan data yang bersumber dari perusahaan yang sedang membutuhkan pekerja.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja cenderung fluktuatif dan terus mengalami peningkatan dan mencapai 27,47 persen pada tahun 2023. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingkat kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini masih diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja melalui balai-balai pelatihan kerja baik yang dibawah wewenang Disnakertrans maupun perangkat daerah lainnya.

**Tabel II.25**

**Persentase Penempatan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (persen)**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pencari Kerja yang Mendaftar (orang)	26.148	30.719	22.358	47.254	37.992
2	Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	7.690	5.538	3.531	12.334	10.438
3	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	29,41	18,03	15,79	26,10	27,47

Sumber: Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2024

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka terlihat capaian tertinggi persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2023 adalah Kota Samarinda mencapai 56,45 persen dan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 45,62 persen.

**Tabel II.26**  
**Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

No	KAB/KOTA	Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	Penempatan Pencari Kerja (Orang)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)
1	Paser	2.555	515	20,16
2	KUBAR	3.293	26	0,79
3	KUKAR	2.922	1.333	45,62
4	KUTIM	4.103	1.151	28,05
5	Berau	6.857	1.588	23,16
6	PPU	1.159	252	21,74
7	MAHULU	-	-	-
8	Balikpapan	4.421	815	18,43
9	Samarinda	4.138	2.336	56,45
10	Bontang	8.544	2.422	28,35

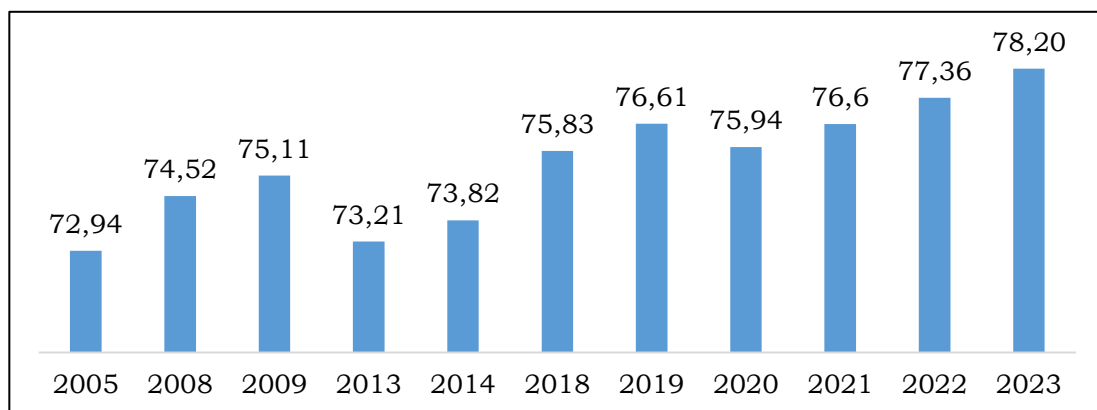
Sumber: Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2024

## 6. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur secara umum mengalami pertumbuhan yang positif selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2023. Nilai IPM di tahun 2005 sebesar 72,90 meningkat sebanyak 5,30 poin di tahun 2023 sebesar 78,20. Pada periode tersebut nilai IPM meningkat sebesar 7,27 persen. Hal ini menunjukkan bahwa status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur pada periode tahun 2005-2023 berada pada level kategori “tinggi”.

Nilai IPM Kalimantan Timur pada periode 2009-2013 mengalami penurunan sebanyak 1,90 poin atau turun sebesar 2,53 persen. Dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya (2005-2008), nilai IPM mengalami penurunan sebanyak 1,31 poin atau turun sebesar 1,76 persen. Penurunan nilai IPM terlihat pada tahun 2009 yang hanya sebesar 75,11 menjadi sebesar 73,21 di tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya metode baru dalam perhitungan IPM di tahun 2010, dimana setidaknya terdapat dua hal dalam perubahan metode baru ini yang meliputi aspek indikator dan cara penghitungan indeks. Perubahan metode baru pada aspek indikator pada dimensi pengetahuan yaitu indikator Angka Melek Huruf (AMH) diganti dengan Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Selain itu, indikator PDB per kapita diganti dengan PNB per kapita. Perubahan juga

terjadi pada perhitungan indeks, dimana metode perhitungan agregasi indeks pada rata-rata aritmatik diganti dengan rata-rata geometrik. Hal ini menyebabkan level IPM pada metode baru lebih rendah dari level IPM. Capaian pembangunan manusia Kalimantan Timur masih sama seperti pada tahun sebelumnya, yaitu berstatus “tinggi” dan berada pada posisi keempat di Nasional setelah DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Kepulauan Riau.



**Gambar II.25**  
**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2005-2023**

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

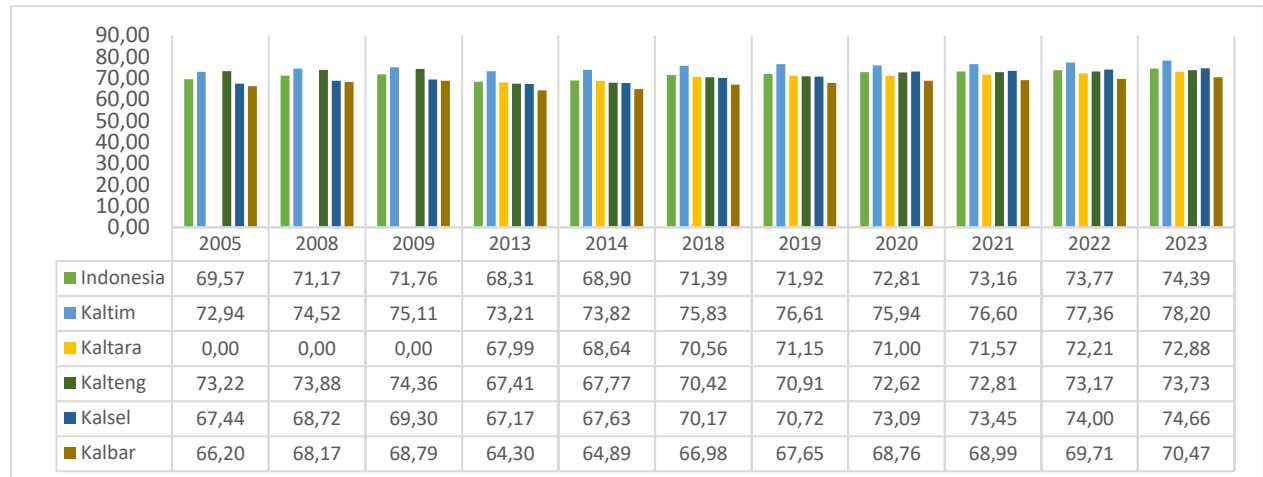
Peningkatan angka IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2023, angka IPM seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terkoreksi naik. Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan terbesar adalah Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 1,23 persen dari 69,17 di tahun 2022 menjadi 70,02 di tahun 2023. Kabupaten Kutai Barat juga mengalami peningkatan angka IPM yang signifikan yaitu sebesar 1,11 persen dari 73,16 di tahun 2022 menjadi 73,97 di tahun 2023.

**Tabel II.27**  
**Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi**  
**Kalimantan Timur Tahun 2005-2023**

No	Kab/Kota	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	71,66	73,46	73,99	69,61	69,87	71,61	72,29	72,43	73,34	73,85	74,56
2	KUBAR	69,25	72,16	72,60	68,13	68,91	70,69	71,63	71,42	72,31	73,16	73,97
3	KUKAR	71,27	72,03	72,50	70,71	71,20	73,15	73,78	74,19	74,69	75,31	75,95
4	KUTIM	69,32	70,84	71,23	69,79	70,39	72,56	73,49	73,32	74,15	74,69	75,33
5	Berau	70,70	72,75	73,22	72,02	72,26	74,01	74,88	75,19	75,69	76,24	76,71
6	PPU	71,46	72,69	73,11	68,07	68,60	71,13	71,64	72,40	73,01	73,56	74,33
7	MAHULU	-	-	-	63,81	64,32	66,67	67,58	67,50	68,36	69,17	70,02
8	Balikpapan	76,10	77,31	77,86	77,53	77,93	79,81	80,11	80,35	81,07	81,49	82,03
9	Samarinda	75,10	76,12	76,68	77,84	78,39	79,93	80,20	80,39	81,05	81,72	82,61
10	Bontang	74,89	76,08	76,52	78,34	78,58	79,86	80,09	80,06	80,65	81,00	81,63

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dilihat dari perbandingan dengan regional Kalimantan, maka IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan IPM tertinggi dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 70,47 – 74,66. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi telah berkurang di seluruh wilayah Kalimantan sehingga seluruh provinsi terdampak positif, khususnya kualitas SDM dari sisi pengeluaran per kapita.



**Gambar II.26**

**Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia**

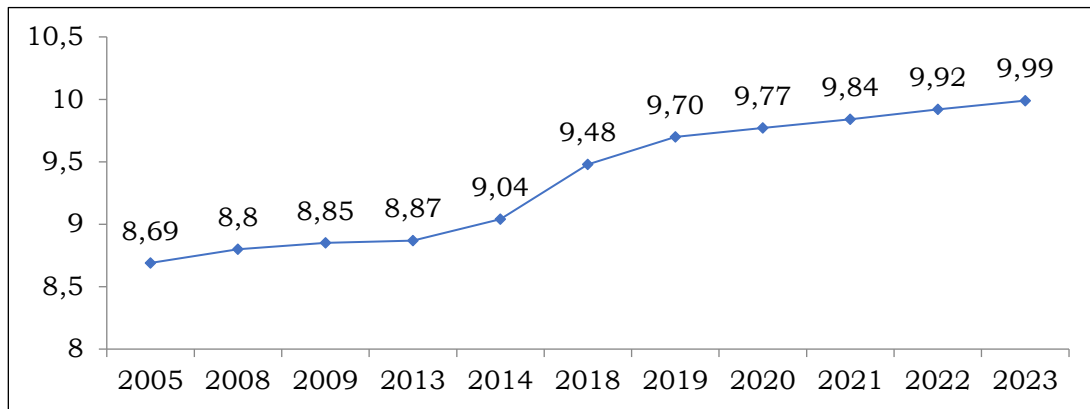
*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023*

Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan Timur yang tinggi bukanlah ranking secara nasional atau regional. Laju pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

Perkembangan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM diuraikan sebagai berikut:

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2023 mencapai 9,99 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I).

**Gambar II.27****Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2005-2023 (Tahun)**

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2024

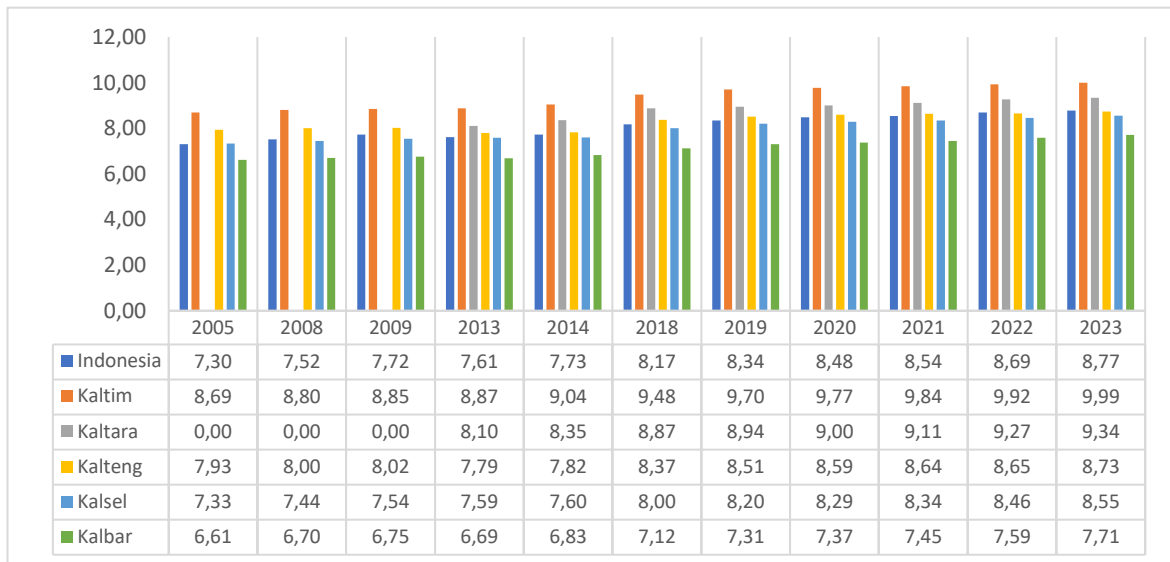
Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota juga selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tiga kota di Kalimantan Timur mengalami rata-rata lama sekolah tertinggi diatas rata-rata lama sekolah Provinsi, yang dimana Kota Balikpapan dan Kota Samarinda memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi mencapai 10,93 tahun. Hal ini disebabkan antara lain karena sarana dan prasarana pendidikan yang sudah lengkap ataupun memadai di semua jenjang Pendidikan di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya dengan capaian 8,49 tahun pada tahun 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP Kelas III). Angka ini masih-belum mencapai target pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Hal ini dimungkinkan antara lain karena infrastruktur pendidikan di Kab. Mahulu masih perlu mendapat perhatian khusus baik oleh Pemerintah Pusat maupun daerah.

**Tabel II.28****Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (tahun)**

No	Kab/Kota	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	7,30	7,61	7,75	7,96	7,99	8,22	8,54	8,55	8,79	8,80	8,91
2	KUBAR	6,80	7,75	7,80	7,89	7,98	8,07	8,34	8,47	8,70	8,78	8,85
3	KUKAR	8,30	8,30	8,33	8,41	8,46	8,84	9,10	9,22	9,23	9,24	9,26
4	KUTIM	7,30	7,61	7,86	8,56	8,60	9,08	9,18	9,19	9,43	9,44	9,45
5	Berau	7,62	7,86	8,13	8,52	8,53	8,98	9,25	9,52	9,53	9,54	9,56
6	PPU	7,40	7,57	7,66	7,30	7,46	8,03	8,16	8,28	8,36	8,51	8,53
7	MAHULU	-	-	-	6,86	7,15	7,69	7,89	7,97	8,18	8,36	8,49
8	Balikpapan	10,01	10,03	10,08	10,39	10,41	10,65	10,67	10,68	10,91	10,92	10,93
9	Samarinda	9,67	9,73	9,80	10,20	10,26	10,46	10,47	10,48	10,49	10,71	10,93
10	Bontang	9,90	9,97	10,04	10,34	10,35	10,72	10,73	10,79	10,80	10,81	10,92

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur sebesar 9,99 tahun adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan serta lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,77 tahun. Disusul Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 9,34 tahun dan 8,73 tahun.



**Gambar II.28**

**Rata-Rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia**

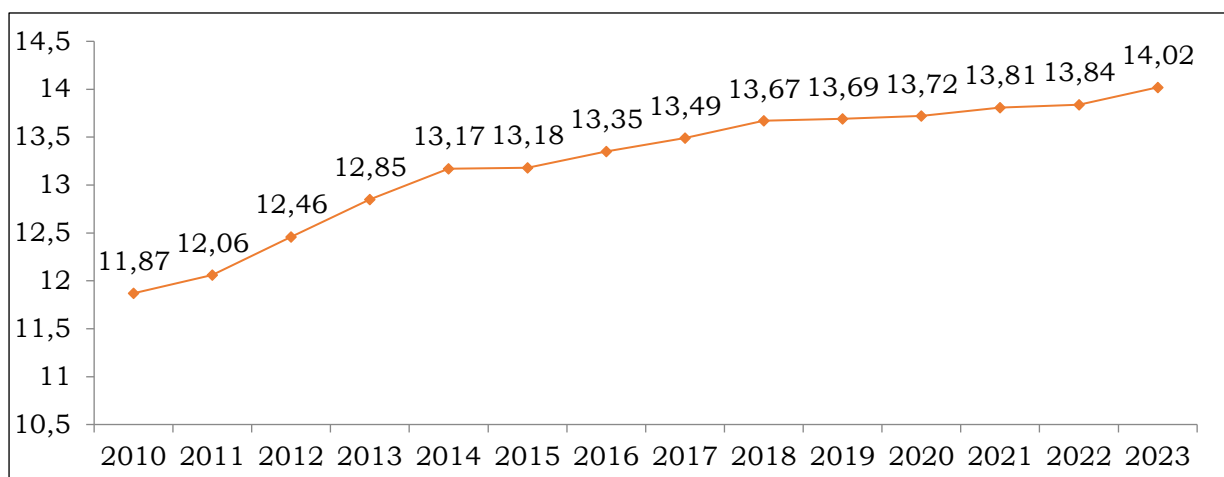
*Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2024*

Capaian Rata-Rata Lama Sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tingginya angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

**b. Harapan Lama Sekolah**

Di tahun 2023, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 14,02 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga SMA atau D1. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.





**Gambar II.29**  
**Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2010-2023 (Tahun)**

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Kota Samarinda memiliki capaian harapan lama sekolah paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu 15,39 tahun sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 12,63 tahun pada tahun 2023 merupakan capaian harapan lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya.

**Tabel II.29**  
**Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 – 2023 (tahun)**

No	Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	11,88	12,52	12,63	12,65	12,96	12,98	12,99	13,00	13,10	13,25	13,27	13,37
2	KUBAR	11,57	11,58	12,14	12,30	12,75	12,82	12,88	12,89	12,90	13,02	13,09	13,25
3	KUKAR	12,11	12,96	13,24	13,25	13,26	13,56	13,57	13,58	13,59	13,60	13,63	13,64
4	KUTIM	11,59	12,12	12,42	12,43	12,44	12,48	12,65	12,78	12,89	12,90	13,00	13,01
5	Berau	12,06	12,86	12,96	13,17	13,18	13,29	13,3	13,31	13,32	13,33	13,35	13,36
6	PPU	11,39	11,45	11,69	12,02	12,46	12,53	12,54	12,55	12,56	12,57	12,70	12,86
7	MAHULU	-	11,82	11,87	12,03	12,42	12,47	12,48	12,50	12,51	12,61	12,62	12,63
8	Balikpapan	12,47	13,15	13,43	13,46	13,59	13,75	14,12	14,13	14,14	14,22	14,23	14,24
9	Samarinda	13,64	13,76	14,16	14,17	14,23	14,64	14,66	14,70	14,89	15,09	15,10	15,39
10	Bontang	12,12	12,50	12,68	12,77	12,79	12,88	12,89	12,90	13,03	13,17	13,18	13,43

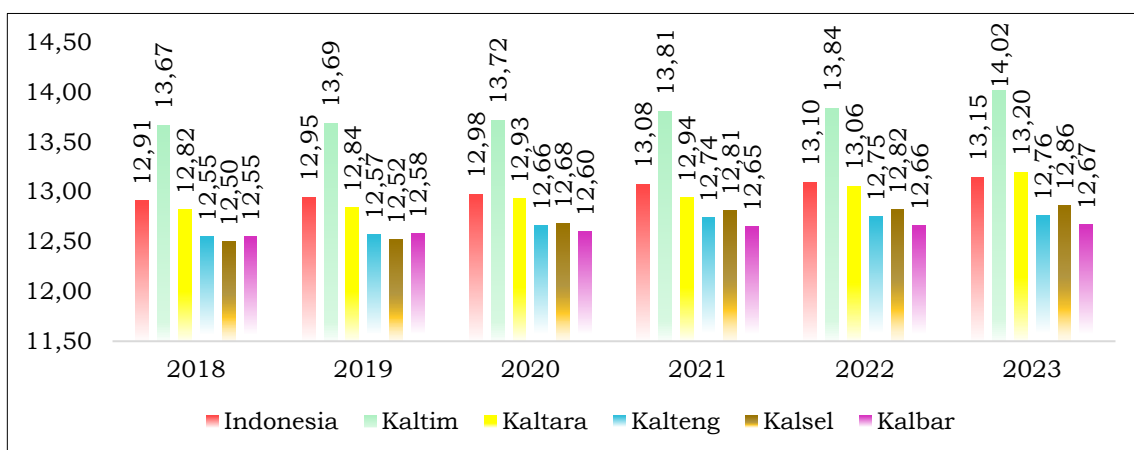
Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2024

Secara umum Harapan Lama Sekolah pada kabupaten/kota mengalami tren kenaikan dari tahun 2012 sampai dengan 2023 meskipun kenaikan harapan lama sekolah di kabupaten/kota belum menunjukkan kenaikan secara signifikan. Sebagai upaya pemerintah terhadap peningkatan harapan lama sekolah di delapan kabupaten dengan angka harapan lama sekolah masih berada dibawah provinsi khususnya Kabupaten Mahulu dengan angka harapan lama sekolah yang paling rendah, maka diperlukan adanya langkah konkret sebagai upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan baik pada peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana

pendidikan maupun pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikannya sehingga peningkatan angka harapan lama sekolah dapat segera diwujudkan.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang tertinggi di Regional Kalimantan. Namun tren laju pertumbuhan komponen ini (2018-2023) cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan Provinsi lainnya di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi, namun cenderung meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur. Hal ini berarti pertumbuhan HLS wilayah lain di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 5 tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan HLS di Provinsi Kalimantan Timur cenderung melambat.



**Gambar II.30**

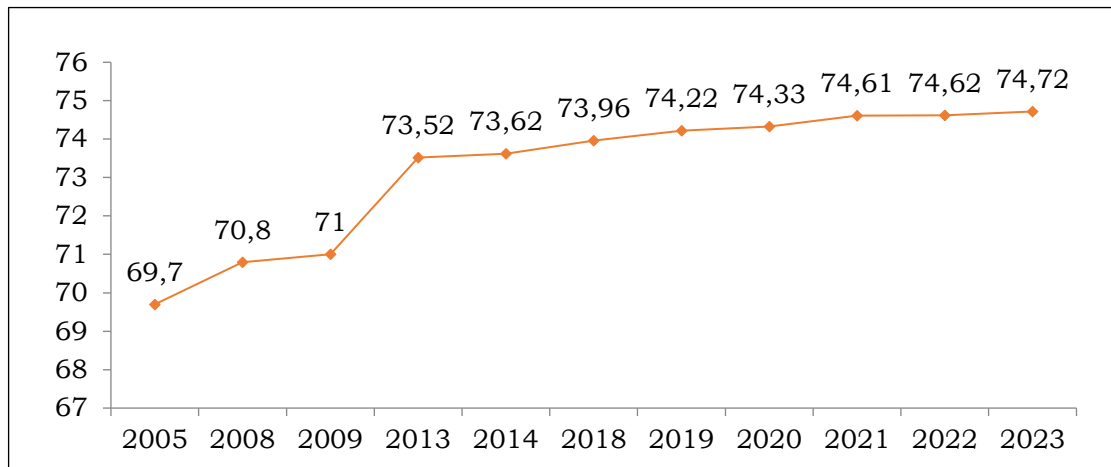
**Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia**

*Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2024*

c. Umur Harapan Hidup

Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2005 mencapai 69,70 tahun dan pada tahun 2023 menjadi 74,72 tahun. Selama periode tersebut secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 7,20 persen atau secara kumulatif terdapat peningkatan 5,02 poin. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2023 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74-75 tahun. Dari sisi preventif Keberhasilan Pemerintah dalam menanggulangi penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal dan

penyakit-penyakit terkait gizi. Sedangkan dari sisi kuratif tergambarakan upaya pemerintah dan swasta di kabupaten/dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.



**Gambar II.31**

**Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023**

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki umur harapan hidup tertinggi mencapai 75,64 tahun dan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai umur harapan hidup 73,44 tahun merupakan umur harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2023 akan memiliki harapan hidup hingga usia 73 tahun.

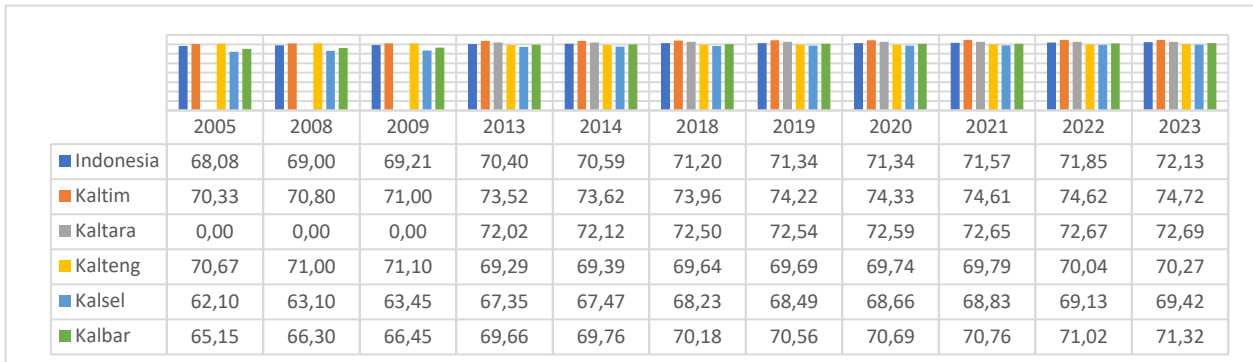
**Tabel II.30**

**Umur Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2023 (tahun)**

No	Kab/Kota	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	71,67	72,39	72,74	71,86	71,88	72,28	72,52	73,48	73,77	73,78	73,89
2	KUBAR	69,41	69,89	70,08	71,96	72,03	72,57	72,79	73,37	73,63	73,63	73,73
3	KUKAR	67,50	67,76	67,85	71,48	71,50	71,93	72,21	73,64	73,99	74,00	74,12
4	KUTIM	67,80	68,25	68,43	72,30	72,37	72,76	73,03	73,86	74,21	74,22	74,33
5	Berau	68,91	69,41	69,66	71,15	71,21	71,68	71,94	73,06	73,35	73,35	73,45
6	PPU	70,86	71,18	71,32	70,43	70,48	71,05	71,30	73,57	73,87	73,90	74,03
7	MAHULU	-	-	-	71,05	71,12	71,56	71,90	73,06	73,30	73,32	73,44
8	Balikpapan	71,07	71,73	71,95	73,93	73,94	74,18	74,41	75,20	75,50	75,52	75,64
9	Samarinda	70,00	70,81	71,01	73,59	73,63	73,93	74,17	74,83	75,12	75,15	75,27
10	Bontang	71,71	72,11	72,26	73,67	73,68	73,94	74,18	74,37	74,67	74,69	74,81

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih berada di atas capaian nasional sebesar 72,13 tahun.

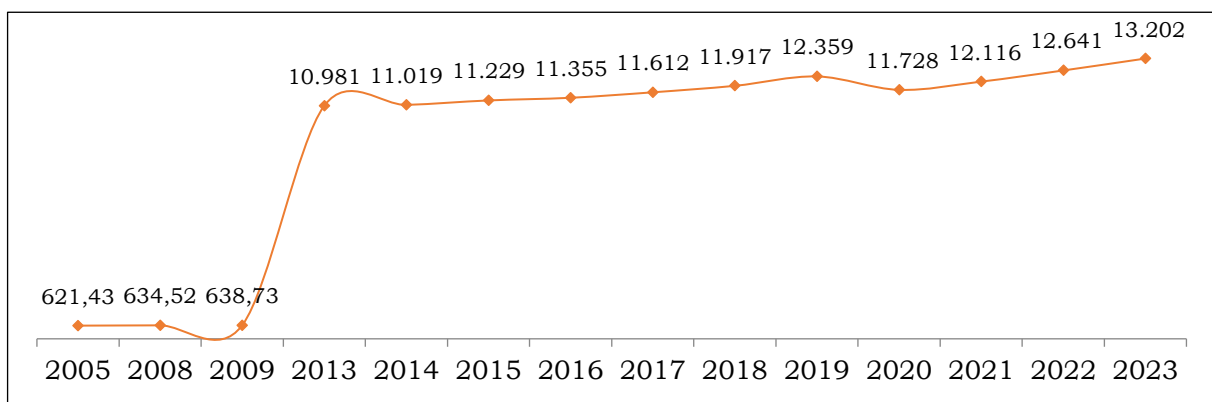


**Gambar II.32**  
**Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia**  
**Tahun 2005-2023**

*Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023*

d. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran per Kapita Disesuaikan periode 2005 - 2023 tumbuh 4,34 persen per tahun. Pada tahun 2023, Pengeluaran per Kapita disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai Rp. 13,20 juta per tahun, atau naik Rp 12,58 juta dibandingkan tahun 2005.



**Gambar II.33**  
**Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2005-2023 (Ribu Rp)**

*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023*

Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 merupakan dampak dari adanya pemulihan pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur tanpa terkecuali yang menyebabkan daya

beli masyarakat meningkat karena pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat.

Sedangkan jika dirinci menurut kabupaten/kota, Kota Bontang memiliki pengeluaran per kapita disesuaikan paling besar diantara kabupaten/kota lainnya mencapai 17.659 ribu rupiah dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 8.696 ribu rupiah merupakan pengeluaran per kapita terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Secara umum, peningkatan pengeluaran per kapita menggambarkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur yang diakibatkan pemulihan pandemi COVID-19 dengan banyaknya masyarakat yang telah vaksin di tahun 2022.

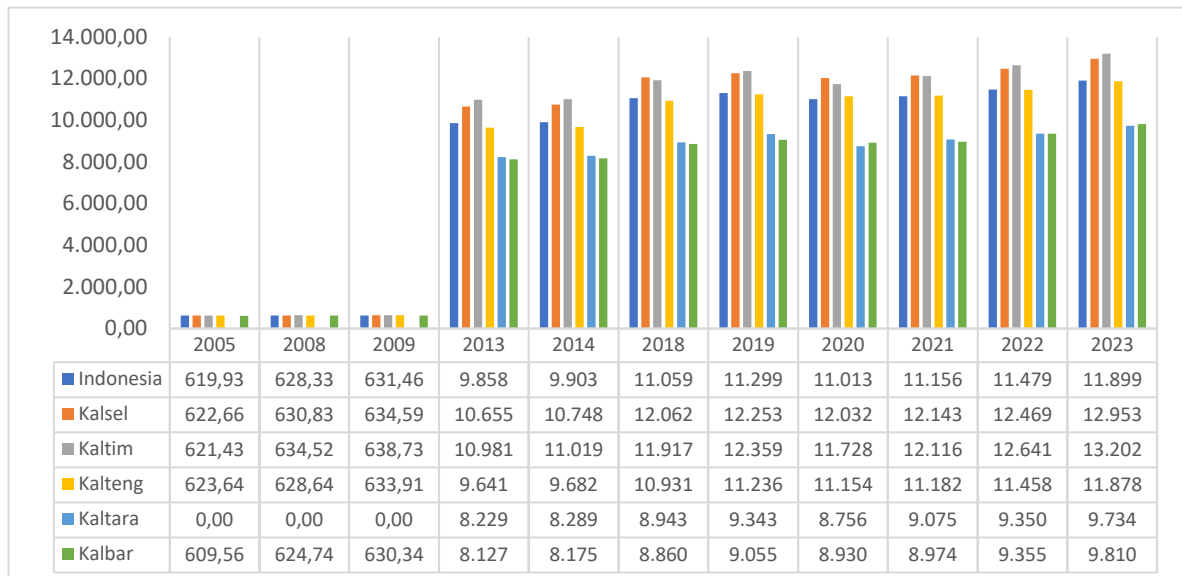
**Tabel II.31**

**Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2023 (Ribu Rupiah)**

No	Kab/Kota	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	616,60	625,82	626,47	9.628	9.706	10.605	10.767	10.344	10.673	11.181	11.651
2	KUBAR	618,53	623,05	625,57	9.228	9.262	9.849	10.338	9.712	10.062	10.740	11.291
3	KUKAR	620,80	628,71	632,64	9.866	9.984	10.959	11.152	10.720	11.048	11.677	12.323
4	KUTIM	612,10	619,00	621,34	9.297	9.484	10.614	11.196	10.485	10.868	11.322	11.961
5	Berau	617,39	633,12	634,47	11.375	11.471	12.207	12.726	12.018	12.435	13.095	13.620
6	PPU	615,12	625,27	628,25	10.773	10.807	11.492	11.750	11.231	11.651	11.890	12.517
7	MAHULU	-	-	-	7.036	7.071	7.653	8.008	7.524	7.802	8.215	8.696
8	Balikpapan	637	646,41	651,65	13.333	13.439	14.557	14.791	14.549	14.862	15.455	16.195
9	Samarinda	638,63	643,80	647,22	13.455	13.538	14.466	14.613	14.135	14.582	15.162	15.610
10	Bontang	617,10	628,37	630,41	15.820	15.878	16.698	16.843	16.278	16.765	17.327	17.659
	Kalimantan Timur	621,43	634,52	638,73	10.981	11.019	11.917	12.359	11.728	12.116	12.641	13.202

*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024*

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun 2023, Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi kemudian disusul Kalimantan Selatan. Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih berada di atas nasional. Capaian ini harus dipertahankan agar kesejahteraan masyarakat dapat terus terlihat peningkatannya dari sisi pendapatan rumah tangga.



**Gambar II.34**  
**Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribu Rupiah)**

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

## 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

### 1. Sosial

Perkembangan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 4 tahun terakhir fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menggambarkan pada peningkatan jumlah PMKS yang harus menerima bantuan dengan puncak jumlah tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 108.434 orang.

**Tabel II.32**  
**Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021**

Jumlah PMKS	Satuan	2018	2019	2020	2021
Jumlah PMKS	Orang	243.459	251.234	251.234	249.893
PMKS yang ditangani	Jenis	26	26	26	26
Persentase Penanganan PMKS	%	1	1	1	1,08
PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	78.387	78.387	81.247	2.671
PMKS yang diberikan Bantuan	Orang	1.200	1.052	1.134	2.671
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	1,53	1,34	1,40	100
Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	%	0,1	1,34	1,4	0,215
Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	KK	n/a	46.510	46.510	46.510



Jumlah PMKS	Satuan	2018	2019	2020	2021
Jumlah Keluarga yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	KK	n/a	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2023

Penanganan dan pemberdayaan PPKA dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan secara simultan melalui Sistem Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curative*), pemulihan (*rehabilitative*) dan pengembangan (*promotive*) seperti meningkatkan jumlah Keluarga miskin dan PPKS yang memiliki usaha ekonomi produktif dengan melibatkan multi program dan lintas sektor.

Berdasarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kalimantan Timur terdapat kenaikan dari tahun 2018 sebanyak 243.459 orang menjadi 247.465 orang pada tahun 2021, atau bertambah sebanyak 4.006 orang. Jumlah PMKS yang terbesar pada kabupaten/kota berada pada Kabupaten Kutai Barat dan Kota Samarinda yaitu sebesar 87.726 dan 34.899. Berdasarkan inventarisasi permasalahan penanganan PMKS hal utama yang perlu dilakukan selain peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga adalah belum tersedianya panti rehabilitasi untuk penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.



**Tabel II.33**  
**Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1	Anak Balita Terlantar	94	-	68	-	1.841	-	59	-	102	-	82	-
2	Anak Terlantar	327	-	743	-	1.542	-	274	-	326	-	1.625	-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	71	-	79	-	66	-	48	-	26	-	21	-
4	Anak Jalanan	124	-	81	-	206	-	-	-	-	-	39	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	76	-	63	-	435	-	31	-	14	-	164	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	187	-	24	-	97	-	170	-	59	-	93	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	161	-	921	-	816	-	23	-	-	-	43	-
8	Lanjut Usia Terlantar	29	-	668	-	1.162	-	-	-	422	-	-	-
9	Penyandang Disabilitas	314	-	2.349	-	1.626	-	1.097	-	449	-	530	-
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	11	-	4	-	51	-	-	-	26	-	10	-
12	Pengemis	9	-	8	-	55	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemulung	21	-	5	-	64	-	-	-	-	-	7	-
14	Kelompok Minoritas	65	-	-	-	38	-	93	-	-	-	17	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	143	-	134	-	439	-	110	-	240	-	298	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	1.091	-	180	-	1.990	-	19	-	43	-	7	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	303	-	75	-	508	-	4	-	6	-	3	-
18	Korban <i>Trafficking</i>	2	-	3	-	8	-	6	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	56	-	-	-	73	-	-	-	-	-	51	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	399	-	-	-	59	-	-	-	48	-	34	-
21	Korban Bencana Alam	2.807	591	169	43	5.950	1.267	981	214	47.301	9.748	1.211	287
22	Korban Bencana Sosial	948	171	2.477	412	3.288	612	781	192	25.304	5.941	1.011	214





No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	56	-	-	-	-	-	27	-	29	-	48	-
24	Fakir Miskin	14.704	3.114	20.114	3.193	14.248	3.101	12.047	3.012	12.678	2.870	13.647	3.291
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	34	-	337	-	-	-	581	-	11	-
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-	-	-	72	27	1.697	378
JUMLAH		21.998	3.876	28.199	3.648	34.899	4.980	15.770	3.418	87.726	18.586	20.648	4.170

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2022

**Tabel II.34**

**Lanjutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	BERAU		KUTIM		BONTANG		MAHULU	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1	Anak Balita Terlantar	77	-	128	-	78	-	-	-
2	Anak Terlantar	502	-	213	-	437	-	-	-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	172	-	442	-	43	-	18	-
4	Anak Jalanan	16	-	-	-	51	-	-	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	35	-	872	-	43	-	-	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	139	-	187	-	56	-	-	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	147	-	587	-	-	-	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	-	-	198	-	337	-	-	-
9	Penyandang Disabilitas	276	-	612	-	795	-	310	-
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	75	-	19	-	17	-	-	-
12	Pengemis	-	-	-	-	4	-	-	-
13	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-



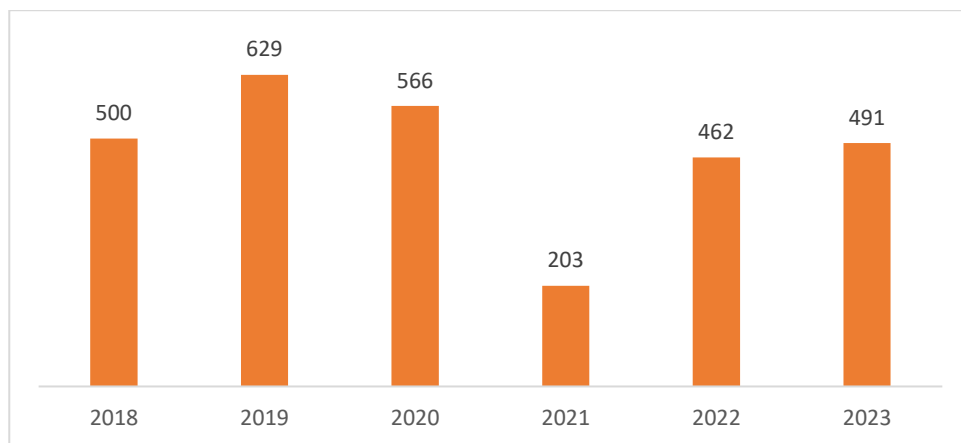
NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	BERAU		KUTIM		BONTANG		MAHULU	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	44	-	-	-	-	-	-	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	31	-	159	-	160	-	-	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	2	-	4	-	4	-	-	-
18	Korban <i>Trafficking</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	52	-	-	-	34	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	-	-	712	154	869	196	-	-
22	Korban Bencana Sosial	422	106	392	98	377	95	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Fakir Miskin	9.307	2.107	12.001	3.001	4.587	1.047	1.067	264
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil	1.717	411	575	104	-	-	1.250	249
JUMLAH		13.014	2.624	17.101	3.357	7.892	1.338	2.645	513

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2021

## 2. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Perlindungan terhadap Perempuan dan anak diberikan meliputi pencegahan, pelayanan, penguatan kelembagaan, pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas keluarga melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota.

Menurut laporan Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPPA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 491 kasus dan terjadi sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebanyak 462 kasus di Provinsi Kalimantan Timur, secara lengkap dapat dilihat dalam gambar di bawah.



**Gambar II.35**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2023**

*Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2024*

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tingginya kasus-kasus terkait dengan isu pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Kalimantan Timur merupakan indikasi perlunya upaya pemerintah yang terstruktur, berkesinambungan serta melibatkan banyak pihak. Salah satu indikator untuk mengukur capaian keberhasilan Pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Indeks perlindungan anak Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mencapai 64,06, capaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun

sebelumnya yang mencapai 73,60. Turunnya indeks perlindungan anak disebabkan oleh rendahnya capaian pada klaster Hak Sipil dan Kebebasan serta pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya diakibatkan pandemi Covid-19.

Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kerentanan untuk menjadi korban kekerasan. Kondisi ini memerlukan upaya integratif selain Pemerintah juga meliputi keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan mas media. Beberapa kelembagaan perlindungan anak adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Forum Anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota, jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat ini bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu diperlukan upaya pemenuhan hak anak serta melakukan percepatan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Jumlah Anak Disabilitas Kalimantan Timur cukup tinggi. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Kalimantan Timur seperti dalam tabel berikut.

**Tabel II.35**  
**Jumlah penduduk disabilitas di Kalimantan Timur Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Disabilitas Fisik	Disabilitas Fisik Mental	Disabilitas Netra/Buta	Disabilitas Mental Jiwa	Disabilitas Rungu/Wicara	Disabilitas Lainnya
1	Paser	54	13	27	179	80	12
2	Kukar	443	110	182	579	330	111
3	Berau	44	13	24	229	69	21
4	Kubar	88	16	44	160	112	62
5	Kutim	99	13	56	201	89	47
6	PPU	128	37	55	132	105	32
7	Mahakam Ulu	52	11	5	34	30	15
8	Balikpapan	146	23	44	574	211	66
9	Samarinda	108	21	69	716	184	40
10	Bontang	90	16	26	276	79	45
JUMLAH		1.252	273	532	3.080	1.289	451

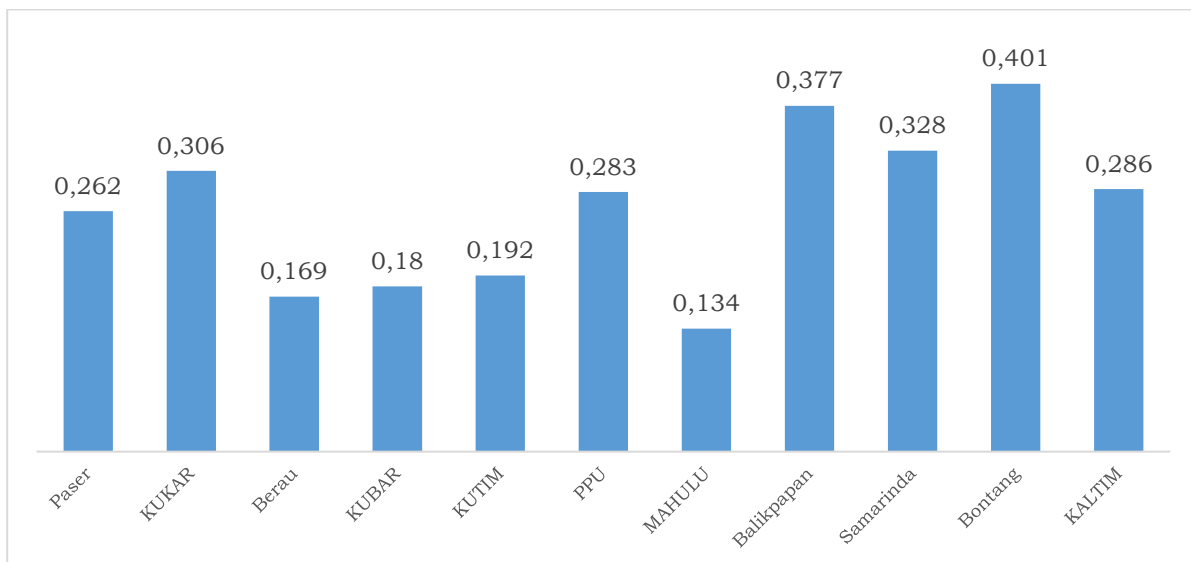
Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2024

### 3. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri

dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan.

Indeks Keluarga Sehat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebesar 0,286 termasuk dalam kategori Keluarga Tidak Sehat disebabkan rendahnya capaian Indikator Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar sebesar 38,08 persen, Penderita hipertensi yang berobat teratur sebesar 31,53 persen dan Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan sebesar 27,22 persen.



**Gambar II.36**

**Indeks Keluarga Sehat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024*

Indeks Keluarga Sehat Kota Balikpapan mencapai 0,401 dan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki Indeks Keluarga Sehat paling rendah sebesar 0,134. Namun seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam kategori Keluarga Tidak Sehat.

#### **4. Indeks Kualitas Keluarga**

Peningkatan kualitas keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting dilakukan demi mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Ketika keluarga memiliki kualitas yang baik, setiap anggota keluarga akan lebih mampu memahami pentingnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Kualitas keluarga yang baik, juga lebih memungkinkan kesetaraan gender dapat terwujud. Penerapan kesetaraan gender dalam keluarga dengan berbagi peran dan menghargai satu sama lain dapat membuat keluarga lebih harmonis dan bahagia. Kualitas keluarga yang

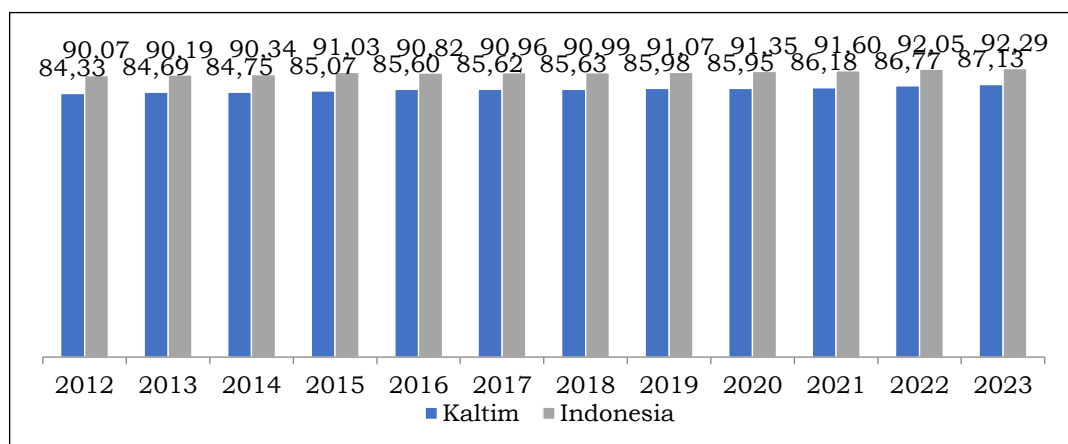
baik juga lebih memungkinkan anak-anak untuk tumbuh sehat dan mendapatkan pendidikan yang baik sehingga membantu anak-anak untuk mencapai potensi mereka dan menjadi kontributor yang lebih baik bagi masyarakat.

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) menjadi suatu kebutuhan mendasar bagi Pemerintah dalam rangka mengidentifikasi permasalahan keluarga dan selanjutnya mempersiapkan penyusunan intervensi kebijakan peningkatan kualitas keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak demi mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

Nilai indeks kualitas keluarga Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2021 mencapai 76,14 dan mengalami peningkatan 2,42 poin pada tahun 2022 menjadi 77,88. Nilai ini menunjukkan kualitas keluarga Provinsi Kalimantan Timur pada kategori Responsif Gender dan Hak Anak.

## 5. Indeks Pembangunan Gender

Untuk dapat melihat pembangunan manusia yang dirinci menurut gender, *United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan sebuah metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender. Seiring dengan penggunaan metode baru di penghitungan IPM pada tahun 2010. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.



**Gambar II.37**

**Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2012-2023 (tahun)**

*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024*

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi di tahun 2023 sebesar 87,13. Dalam rumusan IPG, dilakukan formulasi menggunakan komponen IPM yang dipisahkan sesuai jenis kelamin, sehingga penurunan IPM akibat dampak COVID-19 akan berpengaruh pada penurunan IPG. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan mulai berkurangnya COVID-19 tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 87,13. Rendahnya Indeks Pembangunan Gender disebabkan oleh tingginya kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Perempuan dibanding dengan laki-laki yaitu untuk Rata-Rata Lama Sekolah laki-laki tahun 2023 sebesar 10,26 tahun sedangkan perempuan 9,79 tahun, Adapun dari sisi pengeluaran per kapita untuk Laki-laki sebesar 19,88 juta rupiah sedangkan perempuan hanya 7,76 juta rupiah. Sehingga diperlukan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sekaligus keberhasilan strategi pembangunan berbasis gender yang bersifat multi program dan lintas sektor.

**Tabel II.36****Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023**

No	Komponen	Laki-Laki	Perempuan
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,96	76,62
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,87	14,19
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,26	9,79
4	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp)	19,88	7,76

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 89,76 sedangkan Paser memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 70,64 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

**Tabel II.37****Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 – 2023 (tahun)**

No	Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	66,86	67,82	68,58	68,66	69,78	70,64	71,41	71,35	71,49	72,27	73,15
2	KUBAR	80,91	82,87	83,01	82,51	83,30	83,52	83,84	84,09	84,67	85,02	85,73
3	KUKAR	74,92	76,13	76,92	77,22	78,54	78,83	79,14	79,20	79,61	80,30	81,08
4	KUTIM	73,54	74,17	74,90	74,94	75,48	76,03	76,51	76,63	76,95	77,67	78,46
5	Berau	85,76	86,27	87,23	87,37	87,77	87,92	87,93	87,71	88,08	88,08	88,43
6	PPU	82,87	84,71	85,97	86,26	86,31	86,34	86,22	86,68	86,97	87,23	87,41



No	Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	MAHULU	-	76,65	78,04	78,31	79,82	80,18	80,89	81,07	81,92	82,60	83,28
8	Balikpapan	86,72	87,14	90,05	89,97	89,74	89,76	89,71	90,24	90,48	90,59	90,80
9	Samarinda	88,03	88,71	89,26	89,44	89,26	89,42	89,41	89,82	89,90	90,40	90,68
10	Bontang	84,25	85,47	86,31	85,84	86,44	86,61	86,72	87,29	87,66	88,05	88,34
Kalimantan Timur		84,33	84,69	84,75	85,07	85,62	85,63	85,98	85,95	86,18	86,77	87,13

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

## 6. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

**Tabel II.38**  
**Indeks Pemberdayaan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 – 2023 (tahun)**

No	KAB/KOTA	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	54,51	52,85	58,90	64,58	62,07	62,76	66,20	65,66	65,67	64,94	68,35
2	KUBAR	53,70	49,15	63,49	62,36	62,63	63,68	61,14	60,60	65,34	66,01	66,90
3	KUKAR	46,04	45,86	52,91	53,41	55,07	56,44	63,74	61,43	62,76	63,40	63,55
4	KUTIM	48,56	50,52	55,13	55,20	53,71	55,72	56,35	53,77	53,78	51,55	53,99
5	Berau	50,34	50,48	49,20	47,09	49,85	50,55	57,66	57,91	56,48	58,17	57,53
6	PPU	63,98	61,74	49,42	49,92	50,30	50,02	50,36	49,75	49,85	50,58	50,02
7	MAHULU	-	-	68,19	66,37	74,12	76,04	80,61	80,41	80,43	81,11	82,42
8	Balikpapan	68,94	67,83	65,82	66,29	65,52	66,33	69,11	68,97	68,62	69,27	72,00
9	Samarinda	55,60	56,79	70,67	73,60	70,84	69,61	66,29	70,65	67,54	68,63	68,71
10	Bontang	59,06	59,47	44,29	45,85	45,44	46,36	51,99	51,97	45,67	46,12	47,20
Kalimantan Timur		61,84	63,12	53,74	55,96	56,64	57,53	65,65	65,54	66,64	66,89	68,96

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi dengan capaian 57,53 menjadi 65,65 di tahun 2019. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 65,54. Tahun 2023 Indeks Pemberdayaan Gender mengalami peningkatan menjadi 68,96, dibawah Nasional sebesar 76,90. Masih rendahnya indeks pemberdayaan gender di Kalimantan Timur disebabkan oleh keterlibatan perempuan di parlemen hanya 21,82 persen dan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 24,57

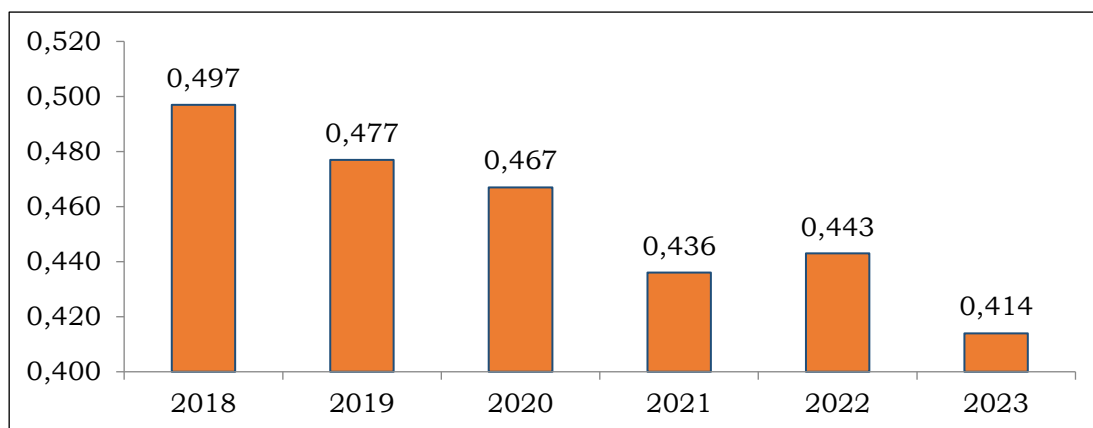


persen. Adapun persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional 48,03 persen.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 82,42 sedangkan Bontang memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 47,20 yang artinya bahwa di Kota Bontang memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

## 7. Indeks Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender di Kalimantan Timur sejak tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan tren menurun, meskipun terjadi sedikit kenaikan di tahun 2022. Dalam kurun waktu tersebut, IKG berkurang sebesar 0,083 poin, rata-rata turun 0,017 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, capaian IKG Kalimantan Timur juga tercatat selalu lebih rendah dari capaian IKG Nasional.



**Gambar II.38**  
**Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018 - 2023**

*Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024*

Pencapaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) selama kurun waktu 2018-2023 cukup bervariasi menurut kabupaten/kota, mengindikasikan ketimpangan gender masih menjadi permasalahan dalam pembangunan gender di Provinsi Kalimantan Timur. Capaian IKG tahun 2023 dibandingkan tahun 2018 untuk 8 dari 10 kabupaten/kota telah memiliki kesetaraan yang semakin tinggi dengan IKG yang semakin menurun, dan masih menyisakan dua kabupaten/kota dengan IKG yang meningkat. Sepanjang periode ini, Kota Balikpapan tercatat mengalami penurunan IKG cukup dalam. Sedangkan IKG di Kota Samarinda, Bontang, Penajam Paser Utara, Berau dan Kubar

justru mengalami peningkatan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meminimalkan hilangnya potensi pembangunan akibat adanya ketimpangan gender.

**Tabel II.18**  
**Indeks Ketimpangan Gender Berdasar Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023 (tahun)**

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	0,552	0,504	0,549	0,511	0,528	0,489
2	KUBAR	0,513	0,574	0,484	0,501	0,490	0,491
3	KUKAR	0,571	0,540	0,556	0,511	0,540	0,490
4	KUTIM	0,520	0,561	0,530	0,518	0,552	0,532
5	Berau	0,487	0,523	0,493	0,467	0,380	0,502
6	PPU	0,589	0,550	0,438	0,572	0,527	0,544
7	MAHULU	0,465	0,509	0,406	0,449	0,421	0,362
8	Balikpapan	0,168	0,300	0,297	0,246	0,344	0,178
9	Samarinda	0,411	0,320	0,311	0,222	0,197	0,237
10	Bontang	0,261	0,253	0,235	0,348	0,253	0,314
	Kalimantan Timur	0,497	0,477	0,467	0,436	0,443	0,414

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

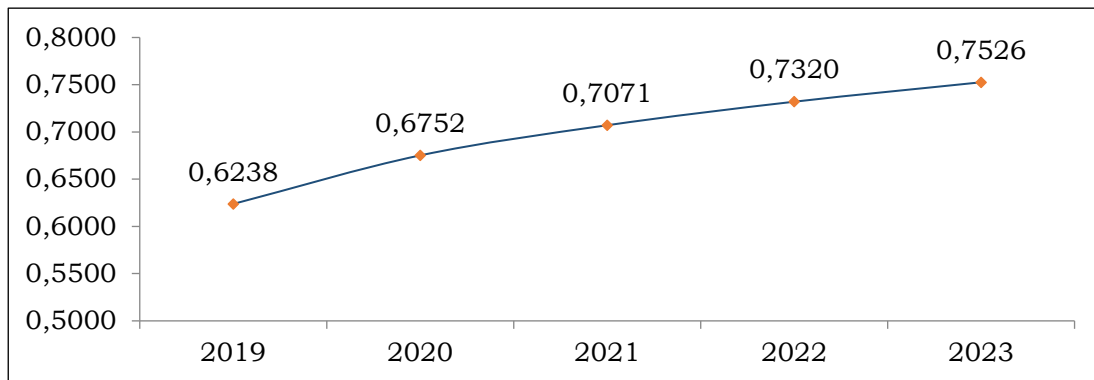
Pada tahun 2023, ketimpangan gender paling tinggi berada pada Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencapai 0,544, sedangkan ketimpangan terendah dicapai oleh Kota Balikpapan sebesar 0,178. Capaian IKG di tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan ketimpangan gender pada 5 kabupaten/kota dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ketimpangan terbesar terjadi pada Kota Balikpapan. Penurunan ketimpangan gender di Kota Balikpapan terutama didorong pada perbaikan dimensi kesehatan reproduksi, dimana terjadi penurunan proporsi penduduk perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas Kesehatan, serta perbaikan pada dimensi pasar tenaga kerja, dimana terjadi penurunan kesenjangan antara TPAK laki-laki dan Perempuan.

## 8. Indeks Desa Membangun

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan desa didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Capaian Indeks Desa Membangun merupakan cerminan status kemajuan dan kemandirian Desa, yang terbagi dalam Klasifikasi Status Desa yaitu Desa Mandiri ( $IDM > 0.8155$ ), Desa Maju ( $0.7072 < IDM \leq 0.8155$ ), Desa Berkembang ( $0.5989 < IDM \leq 0.7072$ ), Desa Tertinggal ( $0.4907 < IDM \leq 0.5989$ ) dan Desa Sangat Tertinggal ( $IDM \leq 0.4907$ ).

IDM Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dengan capaian terakhir pada tahun 2023 telah mencapai 0,7526 pada kategori Maju. Capaian ini menempatkan Kalimantan Timur pada peringkat ke 9 diantara seluruh provinsi di Indonesia. Peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif bagi pemerataan dan pemberdayaan pembangunan hingga level administrasi terkecil di Kalimantan Timur.



**Gambar II.39**  
**Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2019 - 2023**

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2023

Capaian IDM pada 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan seiring berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat melalui dana desa dan bantuan keuangan spesifik ke seluruh desa. Capaian IDM terendah pada tahun 2023 terdapat pada Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 0,6968 dengan status Berkembang, dan capaian tertinggi pada Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai capaian sebesar 0,8052.

**Tabel II.19**  
**Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017 - 2023**

No	Kab/Kota	2017	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	0,5856	0,6092	0,6664	0,7240	0,7500	0,7690
2	KUBAR	0,5233	0,5902	0,6660	0,6953	0,7298	0,7504
3	KUKAR	0,5815	0,6415	0,6846	0,7128	0,7465	0,7759
4	KUTIM	0,6037	0,6378	0,6782	0,7119	0,7305	0,7323
5	Berau	0,6097	0,6539	0,6999	0,7177	0,7261	0,7294
6	PPU	0,6505	0,6905	0,7085	0,7340	0,7769	0,8052
7	MAHULU	0,5352	0,5862	0,6181	0,6318	0,6646	0,6968
Kalimantan Timur		0,5757	0,6238	0,6752	0,7071	0,7320	0,7526

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2024

Pada tahun 2023, dari 841 desa di Provinsi Kalimantan Timur yang tersebar di tujuh kabupaten tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal dan hanya tersisa 5 desa tertinggal yang tersebar di Kabupaten Berau sebanyak 1 desa (Mapulu) dan Kabupaten Kutai Barat sebanyak 4 desa (Deraya, Gerunggung, Lemper, Tanjung Soke). Untuk mengurangi jumlah desa tertinggal di Kalimantan Timur, perlu upaya pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana desa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan desa terutama dalam meningkatkan pencapaian indeks ketahanan ekonomi yang masih rendah daripada 2 komponen lainnya.

**Tabel II.20.**

Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kab/Kota	Desa Mandiri	Desa Maju	Desa Berkembang	Desa Tertinggal	Desa Sangat Tertinggal
1	Paser	31	78	30	0	0
2	KUBAR	47	79	60	4	0
3	KUKAR	76	70	47	0	0
4	KUTIM	19	69	51	0	0
5	Berau	17	39	43	1	0
6	PPU	18	12	0	0	0
7	MAHULU	1	17	32	0	0
Kalimantan Timur		209	364	263	5	0

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2024

## 9. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pengembangan budaya dan seni di Kalimantan Timur ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 mencapai 54,81. Capaian IPK Kalimantan Timur berada bawah capaian IPK Nasional yaitu sebesar 55,13. Dari dimensi penilaian yang tercakup dalam IPK, Kalimantan Timur mendapatkan nilai di atas angka nasional, yaitu pada dimensi Pendidikan 76,55, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai 74,40 dan dimensi budaya literasi.

**Tabel II.21****Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Dimensi IPK	Provinsi	Nasional
Ekonomi Budaya	14,75	26,88
Pendidikan	76,55	72,53
Ketahanan Sosial Budaya	74,40	69,25
Warisan Budaya	43,86	48,92
Ekspresi Budaya	28,51	31,48
Budaya Literasi	64,95	57,40
Gender	56,65	59,30
IPK	54,81	55,13

Sumber: KEMENDIKBUD, 2022

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut, peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif dikarenakan capaian berada diatas capaian IPK nasional. Capaian ini patut diapresiasi dalam pengembangan budaya dan seni serta pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. Meskipun beberapa dimensi IPK terus mengalami peningkatan, namun masih diperlukan sinergi antar lembaga terkait di provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya budaya baik benda dan tak benda di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh negara lain. Pada tahun 2020 mensertifikasikan calon TACB, berdasarkan hasil sertifikasi maka dibentuklah Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur yang diputuskan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 430 tahun 2020 tentang TACB Prov. Kaltim. dan yang sudah melakukan sidang penetapan cagar budaya peringkat provinsi untuk Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkulirang, Mangkalihat dan Situs Penguburan Gunung Selendang.

**Tabel II.22****Karya Budaya Benda dan tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur yang Telah Dipatenkan Tahun 2021**

No	Kabupaten/ Kota	Karya Budaya tak Benda	Peringkat	Karya Budaya Benda
1.	KUBAR	Alat Musik Kelentangan Tari Ngerangkau Tari Gong Alat Musik Sapeq Tari Perang Dayak Sulitng Dewa Belian Bawo Hudoq Upacara adat Kwangkay Musik Genikng Pakaian Kulit Kayu Parapm Api Bayaq Rumah Panjang Dayak	Nasional Nasional	Bunker Komando Gudang Peluru Kolam Belanda Penampungan Air Belanda Pillbox Sumur Kembar Belanda Lamin Mancong Lamin Tolar
2.	SAMARINDA	Sarung Tenun Samarinda	Nasional	
3.	KUKAR	Tari Dewa Memanah Tari Ganjur Tari Datun Ngentau Tari Topeng Kemindu	Nasional Nasional Nasional Nasional	



No	Kabupaten/ Kota	Karya Budaya tak Benda	Peringkat	Karya Budaya Benda
		Undang-Undang Kerajaan Kutai Kertanegara (uu Panju Selatan) Erau Kertanegara Suling Dewa Punan Leto Kanjat Lasan Belian Namang Naek Ayun Muang Tarsul Kutai Begasing Kutai Nutuk Beham	Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional	
4.	Paser	Tari Ngarang Petis Udang Paser Ronggeng Paser Pentengan Gambus Paser	Nasional Nasional Nasional Nasional	
5.	Kutai Timur	Lom Plai Blontang Bekenjong Mandau	Nasional Nasional Nasional Nasional	
6.	Provinsi			Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkuliran Mangkalihat Situs Penguburan Gunung Selendang

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2022

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara keseluruhan pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 698 Cagar Budaya, 9 Museum, 537 Komunitas Budaya, 245 Tenaga Budaya, dan 216 Adat Istiadat/Tradisi.

**Tabel II.23**  
**Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kab/Kota di**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kekayaan Budaya				
		Cagar Budaya	Museum	Komunitas Budaya	Tenaga Budaya	Adat Istiadat/Tradisi
1	Paser	83	1	58	9	7
2	Kubar	13	1	81	31	19
3	Kukar	187	2	69	39	8
4	Kutim	57	0	7	10	7
5	Berau	167	3	7	7	2
6	PPU	33	0	24	12	7
7	Mahulu	47	0	0	9	137
8	Balikpapan	75	1	29	29	29



No	Kabupaten/Kota	Jenis Kekayaan Budaya				
		Cagar Budaya	Museum	Komunitas Budaya	Tenaga Budaya	Adat Istiadat/ Tradisi
9	Samarinda	32	1	222	93	0
10	Bontang	4	0	40	6	0
	Kalimantan Timur	698	9	537	245	216

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2022

## 10. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Pada Tahun 2017 IPP Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari 53,50 pada tahun 2017 menjadi 54,00 pada tahun 2022. Semua capaian domain mengalami peningkatan, kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan. Penurunan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan disebabkan oleh naiknya angka pemuda menjadi korban kejahatan.

**Tabel II.24**

### Domain Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Domain: Pendidikan	73,33	73,33	73,33	76,67	76,67
1. Rata-Rata Lama Sekolah	10,72	11,24	11,28	11,44	11,41
2. APK Sekolah Menengah	94,35	93,00	93,96	93,85	93,28
3. APK Perguruan Tinggi	35,64	37,78	39,16	40,21	40,62
Domain: Kesehatan dan Kesejahteraan	72,50	70,00	57,50	67,50	65,00
1) Angka Kesakitan Pemuda	5,37	6,52	4,07	6,31	8,43
2) Pemuda Menjadi Korban Kejahatan	0,93	1,37	1,67	0,23	0,50
3) Pemuda Merokok	20,80	20,82	20,39	19,14	17,07
4) Remaja Perempuan Sedang Hamil	7,99	2,52	25,55	26,88	26,88
Domain: Lapangan dan Kesempatan Kerja	35,00	45,00	50,00	35,00	45,00
1) Pemuda Berwirausaha Kerah Putih	0,24	0,48	0,70	0,38	0,56
2) Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	15,21	12,80	13,94	16,01	12,35
Domain: Partisipasi dan Kepemimpinan	43,33	43,33	43,33	30,00	30,00
1. Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Masyarakat	70,55	70,55	70,55	50,56	50,56
2. Partisipasi Pemuda yang aktif dalam organisasi	4,87	4,87	4,87	4,15	4,15
3. Pemuda Berpendapat Dalam Rapat	5,12	5,12	5,12	2,62	2,62
Domain: Gender dan Diskriminasi	50,00	50,00	50,00	53,33	53,33
1. Angka Perkawinan Usia Anak	11,54	12,36	11,79	8,64	8,64
2. Pemuda Perempuan Sedang Bersekolah Menengah dan Perguruan Tinggi	44,39	46,10	45,88	46,76	46,76
3. Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	25,29	27,96	24,48	25,17	26,99
Indeks Pembangunan Pemuda Kaltim	54,83	56,33	54,83	52,50	54,00
Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia	51,50	52,67	51,00	53,33	55,33

Sumber: BAPPENAS, 2022

## 2.3 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

#### 1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2005 hingga tahun 2023 menunjukkan tren yang meningkat dari komposisi sektor non migas dan batubara sedangkan dari sektor dengan migas dan non migas mengalami sedikit penurunan di tahun 2020. Nilai PDRB dengan migas Tahun 2020 tercatat sebesar Rp 607,59 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 505,55 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 314,89 triliun. Penurunan Nilai PDRB pada tahun 2020 dikarenakan terjadi anomali dimana karena dampak Pandemi COVID-19 yang sangat signifikan khususnya dalam hal ekspor. Akan tetapi pada tahun 2022 nilai PDRB kembali meningkat seiring dengan mulai pulihnya perekonomian Kalimantan Timur dengan berkurangnya dampak Pandemi COVID-19, nilai PDRB migas mencapai Rp 921,33 triliun, nilai PDRB non migas sebesar Rp 792,53 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 381,97 triliun. Sampai dengan Tahun 2023 Nilai PDRB migas telah mencapai Rp 843,57 triliun, nilai PDRB non migas sebesar Rp 798,76 triliun dan PDRB non migas dan non batubara mencapai Rp 428,24 triliun.

**Tabel II.25**

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (Juta Rupiah)**

Tahun	Migas	Non Migas	Non Migas dan Batubara
2005	180.254.089	68.071.494	46.538.170
2008	314.813.521	134.228.025	78.583.044
2009	285.590.822	155.204.139	90.178.706
2013	519.131.869	381.728.402	184.331.677
2014	527.515.256	391.162.368	209.693.825
2018	635.498.680	516.841.176	290.245.380
2019	652.480.257	539.487.790	311.078.493
2020	607.744.487	505.786.456	315.126.677
2021	696.584.498	584.205.939	338.613.743
2022	921.332.980	792.531.260	381.969.993
2023	843.571.252	798.759.670	428.244.507

Sumber: BPS Kaltim, 2024

Mayoritas lapangan usaha utama Tahun 2023 mengalami perbaikan ekonomi. Dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, kontribusi Lapangan





Usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 53,24 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp 490,50 triliun pada tahun 2022 dimana nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai PDRB mencapai Rp 314,20 triliun dan kontribusi sebesar 45,11 persen. Namun, PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2023 mengalami penurunan akibat turunnya nilai PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang memperoleh Rp 364,37 triliun atau turun sekitar 126,13 triliun dari tahun sebelumnya.



**Tabel II.26**  
**Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2012-2023**

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27.543 (5,47)	29.348,94 (5,65)	36.948,24 (7,00)	38.979,24 (7,72)	41.847,44 (8,22)	47.211,91 (7,98)	50.147,99 (7,89)	51.567,38 (7,91)	53.455,32 (8,80)	59.089,94 (8,48)	64.891,74 (7,04)	67.688,26 (8,02)
B	Pertambangan dan Penggalian	287.478,75 (57,11)	286.637,78 (55,21)	264.883,36 (50,21)	227.448,00 (45,03)	219.761,31 (43,19)	275.822,16 (46,60)	296.725,33 (46,69)	297.371,39 (45,60)	250.845,97 (41,27)	314.198,05 (45,11)	490.501,12 (53,24)	364.365,49 (43,19)
C	Industri Pengolahan	88.586,16 (17,60)	93.315,50 (17,98)	101.933,50 (19,32)	103.998,50 (20,59)	104.969,95 (20,63)	112.075,37 (18,93)	115.272,21 (18,14)	116.204,90 (17,82)	115.564,45 (19,02)	123.816,18 (17,77)	138.636,14 (15,05)	149.526,42 (17,73)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	110,18 (0,02)	107,50 (0,02)	127,55 (0,02)	205,23 (0,04)	232,81 (0,05)	280,20 (0,05)	315,06 (0,05)	344,96 (0,05)	385,06 (0,06)	395,47 (0,06)	422,61 (0,05)	503,42 (0,06)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	170,32 (0,03)	184,95 (0,04)	197,65 (0,04)	208,72 (0,04)	236,98 (0,05)	273,47 (0,05)	288,89 (0,05)	307,67 (0,05)	326,53 (0,05)	348,38 (0,05)	379,90 (0,04)	414,92 (0,05)
F	Konstruksi	31.936,59 (6,34)	34.863,90 (6,72)	39.537,94 (7,50)	41.871,57 (8,29)	42.120,58 (8,28)	46.876,98 (7,92)	53.500,58 (8,42)	58.472,32 (8,97)	58.308,25 (9,59)	62.313,15 (8,95)	70.945,22 (7,70)	86.997,44 (10,31)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.311,54 (4,23)	22.291,90 (4,29)	24.151,88 (4,58)	25.844,88 (5,12)	28.254,18 (5,55)	32.018,02 (5,41)	35.227,60 (5,54)	38.245,24 (5,86)	39.053,04 (6,43)	41.474,91 (5,95)	47.547,02 (5,16)	53.183,30 (6,30)
H	Transportasi dan Pergudangan	11.593,66 (2,30)	13.392,02 (2,58)	15.758,99 (2,99)	17.451,84 (3,46)	18.860,33 (3,71)	21.242,09 (3,59)	22.990,72 (3,62)	24.172,25 (3,71)	22.067,33 (3,63)	23.218,93 (3,33)	28.980,67 (3,15)	34.239,87 (4,06)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.118,90 (0,62)	3.423,16 (0,66)	3.826,88 (0,73)	4.361,98 (0,86)	4.851,07 (0,95)	5.448,93 (0,92)	6.106,13 (0,96)	6.691,56 (1,03)	6.479,40 (1,07)	6.707,64 (0,96)	7.520,92 (0,82)	8.372,54 (0,99)
J	Informasi dan Komunikasi	4.781,09 (0,95)	5.185,90 (1,00)	5.662,42 (1,07)	6.075,45 (1,20)	6.628,93 (1,30)	7.375,63 (1,25)	7.988,16 (1,26)	8.708,38 (1,34)	9.390,81 (1,55)	10.206,75 (1,47)	11.087,18 (1,20)	11.896,25 (1,41)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.179,13 (1,23)	7.409,91 (1,43)	7.906,88 (1,50)	8.386,36 (1,66)	8.762,59 (1,72)	9.032,36 (1,53)	9.717,12 (1,53)	10.216,63 (1,57)	10.490,25 (1,73)	11.244,16 (1,61)	13.379,87 (1,45)	15.329,16 (1,82)
L	Real Estate	3.450,46 (0,69)	3.868,13 (0,75)	4.421,93 (0,84)	4.803,76 (0,95)	4.869,80 (0,96)	5.218,43 (0,88)	5.574,93 (0,88)	5.768,85 (0,88)	5.868,85 (0,97)	5.891,47 (0,85)	6.152,95 (0,67)	6.526,67 (0,77)
M,N	Jasa Perusahaan	844,11 (0,17)	959,04 (0,18)	1.088,75 (0,21)	1.085,81 (0,21)	1.116,07 (0,22)	1.215,39 (0,21)	1.299,48 (0,20)	1.346,71 (0,21)	1.334,74 (0,22)	1.384,56 (0,20)	1.516,51 (0,16)	1.703,22 (0,20)



Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.236,64 (1,64)	8.859,47 (1,71)	10.229,68 (1,94)	11.609,14 (2,30)	11.807,58 (2,32)	11.658,60 (1,97)	12.337,92 (1,94)	13.019,83 (2,00)	12.750,61 (2,10)	13.198,18 (1,89)	14.448,96 (1,57)	15.716,80 (1,86)
P	Jasa Pendidikan	4.368,35 (0,87)	5.293,71 (1,02)	6.245,46 (1,18)	7.288,30 (1,44)	8.215,11 (1,61)	9.081,38 (1,53)	10.107,38 (1,59)	10.995,56 (1,69)	11.724,05 (1,93)	12.340,33 (1,77)	13.132,70 (1,43)	14.103,76 (1,67)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.865,83 (0,37)	2.028,16 (0,39)	2.320,46 (0,44)	2.781,30 (0,55)	3.191,96 (0,63)	3.506,04 (0,59)	3.905,17 (0,61)	4.289,67 (0,66)	5.331,02 (0,88)	6.205,10 (0,89)	6.692,40 (0,73)	7.294,79 (0,86)
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.827,33 (0,36)	1.961,89 (0,38)	2.273,69 (0,43)	2.705,00 (0,54)	3.153,54 (0,62)	3.566,51 (0,60)	3.994,00 (0,63)	4.434,75 (0,68)	4.368,80 (0,72)	4.551,86 (0,65)	5.097,08 (0,55)	5.708,94 (0,68)
PDRB		503.402,03 (100,00)	519.131,87 (100,00)	527.515,26 (100,00)	505.105,06 (100,00)	508.880,24 (100,00)	591.903,49 (100,00)	635.498,68 (100,00)	652.158,06 (100,00)	607.744,49 (100,00)	696.584,50 (100,00)	921.332,98 (100,00)	843.571,25 (100,00)

Sumber: BPS Kaltim, 2024

**Tabel II.27**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha**  
**(Milliar Rupiah) Tahun 2012-2023**

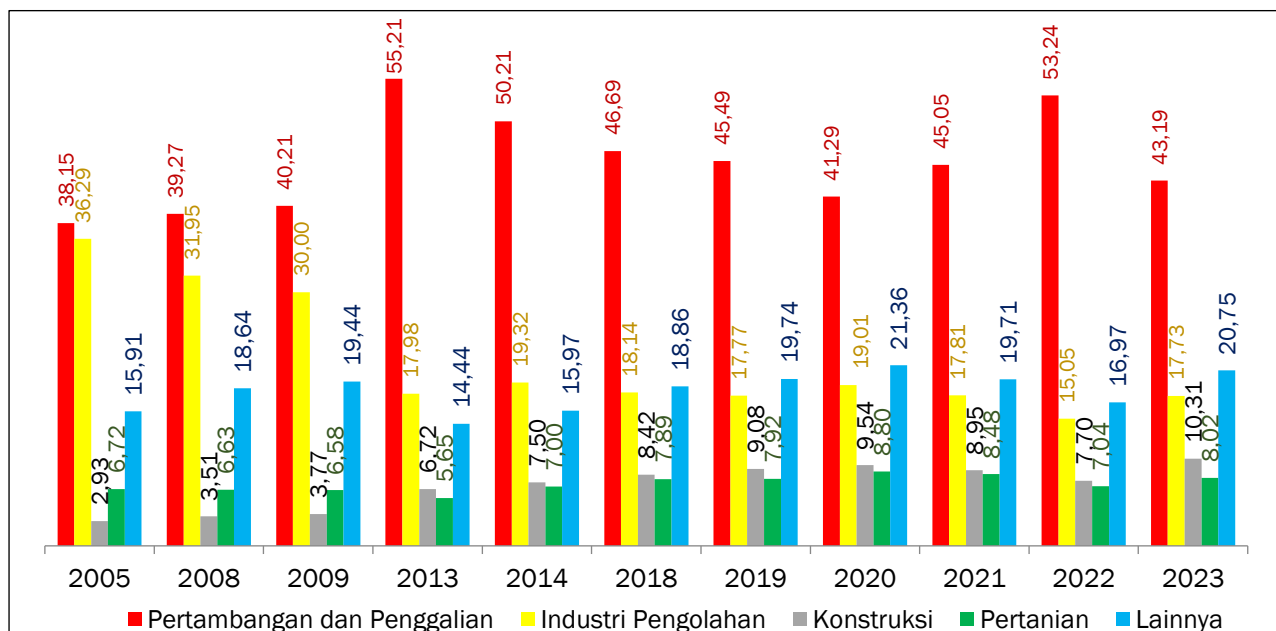
Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.991,79 (5,59)	25.535,67 (5,82)	27.267,20 (6,11)	28.506,91 (6,47)	28.639,40 (6,52)	30.261,40 (6,68)	32.140,17 (6,92)	33.396,19 (6,86)	33.026,69 (6,99)	33.001,68 (6,81)	33.649,34 (6,75)	34.552,82 (6,43)
B	Pertambangan dan Penggalian	228.444,30 (53,27)	232.661,01 (53,05)	231.725,33 (51,95)	220.405,12 (50,02)	212.649,63 (48,44)	216.447,12 (47,81)	218.686,72 (47,06)	233.762,25 (48,03)	222.909,20 (47,17)	227.991,37 (47,07)	235.949,04 (46,72)	248.204,04 (46,17)
C	Industri Pengolahan	87.788,85 (20,47)	86.201,39 (19,66)	86.590,09 (19,41)	88.889,32 (20,17)	93.740,63 (21,35)	96.364,83 (21,28)	96.797,54 (20,83)	96.824,49 (19,89)	93.909,77 (19,90)	96.208,52 (19,86)	99.651,98 (19,70)	104.339,85 (19,41)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	125,93 (0,03)	130,41 (0,03)	158,12 (0,04)	206,24 (0,05)	223,40 (0,05)	238,53 (0,05)	261,83 (0,06)	284,53 (0,06)	317,37 (0,07)	324,79 (0,07)	337,25 (0,06)	391,37 (0,07)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	166,12 (0,04)	176,53 (0,04)	184,56 (0,04)	189,29 (0,04)	201,72 (0,04)	218,60 (0,05)	224,57 (0,05)	235,44 (0,05)	247,99 (0,05)	258,50 (0,05)	278,10 (0,06)	299,36 (0,06)
F	Konstruksi	27.778,92 (6,48)	29.142,46 (6,65)	30.987,51 (6,95)	30.696,16 (6,97)	29.510,46 (6,72)	31.211,25 (6,89)	33.754,00 (7,26)	35.682,99 (7,33)	35.601,17 (7,49)	37.005,24 (7,63)	39.887,74 (7,68)	46.190,19 (8,59)



Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.475,40 (4,54)	20.110,60 (4,59)	21.142,44 (4,74)	21.442,37 (4,87)	22.129,06 (5,04)	23.948,48 (5,29)	25.678,99 (5,53)	27.025,57 (5,55)	27.069,91 (5,76)	28.216,90 (5,83)	30.137,13 (5,94)	32.195,96 (5,99)
H	Transportasi dan Pergudangan	10.236,55 (2,39)	10.903,34 (2,49)	11.694,98 (2,62)	12.017,84 (2,73)	12.384,34 (2,82)	13.184,39 (2,91)	13.937,82 (3,00)	14.264,27 (2,93)	13.281,10 (2,83)	13.667,05 (2,83)	15.301,39 (3,00)	16.738,53 (3,11)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.757,40 (0,64)	2.849,54 (0,65)	3.010,52 (0,67)	3.243,58 (0,74)	3.463,69 (0,79)	3.753,59 (0,83)	4.080,24 (0,88)	4.340,12 (0,89)	4.108,42 (0,87)	4.193,40 (0,86)	4.577,47 (0,90)	4.924,09 (0,92)
J	Informasi dan Komunikasi	4.736,41 (1,10)	5.167,74 (1,18)	5.604,48 (1,26)	6.034,02 (1,37)	6.483,81 (1,48)	6.989,14 (1,54)	7.295,36 (1,57)	7.795,54 (1,60)	8.338,49 (1,76)	8.994,26 (1,86)	9.712,24 (1,92)	10.348,22 (1,92)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.399,64 (1,26)	6.175,39 (1,41)	6.324,32 (1,42)	6.454,21 (1,46)	6.572,95 (1,50)	6.525,58 (1,44)	6.751,78 (1,45)	6.966,07 (1,43)	7.137,89 (1,51)	7.320,02 (1,51)	8.012,39 (1,58)	8.951,76 (1,66)
L	Real Estate	3.240,87 (0,76)	3.507,51 (0,80)	3.798,44 (0,85)	3.934,65 (0,89)	3.901,89 (0,89)	4.032,55 (0,89)	4.227,27 (0,91)	4.316,69 (0,89)	4.321,11 (0,91)	4.290,18 (0,89)	4.397,87 (0,88)	4.590,82 (0,85)
M,N	Jasa Perusahaan	763,48 (0,18)	826,27 (0,19)	894,76 (0,20)	861,22 (0,20)	824,64 (0,19)	853,81 (0,19)	896,17 (0,19)	914,13 (0,19)	889,60 (0,19)	911,51 (0,19)	960,34 (0,19)	1.024,14 (0,19)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.829,76 (1,59)	7.153,50 (1,63)	7.818,06 (1,75)	8.102,30 (1,84)	7.837,74 (1,79)	7.565,60 (1,67)	7.941,46 (1,71)	8.252,79 (1,70)	7.951,12 (1,68)	8.108,29 (1,67)	8.727,05 (1,71)	9.427,89 (1,75)
P	Jasa Pendidikan	3.782,29 (0,88)	4.491,03 (1,02)	5.040,44 (1,13)	5.538,44 (1,26)	5.929,25 (1,35)	6.328,42 (1,40)	6.780,28 (1,46)	7.036,31 (1,45)	7.244,72 (1,53)	7.420,37 (1,53)	7.679,67 (1,53)	8.051,04 (1,50)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.679,57 (0,39)	1.765,60 (0,40)	1.924,96 (0,43)	2.127,64 (0,48)	2.325,82 (0,53)	2.492,46 (0,55)	2.691,44 (0,58)	2.864,49 (0,59)	3.404,05 (0,72)	3.861,22 (0,80)	4.048,70 (0,80)	4.321,49 (0,80)
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.680,44 (0,39)	1.734,90 (0,40)	1.862,85 (0,42)	2.027,05 (0,46)	2.185,41 (0,50)	2.326,15 (0,51)	2.548,79 (0,55)	2.750,36 (0,57)	2.634,73 (0,56)	2.665,59 (0,55)	2.851,23 (0,56)	3.078,44 (0,57)
PDRB		428.877,71 (100,00)	438.532,91 (100,00)	446.029,05 (100,00)	440.676,36 (100,00)	439.003,83 (100,00)	452.741,91 (100,00)	464.694,43 (100,00)	486.712,24 (100,00)	472.393,33 (100,00)	484.438,88 (100,00)	506.158,91 (100,00)	537.630,01 (100,00)

Sumber: BPS Kaltim, 2024

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 38 persen dari total PDRB Kaltim. Namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Mulai tahun 2018, kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi Lapangan Usaha pertanian yang sempat turun tipis pada tahun yang sama. Namun semenjak 2020, khususnya karena masa Pandemi COVID-19, maka terlihat penurunan kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian hingga menjadi 41,29 persen dan terjadi peningkatan cukup signifikan pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan dan Lapangan Usaha Pertanian. Dengan pulihnya perekonomian pasca Covid-19, kontribusi Lapangan Usaha pertambangan dan penggalian kembali meningkat tajam hingga mencapai 53,24 persen di tahun 2022, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 hingga menjadi 42,83 persen. Hal yang menarik diperlihatkan dengan meningkatnya kontribusi sektor-sektor lainnya, termasuk juga Kategori Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Pertanian seiring dengan penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian tersebut.



**Gambar II.40**  
**Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2005-2023 (%)**

Sumber: BPS Kaltim, 2024

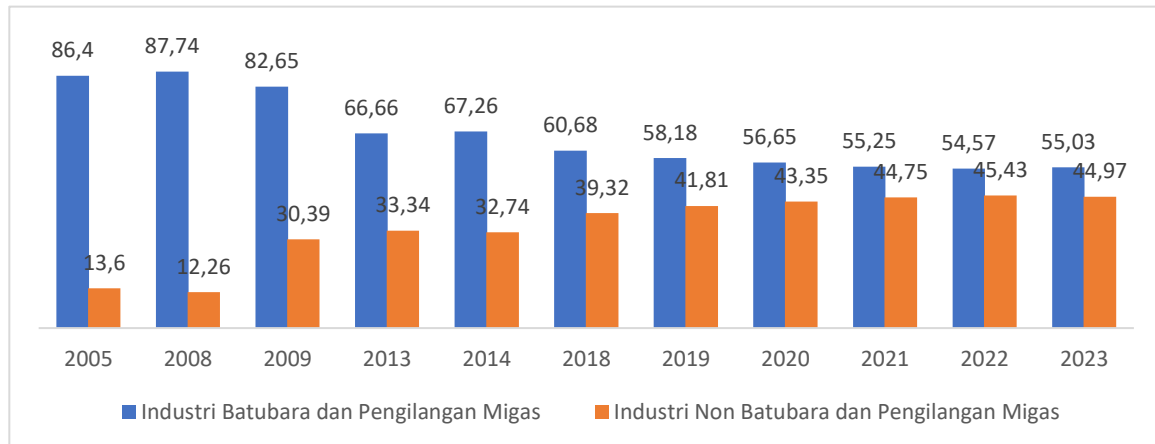
Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka transformasi ekonomi baik secara horizontal yaitu menumbuhkan dan mendorong lapangan usaha ekonomi baru maupun transformasi vertikal melalui upaya hilirisasi/industrialisasi sangat tepat untuk dilakukan. Lapangan Usaha yang dapat didorong diantaranya Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kaltim secara rata-rata dari tahun 2005-2023 sebesar 8,05 persen. Capaian ini tentunya masih sangat kecil. Maka diperlukan dorongan besar untuk melakukan perubahan yang besar pula, terutama diarahkan pada inovasi pengembangan komoditas. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian terutama pada sub tanaman perkebunan.

Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun. Komoditas perkebunan tahunan yang dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara. Komoditas dalam sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian, namun untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan, dibutuhkan *supporting data* yang lengkap, akurat dan valid.

Perlu diketahui bahwa *share* Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih relatif kecil, pada tahun 2023 kontribusinya hanya sebesar 5,78 persen.

Lapangan Usaha perindustrian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di Kalimantan Timur setelah Lapangan Usaha pertambangan dan penggalian. Berdasarkan sub sektornya, Sub sektor industri batubara dan pengilangan migas memiliki peranan terbesar dalam Lapangan Usaha industri pengolahan. Selama periode 2005 – 2020 kontribusi Lapangan Usaha industri pengolahan terus meningkat hingga mencapai 19,02 persen, namun

pada periode 2020 – 2023 terjadi penurunan setiap tahunnya yakni menjadi 9,75 persen pada tahun 2023.



**Gambar II.41**  
**Kontribusi Industri Migas dan Industri Non Migas**  
**Tahun 2005-2023 (persen)**

*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024*

Struktur yang menyusun lapangan usaha industri pengolahan migas berasal dari Industri Batubara dan Pengilangan Migas, sedangkan industri pengolahan non migas berasal dari Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Makanan dan Minuman serta Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya. Selama periode 2005 – 2023 kontribusi industri pengolahan migas maupun non migas mengalami fluktuasi, dimana Kinerja Industri Batubara dan Pengilangan Migas perlahan mengalami penurunan dan Kinerja industri non batubara dan pengilangan migas mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2009 mulai terlihat hasilnya.



**Tabel II.36**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran**  
**Tahun 2012-2023 (Miliar Rupiah)**

No	Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	65.493,37	73.396,42	80.180,29	86.786,22	91.536,85	96.807,32	102.584,20	109.767,66	110.821,28	115.053,40	125.598,38	137.324,91
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.301,07	1.766,36	2.090,68	2.460,19	2.439,03	2.629,57	2.958,20	3.239,36	3.248,32	3.419,27	3.689,59	4.063,77
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	17.342,81	20.281,62	23.523,17	25.949,72	23.578,34	21.596,79	23.760,62	26.360,55	27.129,17	28.315,36	31.283,12	45.261,36
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	124.671,83	129.083,65	139.830,35	145.766,48	144.654,38	154.503,23	173.474,79	188.079,94	188.258,10	209.951,00	232.491,11	274.469,61
5	Perubahan Inventori	8.232,43	9.842,94	12.344,42	5.771,87	1.922,89	1.757,93	1.613,95	768,36	1.228,65	383,61	401,29	562,28
6	Net Ekspor Barang & Jasa	286.360,52	284.760,88	269.546,35	238.370,58	244.748,75	314.608,65	331.106,93	324.264,39	277.058,96	339.461,86	527.869,49	381.889,32
PDRB		503.402,03	519.131,87	527.515,26	505.105,06	508.880,24	591.903,49	635.498,68	652.480,26	607.744,49	696.584,50	921.332,98	843.571,25

Sumber: BPS Kaltim, 2024

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2019-2023 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan karena Pandemi COVID-19, dimana PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 607,32 triliun. Pada tahun 2022 Ekonomi Kalimantan Timur mulai mengalami perbaikan ekonomi yang mencapai Rp 921,33 triliun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2023, nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran telah mencapai Rp 843,57 triliun, dengan net ekspor barang dan jasa yang menjadi komponen pengeluaran terbesar.





**Tabel II.37**  
**Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023**

No	Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13,01	14,14	15,20	17,18	17,99	16,36	16,14	16,82	18,23	16,52	13,66	16,28
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,26	0,34	0,40	0,49	0,48	0,44	0,47	0,50	0,53	0,49	0,40	0,48
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,45	3,91	4,46	5,14	4,63	3,65	3,74	4,04	4,46	4,06	3,48	5,36
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,77	24,87	26,51	28,86	28,43	26,10	27,30	28,83	30,98	30,14	25,30	32,54
5	Perubahan Inventori	1,64	1,90	2,34	1,14	0,38	0,30	0,25	0,12	0,20	0,06	0,04	0,07
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	56,89	54,85	51,10	47,19	48,09	53,15	52,10	49,70	45,59	48,73	57,12	45,27

*Sumber: BPS Kaltim, 2023*

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012-2023 masih didominasi oleh Komponen Net ekspor barang dan jasa. Hal ini tentu saja tidak dapat dipungkiri dimana ekspor barang tambang dan penggalian sangat mendominasi dalam ekspor barang dan jasa. Fenomena tersebut merupakan aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen ekspor barang dan jasa, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi komoditas bahan bakar mineral (batubara, minyak bumi dan gas alam).



**Tabel II.38**

**Nilai PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (Miliar Rp)**

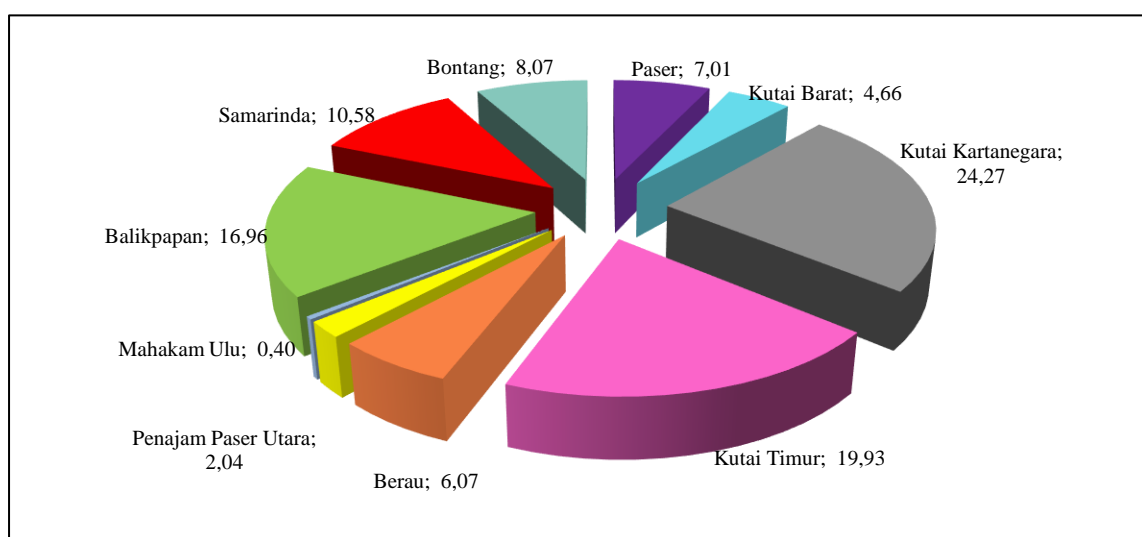
No	KAB/KOTA	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	4.001,25	8.696,80	9.972,21	36.916,27	39.250,90	48.054,12	35.734,75	34.712,07	36.582,32	36.985,15	37.493,83
2	KUBAR	3.217,55	5.269,23	5.899,93	21.956,10	21.442,76	28.353,17	21.253,83	20.644,38	21.509,05	22.536,42	23.848,65
3	KUKAR	59.207,77	103.959,39	90.100,48	161.634,30	156.723,06	161.920,39	126.272,37	120.953,68	124.197,10	128.798,43	135.406,05
4	KUTIM	12.315,30	24.444,70	28.627,18	92.109,09	95.030,36	127.935,40	95.815,41	92.868,68	92.039,29	97.173,42	104.663,19
5	Berau	4.558,22	6.191,02	6.983,76	24.907,14	29.366,86	37.661,47	28.275,57	27.337,09	28.802,65	29.940,84	31.570,05
6	PPU	1.931,63	2.769,21	2.577,86	6.437,39	7.589,46	8.877,83	6.762,58	6.604,62	6.492,68	7.433,57	9.652,65
7	MAHULU	-	-	-	1.526,01	1.778,45	2.511,28	1.767,80	1.763,93	1.786,29	1.802,46	1.852,96
8	Balikpapan	22.353,58	38.527,95	36.521,93	58.695,65	71.622,70	97.699,38	83.793,41	83.034,71	86.831,69	91.142,16	97.060,15
9	Samarinda	13.125,82	18.773,92	21.077,42	41.242,82	48.273,72	63.564,69	45.491,36	45.041,33	46.294,41	49.349,59	53.604,33
10	Bontang	48.165,23	74.738,48	52.664,32	54.511,51	59.055,31	58.785,89	40.427,70	39.320,23	39.949,08	40.930,98	42.633,63

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Dominasi struktur ekonomi kewilayahan didominasi oleh PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dimana Nilai PDRB (ADHK) pada tahun 2022 mencapai Rp 128,81 triliun disusul perekonomian Kutai Timur dan Kota Balikpapan yang masing-masing dengan nilai PDRB (ADHK) sebesar Rp 97,17 triliun dan Rp 91,10 triliun. Ketiga daerah ini memang layak memiliki kontribusi dominan karena memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian yang cukup menjanjikan dalam memberikan sumbangsih nilai PDRB.

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan, salah satu faktor penyebab meningkatnya kinerja ekonomi adalah mulai menurunnya pandemi COVID-19 dan meningkatnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, dari sisi eksternal ekonomi wilayah Kalimantan Timur, khususnya pasar global, meningkatnya rata-rata harga komoditas pangan (tandan buah segar/TBS kelapa sawi dan minyak kelapa sawit/CPO), Harga Batu Bara Acuan (HBA) serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sehingga terdapat peningkatan *demand* terhadap komoditas energi, yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Timur seperti migas dan batubara dan kemudian diikuti peningkatan harga komoditas energi tersebut di pasar internasional.

Berdasarkan peranan kabupaten/kota dalam pembentukan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, maka terlihat bahwa peranan Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 24,27 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 19,93 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur merupakan sentra pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memberikan peran sebesar 16,96 persen sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak dan Kota Samarinda memberikan peran sebesar 10,58 persen sebagai pusat perdagangan dan jasa. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 10 persen.



**Gambar II.41**  
**Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2023 (%)**

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Pada tahun 2023, terdapat 5 (lima) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi terutama pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 79,67 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

Tabel II.39

**Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral  
Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023**

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	67,00	Pertanian	13,56	Industri	5,67
KUBAR	Pertambangan	49,28	Pertanian	13,98	Konstruksi	12,13
KUKAR	Pertambangan	62,55	Pertanian	13,12	Konstruksi	8,89
KUTIM	Pertambangan	79,67	Pertanian	7,60	Industri	3,22
Berau	Pertambangan	58,27	Pertanian	11,26	Perdagangan	6,48
PPU	Konstruksi	40,32	Pertambangan	17,02	Pertanian	15,25
MAHULU	Pertanian	73,56	Konstruksi	7,37	Pertambangan	6,27
Balikpapan	Industri	47,26	Konstruksi	15,67	Transportasi	11,60
Samarinda	Konstruksi	23,10	Perdagangan	16,85	Pertambangan	10,66
Bontang	Industri	78,37	Konstruksi	7,37	Perdagangan	3,39

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 67,00 persen. Sama halnya dengan wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 62,55 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya. Kabupaten lain dengan sektor utama pertambangan juga tercatat di Berau. Adapun daerah yang menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota Bontang dan Kota Balikpapan, sedangkan daerah yang sektor utamanya Pertanian yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel II.40

**Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran  
Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023**

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	62,42	PMTB	19,71	K. Ruta	13,49
KUBAR	Net Ekspor	42,32	PMTB	34,57	K. Ruta	14,22
KUKAR	Net Ekspor	43,17	PMTB	41,52	K. Ruta	11,17
KUTIM	Net Ekspor	70,99	PMTB	20,13	K. Ruta	6,07
Berau	Net Ekspor	64,40	PMTB	19,26	K. Ruta	10,89
PPU	PMTB	72,25	K. Ruta	28,53	K. Pemerintah	12,57
MAHULU	PMTB	31,27	K. Ruta	24,94	Net Ekspor	24,86
Balikpapan	PMTB	37,47	Net Ekspor	35,40	K. Ruta	22,81
Samarinda	PMTB	46,91	K. Ruta	45,16	K. Pemerintah	17,77
Bontang	Net Ekspor	72,17	PMTB	14,53	K. Ruta	10,40

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Pada tahun 2023, dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebanyak enam kabupaten/kota memiliki perekonomian yang didominasi oleh komponen Net Ekspor, sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kabupaten/kota yang perekonomiannya didominasi oleh komponen selain Net ekspor adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh komponen PMTB (investasi) dengan *share* sebesar 72,25 persen.

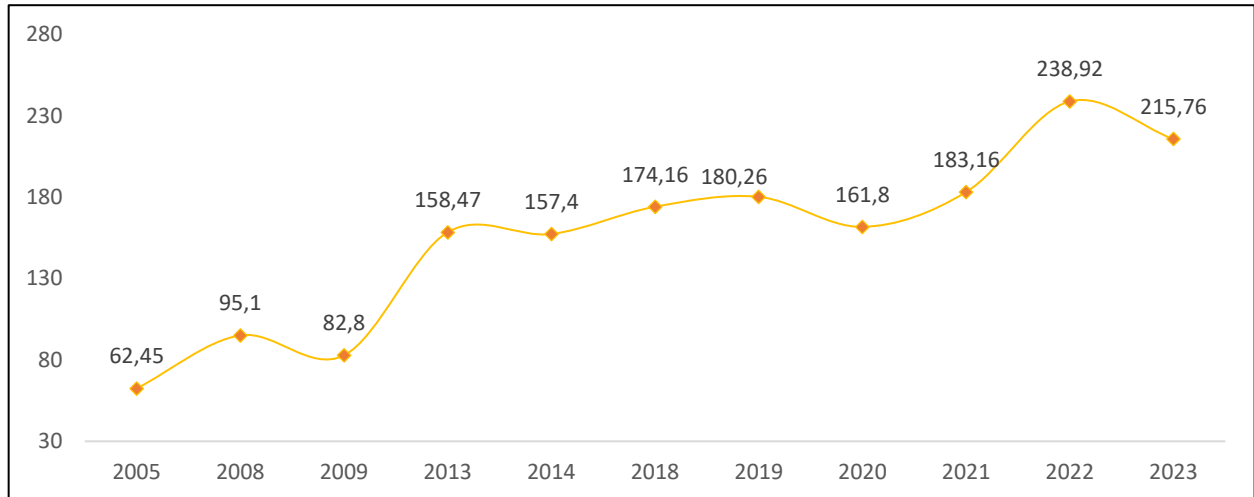
Kabupaten/kota yang porsi terbesarnya merupakan Net Ekspor merupakan wilayah dengan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, seperti batubara, minyak dan gas bumi. Jika dibandingkan porsi komponen Net Ekspor antar wilayah tersebut, yang memiliki nilai *share* Net Ekspor terbesar adalah Kota Bontang, yaitu sebesar 72,17 persen. Kabupaten/Kota lain yang perekonomiannya didominasi olehn komponen Net Ekspor adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

## 2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRB-nya besar dengan jumlah penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut akan besar, demikian pula sebaliknya.

Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2005-2023 cenderung meningkat, namun nilai PDRB per Kapita tersebut mengalami penurunan pada tahun 2009, 2014 dan tahun 2020. PDRB Per Kapita tahun 2020 turun dari sebesar Rp 180,26 juta menjadi Rp 160,11 juta. Hal ini tentu saja disebabkan adanya pengaruh dari Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian daerah, khususnya ekonomi makro. Namun di tahun 2023 nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku kembali meningkat mencapai Rp 215,76

juta. Salah satu sebab turunnya nilai PDRB Per Kapita adalah turunnya nilai harga batu bara dunia.



**Gambar II.42**

**PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (Juta Rupiah)**

*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024*

Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per kapita tertinggi tahun 2023 yakni di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 369,42 juta, Kota Bontang sebesar Rp 366,46 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 270,72 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 87,26 juta dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 100,94 juta.



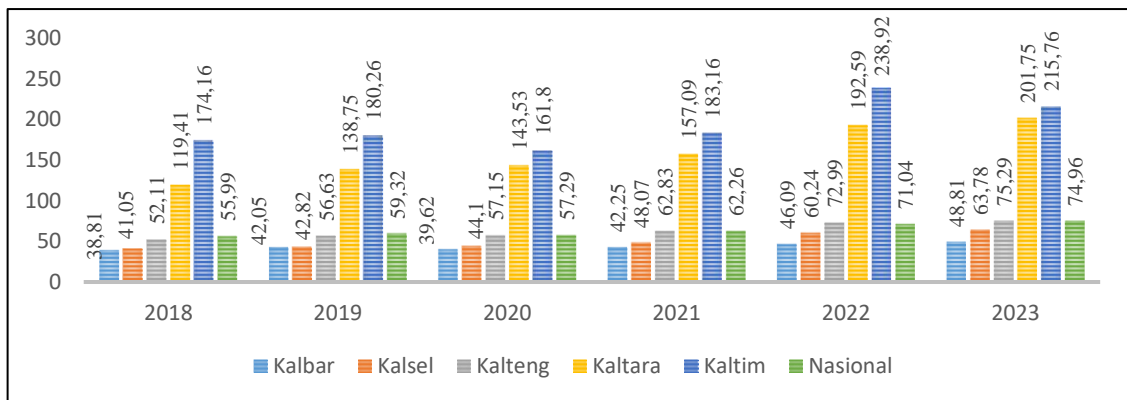
**Tabel II.28**

**PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2012-2023 (Juta Rupiah)**

No	Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	143,76	147,67	153,22	146,05	139,01	160,30	171,64	173,34	157,18	194,12	272,09	208,43
2	KUBAR	150,25	152,45	147,99	146,04	150,51	175,43	192,10	195,40	158,03	184,46	246,65	222,08
3	KUKAR	251,42	236,61	223,75	177,14	173,97	198,41	210,47	212,76	204,50	241,84	325,67	270,72
4	KUTIM	327,10	334,49	309,57	292,20	285,34	346,12	353,74	367,11	268,80	304,16	450,27	369,42
5	Berau	130,01	142,08	144,51	143,99	143,44	161,63	166,27	173,83	143,67	170,34	232,68	198,53
6	PPU	43,49	46,48	49,89	48,32	49,24	53,77	55,70	57,76	50,78	55,85	72,05	87,26
7	MAHULU	59,79	61,28	68,68	76,27	82,11	88,87	95,32	102,46	85,38	90,17	94,51	100,94
8	Balikpapan	100,63	108,18	118,37	120,78	128,12	137,92	151,30	165,69	151,31	160,20	180,96	201,64
9	Samarinda	53,92	57,39	60,57	62,52	63,56	69,29	74,08	79,95	80,36	85,60	99,82	104,97
10	Bontang	358,42	361,03	369,99	358,80	331,04	345,15	337,45	327,06	311,88	320,44	344,56	366,46

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

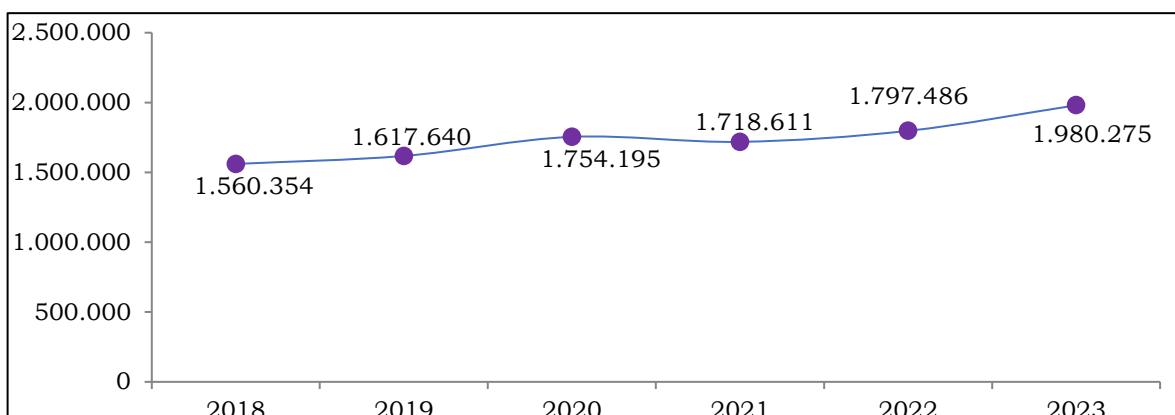
Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2023 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp 215,76 juta. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan yang tertinggi kedua di tingkat nasional setelah DKI Jakarta. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarnya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.

**Gambar II.43****PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan  
Tahun 2018-2023 (Juta Rupiah)**

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2024

**3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama 5 tahun terakhir, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik akan tetapi pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yang mencapai Rp. 1.718.611,- per bulan. Namun di tahun 2023, pengeluaran konsumsi rumah tangga kembali mengalami meningkat mencapai Rp. 1.980.275,-. Penyebab naiknya pengeluaran rata-rata per kapita adalah meningkatnya pengeluaran konsumsi makanan di tahun 2023 yang mencapai Rp 885.069 (44,69 persen) dimana pengeluaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 736.465 (45,06 persen).

**Gambar II.44****Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Provinsi Kalimantan  
Timur Tahun 2018-2023 (Rupiah)**

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024



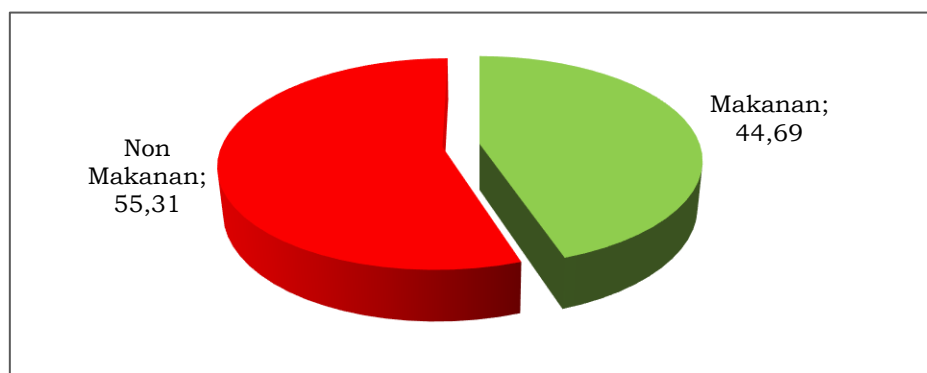
#### 4. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi Rumah Tangga untuk Non Pangan)

Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

**Tabel II.29**  
**Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	857.449	893.217	963.725	982.146	984.038	885.069
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	1.560.354	1.617.640	1.754.195	1.718.611	1.797.486	1.980.275
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	54,95	55,22	54,94	57,15	54,75	55,31

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024



**Gambar II.45**  
**Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

#### 5. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pentingnya peran koperasi dan UKM Koperasi dan UKM ditujukan untuk membantu pemberdayaan perekonomian masyarakat terutama para pengusaha mikro kecil dan menengah. Pembangunan dan pembinaan Koperasi dan UKM telah menunjukkan dampak yang positif, meskipun belum optimal mengubah struktur perekonomian daerah. Pentingnya peran

koperasi dan UKM di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa Koperasi dan UKM merupakan bentuk perekonomian kerakyatan di Kalimantan Timur. Adapun jumlah koperasi aktif tahun 2023 adalah sebanyak 2.995 Koperasi dari jumlah koperasi sebanyak 6.197 Koperasi. Secara rinci perkembangan aktivitas koperasi dijelaskan melalui tabel berikut:

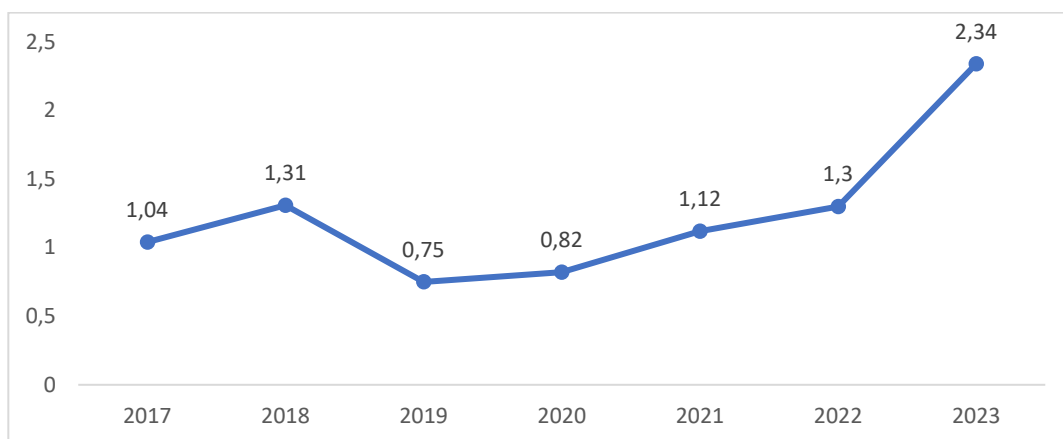
**Tabel II.30**  
**Perkembangan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018–2023**

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Aktif	3.428	2.832	2.751	2.844	2.885	2.995
2	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	657	583	351	457	446	646
3	Jumlah Seluruh Koperasi	5.406	5.664	5.619	5.676	5.809	6.197
4	Jumlah Anggota Koperasi	86.297	82.054	57.381	68.580	94.882	164.451

*Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2024*

Pada tabel diatas terlihat jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dan jumlah seluruh koperasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pengurus koperasi dalam pertanggung jawaban koperasi. Disamping itu masih rendahnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 tahun sekali atau paling lambat 6 bulan setelah tutup buku. Pelaksanaan RAT bagi koperasi menjadi syarat untuk menjadi koperasi yang bisa dikatakan aktif dan sehat.

Jumlah anggota koperasi di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, kondisi tahun 2020 mengalami penurunan jumlah anggota yakni 57.381 orang. Secara umum kendala penurunan di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19, namun kendala lain yang dihadapi adalah berkurangnya modal, berkurangnya pelanggan, dan harga produk yang menurun. Hal ini juga memberi pengaruh pada jumlah volume usaha koperasi yang tergambar pada gambar berikut.

**Gambar II.46****Volume Usaha Koperasi Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2017–2023 (Triliun Rupiah)**

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2024

Jumlah volume usaha koperasi di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah volume usaha koperasi tahun 2019 dan 2020 berada di bawah 1 Triliun Rupiah. Tahun 2023 jumlah volume usaha koperasi kembali pulih mencapai 2,34 Triliun Rupiah yang diikuti dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif, jumlah anggota koperasi, dan koperasi yang melaksanakan RAT.

Sementara Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pergerakan perekonomian daerah khususnya perekonomian masyarakat. Usaha kecil dan menengah merupakan usaha yang mampu bertahan lebih baik di saat pandemi COVID-19. Secara rinci jumlah UKM berdasarkan jenis usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel II.31****Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten/Kota  
Tahun 2023**

No.	Kab/Kota	Industri			Dagang	Jasa	Total
		Kuliner	Industri Pengolahan	Kerajinan			
1	Paser	10.331	702	47	28.161	6.430	45.671
2	KUBAR	1.348	-	1.164	9.022	2.443	13.977
3	KUKAR	12.852	934	130	45.998	514	60.428
4	KUTIM	11.221	1.204	30	336	875	13.666
5	Berau	4.509	62	53	9.467	851	14.942
6	PPU	3.806	489	38	7.017	1.879	13.229
7	MAHULU	37	-	13	446	60	556
8	Balikpapan	8.528	2.488	121	15.297	10.341	36.775
9	Samarinda	45.653	1.522	591	44.851	11.107	103.724
10	Bontang	8.558	3.788	115	15.905	4.711	33.077
	<b>Jumlah</b>	<b>106.843</b>	<b>11.189</b>	<b>2.302</b>	<b>176.500</b>	<b>39.211</b>	<b>336.045</b>

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2024

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 sebanyak 336.045 UMKM. Jumlah terbanyak berada di Kota Samarinda yakni 103.724 UMKM, sedangkan terbanyak kedua adalah Kabupaten Paser sebanyak 45.671 UMKM. Jenis usaha UMKM yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur beragam, mulai dari kuliner, industri pengolahan, industri kerajinan, perdagangan dan jasa. Jenis usaha didominasi pada usaha dagang sebanyak 176.500 UMKM dan usaha kuliner sebanyak 106.843 UMKM. Banyaknya usaha dagang dan kuliner ini tidak dipungkiri karena kemudahan dalam penyediaan modal dan banyak peminat. Sedangkan jenis usaha paling sedikit adalah industri kerajinan yakni 2.302 UMKM.

## 6. Penanaman Modal

Kenaikan jumlah proyek investasi merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.

**Tabel II.32**  
**Jumlah Proyek PMDN/PMA Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2005-2023**

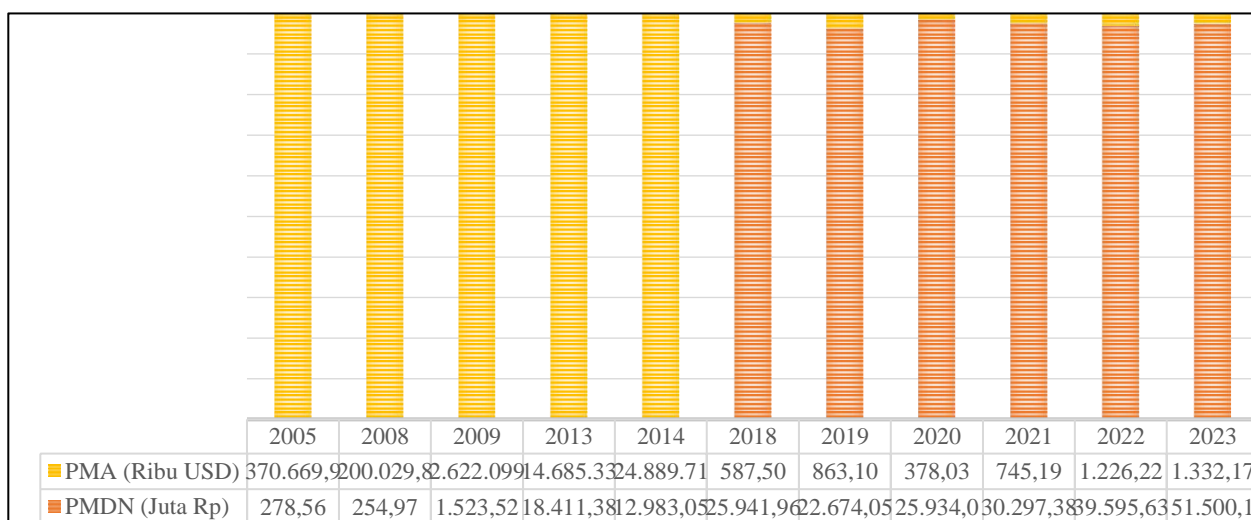
Tahun	PMDN	PMA	Total
2005	9	7	16
2008	4	13	17
2009	8	30	38
2013	103	351	454
2014	60	297	357
2018	520	513	1.033
2019	2.227	903	3.130
2020	3.924	778	4.702
2021	9.291	1.034	10.325
2022	6.706	1.055	7.711
2023	15.490	1.991	17.481

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2024

Dilihat dari total jumlah proyek PMDN/PMA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah proyek PMDN/PMA di Kalimantan Timur sebanyak 10.325 proyek, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya sebanyak 4.702 proyek. Kenaikan jumlah proyek pada investasi Dalam Negeri sebesar 5.367 proyek dan kenaikan proyek pada investasi Asing sebesar 256 proyek. Peningkatan jumlah proyek baik penanaman modal dalam negeri maupun asing ini

diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif pada nilai investasi sehingga mampu menggerakkan perekonomian dengan lebih baik. Total proyek pada tahun 2022 menurun menjadi 7.711 proyek, namun kembali meningkat pada tahun 2023 dengan 15.490 proyek PMDN dan 1.991 proyek PMA. Proyek pada investasi Dalam Negeri dominan berlokasi di Kota Balikpapan dengan jumlah 4.812 proyek dan di Kota Samarinda dengan jumlah 3.856 proyek. Begitu juga untuk proyek investasi asing dominan berlokasi di Kota Balikpapan dengan jumlah 802 proyek.

Nilai realisasi investasi dalam negeri pada tahun 2023 mencapai Rp 51,5 triliun dengan 5 (lima) sektor utama yakni Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi (36,52%), Pertambangan (31,62%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (8,98%), Industri Makanan (4,88%), dan Transportasi, Gudang & Komunikasi (3,42%). Selanjutnya nilai realisasi investasi asing mencapai US\$ 1.332,71 juta dengan 5 (lima) sektor utama yaitu Pertambangan (29,42%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (14,63%), Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (12,95%), Industri Mineral Non Logam (11,63%), dan Transportasi, Gudang & Komunikasi (10,53%). Dengan adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur tentunya akan membawa pengaruh yang baik terhadap nilai investasi di kemudian hari dikarenakan adanya peningkatan aktivitas investasi oleh investor.



**Gambar II.47**  
**Nilai Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2005-2023**

*Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2024*



Kalimantan Timur telah dikenal sebagai provinsi yang punya banyak kekayaan alam, mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, maupun sektor lainnya seperti Agrikultur, Pariwisata dan Industri pengolahan. Hal ini menjadi daya tarik investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal di Kalimantan Timur baik pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Di samping itu, kehadiran IKN Nusantara tentu menjadi potensi yang baik untuk investasi ke depan.

Berdasarkan Realisasi Investasi PMDN, mulai tahun 2005-2023 sektor pertambangan merupakan sektor yang paling dominan dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, namun sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia sektor yang paling dominan di tahun 2020 adalah sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi yang mencapai Rp 7.965,22 miliar dan meningkat tajam di tahun 2021 hingga mencapai Rp 15.145,34 miliar. Investasi sektor pertambangan juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai Rp 5.859,33 miliar meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3.818,59 miliar diikuti sektor Tanaman pangan dan perkebunan yang mencapai Rp 4.828,00 miliar. Mulai pada tahun 2022 sektor pertambangan kembali menjadi sektor paling dominan mencapai Rp 15.012,38 miliar dan terus meningkat dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri mencapai yakni Rp 16.497,94 miliar. Sektor lain yang juga berkontribusi cukup besar adalah sektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi mencapai Rp 19.052,13 miliar, serta sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan mencapai Rp 4.686,63 miliar. Sektor Pertambangan kembali mendominasi dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di tahun 2023 mencapai Rp 16,50 miliar. Peningkatan ini terjadi karena adanya momentum membaiknya harga komoditas batubara pada level tinggi dan menjadi faktor pendorong investasi di sektor pertambangan.



**Tabel II.33**  
**Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (Juta Rupiah)**

No.	Sektor Usaha	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I.	Sektor Primer											
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	24.504,60	.	8.405,50	1.138.136,70	3.793.223,40	3.747.269,70	4.278.148,30	4.738.083,60	4.828.002,20	3.650.817,60	4.686.630,20
2.	Kehutanan	31.340,00	.	.	.	.	602.835,40	283.625	125.549,60	73.973,60	346.853,60	996.226,90
3.	Perikanan	.	.	.	.	.	.	.	3,00	0,50	2,00	-
4.	Pertambangan	.	.	.	8.596,10	328.865,50	12.559.385,40	8.712.257,70	3.818.587,60	5.859.330,30	15.012.379,10	16.497.941,30
II.	Sektor Sekunder											-
1.	Industri Makanan	.	1.300,00	.	4.346,90	73.074,10	1.687.495,70	569.890,60	1.397.339,40	671.841,30	2.390.781,50	2.545.477,20
2.	Industri Tekstil	.	.	.	.	.	.	.	-	2,00	431,00	848,00
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-
4.	Industri Kayu	222.716,00	37.853,38	31.300,00	197.684,90	487.151,60	264.104,30	350.224	97.509,90	5.996,00	24.001,70	356.202,10
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	.	.	10.000,00	.	.	.	0	5,00	500,00	-
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	.	.	17.283,00	1.824.619,00	3.155.561,90	1.034,70	444.145,60	7.965.221,90	15.145.338,40	14.914.625,40	19.052.132,50
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	.	.	.	.	.	.	9.000	70,80	-	7.209,90	2.301,40
8.	Industri Mineral Non-Logam	.	.	.	.	175,30	17.919,90	292.133,10	95,00	2.351	18.184,90	48.549,30
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	.	.	.	.	.	.	.	5.000	10,30	521.796,50	1.013.785,00
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	.	.	.	.	.	.	.	0	39,50	4.381,50	69.421,90
11.	Industri Alat Angkutan dan	.	.	.	.	.	7.620	151.706,50	3.626,30	9.221,80	21.487,30	329.353,20



No.	Sektor Usaha	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Transportasi Lainnya											
12.	Industri lainnya	.	.	.	.	.	.	509,50	70.348,60	5.200,50	48.889,00	14.923,00
III.	Sektor Tersier											
1.	Listrik, Gas, dan Air	.	214.820,18	600,00	1.283.401,40	2.474.559,40	2.559.556,90	2.021.363,60	759.122,70	298.896,80	165.780,50	713.903,90
2.	Konstruksi	.	.	.	.	.	3.204.289,50	1.223.384,70	5.777.776,90	113.413,70	55.394,60	460.326,10
3.	Perdagangan dan Reparasi	.	.	.	1.147.080,40	-	82.557,40	341.327,60	218.379,90	295.260,00	687.631,40	937.115,20
4.	Hotel dan Restoran	.	.	.	.	.	480	1.086.261,80	25.127	55.384,90	199.549,50	356.393,40
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	.	.	.	60.861,30	1.916.276,50	165.403,80	940.606,30	459.299,20	1.503.072,30	573.564,20	1.785.135,10
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	.	.	.	.	.	26.874,40	345.944,10	53.687,40	840.351,30	286.654,80	1.168.443,70
7.	Jasa Lainnya	.	1.000,00	1.465.926,90	12.746.640,60	754.162,00	1.015.135	1.623.524,70	419.150	589.690,80	664.717,90	1.136.586,30
Total		278.560,60	254.973,56	1.523.515,40	18.411.377,30	12.983.049,70	25.941.962,10	22.674.053,10	25.934.008,80	30.297.382,20	39.595.633,00	52.171.695,70

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2024





Disamping itu pada realisasi investasi PMA, lapangan usaha pertambangan yang memiliki peranan terbesar di Kalimantan Timur tahun 2005-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 nilai investasi PMA lapangan usaha pertambangan mencapai US\$ 392.072,60 Ribu. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan secara signifikan tahun 2023 yaitu Transportasi, Gudang dan Komunikasi yang mencapai US\$ 140.332,00 Ribu.

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan masuknya investasi asing ke Kalimantan Timur. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing ini juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Selain itu, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi baru yang dikembangkan serta tidak menutup kemungkinan pula para investor asing akan bekerja sama dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional.



**Tabel II.34**  
**Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023 (US\$)**

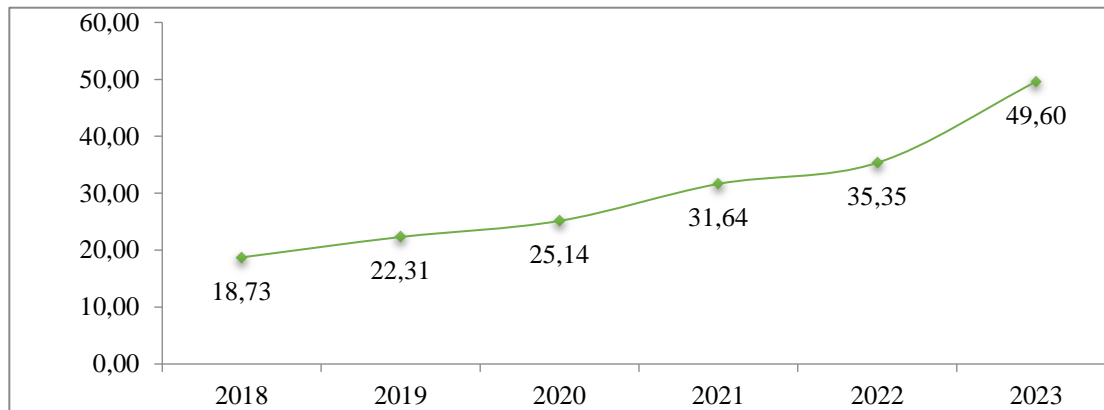
No	Sektor Usaha	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I.</b>	<b>Sektor Primer</b>											
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	.	.	.	406.404.800	470.026.400	64.114.100	185.796.300	67.781.500	58.097.000	190.013.892	195.033.000
2.	Kehutanan	.	.	.		6.050.000	657.100	2.751.700	2.071.400	2.330.000	37.276.491	46.304.700
3.	Perikanan	.	.	.			135.500	.	-	-	-	-
4.	Pertambangan	.	.	.	824.313.750	1.142.308.900	188.763.000	306.457.800	167.858.400	252.125.200	515.919.940	392.072.600
<b>II.</b>	<b>Sektor Sekunder</b>			.								
1.	Industri Makanan	.	.	.	14.006.110	103.197.300	118.386.600	14.264.600	41.235.500	242.430.000	96.106.592	119.900.400
2.	Industri Tekstil	.	.	.			.	.	-	-	-	-
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	.	.			.	.	-	-	-	-
4.	Industri Kayu	.	.	.		8.055.000	6.600	33.300	-	15.291.200	1.811.899	7.703.400
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	.	.			.	.	-	-	-	13.500
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	.	.	95.960	21.826.100	52.386.300	760.700	60.000	32.861.600	66.411.000	60.176.592	59.777.400
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	.	.	.	146.350	2.389.200	256.700	561.100	986.400	990.600	136.400	128.200
8.	Industri Mineral Non-Logam	.	.	.	18.160	1.455.300	.	15.809.600	24.840.000	40.020.700	216.016.282	155.023.600
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	.	.	.			22.600	1.879.400	276.400	24.600	93.934.693	172.595.100
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	.	.	.			253.200	1.533.400	3.550.700	1.084.700	1.967.500	1.455.400
11.	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	.	.	.	400.000		.	43.800	-	-	10.091.596	54.300
12.	Industri lainnya	.	.	.	2.200	200.000	526.100	134.600	-	-	-	285.800
<b>III.</b>	<b>Sektor Tersier</b>											



No	Sektor Usaha	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Listrik, Gas, dan Air	.	.	350.000	5.808.600		53.012.000	280.607.900	278.800	-	-	2.274.400
2.	Konstruksi	.	.	.			5.093.100	.	-	-	-	177.900
3.	Perdagangan dan Reparasi	.	4.200.000	6.688.190	8.349.180	39.065.050	3.738.700	4.258.100	5.618.500	3.804.800	9.497.500	15.375.800
4.	Hotel dan Restoran	.	.	.	212.900		2.245.800	1.297.000	791.000	586.000	3.682.299	7.105.400
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	.	.	.	50.998.080	194.632.200	86.566.000	14.847.700	29.415.000	52.588.300	16.726.698	140.322.000
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	.	.	.	672.490	687.100	301.200	146.900	221.300	9.379.800	6.288.898	5.266.000
7.	Jasa Lainnya	38.013.530	16.301.160	245.915.450	52.250.280	125.212.351	62.662.600	32.616.200	240.700	26.300	6.574.500	11.841.700
Total		38.013.530	20.501.160	253.049.600	1.385.409.000	2.145.665.101	587.501.600	863.099.400	378.027.200	745.190.200	1.266.221.770	1.332.710.600

Sumber: DPMTSP Provinsi KALTIM, 2024

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan pada tahun 2017 yang mencapai Rp 11,42 triliun dan mengalami peningkatan di tahun berikutnya hingga mencapai Rp 49,60 triliun pada tahun 2023.



**Gambar II.48**

**Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 (Triliun Rp)**

*Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2024*

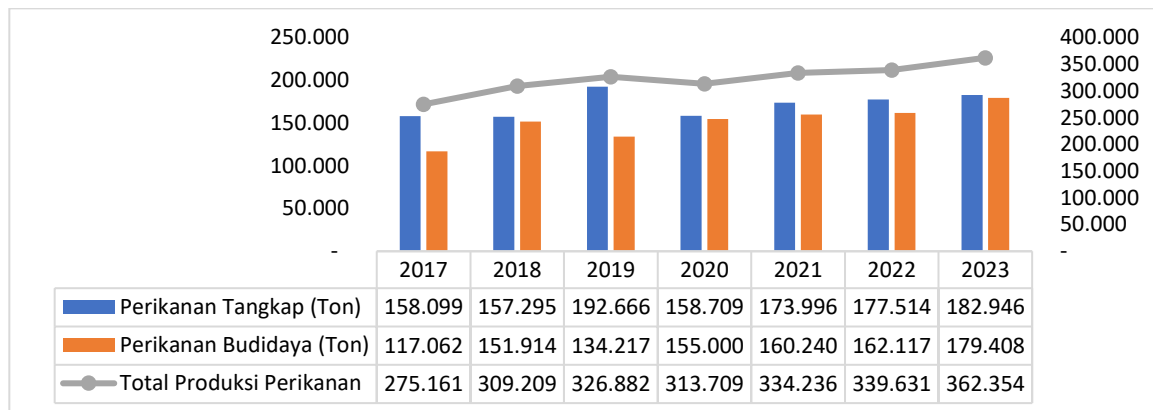
Nilai investasi sektor non migas dan batubara tahun 2021 yang mencapai Rp 31,64 triliun ini terdiri dari investasi PMDN sebesar Rp 24,44 triliun dan PMA sebesar Rp 7,2 triliun. Peningkatan nilai investasi ini dipengaruhi oleh masih tingginya angka kasus Covid-19 di tahun 2021 sehingga kontribusi sektor usaha Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni mencapai Rp 15,145 triliun. Pada tahun 2023 Nilai Investasi sektor non migas dan batubara mencapai Rp 49,60 triliun dan diharapkan ke depannya investasi sektor non migas dan batubara lebih maksimal.

## **7. Kelautan dan Perikanan**

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas baik laut seluas 3,99 juta Ha maupun perairan darat dengan potensi perikanan yang juga sangat besar. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan.

Produksi perikanan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Dalam pencapaian produksi perikanan di Kalimantan Timur masih ditemui permasalahan yang perlu mendapat perhatian yakni tingginya harga pakan mengakibatkan beberapa pelaku

usaha menurunkan produksinya atau berhenti produksi sementara waktu, masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan, serta sistem pemasaran dan peningkatan nilai tambah produk perikanan.



**Gambar II.49**

**Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017–2023**

*Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2024 (diolah)*

**8. Pariwisata**

Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 - 2023 mulai mengalami peningkatan setelah sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat terjadinya wabah COVID – 19 yang masuk ke Indonesia tahun 2020. Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara terjadi karena pulihnya perekonomian, banyaknya pelaksanaan event, dan pembangunan IKN. Untuk capaian jumlah kunjungan wisatawan (wisman – wisnus) pada tahun 2023 sebanyak 9.242.912 orang. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat hambatan dalam analisis pasar promosi pariwisata. Diharapkan dengan analisis tersebut promosi pariwisata bisa lebih terarahkan.

**Tabel II.35**

**Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2018–2023**

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Balikpapan	2.837.034	2.878.561	1.072.569	1.431.862	1.748.085	2.534.015
2	Kota Samarinda	2.036.236	1.643.536	654.984	1.119.174	2.338.341	3.119.213
3	Kota Bontang	409.319	472.037	215.029	156.212	270.167	305.924
4	Kab Paser	39.566	7.501	32.965	89.931	118.045	105.838
5	Kab Penajam Paser Utara	86.375	57.576	20.263	114.869	164.532	859.041
6	Kab Kutai Kartanegara	1.715.660	1.394.171	692.689	617.018	1.041.254	1.530.444
7	Kab Kutai Timur	36.717	70.560	40.129	72.438	107.006	212.959
8	Kab Kutai Barat	32.205	56.125	25.929	10.871	103.435	145.795

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Kab Mahulu	3.464	3.058	2.596	5.590	7.789	8.757
10	Kab Berau	283.294	292.692	127.176	141.398	397.054	420.926
Jumlah Se-Kalimantan Timur		7.479.870	6.875.817	2.884.329	3.759.363	6.295.708	9.242.912

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi KALTIM, 2024

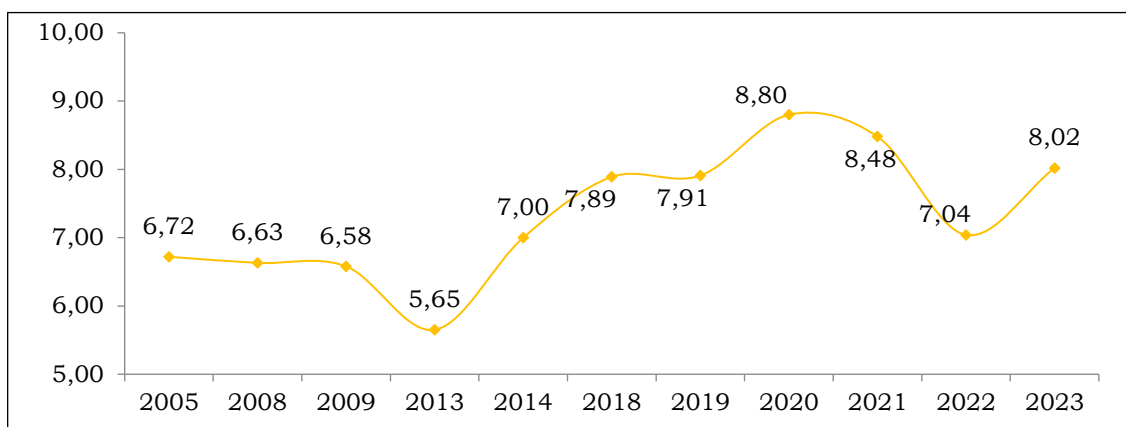
**Tabel II.36**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2018–2023**

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Balikpapan	47.040	56.577	16.510	17.458	11.704	24.511
2	Kota Samarinda	4.835	2.735	2.075	444	1.418	6.818
3	Kota Bontang	174	168	-	-	1.450	1.564
4	Kab Paser	431	-	-	1	1	28
5	Kab Penajam Paser Utara	135	8	26	-	2	40
6	Kab Kutai Kartanegara	4.557	3.872	557	46	632	1.530
7	Kab Kutai Timur	2.340	345	365	6	152	805
8	Kab Kutai Barat	279	273	28	5	243	158
9	Kab Mahulu	47	-	5	-	622	708
10	Kab Berau	2.586	8.323	220	85	283	1.666
Jumlah Se-Kalimantan Timur		62,424	72.301	19.786	18.045	10.767	16.507

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi KALTIM, 2024

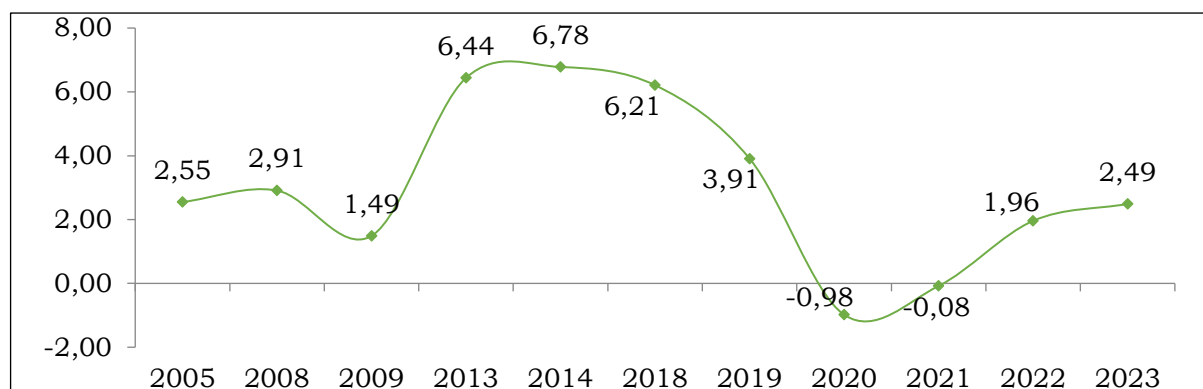
## 9. Pertanian

Kontribusi sektor Pertanian Arti Luas Tahun 2005-2023 secara umum mengalami tren fluktuasi, dimana tercatat pada Tahun 2023 kontribusi sektor mencapai 8,14%. Kontribusi sektor pertanian arti luas di Kaltim didominasi oleh kinerja sub sektor Tanaman Perkebunan dan sub sektor Perikanan. Kedua kontributor tersebut sangat dipengaruhi oleh harga komoditi di pasar dan biaya produksi. Sub sektor Tanaman Perkebunan pada tahun 2022 terjadi penurunan pendapatan di tingkat petani dikarenakan adanya pelarangan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang mengakibatkan hasil panen petani tidak terserap dan berimbas pada harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani turun signifikan. Untuk Sub sektor perikanan sangat dipengaruhi oleh biaya produksi dan iklim. Selain itu usaha pertambangan batu bara sejak 2021 sudah kembali bangkit, yang mengakibatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB belum dapat menyaingi kecepatan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian. Sejalan dengan hal tersebut, sektor pertanian di Kalimantan Timur masih belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal terutama pada tingkat produksi dan produktivitas komoditas pertanian.

**Gambar II.50****Kontribusi Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2005-2023 (%)**

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Dari sisi Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian Arti Luas dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Tercatat pada tahun 2020 dan tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Sub sektor Pertanian Arti Luas mengalami pertumbuhan negatif yaitu pada angka  $-0,98$  dan  $-0,08\%$ . Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yang berkontraksi cukup pada tahun 2020 yaitu sebesar  $-6,28$  dan kontraksi yang cukup dalam juga terjadi pada sub sektor tanaman pangan pada tahun 2021 yaitu sebesar  $-4,48$ . Namun hal menggembirakan terjadi pada tahun 2023, dimana Laju Pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian telah mampu tumbuh positif sebesar  $1,73$  persen, dengan sub sektor perkebunan yang menjadi penopang utamanya.

**Gambar II.51****Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2005-2023 (%)**

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering

(ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Secara umum, terjadi penurunan produktivitas padi selama empat tahun terakhir dimana pada tahun 2018 mencapai 4,05 ton per hektar dan menurun hingga 3,77 ton/ha pada tahun 2023. Selain karena penurunan produksi, menurunnya produktivitas ini juga ternyata dikarenakan fluktuasinya luas panen secara umum. Beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi salah satunya adalah pemberian bantuan saprodi pertanian kepada petani dan Kegiatan Gerakan Tanam yang menjadi motivasi bagi petani untuk menanam padi. Namun program tersebut belum terlalu efektif untuk mewujudkan swasembada pangan.

**Tabel II.37**  
**Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023**

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2018	64.961	262.774	4,05
2019	69.708	253.818	3,64
2020	73.568	262.435	3,57
2021	66.269	244.678	3,69
2022	64.970	239.425	3,69
2023	57.143	215.291	3,77

*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024*

## 10. Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 (lima) komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Lima komoditas unggulan itu adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, dan lada. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investor dari luar daerah adalah kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,35 juta Ha dengan tingkat produksi mencapai 21,03 juta ton. Kemudian komoditas yang juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian adalah tanaman karet dengan luas tanam saat ini mencapai 125.258 Ha dan produksi sebesar 55,50 ribu ton pada Tahun 2023. Luasan dan Produksi ini meningkat dari tahun



sebelumnya dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan pada Tahun 2023 sehingga membangkitkan semangat pekebun untuk berbudidaya dan memanen hasil budidayanya. Namun peningkatan produksi perkebunan di Kalimantan Timur masih dihadapkan pada tantangan berupa mahalannya harga pupuk yang berpengaruh pada produksi tanaman. Serta masih adanya tanaman tua/rusak belum dilakukan peremajaan maupun rehabilitasi.

**Tabel II.38**  
**Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

No.	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Karet	125.258	55.552	1,04
2.	Kelapa	19.806	7.520	0,49
3.	Kopi	1.278	154	0,32
4.	Lada	8.111	5.188	0,88
5.	Kakao	7.806	2.542	0,62
6.	Kelapa Sawit	1.359.531	21.036.260	18,04

*Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2024*

Secara umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki perkebunan Kelapa Sawit dengan Kabupaten Kutai Timur sebagai kabupaten yang memiliki produksi terbanyak yaitu sebanyak 7,87 juta ton pada tahun 2023, Sedangkan Kabupaten Kutai Barat merupakan penghasil jenis karet terbesar di Kalimantan Timur sebanyak 35,10 Ribu Ton. Untuk tanaman lada, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kabupaten dengan penghasil kelapa terbesar dibanding kabupaten/kota lain dengan jumlah produksi sebesar 2.619 ton dan Kabupaten Kutai Timur dengan produksi tanaman kakao terbesar yaitu 1.456 ton. Dengan tingkat produksi yang ada, akan terus dilakukan pengembangan salah satunya melalui pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi sehingga kegiatan perkebunan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi namun akan dapat terintegrasi dari hulu – hilir. Dimana pengadaan benih/bibit, pengolahan/produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir diintegrasikan dan dikelola oleh korporasi petani sedemikian rupa sehingga nilai tambah terbesar dari kegiatan pertanian bisa dinikmati pekebun yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun.

**Tabel II.39**  
**Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), Tahun 2023**

No	Kab/Kota	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao
1	Paser	2.606.069	622	9.705	54	6
2	KUBAR	1.233.998	218	35.107	28	21
3	KUKAR	4.295.829	2.619	1.100	-	41
4	KUTIM	7.876.111	679	1.557	59	1.456
5	Berau	3.941.991	1.794	100	9	725
6	PPU	561.087	1.022	2.157	1	1
7	MAHULU	178.881	4	-	-	289
8	Balikpapan	212	562	3.626	3	1
9	Samarinda	16.360	306	599	-	1
10	Bontang	440	17	-	-	-

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2024

Namun jika dilihat dari pola pengelolaannya dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat masih jauh jika dibandingkan dengan produktivitas komoditi perkebunan yang dikelola oleh perusahaan/swasta. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pendampingan pemerintah terhadap petani terutama pada aspek akses terhadap benih unggul, sarana dan prasarana produksi, serta akses modal dan pasar.

**Tabel II.40**  
**Data Perbandingan Produktivitas Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Swasta (Ton/Ha)**

Kabupaten / Kota	Kelapa Sawit		Karet	
	Swasta	Rakyat	Swasta	Rakyat
1. Kutai Kartanegara	15,330	14,025	1,383	1,006
2. Kutai Timur	20,066	15,704	0,125	0,774
3. Kutai Barat	20,861	1,806	0,783	1,351
4. Penajam Paser Utara	14,356	7,634		0,321
5. Paser	15,184	13,663	0,750	1,277
6. Berau	26,826	25,545		0,62
7. Mahakam Ulu	7,351	-		-
8. Samarinda		19,951		1,356
9. Balikpapan		9,217		0,899
10. Bontang	19,100	1,450		
Kalimantan Timur	18,736	14,362	0,789	1,059

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi KALTIM, 2024 (diolah)

Disamping itu, guna meningkatkan daya saing hasil komoditi perkebunan diperlukan upaya hilirisasi hasil produk perkebunan. Dengan adanya upaya hilirisasi maka geliat produksi pada sektor hulu akan semakin meningkat dan harga komoditi perkebunan di tingkat pasar akan cenderung stabil. Terdapat 109 Perusahaan Besar Sawit (PBS) di Kalimantan Timur dimana perusahaan tersebut mengolah dari produk mentah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi produk setengah jadi berupa *Crude Palm Oil* (CPO). Diperlukan upaya pemerintah untuk menarik investor untuk membangun industri pengolahan berupa turunan produk rumah tangga, membentuk korporasi pekebun serta penyediaan infrastruktur pendekat dari kebun menuju pabrik pengolahan guna meningkatkan geliat perekonomian Kalimantan Timur.

**Tabel II.41**  
**Jumlah Perusahaan Besar Sawit (PBS) Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2023**

Kabupaten / Kota	Perusahaan Besar Sawit	Kapasitas Produksi TBS (ton/jam)	
		Terpasang	Terpakai
1. Kutai Kartanegara	19	1.090	938
2. Kutai Timur	38	2.040	1.828,56
3. Kutai Barat	12	690	653
4. Penajam Paser Utara	7	360	299
5. Paser	18	940	791,53
6. Berau	13	745	713
7. Mahakam Ulu	2	90	96
8. Samarinda	0	0	0
9. Balikpapan	0	0	0
10. Bontang	0	0	0
KALIMANTAN TIMUR	109	5.955	5.319

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi KALTIM, 2024

## 11. Peternakan

Populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini didominasi ternak ayam ras pedaging sebanyak 61,41 juta ekor, ayam buras 5,18 juta ekor dan ayam ras petelur 1,34 Juta ekor. Sedangkan untuk populasi sapi potong hanya sebesar 108,61 ribu ekor, populasi kambing 58,52 ribu ekor dan babi sebanyak 45,83 ribu ekor yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

**Tabel II.42**  
**Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2022 (ekor)**

No	Hewan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sapi Potong	117.504	119.485	119.974	121.290	108.613
2	Sapi Perah	110	91	87	76	68
3	Kambing	66.378	67.892	69.929	68.997	58.522
4	Domba	439	590	635	694	642
5	Babi	78.968	82.546	83.652	76.292	45.839
6	Kerbau	6.157	6.194	6.552	6.539	6.490
7	Kuda	97	102	95	143	95
8	Kelinci	14.189	8.859	10.830	9.462	7.931
9	Ayam Buras	4.569.169	4.372.415	4.435.205	4.815.976	5.183.873
10	Ayam Ras Pedaging	66.672.445	67.886.566	59.402.832	55.877.917	61.412.191
11	Ayam Ras Petelur	1.055.432	853.693	1.218.994	2.263.835	1.340.217
12	Itik	248.978	254.683	254.749	261.263	269.564

Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2023

Untuk mendukung program pemerintah berupa swasembada dan ketahanan pangan, maka jumlah ketersediaan daging sapi harus mampu mengimbangi jumlah kebutuhan daging sapi masyarakat di Kalimantan Timur dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau sehingga kebutuhan akan daging sapi terpenuhi. Ketersediaan daging sapi sampai saat ini belum bisa mengimbangi kebutuhan akan daging sapi setiap tahunnya untuk masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan hanya mampu memenuhi sekitar 30% kebutuhan. Hal ini dikarenakan populasi sapi di Kalimantan Timur masih tergolong sedikit, sehingga masih harus memasok dari luar daerah seperti dari Sulawesi Selatan, NTT, NTB. Keterbatasan fasilitas yang pada umumnya menimbulkan efek langsung untuk usaha peternakan juga mempengaruhi produksi daging sapi, serta adanya kecenderungan peternak berusaha sendiri. Sehingga sebagai upaya mendorong pemenuhan konsumsi daging sapi maka Pemerintah Kalimantan Timur telah melakukan strategi pengembangan peternakan sapi pada lahan bekas tambang melalui fasilitasi *miniranch* dan areal kebun sawit melalui Program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA).

**Tabel II.43**  
**Jumlah *Miniranch* di Provinsi Kalimantan Timur**

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	1	2	3	9	5
2	KUBAR	1	2	3	6	3
3	KUKAR	-	3	5	12	9
4	KUTIM	2	-	4	5	5
5	Berau	-	1	5	7	3
6	PPU	1	2	3	4	3
7	MAHULU	-	2	-	2	-

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
8	Balikpapan	-	-	-	2	-
9	Samarinda	-	-	-	1	1
10	Bontang	-	-	1	1	1
Kalimantan Timur		5	12	24	49	30

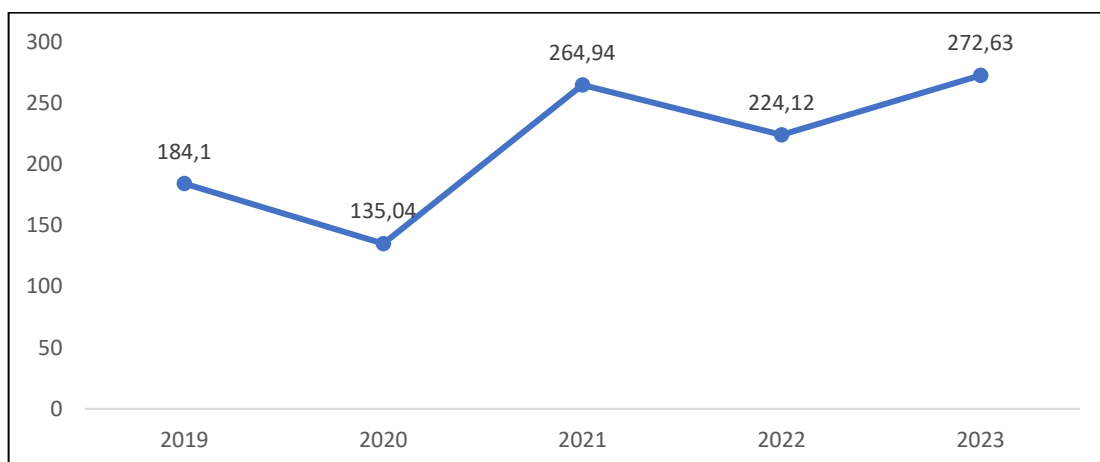
Sumber: Siranch, DPKH Provinsi KALTIM, 2024

## 12. Kehutanan

Sebagaimana sasaran pembangunan daerah dalam peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kemasyarakatan. Secara konvensional, Produk Domestik regional Bruto (PDRB) sering digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB merupakan jumlah nilai rupiah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu perekonomian daerah untuk waktu satu tahun. Dalam kaitannya dengan PDRB, pengelolaan sumberdaya hutan nasional di Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan lebih dari empat dekade dan sempat menjadi sumberdaya alam yang memiliki kontribusi sebagai penyumbang devisa nomor satu di Kalimantan Timur pada era 1970-an. Namun saat ini, kontribusi terbesar terhadap PDRB Kalimantan Timur telah diduduki oleh sumberdaya lainnya yakni minyak dan gas bumi, batubara dan perkebunan kelapa sawit.

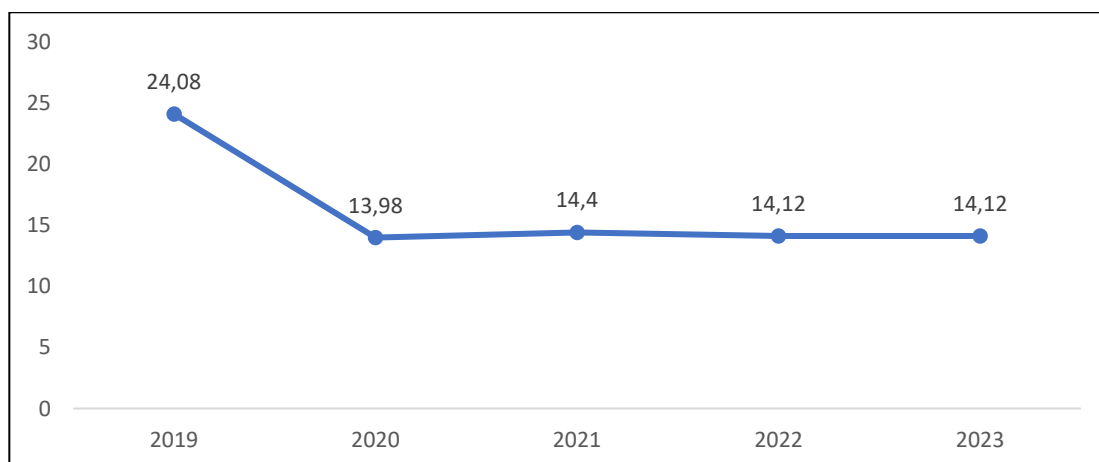
Menghadapi tantangan mendatang, pengelolaan sumberdaya hutan seluas lebih dari 8 juta hektar hendaknya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kerakyatan sebagaimana juga dirumuskan pada Misi 2, melalui peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan.

Dari pemanfaatan hutan tersebut, realisasi penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan adalah dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif namun jika dilihat secara umum maka terjadi penurunan. Dalam lima tahun terakhir, Pada tahun 2019 kontribusi sub sektor kehutanan sebesar Rp. 184,10 Milyar, lalu terjadi penurunan dengan kontribusi terendah pada tahun 2020 yakni sebesar Rp. 135,04 Milyar. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 264,94 Milyar sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 224,12 Milyar. Kontribusi terbesar sub sektor kehutanan terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 272,63 Milyar.

**Gambar II.52****Realisasi PNPB Sektor Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022 (Rp. Miliar)**

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi dari pembukaan lahan. Perubahan tutupan lahan di Kalimantan Timur dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami perubahan tutupan lahan dari satu tipe menjadi tipe lainnya, dengan laju perubahan Persentase Tutupan Lahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebesar 24,08%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan terendah yakni 13,98%, pada tahun 2021 meningkat sebesar 14,40%, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 14,12%, sedangkan pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan. Umumnya hal ini dipicu oleh berkurangnya luasan hutan alami karena perluasan hutan tanaman, perkebunan, pertanian, pertambangan, serta meningkatnya lahan-lahan tidur seperti tanah terbuka dan semak belukar.

**Gambar II.53****Persentase Tutupan Lahan Di Kalimantan Timur Tahun 2019–2023 (%)**

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat besar. Luas hutan di Kalimantan Timur seluas 8.371.478,05 hektar yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan KSA/KPA.

**Tabel II.44**  
**Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

No	Tahun	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)
1.	2018	38.771,77
2.	2019	66.302,27
3.	2020	38.737,80
4.	2021	39.900,80
5.	2022	1.144,00
6.	2023	38.861,16
TOTAL		223.717,80

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2018, Luas Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Timur seluas 275.272 Hektar (diperbaharui setiap 5 tahun). Pada tahun 2018 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 38.771,77 Hektar. Pada tahun 2019 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami peningkatan seluas 66.302,27 hektar. Pada tahun 2020 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami penurunan seluas 38.737,80 hektar. Pada tahun 2021 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 39.900,80 hektar pada tahun 2022 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 1.144 hektar dan pada tahun 2023 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami peningkatan sebesar 38.861,16 hektar. Jumlah total lahan kritis yang direhabilitasi hingga tahun 2023 adalah 223.717,80 hektar dengan persentase 81,27%.

Pengawasan terhadap gangguan hutan tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi. Walaupun pada level tertentu, harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Terutama untuk wilayah yang di atasnya masih ditumbuhi pohon dan masih menjadi aset negara. Ini dapat ditemui di wilayah-wilayah berhutan yang akan dikonversi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan kepada industri pengolahan kayu tetap harus dilakukan. Karena sangat mungkin di industri pengolahan ditemukan bahan

baku dari sumber yang tidak sah. Hal ini merupakan tugas dan fungsi untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum atas hilangnya aset-aset negara tersebut. Hal lain yang juga penting adalah bagaimana mendorong SDM untuk lebih cerdas dan profesional dalam menangani perkara-perkara ilegal *logging*/kebakaran hutan, memberikan dalam memberikan keterangan ahli untuk tujuan-tujuan penyidikan/penyelidikan, termasuk juga penanganan pelanggaran administratif kehutanan (perdata) yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

**Tabel II.45**  
**Jumlah Luas Hutan yang Rusak/Terbakar/Perambahan/Ilegal Logging Tahun 2023**

No	Kab/Kota	Luas Areal Terbakar (Ha)	Illegal Logging (Ha)	Perambahan (Ha)	Total
1.	Berau	1.935	57,41	590,16	2.582,57
2.	Kutai Timur	2.157	83,91	10.000,36	12.241,27
3.	Bontang	17	-	56	73
4.	Kutai Kartanegara	2.518	-	460	2.978
5.	Kutai Barat	495	120,63	477,31	1.092,94
6.	Mahakam Ulu	64	-	2	66
7.	Balikpapan	25,84	-	2,94	28,78
8.	Penajam Paser Utara	1.136	4,70	859	1.999,7
9.	Paser	2.054	-	213,32	2.267,32
<b>TOTAL</b>		<b>10.402,84</b>	<b>266,65</b>	<b>12.661,08</b>	<b>23.329,58</b>

*Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024*

Guna optimalisasi daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas hutan dan lahan dapat dicapai dengan menurunkan laju kerusakan hutan (per tahun) melalui upaya menurunkan luas lahan kritis dan mempertahankan kelestarian hutan, diantaranya dengan menjaga hutan dari ilegal *logging* dan kebakaran hutan yang merupakan penyebab kerusakan hutan. Melalui Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistemnya di tahun 2022 berorientasi pada menurunnya intensitas terjadinya gangguan hutan dalam bentuk aktivitas kebakaran hutan, ilegal *logging*/perambahan, dan yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan. Persentase pencegahan kerusakan hutan pada tahun 2022 sebesar 0,12% dan persentase pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2022 sebesar 0,0012%. Beberapa pencegahan kerusakan hutan yang dilakukan adalah patroli pencegahan kerusakan hutan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi pencegahan kerusakan hutan serta pembentukan dan pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Dan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan



dilakukan kegiatan belanja sarana prasarana Karhutla (perlengkapan lapangan, alat pemadam kebakaran/selang pemadam, pompa air mesin pemadam, *drone* pemantau kebakaran hutan) patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi penyadartahuan kebakaran hutan, pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Namun hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai.

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4.104.271,21 m<sup>3</sup> menjadi 4.471.286,16 m<sup>3</sup> di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan adanya faktor pendukung yaitu 1). Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Unit Manajemen terkait aspek produksi, lingkungan dan sosial; 2.) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada pemegang Izin terkait penatausahaan hasil hutan; 3). Adanya akses ke sistem pelaporan (SI-PUHH, SI-CAKEP, SI-HHBK, SI-PNBP, SIMPONI) sehingga produksi Hasil Hutan unit manajemen dapat terpantau melalui sistem. Namun demikian, adapun yang menjadi penghambat pada pemanfaatan hasil hutan kayu yaitu: 1). Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu menurun karena adanya beberapa faktor: a). Curah hujan tinggi menyebabkan produksi terganggu; b). Peralatan Produksi yang sudah berumur sehingga produktivitas alat rendah; c). Harga kayu yang menurun cukup tajam (terutama pada bulan – bulan terakhir) karena lesunya permintaan pasar dunia sementara biaya operasional meningkat karena kenaikan BBM, kenaikan biaya perawatan, biaya *sparespart*, dll

Sementara harga jual produksi kayu bulat tidak naik signifikan, malah cenderung turun pada beberapa bulan menjelang akhir tahun 2022, serta lesunya permintaan pasar dunia (ekspor) terhadap produk-produk olahan kayu terutama dari negara Eropa pada beberapa bulan. Tidak hanya hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu juga mengalami Penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2021 sebesar 1.175,38 ton menjadi 826,05 ton di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena tanaman karet sudah masuk usia siap sadap.

**Tabel II.46**  
**Data Rekapitulasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)**  
**Revisi VIII Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

NO	Kab/Kota	Status dan Fungsi Kawasan				Jumlah Total
		HL	HP	HPK	HPT	
1	Paser	6.952,35	11.243,83	342,53	23.585,25	41.781,43
2	Kutai Barat	13.671,95	7.003,03	-	2.960,47	23.635,45
3	Kutai Kartanegara	13.040,23	2.941,81	1.551,37	27.996,96	42.588,56
4	Kutai Timur	11.544,32	14.235,65	849,62	9.100,05	35.729,64
5	Berau	37.091,91	1.863,03	193,69	3.920,97	43.069,60
6	Penajam Paser Utara	-	1.874,35	-	-	1.874,35
7	Mahakam Ulu	12.412,48	4.889,82	318,77	26.737,27	44.358,34
8	Balikpapan	-	-	-	-	-
9	Bontang	-	-	62,03	-	62,03
<b>TOTAL</b>		<b>94.713,24</b>	<b>41.109,71</b>	<b>2.975,48</b>	<b>94.300,97</b>	<b>233.099,40</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Dalam rangka mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan, menurunkan pengangguran dan memberikan akses secara legal kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan lahan kawasan hutan, maka Pemerintah berkomitmen meningkatkan alokasi lahan kawasan hutan dari 1,7 juta hektar menjadi 12,7 juta hektar dari total kawasan hutan Indonesia untuk dikelola oleh masyarakat setempat, dan Kalimantan Timur mendapatkan luas kawasan yang dikelola sebesar 250 ribu hektar. Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan kawasan hutan ini, pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS). Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program Perhutanan Sosial lahir untuk menjawab pertanyaan apakah benar bahwa hutan sebagai sumber penghidupan warga masyarakat perdesaan, telah dioptimalkan fungsinya secara sosial, sehingga dapat membantu mengurangi dan mengatasi kemiskinan, bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) merupakan instrumen yang disiapkan untuk memberikan arahan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat dibawah skema Perhutanan Sosial tersebut. Namun Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat memiliki kendala yaitu Tata Waktu Penerbitan SK Persetujuan dari KLHK Yang belum Terukur dan Lokasi PIAPS Relatif Jauh Dari Pemukiman.

**Tabel II.47**  
**Data Rekapitulasi Perkembangan Perhutanan Sosial**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

NO	Kabupaten/ Kota	Jumlah					Luas (Ha)					Total Per Kab/Kota	
		HD	HKm	HTR	Kem it raan	HA	HD	HKm	HTR	Kemi t raan	HA	Jum lah	Luas (Ha)
1	Balikpapan	-	11	-	-	-	-	1.897	-	0	-	11	1.897
2	Berau	17	1	1	3	-	97.287	119,21	1.096	425	-	22	98.927
3	Kutai Timur	5	6	10	1	-	24.945	3.162	10.556	109	-	22	38.772
4	Kutai Kartanegara	16	30	4	-	-	55.004	8.575	3.574	-	-	50	67.153
5	Kutai Barat	8	-	3	-	1	27.204	-	989	-	48,85	12	28.242
6	Mahakam Ulu	12	-	-	1	-	40.743	-	-	96	-	13	40.839
7	Paser	2	3	-	-	1	1.550	361	-	-	7.722	6	9.633
8	Penajam Paser Utara	-	1	-	-	-	-	1.605	-	-	-	1	1.605
<b>TOTAL</b>		60	52	18	5	2	246.733	15.719 ,21	16.215	630	7.770,85	137	287.068

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Selain itu, dari sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur pada tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat. Realisasi laporan perkembangan perhutanan sosial sampai dengan bulan desember tahun 2023 sebesar 287.068 hektar yang dikelola oleh 137 unit pengelola (Kelompok Perhutanan Sosial) dimana unit pengelola sebelumnya sejumlah 89 unit, dengan jumlah penambahan sebanyak 48 unit, dimana luas sebelumnya adalah sebesar 210.924 hektar bertambah menjadi 287.068 hektar. Sampai dengan saat ini Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari : Hutan Desa (HD) semula seluas 183.310 hektar dikelola sebanyak 42 unit pengelola bertambah menjadi seluas 246.733 hektar dikelola oleh 60 unit pengelola; Hutan Kemasyarakatan (HKm) semula seluas 5.877 hektar dikelola sebanyak 13 unit pengelola bertambah menjadi seluas 15.719,21 hektar dikelola oleh 52 unit pengelola; Hutan Tanaman Rakyat (HTR) semula seluas 13.445 hektar dikelola sebanyak 16 unit pengelola bertambah menjadi 16.215 hektar dikelola oleh 18 unit pengelola; Kemitraan semula seluas 521 hektar dikelola sebanyak 4 unit pengelola bertambah

menjadi seluas 630 hektar dikelola oleh 5 unit pengelola; dan realisasi Hutan Adat seluas 7.771 hektar dikelola sebanyak 2 unit pengelola belum ada penambahannya.

Perhutanan Sosial (*social forestry*) sebagai program pemerintah pada dasarnya sudah dimulai sekitar 4 (empat) dasawarsa lalu, namun baru menjadi program utama Kementerian LHK pada 4 (empat) tahun terakhir. Perhutanan Sosial secara resmi didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2016).

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sangat penting diketahui karena berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar hutan. Desa yang memiliki hutan memiliki potensi membentuk KUPS. KUPS sendiri merupakan amanat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Desa yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) kepemilikan areal hutan didorong untuk membentuk KUPS. Namun, terlebih dahulu membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

KLHK membuat tingkatan kemandirian KUPS dengan beberapa kategori. Pertama adalah kategori Biru, yaitu baru mendapatkan izin/hak pengelolaan hutan sosial, Kedua adalah kategori Perak/Silver, yang berarti sudah menyusun Rencana Kerja Usaha dan melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya Ketiga adalah Kategori Emas/Gold, yaitu yang telah memiliki unit usaha dan memasarkan produk, dan terakhir, Kategori keempat adalah Platinum, yang berarti KUPS tersebut telah memiliki pasar yang luas, baik nasional maupun internasional. Di Kalimantan Timur hingga tahun 2023 telah berhasil menghasilkan 2 KUPS dengan kategori Platinum, dan 5 KUPS dengan Kategori Gold.



**Tabel II.48**  
**Perkembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Di Kalimantan Timur Tahun 2023**

Kabupaten /Kota	HUTAN DESA						HUTAN KEMASYARAKATAN						HUTAN TANAMAN RAKYAT						HUTAN ADAT					
	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS	
		Platinum	Gold	Silver	Blue			Platinum	Gold	Silver	Blue			Platinum	Gold	Silver	Blue		Platinum	Gold	Silver	Blue		
Berau	97.287	2	-	4	29	35	119,21	-	-	-	-	-	1.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kutai Barat	27.204	-	-	15	6	21	-	-	-	-	-	-	989	-	-	-	1	1	48,85	-	-	-	1	1
Kutai Kartanegara	59.952	-	-	6	7	13	8.575,30	-	3	8	23	34	3.574	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kutai Timur	24.944,75	-	-	4	7	11	3.162	-	-	3	3	6	10.556,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mahakam Ulu	40.966,19	-	-	15	8	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paser	6.108	-	1	1	3	5	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.722	-	-	-	-	-
Balikpapan	-	-	-	-	-	-	1.897,30	-	1	8	32	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>256.461,94</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>108</b>	<b>14.114,81</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>58</b>	<b>81</b>	<b>16.215,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7.770,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

### 13. Energi Dan Sumber Daya Mineral

#### 1) Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal.

**Tabel II.49**  
**Data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022**

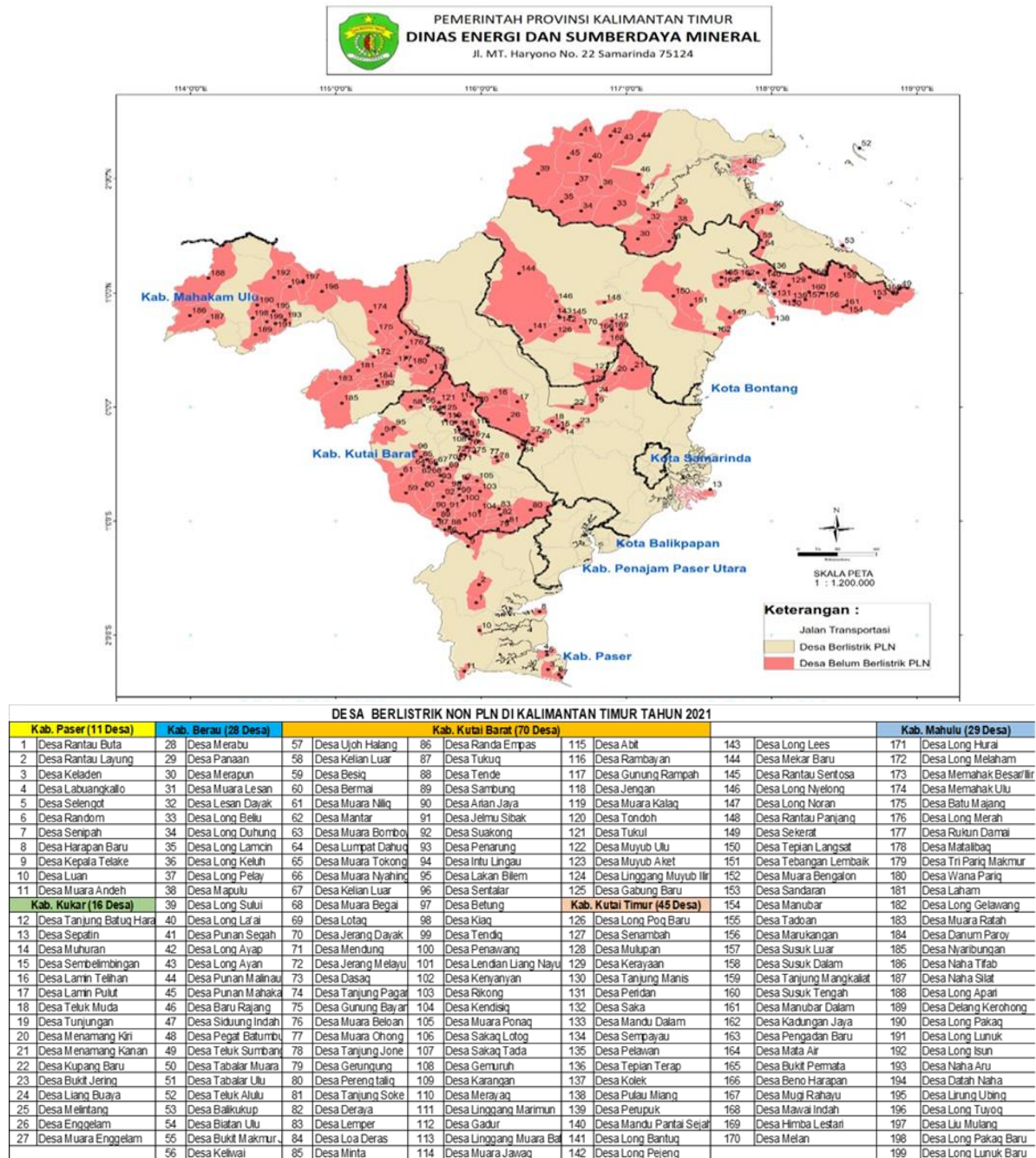
No	Kab/Kota	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik	KK Berlistrik			Rasio Desa Berlistrik (%)	Rasio Elektrifikasi/Rasio KK Berlistrik (%)
		PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	Non PLN	Jumlah		
1	Paser	133	11	144	0	77.728	6.652	84.380	100%	89,69%
2	KUBAR	124	70	194	0	44.152	8.383	52.535	100%	94,17%
3	KUKAR	221	16	237	0	198.502	13.426	211.928	100%	86,90%
4	KUTIM	96	45	141	0	84.798	30.053	114.851	100%	82,59%
5	Berau	82	28	110	0	68.252	13.104	81.356	100%	92,00%
6	PPU	54	0	54	0	46.687	2.963	49.650	100%	82,76%
7	MAHULU	21	29	50	0	4.596	6.461	11.057	100%	90,74%
8	Balikpapan	34	0	34	0	224.999	416	225.415	100%	93,89%
9	Samarinda	59	0	59	0	281.599	0	281.599	100%	100%
10	Bontang	15	0	15	0	52.447	1.123	53.570	100%	91,90%
KALTIM		839	199	1.038	0	1.083.760	82.581	1.166.341	100%	92,29%

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2022

Dari total 1.263.831 jumlah KK dan 3.849.832 jumlah penduduk di Kalimantan Timur, 85,75 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 6,53 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non-PLN dan sampai dengan tahun 2022 masih terdapat 199 Desa Berlistrik Non PLN dan 82.581 KK Berlistrik Non PLN. Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik Non-PLN. Pada Tahun 2022, Rasio Elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 91,98 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 92,29 persen pada tahun 2022.

Desa yang sudah terjangkau aliran listrik, baik hanya menggunakan genset dan listrik yang menyala tidak lebih dari 6 jam sehari. Terdapat 199 desa yang belum berlistrik PLN atau bisa dikatakan belum berlistrik selama 24jam, yang akan dikejar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PLN dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari (PLTS).

Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah berdaya saing tinggi, maka sektor energi listrik ini berperan sebagai salah satu kontributor yang cukup besar. Dalam rangka mendukung perwujudan pertumbuhan ekonomi dengan salah satunya adalah pengembangan kawasan industri, maka peran sektor energi listrik ini menjadi cukup penting sebagai penyedia energi bagi kawasan industri baru.

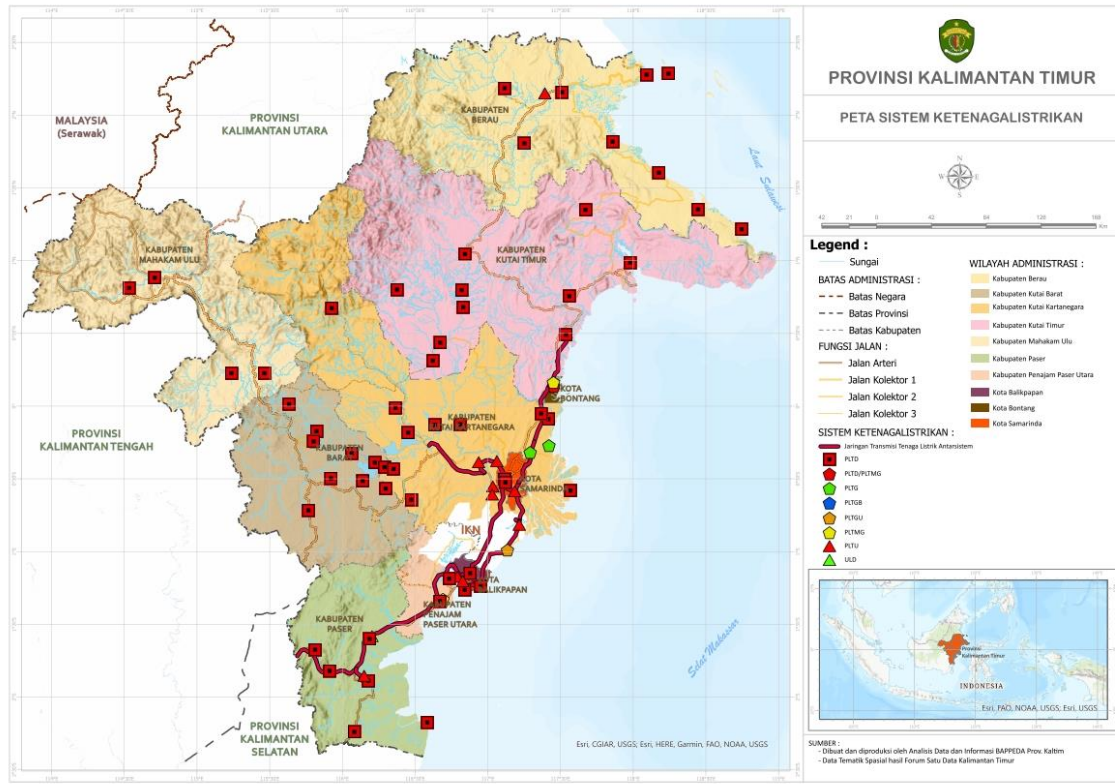


**Gambar II.54**  
**Data Desa Berlistrik Non PLN**

*Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2022*

Sistem ketenagalistrikan Kalimantan Timur ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi yang disebut Sistem Mahakam yang terkoneksi

dengan Sistem Barito Kalimantan Selatan. Dengan demikian dalam pemenuhan kebutuhan listrik, Kalimantan Timur tidak hanya ditopang oleh pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Timur namun juga Kalimantan Selatan.



**Gambar II.55**  
**Peta Sistem Ketenagalistrikan**  
*Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022*

Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal, potensi energi matahari selalu ada setiap perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur ditambah dengan luasan wilayah merupakan Provinsi Peringkat 2 di NKRI sehingga dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari sangat lebih baik. Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai 7 Kabupaten (Paser, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, & Mahakam Ulu dan 3 Kota (Samarinda, Balikpapan & Bontang) dengan desa/kelurahan sebanyak 1.038 desa/kelurahan. Desa Belum Berlistrik PLN tahun 2021 sebanyak 199 desa yang mana diantaranya desa-desa tersebut akan dibangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pembangunan PLTS Terpusat merupakan satu diantara program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Adapun pelaksanaan program unggulan pembangunan PLTS Terpusat dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel II.50**  
**Data Listrik di Seluruh Desa Berbasis Potensi Lokal**

No.	Lokasi	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Rumah/ Fasum/ Pelanggan	Kapasitas (kWp)	Keterangan
1	Desa Rantau Buta	Batu Sopang	Paser	51	24.00	Tahun 2020
2	Desa Sandaran	Sandaran	Kutai Timur	130	65.34	Tahun 2020
3	Dusun Labuan Bili Desa Sandaran	Sandaran	Kutai Timur	54	27.72	Tahun 2020
<b>Jumlah Tahun 2020</b>				<b>235</b>	<b>117.06</b>	
4	Desa Tadoan	Sandaran	Kutai Timur	203	58.80	Tahun 2021
5	Desa Enggelam	Muara Wis	Kutai Kartanegara	201	83.16	Tahun 2021
6	Dusun Ketibeh Desa Enggelam	Muara Wis	Kutai Kartanegara	91	47.04	Tahun 2021
7	Desa Long Lamcin	Kelay	Berau	67	29.40	Tahun 2021
8	Desa Rantau Layung	Batu Sopang	Paser	79	33.60	Tahun 2021
9	Desa Tanjung Soke	Bongan	Kutai Barat	49	29.40	Tahun 2021
<b>Jumlah Tahun 2021</b>				<b>690</b>	<b>281.40</b>	
10	Desa Selengot	Tanjung Harapan	Paser	293	73.65	Tahun 2022
11	Desa Pegat Batumbuk	Pulau Derawan	Berau	139	40.45	Tahun 2022
12	Desa Menamang Kanan	Muara Kaman	Kutai Kartanegara	208	65.54	Tahun 2022
13	Desa Menamang Kiri	Muara Kaman	Kutai Kartanegara	141	37.45	Tahun 2022
14	Desa Long Duhung	Kelay	Berau	69	21.89	Tahun 2022
<b>Jumlah Tahun 2022</b>				<b>850</b>	<b>238.98</b>	
15	Desa Pegat Betumbuk	Pulau Derawan	Berau	63.00	30.00	Tahun 2023
16	Desa Long Sului	Kelay	Berau	91.00	50.00	Tahun 2023
17	Desa Lemper & Desa Deraya	Bongan	Kutai Barat	156.00	100.00	Tahun 2023
18	Desa Mata Libaq	Long Hubung	Mahakam Ulu	218.00	130.00	Tahun 2023
19	Desa Ujoh Halang	Long Iram	Kutai Barat	97.00	50.00	Tahun 2023
20	Dusun Muly Desa Swan Slutung	Muara Komam	Paser	51.00	30.00	Tahun 2023
21	Desa Labuan Kallo	Tanjung Harapan	Paser	204.00	76.20	Revitalisasi 2023
<b>Jumlah Tahun 2023</b>				<b>880</b>	<b>466.20</b>	

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2024

Pembangunan PLTS Terpusat merupakan satu diantara program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Pada tahun 2020 pembangunan PLTS Terpusat berlokasi di Paser dengan jumlah 51 pelanggan dan Kutai Timur dengan jumlah 184 pelanggan dengan jumlah pembangunan 235 Pelanggan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 pembangunan PLTS Pusat berlokasi di Kutai Timur dengan jumlah 203 pelanggan, Kutai Kartanegara dengan jumlah 292 pelanggan, Berau dengan jumlah 67 pelanggan, Paser dengan jumlah 79 pelanggan, dan Kutai Barat dengan jumlah 49 pelanggan dengan jumlah pembangunan 690 pelanggan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pembangunan PLTS Pusat berlokasi di Paser dengan jumlah 293 pelanggan, Berau dengan jumlah 208 pelanggan, dan Kutai Kartanegara dengan jumlah 349 pelanggan dengan jumlah pembangunan 850 Pelanggan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 pembangunan PLTS Pusat berlokasi di Berau dengan

jumlah 154 pelanggan, Kutai Barat dengan jumlah 253 pelanggan, Mahakam Ulu dengan jumlah 218 pelanggan, Paser dengan jumlah 51 pelanggan dan revitalisasi 204 pelanggan dengan jumlah pembangunan 880 Pelanggan pada tahun 2023.

Infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik mencapai 4.273.525 MWh pada tahun 2019. Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebanyak 1.038 Desa dan telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non-PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 886 Desa dan yang bersumber dari non-PLN sebanyak 152 Desa, sehingga rasio desa berlistrik pada tahun 2020 telah mencapai 100 persen. Sejalan dengan peningkatan rasio desa berlistrik, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan yakni sebesar 92,29 persen pada tahun 2022 menjadi 95,18 persen pada tahun 2023.

## 2) Energi Baru Terbarukan (EBT)

Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Timur cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal, sementara pengembangan energi baru dan terbarukan masih mengalami kendala, lokasi sebagian besar berada di kawasan tertinggal, terdepan, terluar (3T) serta kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai. Adapun potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti energi air, surya, angin, *bioenergy*, panas bumi, gelombang laut dan lahan bekas tambang.

Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (*Solar Cell*) merupakan pembangkit listrik yang mampu mengonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Energi matahari sesungguhnya merupakan sumber energi yang paling menjanjikan mengingat sifatnya yang berkelanjutan (*sustainable*) serta jumlahnya yang sangat besar. Untuk wilayah khatulistiwa seperti Kalimantan Timur, potensi radiasi sinar matahari mencapai 1000 Watt Peak (Wp) per meter persegi. Dengan efisiensi panel surya 20%, maka dapat diperoleh daya listrik sebesar 200 Wp per meter persegi. Bila diasumsikan daya yang dapat diperoleh dari sistem tenaga surya sebesar 1 MWp per Hektar, maka apabila luasan void tambang yang dibangun dengan sistem tenaga surya terapung seluas 1000 Ha akan diperoleh daya listrik sebesar 1 GWp.



**Tabel II.51**  
**Rincian data Kualitatif/Absolut Terkait Presentasi Pemanfaatan**  
**EBT (Realisasi Capaian 11,44)**

JENIS ENERGI	UNIT	2023	KONVERSI KE BOE		BOE	TOE
<b>Minyak Bumi</b>						
Avgas	KL	24	16.59		132.72	18.5808
Avtur	KL	96016	17.6721		565601.4512	79184.2032
MFO 180/380	KL	186487.91	20.8836		1298179.639	181745.1495
RON 95/98	KL	3327	17.4825		19388.0925	2714.333
RON 88	KL	0	17.4825		0	0
RON 89/90	KL	639649	17.4825		3727554.548	521857.6367
RON 92	KL	110805	17.4825		645716.1375	90400.2593
IDO	KL	0	19.8234		0	0
CN 48 (murni)	KL	0	19.4613		0	0
CN 51 (murni)	KL	65695	19.4613		426170.0345	59663.8048
CN 53 (murni)	KL	28382	19.4613		184116.8722	25776.3621
Kerosene	KL	837	17.7822		4961.2338	694.5727
Biogasoil (B20/B30)	KL	5628515.634	19.4613		25558920.64	3578248.889
LPG	MT	146279	25.5738		1246969.963	174575.7949
					33677711.33	4714879.586
<b>Batu Bara</b>						
Bahan Bakar Pembangkit	TON	2715309.172	29.4		11404298.52	1596601.793
Bahan Bakar Industri	TON	0	29.4		0	0
					11404298.52	1596601.793
<b>Gas Bumi</b>						
Bahan Bakar Pembangkit	mmscf	14777438.79	0.5388		2654028.007	371563.9209
Bahan Bakar Industri	mmscf	92261333	0.5388		16570135.41	2319818.957
Jargas Rumah Tangga	sambungan RT/mmscf	62735	0.5388		11267.206	1577.4088
Sektor Komersial	mscf	0	0.5388		0	0
					19235430.62	2692960.287
<b>EBT</b>						
FAME	KL	1235882.1	32.4355		8017290.771	1122420.708
Etanol	KL	0	11.4895		0	0
Biomassa	TON	0	16.4895		0	0
Kapasitas Biogas RT	m3/tahun	0	0.0317		0	0
			Cf	Eff		
PLTA	MV	0	3	1.65	0	0
PLTB	MV	0	2.5	1.25	0	0
PLT BIOGAS	MV	4	4	1.25	68734.464	9622.825
PLT Biomassa	MV	6.3	4	1.25	108256.7808	15155.9493
PLTM	MV	0	3	1.25	0	0
PLTMH	MV	0	3	1.25	0	0
PLTP	MV	0	7.5	2.9	0	0
PLTS/PLTS ATAP	MV	14	1	0.65	115658.9538	16192.2535
PLTS Hybrid	MV	0	0.85	0.65	0	0
PLT Sampah	MV	0	4	1.25	0	0
PJUTS	MV	0	0		0	0
LTHSE	MV	0	0		0	0
					8309940.97	1163391.736

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2024

**Tabel II.52**  
**Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2023**

No	Uraian	BOE	TOE	MTOE	%
1	EBT	8,309,940.97	1,163,391.74	1.16	11.44%
2	Minyak Bumi	33677711.33	4,714,879.59	4.71	46.37%
3	Gas Bumi	19,235,430.62	2,692,960.29	2.69	26.49%
4	Batubara	11,404,298.52	1,596,601.79	1.60	15.70%
<b>Total</b>		<b>72,627,381.44</b>	<b>10,167,833.40</b>	<b>10.17</b>	100.00%

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2023

Bio-energi yang berasal dari biomassa, baik dalam bentuk cair, gas atau padat yang didukung oleh:

- limbah ternak seperti kotoran sapi perah, potong, kambing dan unggas.
- limbah industri seperti tahu, kelapa sawit (POME), dan tapioka.
- limbah rumah tangga dan perkotaan seperti kotoran manusia, sampah industri dan rumah tangga, *biomass* seperti hutan tanaman energi, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, limbah kayu, sekam padi, tongkol jagung, cangkang sawit, tangkos sawit.

**Tabel II.53**  
**Potensi Bioenergi dari Pome**

No	Nama Perusahaan	Teknologi Pengelolaan POME	Output	Jumlah dari Pemanfaatan POME (Ton/ Thn)
1	PT REA Kaltim Plantations	Bio Gas	Pembangkit Listrik Biogas 3 MW	297,435.89
2	PT REA Kaltim Plantations	Bio Gas	Pembangkit Listrik Biogas 4 MW	376,761.89
3	PT Dharma Satya Nusantara (PKS 3)	Bio Gas	Pembangkit Listrik Biogas 1,2 MW	253,843.20
4	PT Hutan Hijau Mas	Bio Gas	Pembangkit Listrik Biogas 1,2 MW	408,345.84
5	PT Prima Mitrajaya Mandiri	Bio Gas	Pembangkit Listrik Biogas 1,2 MW	300,218.40
6	PT Telen Prima Sawit	Bio Gas	Pembangkit Listrik Biogas 1,2 MW	317,304.00
7	PT Teguh Jayaprima Abadi	Bio Gas/ Flaring	Gas dibakar	219,672.00
8	PT Jabontara Eka Karsa	Belt Pres	Pupuk organik (Amelioran)	291,626.78
Total Keseluruhan				2,173,581.22

**Tabel II.54**  
**Potensi Bioenergi dari Biomass Hutan Energi**

Kabupaten/ Perusahaan	Cangkang (Ton/Thn)	Fiber (Ton/Thn)	Kapasitas Pembangkit Listrik Bio Massa(KvA)
<b>Berau</b>	<b>368,838.24</b>	<b>131,727.94</b>	<b>25,905.20</b>
PT Anugerah Agung Prima Abadi	27,382.52	9,779.47	1,923.20
PT Berau Sawit Sejahtera	33,926.31	12,116.54	2,382.80
PT Dwiwira Lestari Jaya	33,060.64	11,807.37	2,322.00
PT Gunta Samba Jaya	27,336.96	9,763.20	1,920.00
PT Hutan Hijau Mas	47,640.35	17,014.41	3,346.00
PT Jabontara Eka Karsa	34,023.12	12,151.12	2,389.60
PT Mulia Inti Perkasa	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Natura Pacific Nusantara	19,528.84	6,974.59	1,371.60
PT Satu Sembilan Delapan	34,011.73	12,147.05	2,388.80
PT Sentosa Kalimantan Jaya	25,457.54	9,091.98	1,788.00
PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation	34,797.67	12,427.74	2,444.00
PT Yudha Wahana Abadi	26,044.15	9,301.48	1,829.20
<b>Kutai Barat</b>	<b>256,517.50</b>	<b>91,613.39</b>	<b>18,016.40</b>
PT Agro Manunggal Selaras	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Citra Agro Kencana	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Farinda Bersaudara	29,210.68	10,432.39	2,051.60
PT Ketapang Agro Lestari	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Kruing Lestari Jaya	45,561.60	16,272.00	3,200.00
PT Kutai Agro Lestari	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT London Sumatera (Isuy Makmur POM)	24,552.01	8,768.57	1,724.40
PT London Sumatera (Pahu Makmur POM)	29,051.22	10,375.43	2,040.40
<b>Kutai Kartanegara</b>	<b>476,500.30</b>	<b>170,178.68</b>	<b>33,516.80</b>
PT Agrieast Borneo Kencana	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Alam Jaya Persada	21,641.76	7,729.20	1,520.00
PT Cahaya Anugerah Plantation	17,450.09	6,232.18	1,225.60
PT Jaya Mandiri Sukses	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Karya Teknik Plantation	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Mahakam Sawit Plantation (SBSL-M)	24,267.25	8,666.87	1,704.40
PT Maju Kalimantan Hadapan	51,256.80	18,306.00	3,600.00
PT Niagamas Gemilang	16,373.70	5,847.75	1,200.00
PT Perkebunan Kaltim Utama	12,529.44	4,474.80	880.00
PT Prima Mitrajaya Mandiri	35,025.48	12,509.10	2,460.00
PT REA Kaltim Plantations	78,656.41	28,091.57	5,524.40
PT Sasana Yudha Bhakti	26,112.49	9,325.89	1,834.00
PT Sawit Kaltim Lestari	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Sawit Unggul Agro Niaga	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Teguh Jayaprima Abadi	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Tritunggal Sentra Buana	20,348.95	7,267.48	1,429.20
PT Tunas Prima Sejahtera	19,067.53	6,809.83	1,339.20
<b>Kutai Timur</b>	<b>1,054,363.77</b>	<b>376,558.49</b>	<b>74,052.80</b>
PT Anugerah Energitama	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Bima Agri Sawit	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Bima Palma Nugraha	24,489.36	8,746.20	1,720.00
PT Bumi Mas Agro	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Dharma Satya Nusantara (PKS 2)	23,919.84	8,542.80	1,680.00
PT Dharma Satya Nusantara (PKS 3)	29,615.04	10,576.80	2,080.00



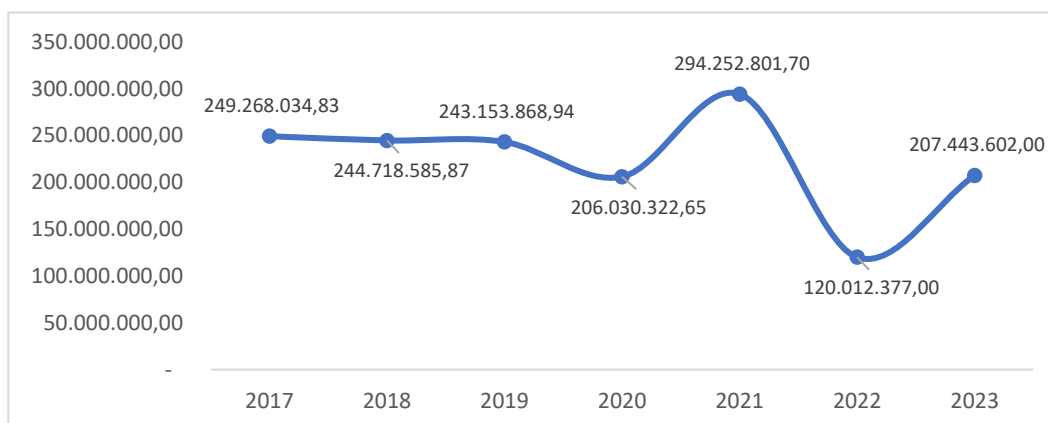
Kabupaten/ Perusahaan	Cangkang (Ton/Thn)	Fiber (Ton/Thn)	Kapasitas Pembangkit Listrik Bio Massa(KvA)
PT Dharma Satya Nusantara (PKS 4)	29,615.04	10,576.80	2,080.00
PT Dharma Satya Nusantara (PKS 6)	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Dharma Satya Nusantara (PKS 7)	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Dinamika Prima Artha	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Etam Bersama Lestari	25,058.88	8,949.60	1,760.00
PT Fairco Agro Mandiri	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Gunta Samba	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Hamparan Perkasa Mandiri	36,449.28	13,017.60	2,560.00
PT Hanusentra Agro Lestari	22,780.80	8,136.00	1,600.00
PT Indonesia Plantation Sinergy	8,542.80	3,051.00	600.00
PT Kalimantan Agro Nusantara	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Karyanusa Eka Daya 1	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Karyanusa Eka Daya 2	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Kemilau Indah Nusantara	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Kresna Duta Agroindo (GKMM)	8,542.80	3,051.00	600.00
PT Kresna Duta Agroindo (MWHM)	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Kresna Duta Agroindo (RPNM)	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Kutai Balian Nauli	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Long Bagun Prima Sawit	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Multi Pacific International	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Nala Palma Cadudasa	32,644.89	11,658.89	2,292.80
PT Nusaraya Agro Sawit	51,256.80	18,306.00	3,600.00
PT Sawit Sukses Sejahtera	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Sima Agung Prima Sawit	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Sinergi Agro Industri	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Sumber Kharisma Persada	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Swakarsa Sinarsentosa	26,767.44	9,559.80	1,880.00
PT Tapian Nadenggan (JLYM)	45,561.60	16,272.00	3,200.00
PT Telen	71,190.00	25,425.00	5,000.00
PT Telen Prima Sawit	37,018.80	13,221.00	2,600.00
PT Wira Inova Nusantara	34,171.20	12,204.00	2,400.00
<b>Mahulu</b>	<b>17,085.60</b>	<b>6,102.00</b>	<b>1,200.00</b>
PT Borneo Bhakti Sejahtera	17,085.60	6,102.00	1,200.00
<b>Paser</b>	<b>344,998.13</b>	<b>123,213.62</b>	<b>24,230.80</b>
PT Agro Inti Kencana Mas	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Borneo Indah Marjaya	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Buana Wira Subur Sakti	16,134.50	5,762.32	1,133.20
PT Cahaya Bintang Sawit Sejati 1	28,367.79	10,131.35	1,992.40
PT Cahaya Bintang Sawit Sejati 2	28,282.36	10,100.84	1,986.40
PT Gawi Makmur Kalimantan	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Harapan Sawit Sejahtera	14,961.29	5,343.32	1,050.80
PT Muaratoyu Sumber Lestari	31,574.19	11,276.50	2,217.60
PT Multi Jayantara Abadi	28,595.60	10,212.71	2,008.40
PT Multi Makmur Mitra Alam	27,336.96	9,763.20	1,920.00
PT PN XIII Long Pinang (PALPI)	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Pradiksi Gunatama	34,171.20	12,204.00	2,400.00
PT Pucuk Jaya	17,085.60	6,102.00	1,200.00
PT Saraswanti Sawit Makmur	15,975.04	5,705.37	1,122.00
<b>PPU</b>	<b>157,415.33</b>	<b>56,219.76</b>	<b>11,056.00</b>

Kabupaten/ Perusahaan	Cangkang (Ton/Thn)	Fiber (Ton/Thn)	Kapasitas Pembangkit Listrik Bio Massa(KvA)
PT Agro Indomas	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Alam Permai Makmur Raya	17,911.40	6,396.93	1,258.00
PT Kebun Mandiri Sejahtera	25,822.04	9,222.16	1,813.60
PT Megah Hijau Lestari	25,628.40	9,153.00	1,800.00
PT Sumber Sawit Bunga Lestari	28,253.89	10,090.67	1,984.40
PT Waru Kalimantan Plantation	34,171.20	12,204.00	2,400.00
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>2,675,718.86</b>	<b>955,613.88</b>	<b>187,978.00</b>

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, 2024

### 3) Pertambangan

Produksi batubara tahun 2021 adalah sebesar 289,53 juta ton, yang menunjukkan peningkatan sebesar 40,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi batubara disebabkan oleh permintaan batubara yang meningkat dari negara tujuan seperti Tiongkok dan India akibat mulai berkurangnya pandemi COVID-19 serta peningkatan yang signifikan pada harga batubara global.



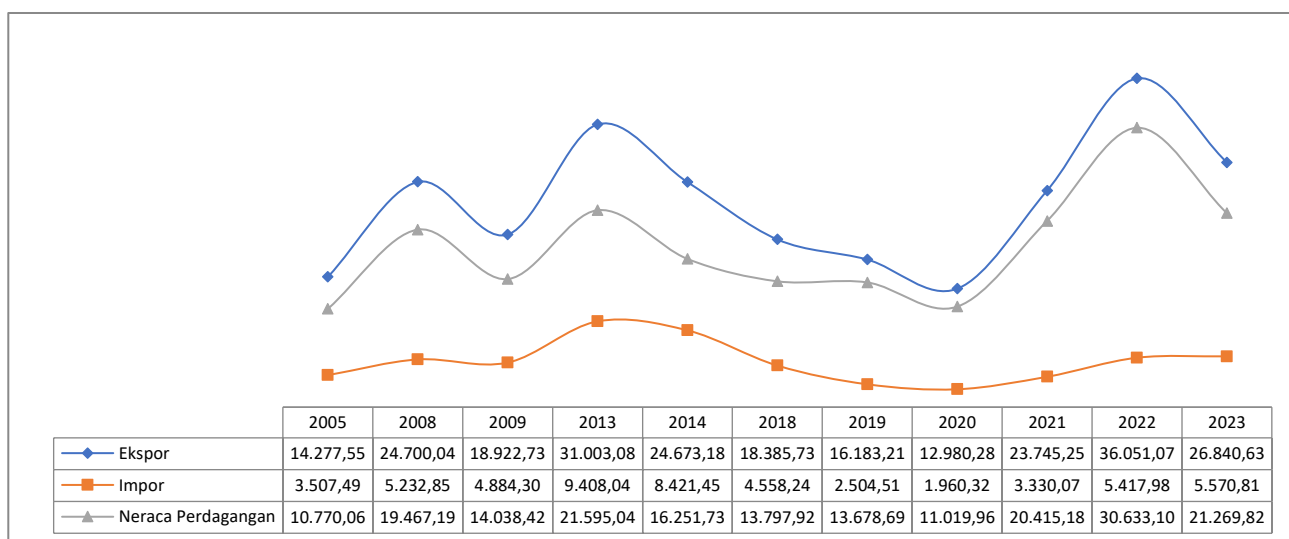
**Gambar II.56**  
**Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017-2023 (Ton)**

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Pada tahun 2023 produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur terdapat penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi. Penurunan produksi migas tak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja aktivitas hulu migas.

#### 14. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kaltim lebih kecil dibandingkan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persoalan ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan.



**Gambar II.57**

**Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023**

*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024*

Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerja sama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2005-2023, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari tren pertumbuhan mengalami surplus perdagangan.

**Tabel II.55**

**Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023 (Juta US\$)**

No	Golongan Barang	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Migas		4.302,83	3.356,38	2.068,20	1.605,15	2.998,12	2.612,66
1	Minyak Mentah	334,70	12,63	7,27	-	8,48	-
2	Hasil Minyak	12,97	224,05	108,64	7,40	763,12	683,52
3	Gas	2.977,57	1.831,52	1.032,38	1.597,75	2.226,52	1.929,13
Non Migas		13.230,03	15.029,36	14.113,59	22.554,76	33.052,95	22.260,63
1	Hasil Tambang	13.580,80	12.408	9.600,36	17.767,61	27.665,96	19.981,65
2	Hasil Industri	1.445,92	1.696,72	2.222,52	4.780,52	5.377,14	4.224,58

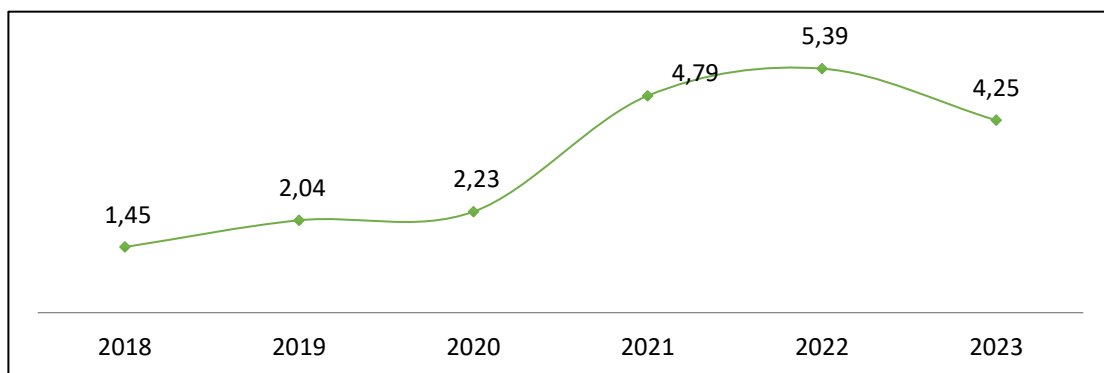


No	Golongan Barang	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Hasil Pertanian	4,21	8,87	9,11	6,63	9,85	21,84
Total Ekspor		18.385,73	16.183,21	12.980,28	24.159,90	36.051,07	26.840,72

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -25,56 persen dibanding tahun 2022 yaitu dari US\$ 36,05 miliar menjadi US\$ 26,84 miliar. Penurunan ekspor tahun 2023 disebabkan oleh turunnya nilai ekspor barang migas maupun non migas. Ekspor barang migas tahun 2023 mencapai US\$ 2,61 miliar turun sebesar -12,88 persen dibanding tahun 2022. Sementara ekspor barang non migas mencapai US\$ 24,23 miliar turun sebesar -26,71 persen dibanding tahun 2022.

Nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir hingga mencapai 5,39 miliar US\$ pada tahun 2022 dengan peningkatan 12,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,79 miliar US\$. Namun, nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara menurun 21,15 persen pada tahun 2023 hingga mencapai 4,25 miliar US\$.



**Gambar II.58**

**Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 (Miliar US\$)**

Sumber: BPS Prov KALTIM, 2024

## 15. Indeks Ekonomi Inklusif

Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah Pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan Indeks

Pembangunan Ekonomi Inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebesar 6,24 dengan kategori memuaskan.

### **2.3.2 Daya Saing SDM**

#### **1. Pendidikan**

Angka partisipasi sekolah (APS) di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur ternyata belum capai 100 persen, terbukti pada jenjang usia 16-18 tahun mengalami penurunan (81,43) tahun 2022, artinya Masih ada anak belum sepenuhnya mengenyam pendidikan formal bahkan pada tahun 2020 akibat pandemi Corona angkanya mengalami penurunan (81,88). Penyebab tersebut mungkin dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah). Untuk itu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan berdasarkan kewenangannya lebih memfokuskan/melaksanakan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan ruang kelas baru SD, pembangunan SD, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, bantuan untuk siswa.

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 paling tinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yakni sebesar 105,21. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 5,21 persen penduduk yang bukan golongan umur 7-12 tahun masih bersekolah ditingkat SD, ini hal disebabkan adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Sebenarnya wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya namun tidak memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas

Pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang Pendidikan. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian. APM di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022 mengalami peningkatan pada setiap jenjang Pendidikan terkecuali jenjang SLTA mengalami sedikit penurunan di tahun 2022. Peningkatan APM ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan yang harus diikuti terus bertambah dan menjadi penanda dari meningkatnya akses penduduk kelompok usia tersebut terhadap layanan Pendidikan di Kalimantan Timur. Namun, meskipun APM terus mengalami kenaikan, pemerintah tetap mendorong peningkatan yang lebih baik lagi melalui beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berupa pemberian bantuan operasional Pendidikan, bantuan bagi siswa miskin, pembangunan unit sekolah baru, pemerataan guru, dan sebagainya.

**Tabel II.56**  
**Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2005-2023**

Usia Sekolah	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Angka Partisipasi Sekolah</b>											
7-12	96,55	98,37	98,42	99,46	99,35	99,76	99,68	99,73	99,60	99,57	99,64
13-15	87,57	90,41	91,55	96,62	97,89	98,89	98,21	99,07	98,90	98,75	98,71
16-18	60,46	63,88	64,07	73,10	80,50	81,55	82,07	81,88	82,10	81,43	81,50
<b>Angka Partisipasi Kasar</b>											
Jenjang Pendidikan	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD	105,42	110,95	110,38	107,57	110,32	108,02	106,84	105,75	105,26	105,21	106,46
SLTP	90,31	87,53	88,61	91,06	92,04	92,57	91,03	92,17	92,03	91,47	92,28
SLTA	63,65	69,89	76,38	116,46	85,97	96,08	94,96	95,23	95,52	95,09	95,16
<b>Angka Partisipasi Murni</b>											
Jenjang Pendidikan	2005	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD	91,62	93,59	93,74	95,91	96,81	98,40	98,41	98,44	98,36	98,45	98,53
SLTP	67,09	71,19	72,06	76,10	78,96	79,68	80,42	81,28	81,30	82,65	83,36
SLTA	46,73	53,94	53,10	62,22	67,41	68,43	68,55	69,00	69,29	69,10	69,89

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur.

Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

**Tabel II.57**  
**Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.676	367.363	23.050	15,94	219,19
Swasta	253	52.109	3.366	15,48	205,96
MI	149	33.396	2.326	14,36	224,13
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	458	129.945	8.681	14,97	283,72
Swasta	239	31.929	2.269	14,07	133,59
MTs	182	31.833	2.998	10,62	174,91
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	145	68.792	4.290	16,04	474,43
Swasta	92	13.541	1.105	12,25	147,18
MA	92	12.138	1.512	8,03	131,93
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	88	54.574	3.481	15,68	620,16
Swasta	129	28.536	1.850	15,42	221,21

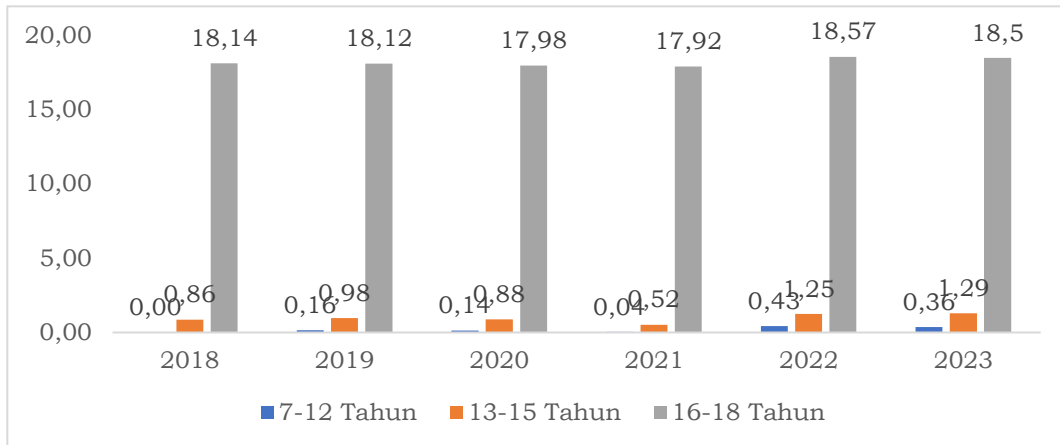
*Sumber: Disdikbud dan Kemenag Kaltim, 2024*

Pada tahun 2023, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Selama beberapa tahun terakhir, Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2021, Angka Putus Sekolah mengalami penurunan di seluruh kelompok usia sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,10 poin untuk kelompok usia 7-12 tahun, kelompok usia 13,15 tahun turun 0,36 poin, dan untuk kelompok usia 16-18 tahun turun 0,06 poin. Angka Putus Sekolah kembali meningkat pada tahun 2023 untuk masing-masing kelompok umur menjadi 0,36 untuk kelompok usia 7-12 tahun, 1,29 untuk kelompok usia 13-15 tahun, dan 18,50 untuk kelompok usia 16-18 tahun

Faktor penyebab putus sekolah antara lain karena masih kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan atau kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Kemiskinan sering kali menjadi alasan bagi siswa untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, faktor ekonomi sering kali memunculkan anggapan

bahwa lebih baik bekerja untuk mendapatkan uang, dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan yang berimplikasi pada semakin besarnya pengeluaran yang harus dilakukan oleh rumah tangga.



**Gambar II.59**  
**Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2023 (persen)**

*Sumber: BPS Kaltim, 2024*

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 54 perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2022, jumlah mahasiswa mencapai 96.091 dengan jumlah dosen sebanyak 4.424 orang.

## 2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Namun seiring perkembangan zaman, literasi rupanya tak hanya soal membaca dan menulis. Literasi juga diartikan sebagai kemampuan berbicara, berhitung, memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, memahami, dan menggunakan potensi kemampuan diri.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar 69,22.

### 3. Indeks Literasi Digital

Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya. Pemanfaatan ini harus dilakukan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai 3,62 berada pada peringkat tiga besar nasional. Indeks literasi digital dalam laporan ini diukur melalui empat pilar indikator besar, yakni *Digital Skills*, *Digital Ethics*, *Digital Safety*, serta *Digital Culture*.

Pada *digital skills* atau indikator kecakapan digital Kalimantan Timur sebesar 3,55 poin pada 2022, lebih tinggi 0,03 poin dari skor nasional 3,52 poin. Pilar ini mengukur kecakapan pengguna internet dalam menggunakan komputer atau gawai, mengunggah/mengunduh data, mengecek ulang informasi dari internet dan sebagainya.

Kemudian, *digital ethics* atau indikator etika digital Kalimantan Timur mencapai 3,90 poin, lebih tinggi 0,22 poin dari skor nasional 3,68 poin. Pilar ini mengukur kepekaan pengguna internet dalam mengunggah konten tanpa izin, berkomentar kasar di media sosial, menghargai privasi di media sosial, dan sebagainya.

Indikator lainnya yakni *digital safety* atau indikator keamanan digital Kalimantan Timur sebanyak 3,17 poin, lebih besar 0,05 poin dari skor nasional 3,12 poin. Pilar ini mengukur kemampuan pengguna internet dalam mengidentifikasi dan menghapus spam/*malware*/virus di komputer atau gawai pribadi, kebiasaan mencadangkan data, perlindungan data pribadi, dan sebagainya.

*Digital culture* atau indikator budaya digital Kalimantan Timur sebesar 3,86 poin, lebih besar 0,02 poin dari skor nasional 3,84 poin. Pilar ini mengukur kebiasaan pengguna internet seperti mencantumkan nama penulis/pengunggah asli saat melakukan *reposting*, membuat unggahan dengan mempertimbangkan perasaan pembaca dari suku/agama/pandangan politik berbeda, menikmati dan berbagi konten seni budaya Indonesia di ruang digital, dan sebagainya.

#### 4. Kesehatan

##### 1) Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting

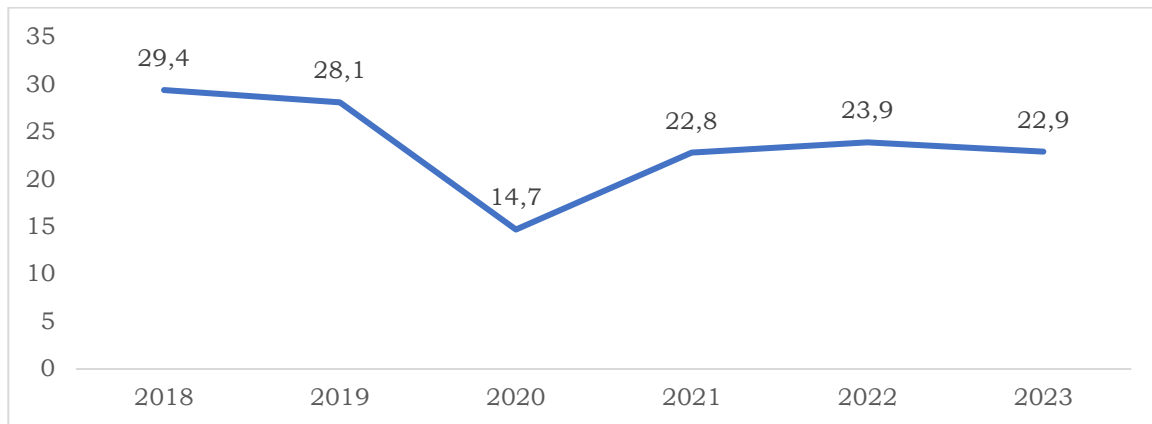
Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Tren Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2021–2023 sudah terjadi penurunan dari tahun 2021 sebanyak 168 orang ibu yang meninggal menjadi 51 orang di tahun 2023. Sama halnya dengan jumlah kematian bayi (0–11) bulan juga mengalami penurunan di tahun 2021 sebanyak 702 bayi yang meninggal menjadi 391 bayi di tahun 2023.

**Tabel II.58**  
**Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Persen)**

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	27,50	32,20	15,50	23,60	24,90
2	KUBAR	30,00	35,70	16,60	15,80	23,10
3	KUKAR	35,70	36,50	14,30	26,40	27,10
4	KUTIM	30,50	39,40	16,10	27,50	24,70
5	Berau	31,70	24,70	17,60	25,70	21,60
6	PPU	31,60	27,00	11,40	27,30	21,80
7	MAHULU	32,80	36,60	9,60	20,30	14,80
8	Balikpapan	23,80	14,00	13,30	17,60	19,60
9	Samarinda	26,30	24,70	11,90	21,60	25,30
10	Bontang	26,60	29,00	20,90	26,30	21,00

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2023

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan *Cut of Point* menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Walau sempat turun tajam pada tahun 2020 menjadi 14,7, namun prevalensi stunting di Kalimantan Timur tahun 2021 dan 2022 cenderung meningkat mencapai 23,9, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan mencapai 22,90. Angka ini diatas prevalensi stunting nasional yang mencapai 21,5. Rata-rata prevalensi stunting menurut kabupaten/kota pada tahun 2022 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kabupaten Mahakam Hulu dan Kota Balikpapan yang masing-masing mencapai 14,8 persen dan 19,6 persen.



**Gambar II.60**

**Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 berdasarkan Hasil Survei SSGI**

*Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2023*

Untuk wasting sendiri hasil SSGI Tahun 2022 menunjukkan Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9,1. Angka ini lebih tinggi dibandingkan wasting nasional yang mencapai 7,7. Wasting di Kalimantan Timur dibandingkan daerah lain di Pulau Kalimantan berada pada posisi ketiga terendah setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Hal ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur bagaimana agar semua balita yang ada dalam sasaran untuk dilakukan pengukuran setiap bulan agar terlihat data stunting dan wasting yang sebenarnya. Perlu adanya dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait dalam rangka percepatan penurunan jumlah kematian ibu dan bayi dan stunting serta wasting di Provinsi Kalimantan Timur.

## 2) Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, upaya penambahan jumlah fasilitas kesehatan diwujudkan untuk mengoptimalkan dukungan pelayanan Kesehatan masyarakat. Terdapat penambahan sebanyak 5 Rumah Sakit Umum, 3 Rumah Sakit Swasta, 1 Puskesmas, sampai dengan bertambahnya 50 Puskesmas Pembantu sehingga terlihat persebaran fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota sudah cukup merata. Dengan jumlah 58 Rumah Sakit Umum dan 22 Rumah Sakit Swasta di Kalimantan Timur pada tahun 2023, terdata pada Mahulu dan Bontang sudah memiliki masing-masing 2 dan 5 unit RS. Persebaran fasilitas kabupaten kota lainnya memiliki lebih dari jumlah tersebut. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 188 unit, setiap kabupaten kota setidaknya memiliki minimal 6 puskesmas yaitu pada Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Bontang. Selanjutnya jumlah pedagang besar farmasi dan apotek



secara kuantitas tersebar merata, sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di setiap kabupaten dan kota.

**Tabel II.59**  
**Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2023**

No	Fasilitas Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Sakit Umum	54	53	57	59	59	58
2	Rumah Sakit Swasta	19	19	22	22	22	22
3	RS Bersalin	15	9	7	10	10	8
4	Puskesmas	186	187	187	188	188	188
5	Puskesmas Pembantu	716	716	730	742	745	766
6	Pedagang Besar Farmasi	48	49	52	53	52	52
7	Apotek	637	704	759	745	745	745

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

**Tabel II.60**  
**Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kabupaten Kota**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan					
		RS. Umum	RS. Swasta	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Pedagang Besar Farmasi	Apotek
1	Paser	2	0	19	123	0	38
2	Kutai Barat	2	1	19	84	0	36
3	Kutai Kartanegara	3	0	32	175	0	122
4	Kutai Timur	3	5	21	116	1	51
5	Berau	2	0	21	112	0	71
6	Penajam Paser Utara	2	0	11	43	0	34
7	Mahakam Ulu	2	0	6	30	0	6
8	Balikpapan	11	4	27	14	19	165
9	Samarinda	14	3	26	0	32	285
10	Bontang	1	4	6	2	0	18
JUMLAH		42	17	188	699	52	826

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Terjaminnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan setiap warga merupakan tanggung jawab Pemerintah. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan baik secara promotif, preventif, dan kuratif demi mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang baik. Pelaksanaan pelayanan di bidang Kesehatan harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

**Tabel II.61**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2023**

No	Fasilitas Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokter Umum	1.010	1.024	1.106	2.097	1.488	2.103
2	Dokter Gigi	309	314	320	411	327	454
3	Dokter Spesialis	503	597	649	768	1.174	843
4	Perawat	7.823	6.524	7.510	10.789	9.627	11.006

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022*

Hal utama selanjutnya yaitu pemenuhan tenaga Kesehatan yang mencukupi secara kualitas dan kuantitas yang adil dan merata di setiap wilayah. Pertambahan jumlah penduduk diikuti juga dengan penambahan jumlah sumber daya manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak 2019 sampai dengan 2023 penambahan Dokter umum bertambah 989 orang, Dokter gigi 140 orang, Dokter spesialis 246 orang, dan perawat sejumlah 4.482 orang. Persebaran tenaga Kesehatan di Kabupaten Kota sudah merata walaupun perlu di akurasi sampai pada kebutuhan di tingkat kecamatan. Dengan jumlah 11.976 tenaga Kesehatan utama pada tahun 2022, yang terdiri dari Dokter umum, Dokter gigi, Dokter Spesialis dan Perawat menggambarkan persebaran tenaga kesehatan di kabupaten/kota upaya pemenuhan pelayanan pada masyarakat sudah terpenuhi.

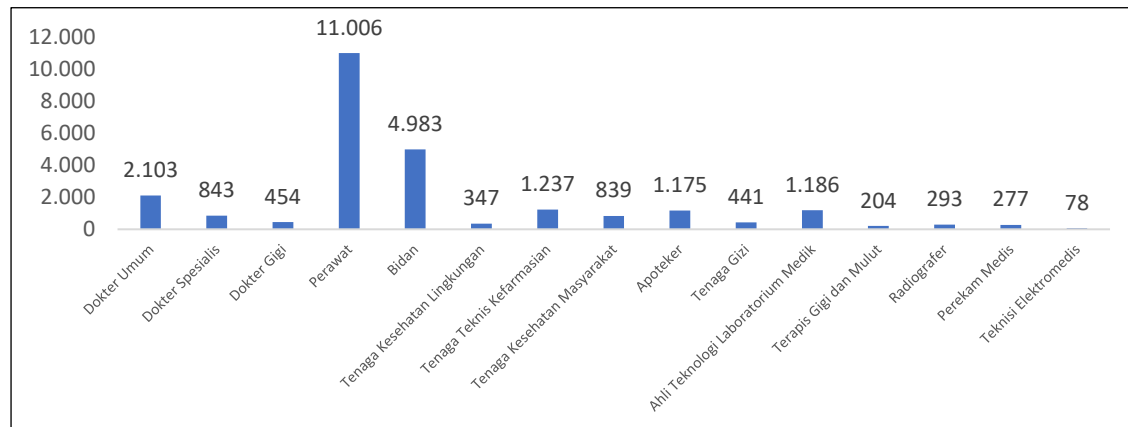
**Tabel II.62**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi**  
**Kalimantan Timur Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan			
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Perawat
1	Paser	61	23	32	543
2	Kutai Barat	62	16	18	611
3	Kutai Kartanegara	111	33	68	1.096
4	Kutai Timur	113	34	50	858
5	Berau	108	23	25	665
6	Penajam Paser Utara	39	13	23	287
7	Mahakam Ulu	24	2	1	211
8	Balikpapan	368	89	393	1.974
9	Samarinda	305	112	302	2.438
10	Bontang	163	35	104	763
JUMLAH		1.354	380	1.016	9.226

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022*

Dalam upaya percepatan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mutlak

diperlukan, sejumlah upaya telah dilakukan dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan atau Rumah Sakit diantaranya pemenuhan tenaga kesehatan melalui Program Nusantara sehat, Program Intersip Dokter Indonesia (PIDI), Program Pemberdayaan Dokter Spesialis (Dokter Spesialis yang baru selesai tugas belajar) ataupun juga dengan Institusi Pendidikan kesehatan untuk penempatan tenaga residen.



**Gambar II.61**  
**Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024

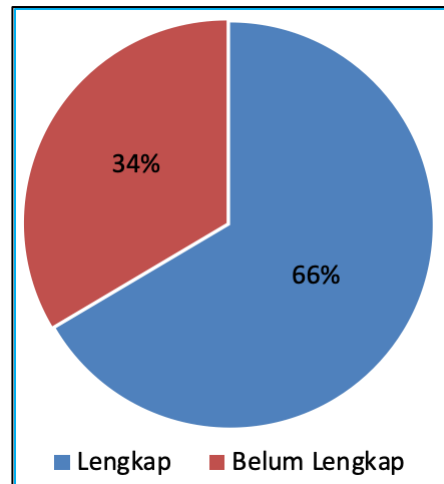
**Tabel II.63**  
**Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Lengkap	Belum Lengkap	% Pemenuhan
1	Paser	19	17	2	89.47
2	Kutai Barat	19	4	15	21.05
3	Kutai Kartanegara	32	22	10	68.75
4	Kutai Timur	21	7	14	33.33
5	Berau	21	15	6	71.43
6	Penajam Paser Utara	11	5	6	45.45
7	Mahakam Hulu	6	1	5	16.67
8	Kota Balikpapan	27	26	1	96.30
9	Kota Samarinda	26	22	4	84.62
10	Kota Bontang	6	6	0	100.00
Jumlah		188	125	63	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan Kecukupan

jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 53 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaganya.



**Gambar II.62**  
**Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Pemenuhan Tenaga Kesehatan terus dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebesar 55 persen RSUD di Provinsi Kalimantan Timur telah terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang dengan jumlah 9 RSUD yang belum terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang.

**Tabel II.64**  
**Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Kab/Kota	Milik	Tipe	Nama Fasyankes	Medik SPES Dasar				Medik SPES Penunjang		
					Sp.A	Sp.B	Sp.OG	Sp.PD	Sp.An	SP.PK	Sp.Rad
1.	Kabupaten Berau	Kab/Kota	RSUD	RSUD Talisayan		1	1	1	1		
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Dr. Abd. Rival berau	3	2	3	3	1	1	2
2.	Kota Balikpapan	Kab/Kota	RSUD	RSUD Balikpapan	2	2	3	4	3	2	
3.	Kota Bontang	Kab/Kota	RSUD	RSUD Taman Husada	3	2	4	3	3	2	2
4.	Kota Samarinda	Kab/Kota	RSUD	RSUD Inche Abdoel Moeis	3	3	3	4	3	2	2

No.	Kab/Kota	Milik	Tipe	Nama Fasyankes	Medik SPES Dasar				Medik SPES Penunjang		
					Sp.A	Sp.B	Sp.OG	Sp.PD	Sp.An	SP.PK	Sp.Rad
5.	Kabupaten Kutai Barat	Kab/Kota	RSUD	RSUD Harapan Insan Sendawar	2	3	2	3	1	3	1
6.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab/Kota	RSUD	RSUD AM Parikesit Tenggarong	4	3	5	6	4	2	2
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Dayaku Raja	1	1		1			
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	2	1	1	3	1	1	1
7.	Kabupaten Kutai Timur	Kab/Kota	RSUD	RSUD Sangkulirang		1	1	1		1	
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Kudungga	1	3	3	4	3	2	1
8.	Kabupaten Paser	Kab/Kota	RSUD	RSUD Panglima Sebaya	3	4	4	3	3	2	2
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Kerang			1				
9.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kab/Kota	RSUD	RSUD Sepaku	1		1				
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Ratu Aji Putri Botung	1	3	2	2	1	2	2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

## 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Bila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, ternyata penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur persentase terbesar adalah pendidikan SMA/SMK dan persentase terkecil adalah tamatan Diploma I/II/III. Pada tahun 2023 persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah tercatat 25,18 persen menurun dibanding tahun 2022 yang mencapai 25,98 persen. Sementara Persentase penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan lulus Diploma I/II/III sekitar 3,69 persen meningkat dibandingkan pada tahun 2022 yang mencapai 3,26 persen.



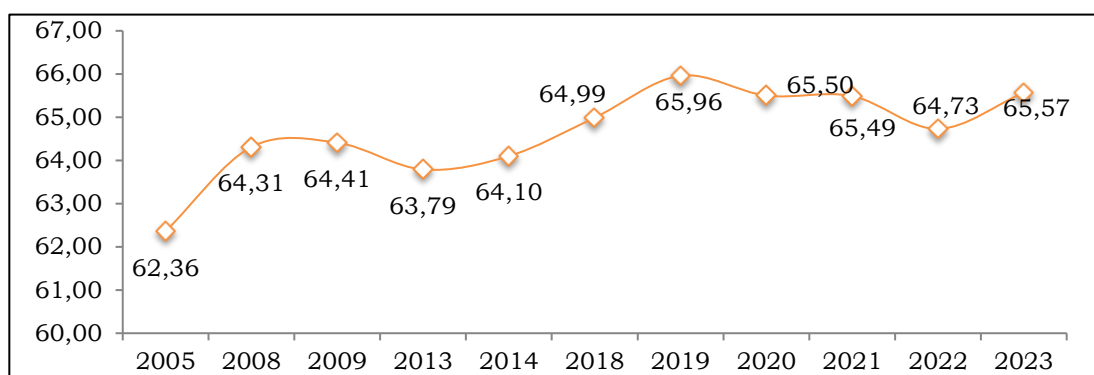
**Tabel II.65**  
**Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut**  
**Tingkat Pendidikan Tahun 2012-2023**

No	Tingkat Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD ke Bawah	571.432	582.409	579.622	402.237	470.608	443.488	477.106	482.844	493.889	491.456	453.853	465.175
		(35,29)	(35,86)	(34,55)	(28,25)	(29,76)	(28,79)	(29,43)	(28,51)	(29,18)	(28,57)	(25,98)	(25,18)
2	SMP	280.373	279.989	310.359	243.781	278.802	236.959	260.843	273.257	267.721	260.789	259.693	279.689
		(17,32)	(17,24)	(18,50)	(17,12)	(17,63)	(15,38)	(16,09)	(16,14)	(15,82)	(15,16)	(14,87)	(15,14)
3	SMA/SMK	565.495	578.251	588.398	566.393	600.455	593.161	609.994	659.047	643.105	666.878	760.250	804.339
		(34,93)	(35,60)	(35,08)	(39,78)	(37,97)	(38,50)	(37,63)	(38,92)	(37,99)	(38,76)	(43,52)	(43,54)
4	Diploma I/II/III	52.307	50.394	50.429	49.496	70.398	68.636	64.291	57.174	64.507	64.906	56.923	68.139
		(3,23)	(3,10)	(3,01)	(3,48)	(4,45)	(4,45)	(3,97)	(3,38)	(3,81)	(3,77)	(3,26)	(3,69)
5	Universitas/DIV	138.534	154.424	148.658	162.050	160.976	198.431	208.735	221.159	223.574	236.332	216.201	229.953
		(8,56)	(9,51)	(8,86)	(11,38)	(10,18)	(12,88)	(12,88)	(13,06)	(13,21)	(13,74)	(12,38)	(12,45)
Kalimantan Timur		1.619.118	1.624.272	1.677.466	1.423.957	1.581.239	1.540.675	1.620.969	1.693.481	1.692.796	1.720.361	1.746.920	1.847.295
		(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Perkembangan jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja selama tahun 2012-2023 selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang sempat turun dari 1.693.481 orang di tahun 2019 menjadi 1.692.796 orang di tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk yang bekerja tersebut merupakan salah satu dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak penduduk kehilangan pekerjaannya atau usahanya, pengurangan jam kerja ataupun pemberhentian kerja. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu serta program pemulihan ekonomi pasca pandemi yang dilaksanakan pemerintah, jumlah penduduk yang bekerja telah kembali meningkat. Kondisi itu tercermin pada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.746.920 orang di tahun 2022 kemudian menjadi sebanyak 1.847.295 orang di tahun 2023.

Pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan tingkat pendidikan tertinggi Diploma dan Sarjana ke atas. Sebaliknya, terjadi peningkatan pada penduduk bekerja yang memiliki pendidikan tertinggi SMA dan SMK. Kedua hal ini juga dapat mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan lulusan SMA dan SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memilih untuk bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi yang dominan menyerap tenaga kerja di Kalimantan Timur tidak memerlukan kompetensi/keahlian pada jenjang Diploma dan Universitas. Jika melihat fakta, penduduk paling banyak bekerja di wilayah perkotaan dengan lapangan usaha dominan di sektor perdagangan dan jasa (19,74%). Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa para pekerja sektor-sektor tersebut memiliki potensi untuk mendapatkan peluang kesejahteraan yang lebih baik apabila berpendidikan lebih tinggi yang didukung dengan kebutuhan perkembangan sektor ekonominya.

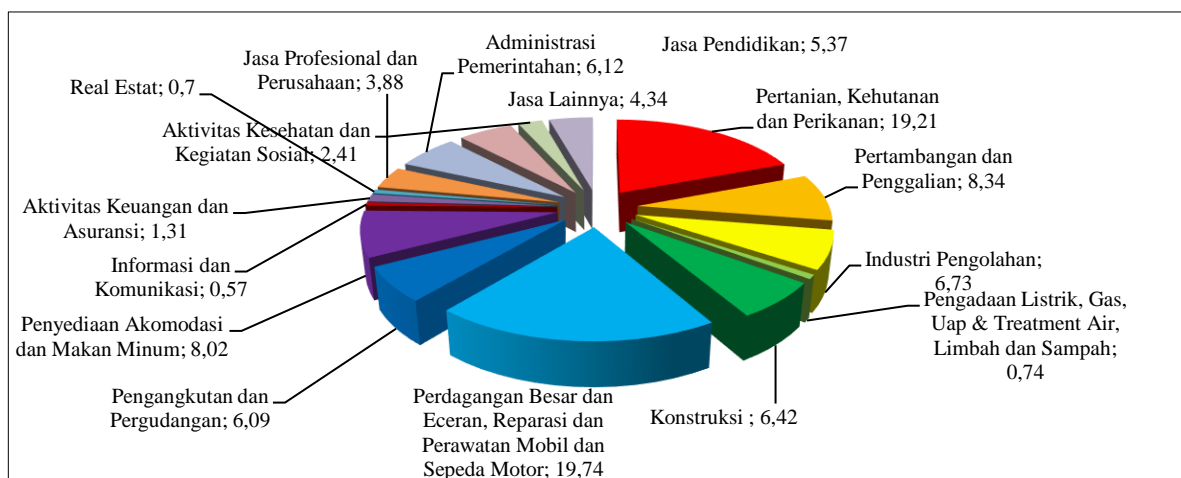


**Gambar II.63**

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2023**

*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan, periode 5 tahun terakhir pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja turun dari 65,49 persen menjadi 64,73 persen. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangnya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja. Membaiknya kinerja ekonomi turut berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja yang tersedia dan hal tersebut juga membantu menurunkan angka pengangguran. Pada tahun 2023 TPAK mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya mencapai 65,57 persen.



**Gambar II.64**  
**Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (%)**

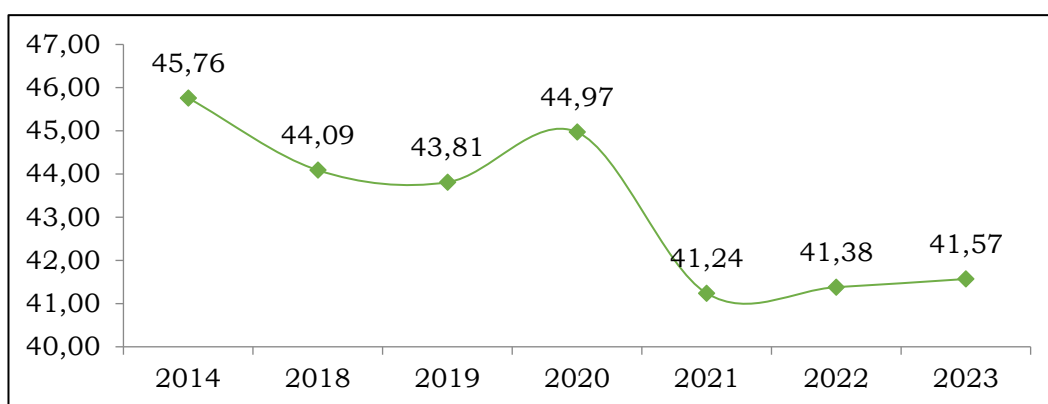
*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024*

## 6. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif pada tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 41,57



persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45-46 orang penduduk usia non produktif. Bila disandingkan dengan tingkat kemiskinan dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan dipengaruhi oleh rasio ketergantungan, dimana pengeluaran per kapita usia produktif harus menanggung biaya hidup kelompok usia non produktif. Upaya mengurangi angka ketergantungan usia non produktif dapat dilakukan dengan meningkatkan Pendidikan dan keterampilan kelompok usia produktif serta menciptakan kesempatan lapangan kerja yang melibatkan usia non produktif.



**Gambar II.65**

**Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2023**

*Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024*

Besarnya rasio ketergantungan dibawah 50 persen, dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami bonus demografi. Bonus demografi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana sebuah daerah memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk lansia atau anak-anak. Fenomena ini terjadi ketika generasi muda yang lebih besar mencapai usia kerja, sementara jumlah kelahiran menurun sehingga proporsi penduduk usia produktif menjadi lebih tinggi.

Jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak dapat memberikan dampak positif, baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan jumlah yang besar, pemerintah dapat memanfaatkan daya manusia yang ada dengan lebih optimal. Dengan persiapan yang matang dan sistem yang lebih baik, penduduk usia produktif ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, bonus demografi juga dapat menciptakan kesempatan bagi sektor ekonomi lainnya. Semakin banyaknya investasi yang dilakukan, baik

oleh perusahaan maupun pemerintah, otomatis akan membantu sektor ekonomi untuk semakin bertumbuh. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, pemerintah pasti akan mencari kandidat yang memenuhi kualifikasi dan dapat membantu untuk membentuk daya manusia yang lebih baik demi meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan.

Bonus demografi juga memiliki tantangan yang perlu diatasi. Pemerintah harus melakukan upaya untuk memberikan pendidikan yang lebih baik demi mempersiapkan penduduk usia produktif menjadi tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas. Pemerintah juga harus menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk mengakomodasi jumlah penduduk usia produktif yang besar.

## 7. Nilai Tukar Petani

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, NTP gabungan tahun 2008 – 2023 selalu berada di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayarkan petani di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel II.66**  
**Rata-Rata Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2008-2023**

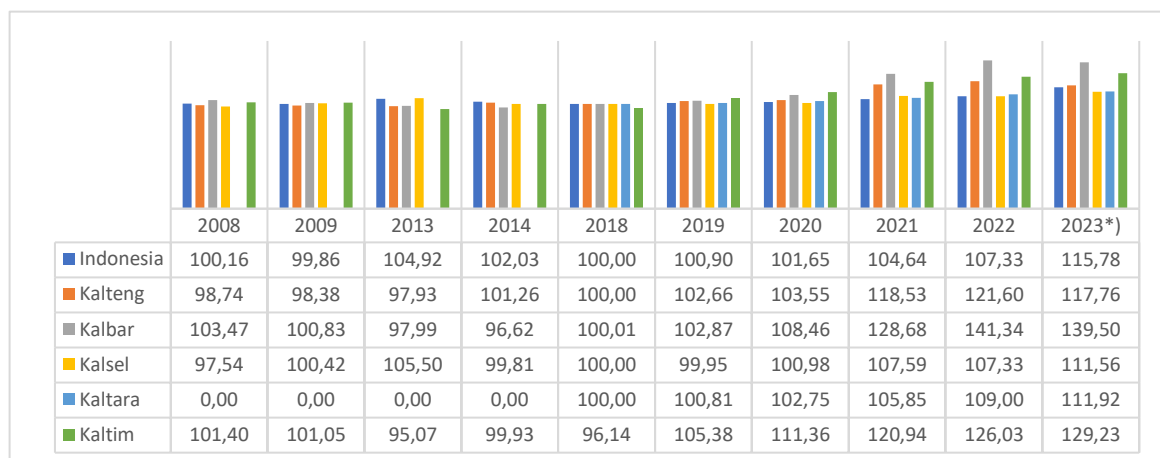
No	Uraian	2008	2009	2013	2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Harga Yang Diterima Petani (It)	112,19	119,37	132,84	111,58	123,77	107,91	116,96	128,25	139,73	149,24
2.	Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib)	110,62	118,13	139,73	111,66	128,75	102,41	104,76	106,05	110,87	115,65
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,40	101,05	95,07	99,93	96,14	105,38	111,65	120,94	126,03	129,04

*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024*

Peningkatan NTP tahun 2023 disebabkan meningkatnya NTP pada hampir seluruh sub sektor, kecuali sub sektor tanaman pangan dan perikanan yang mengalami penurunan. Selanjutnya, ada tiga sub sektor yang mengalami peningkatan NTP, yaitu sub sektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat dan peternakan. Penurunan NTP sub sektor Tanaman Pangan disebabkan menurunnya indeks harga yang diterima petani (It) sejak bulan Februari dan terus menurun hingga bulan Mei tahun 2022 dan mulai sedikit meningkat pada bulan Juni tahun 2022. Bahkan pada bulan Mei tahun 2022 angka indeks harga yang diterima petani dibawah 100. Artinya pada bulan Mei tersebut, harga produk pertanian tanaman pangan yang

diterima petani nilainya dibawah harga tahun dasar 2018. Sedangkan penyebab menurunnya nilai NTP tahun 2022 sub sektor perikanan adalah karena sejak bulan Juli hingga Oktober, indeks harga yang diterima petani perikanan lebih rendah daripada yang harus dibayarkan. Sehingga menyebabkan NTP bulan Juli hingga Oktober tahun 2022 berada dibawah 100 yang artinya pada bulan-bulan tersebut petani perikanan merugi.

Diantara kelima sub sektor dalam pembentukan NTP, petani pada sub sektor perkebunan rakyat adalah petani yang paling sejahtera dibandingkan dengan sub sektor yang lain karena rata-rata NTP tiap tahun sudah diatas 150 artinya bahwa nilai yang diterima dari hasil produksi perkebunannya sudah 50 persen lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal untuk proses produksi perkebunannya. Untuk sub sektor yang lain masih belum aman karena nilai NTP masih berfluktuasi disekitaran angka 100.



**Gambar II.66**

**Nilai Tukar Petani (NTP) Regional Kalimantan dan Nasional**

*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024*

Ternyata fenomena yang terjadi di Kalimantan Timur, juga terjadi di wilayah lain di pulau Kalimantan, bahwa petani sub sektor perkebunan rakyat lebih sejahtera dibandingkan dengan sub sektor yang lain. Sementara sub sektor tanaman pangan dan perikanan merupakan sub sektor yang masih rentan berfluktuasi nilai NTP-nya berada dibawah 100.

Nilai Tukar Petani di regional Kalimantan berada di atas 100 dan berada di atas nasional sebesar 107,33. Namun jika diurutkan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata NTP tertinggi kedua sebesar 126,03, dibawah Kalimantan Barat sebesar 141,34.

## 8. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Pada tahun 2017-2021, proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mengalami kenaikan namun rasio daya serap tenaga kerja justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam penyediaan lapangan kerja yang belum sesuai dengan kualitas dan *skill* tenaga kerja lokal yang tersedia. Sejalan dengan itu, peralihan investasi dari sektor industri/manufaktur yang padat karya menjadi sektor industri/manufaktur padat modal yang cenderung memiliki serapan tenaga kerja yang lebih sedikit. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan peluang dan kesempatan kerja lebih kepada masyarakat lokal melalui peningkatan investasi yang memberikan timbal balik positif bagi masyarakat. Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.67**  
**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2018-2023**

No	Uraian	PMDN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	12.935	20.837	19.952	21.596	24.829	36.977
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	520	2.227	3.924	9.291	4.938	15.490
3	Rasio daya serap tenaga kerja	24,88	9,36	5,08	2,32	5,03	2,39
No	Uraian	PMA					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	12.500	15.166	5.868	5.650	11.609	13.330
2	Jumlah proyek seluruh PMA	513	903	778	1.034	742	1.991
3	Rasio daya serap tenaga kerja	24,37	16,80	7,54	5,46	15,65	6,70

Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2024

Sektor usaha tenaga kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2023 pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) paling banyak diserap oleh sektor pertambangan sebesar 41,03 persen dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 28,88 persen. Hal ini terjadi dikarenakan nilai realisasi

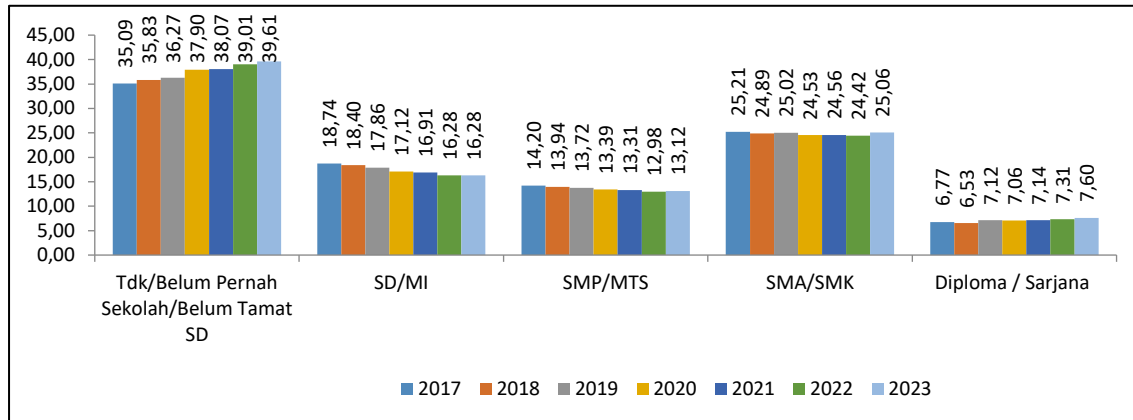
investasi dan jumlah proyek terbesar pada PMDN adalah sektor pertambangan. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) paling banyak diserap oleh sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan menyerap 50,59 persen tenaga kerja, sedangkan sektor pertambangan menyerap tenaga kerja sebanyak 26,13 persen. Sama halnya seperti pada PMDN, pada PMA penyerapan tenaga kerja sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan terbanyak juga dipengaruhi dengan nilai investasi dan jumlah proyek yang tinggi pada sektor tersebut. Kemudian dengan berkembangnya investasi, efek yang akan diperoleh yakni terhadap upaya memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

## **9. Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan**

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku diploma/sarjana pada tahun 2023 hanya sebesar 7,60 persen, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA/MA/SMK (25,06 persen), SLTP/MTs (13,12 persen) dan SD/MI (16,28 persen). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 39,61 persen, persentase ini meningkat dibandingkan persentase pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.



**Gambar II.67**  
**Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2023**  
*Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2024*

### 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana jaringan jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2022 mencapai 693,86 km atau 77,52 persen. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 284,86 km, kondisi sedang 409,00 km, kondisi rusak ringan 104,81 km, dan kondisi rusak berat 96,42 km. Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.710,96 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2021 mencapai 1.409,94 km atau 82,40 persen. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 305,83 Km, kondisi sedang 1.104,11 Km, kondisi rusak ringan 223,89 Km, dan kondisi rusak berat 77,12 Km.

**Tabel II.68**  
**Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan (km) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

No	Status	Panjang (Km)	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya
1	Nasional	1.710,96	1.428,99	16,25	0	265,72
2	Provinsi	895,09	465,29	127,59	27,17	275,04

*Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023*

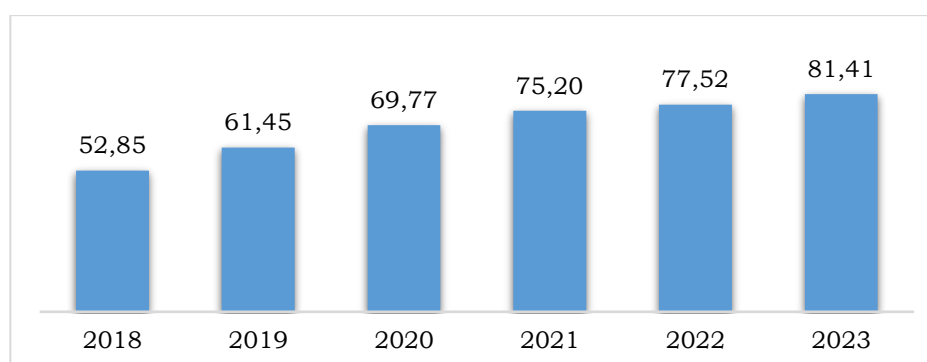
Data jalan kewenangan provinsi pada Tahun 2022 menunjukkan cukup besarnya rasio jalan yang dalam kondisi rusak sedang dan berat. Kondisi ini membutuhkan perhatian untuk pemeliharaan, sehingga dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan.

**Tabel II.69**  
**Rasio Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

No	Status	Baik	Sedang	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Nasional	305,83	1.104,11	223,89	77,12
2	Provinsi	284,86	409,00	104,81	96,42
3	Kabupaten/Kota	6.859,70	2.265,13	2.035,89	2.355,49
TOTAL		7.450,39	3.778,24	2.364,59	2.529,03

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 yang hanya mencapai 473,05 km, meningkat 220,81 km sehingga pada tahun 2023 telah mencapai 764,65 km faktor pendorong yang membuat capaian jalan mantap bertambah setiap tahunnya adalah pemeliharaan jalan provinsi oleh UPTD Pemeliharaan Dinas PUPR PERA untuk menjaga kemantapan jalan dan alokasi pendanaan untuk rekonstruksi jalan yang bertambah setiap tahunnya untuk menambah proporsi jalan mantap yang ada di Provinsi Kaltim. Lokus penanganan jalan untuk meningkatkan persentase jalan mantap adalah ruas-ruas jalan provinsi yang mendukung sektor perekonomian seperti ruas jalan Tanjung Redeb–Talisayan yang mendukung Pariwisata dan ruas jalan Patung Lembuswana – Sebulu yang mendukung Pertanian. Selain itu terdapat rencana pembangunan ruas jalan akses dan Jembatan Nibung Kutai Timur, Pembangunan ruas jalan menuju Bandara APT Pranoto, ruas jalan Jembatan Maluhu – Jakarta II Samarinda serta ruas akses jalan Perbatasan.



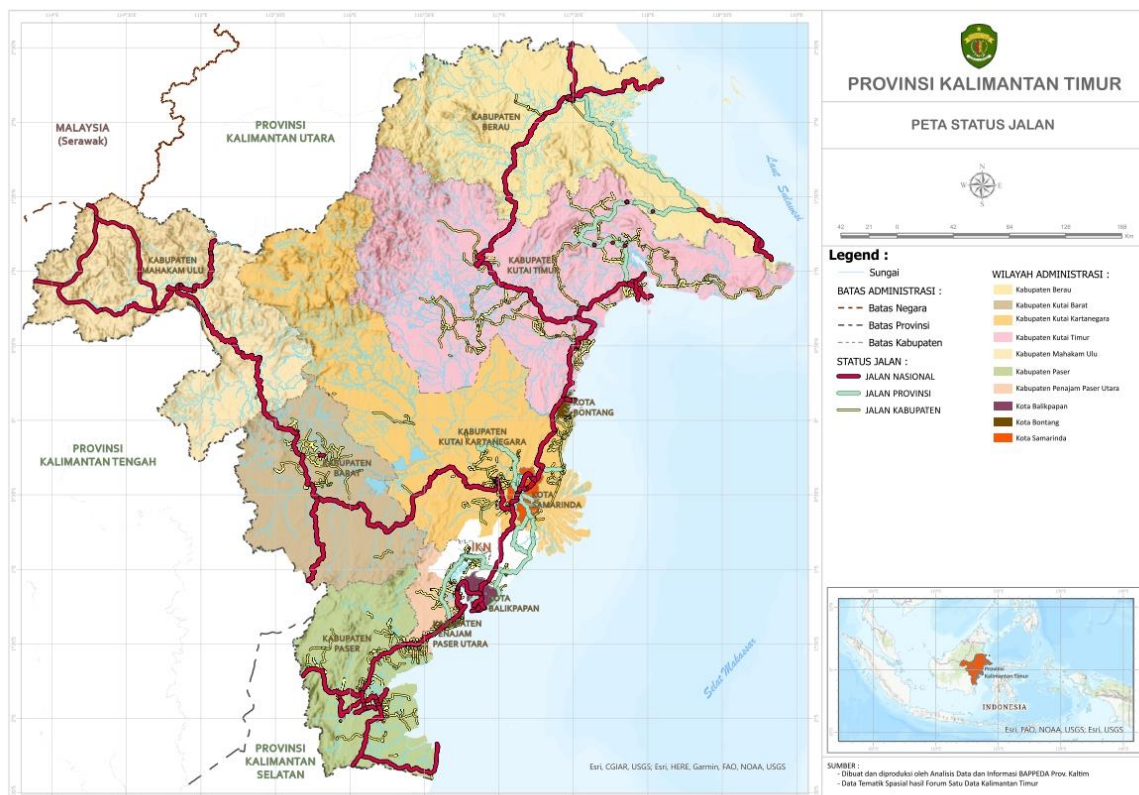
**Gambar II.68**  
**Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2018-2023**

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu permasalahan yaitu rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 149,19 km/1.000 km<sup>2</sup> (terdapat jalan sepanjang 149,19 km di dalam wilayah seluas 1000 km<sup>2</sup>)

masih di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km<sup>2</sup>. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Penyebaran penduduk yang tidak merata masih dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung;
2. Permasalahan penyediaan lahan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan;
3. Keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas Kalimantan;
4. Pembangunan jalan di perbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
5. Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
6. Pengendalian batas maksimal muatan barang yang sesuai kelas jalan belum optimal; dan
7. Pembangunan jalan belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai jalan arteri dan kolektor

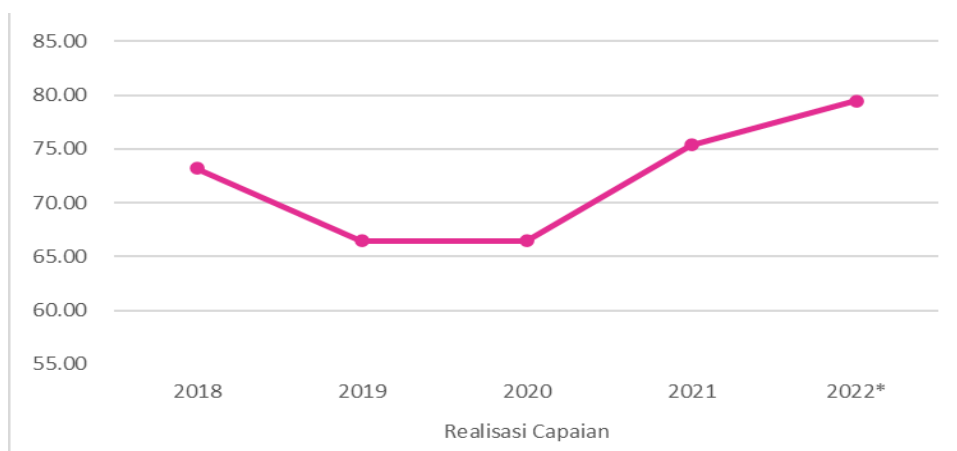


**Gambar II.69**  
**Peta Jalan Menurut Status Provinsi Kalimantan Timur**  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)



Dalam perwujudan penyelenggaraan penataan ruang, skoring penyelenggaraan penataan ruang menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan kinerja penataan ruang. Realisasi capaian kinerja skoring penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2019 sebesar 66.46% dan capaian yang sama pada tahun 2020.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Kawasan Strategis Provinsi tidak lagi ditetapkan dengan Perda RRTR melainkan menjadi bagian dari substansi Perda RTRW itu sendiri, sehingga hal ini mempengaruhi indikator pada aspek pelaksanaan penataan ruang. Sehingga, pada tahun 2021 dan 2022, terdapat peningkatan skoring menjadi 75,38 persen dan 78,57 persen dikarenakan progres revisi RTRWP telah berjalan sesuai dengan target.



**Gambar II.70**

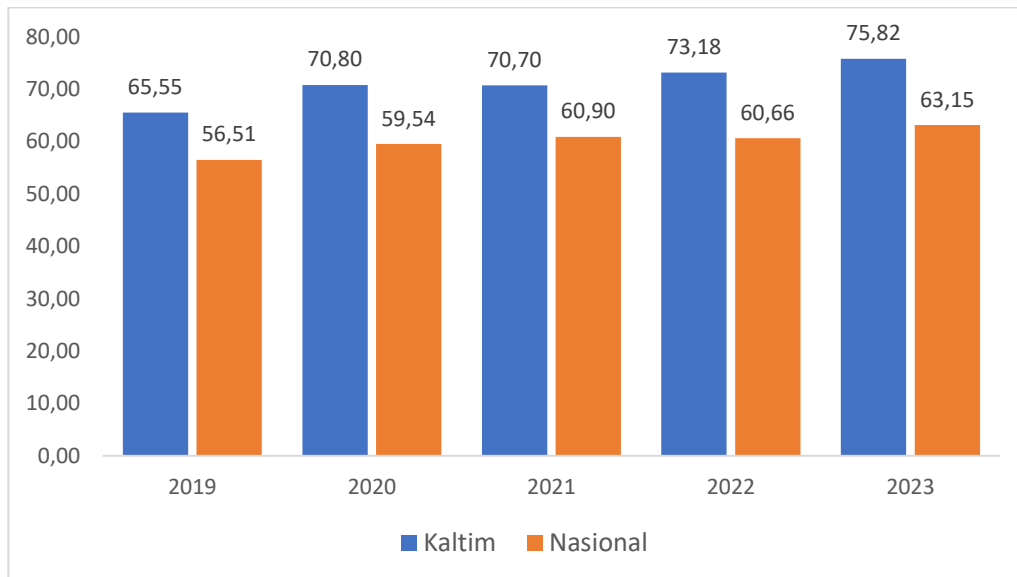
**Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang**

*Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023*

Pada tahun 2023 ditargetkan pencapaian Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang mencapai 83,10% dimana diperlukan peningkatan sebesar 4,53%. Adapun target ini didasarkan kepada peningkatan kinerja dari masing-masing aspek yaitu Aspek Pembinaan Penataan Ruang (38,30), Aspek Pengaturan Penataan Ruang (23,50) dan Aspek Pelaksanaan Penataan Ruang (23,10). Selain itu diharapkan pada awal tahun 2023, Revisi RTRWP sudah dapat ditetapkan menjadi Perda sehingga Kabupaten/Kota yang saat ini sedang melakukan peninjauan kembali dan proses revisi perda dapat mengacu perda RTRWP.

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Data SUSENAS tahun 2023 menunjukkan bahwa Rumah Tangga di Kalimantan Timur yang telah menempati rumah layak huni mencapai 75,82%. Kondisi ini naik sekitar 2,64% dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar karena masih terdapat 345.031 Rumah Tangga (24,18%) yang belum bertempat tinggal di rumah yang layak huni.

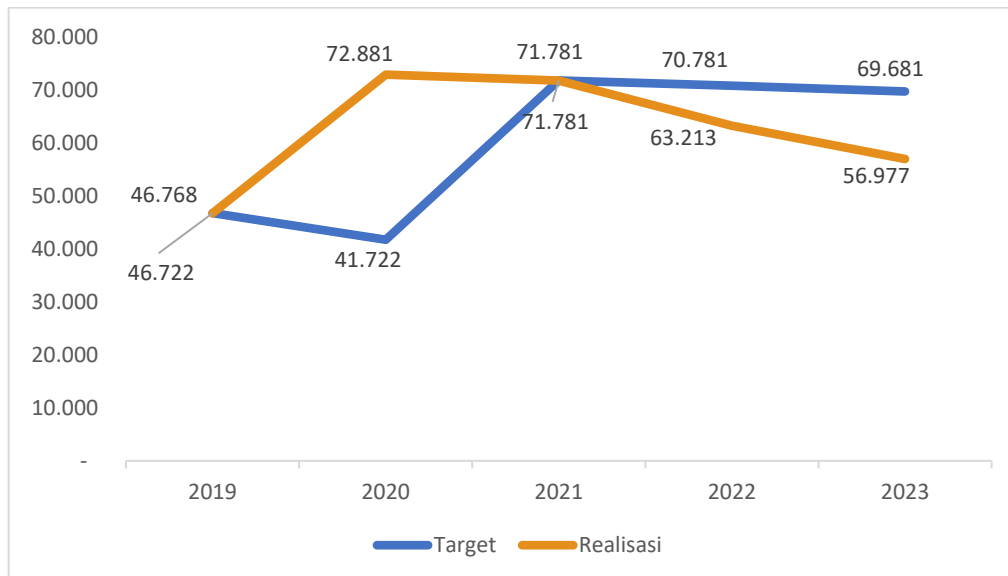


**Gambar II.71**

**Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni di Kaltim Tahun 2019 – 2023**

*Sumber: BPS Kaltim, 2024*

Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah tahun 2019 – 2023. Dalam rentang waktu tersebut, pengurangan ditargetkan mencapai 25.000-unit melalui berbagai skema pendanaan, antara lain program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dana APBN, APBD Provinsi Kaltim, serta APBD kabupaten/kota. Berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2023, masih terdapat setidaknya 56.977 RTLH di Kaltim yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Dari sisi pelaksanaan, penanganan melalui Dana APBD dilakukan dengan berpedoman pada kriteria penentuan kelayakan hunian bangunan. Kegiatan yang dilakukan adalah melalui perbaikan atap, lantai, serta dinding pada bangunan-bangunan yang telah terdata dan terverifikasi.



**Gambar II.72**

**Target dan Realisasi Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni**

*Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024*

Gambar diatas menunjukkan jumlah rumah layak huni tahun 2019 hingga 2023, yakni target dan capaian. Kinerja dikalkulasi melalui pengurangan RTLH setiap tahun, sehingga semakin kecil nilai RTLH maka kinerja dikatakan semakin baik. Kenampakan visual grafik memiliki sedikit anomali. Hal ini juga menunjukkan salah satu kendala atau kesulitan dalam perhitungan capaian kinerja penanganan RTLH, yakni inkonsistensi data *baseline* yang menyebabkan perubahan basis perhitungan. Kelemahan pada kondisi data *baseline* ini akan menjadi perhatian dalam proses perencanaan program penanganan RTLH tahun-tahun berikutnya.

Kalimantan Timur memiliki 1,881.67 Ha area yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mendefinisikan permukiman kumuh sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Secara lebih detail, Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018 menjabarkan aspek yang menjadi penentu dalam penetapan kawasan kumuh, yakni meliputi tujuh aspek dan 16 variabel. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, pengaruh kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, kondisi pengelolaan persampahan, aspek pengelolaan air limbah, aspek drainase lingkungan, serta kondisi jalan lingkungan.

**Tabel II.70**  
**Target dan Realisasi Luas Kawasan Kumuh Tahun 2018-2023**

Luas Kawasan Kumuh (Ha)						
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	673.42	620.06	1.287,82	1.237,82	1.187,82	1.137,82
Realisasi		645.47	1.287,82	1,190.14	1.151,49	1.143,89

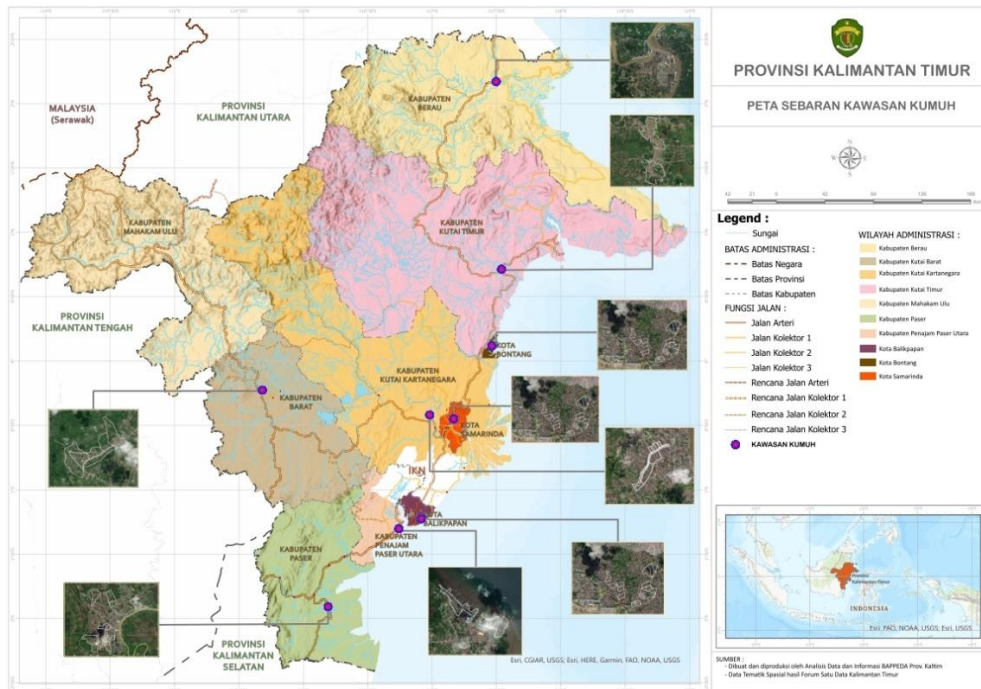
Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023

Lokasi kawasan kumuh ditetapkan oleh bupati/wali kota. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk penanganan areal kumuh dengan luasan 10-15 Ha, pemerintah pusat untuk luasan di atas 15 Hektar, sementara pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menangani areal di bawah 10 Ha. Hingga tahun 2023, luas kawasan kumuh tersisa 1.143,89 Ha. Capaian penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi penanganan antara berbagai sumber pendanaan.

**Tabel II.71**  
**Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan**

No.	Kab/Kota	Luas (Ha)			SK Bupati/Walikota
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	
1	Paser	180,74	35,06	8,72	No. 653/KEP-116/2021
2	KUBAR	969,43	37,5	38,69	No. 592/K.425/2021
3	KUKAR	122,99	37,51	7,61	No. 454/SK-BUP/HK/2019
4	KUTIM	783,73	0	0	No. 050/KK.268/2016
5	Berau	0	25,79	2,47	No. 30 Tahun 2020
6	PPU	49,07	0	0	No. 593.33/270/2017
7	MAHULU	37,15	0	2,45	No. 050.136.146/K.63/2020
8	Balikpapan	137,51	10,39	5,4	No. 188.45-326/2020
9	Samarinda	21,43	24,25	24,83	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Bontang	32,8	33,35	7,41	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kaltim		2.334,85	203,85	97,58	

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022



**Gambar II.73**  
**Peta Sebaran Kawasan Kumuh**  
*Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023*

Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 dimensi kebijakan dan strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih perlu mendapatkan perhatian. Pada dimensi pendayagunaan air, aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius yaitu penyediaan kapasitas air baku.

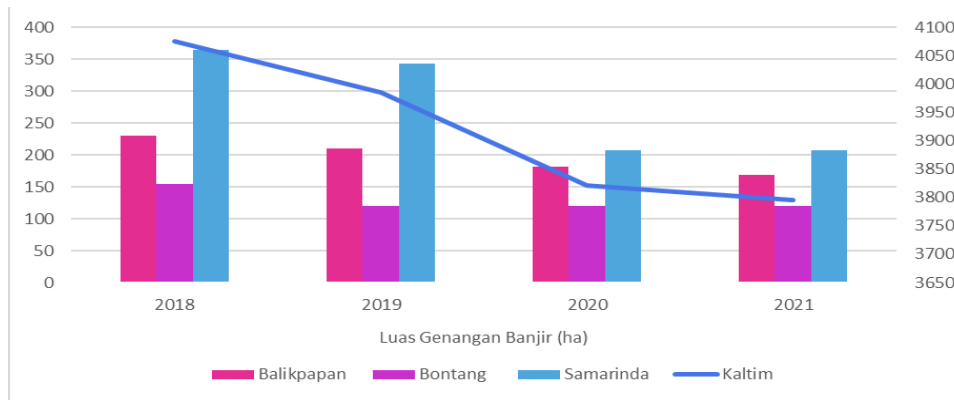
Kondisi eksisting penyediaan kapasitas air baku saat ini adalah sebesar 7.922 liter/detik. Hal ini masih jauh dari kebutuhan air baku yang diharapkan, kondisi ini terjadi dikarenakan kegiatan pembangunan Bendungan Marangkayu dan Sukarahmat yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air baku di Kota Bontang terkendala dalam pelaksanaannya yaitu pembebasan lahan, tumpang tindih dengan HGU, dan lokasi bendungan yang berada di kawasan lindung.

Pemenuhan kebutuhan air baku masih perlu untuk ditetapkan menjadi prioritas daerah, utamanya pada Kota Balikpapan dan Kota Bontang yang masih sangat bergantung pada penggunaan air tanah. Pemenuhan air baku dengan mengandalkan air permukaan sangat diperlukan untuk jangka panjang, sementara untuk pemenuhan air baku untuk jangka pendek masih tetap mengandalkan penggunaan air tanah dengan pembangunan sumur dalam. Penambahan kapasitas air baku juga dianggap sangat penting, terutama dengan ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu Kota Negara

(IKN). Dengan penetapan IKN di Kalimantan Timur maka diperkirakan akan terjadi peningkatan kebutuhan air baku sebagai konsekuensi dari penambahan penduduk dan tumbuhnya kegiatan ekonomi baru dalam mendukung IKN.

Pada dimensi pengendalian daya rusak air, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengurangan luas genangan banjir dan penanganan pantai kritis. Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, baik karena faktor alam maupun manusia. Faktor alam terutama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kondisi topografi, pasang surut dan kondisi geografis DAS yang luas. Sedangkan faktor manusia disebabkan oleh daerah tangkapan air (DTA) yang berubah fungsi, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai serta sistem drainase yang tidak tertata dan berfungsi dengan baik. Hampir semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir.

Penanganan banjir diprioritaskan pada wilayah perkotaan, yakni Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang. 3 Kota tersebut ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Timur yang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur. Luas genangan banjir Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dalam 4 tahun terakhir mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar II.46, capaian kinerja pengurangan luas genangan banjir selalu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Namun demikian kendala yang dihadapi dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan pembebasan lahan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem pengendali luapan air sungai, adanya utilitas terbangun (jalur pipa PDAM, Listrik, Telekomunikasi dan kabel optik), lokasi penanganan banjir yang merupakan daerah padat penduduk, serta faktor cuaca yang tidak menentu. Selain permasalahan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum optimal.



**Gambar II.74**

**Luas Genangan Banjir 3 Kota Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2021 (Ha)**

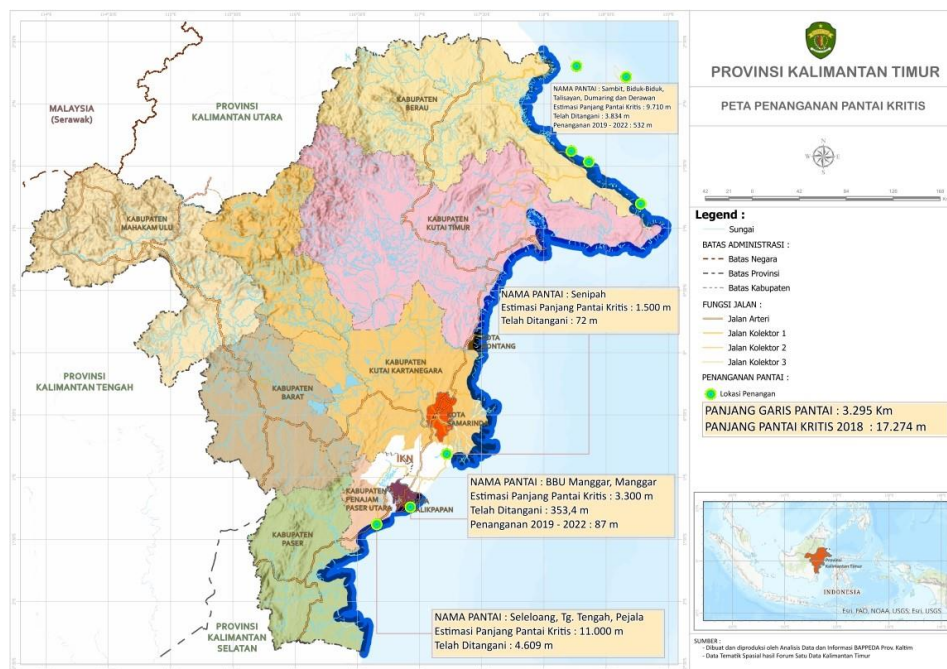
*Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022*

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menurunkan luas genangan banjir seluas 279 Ha dalam kurun waktu 4 tahun. Meskipun capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan, namun penanganan banjir masih perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat pada awal periode RPJMD (Tahun 2018) Provinsi Kalimantan Timur, luas genangan banjir masih 4.075 Ha yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2022 – 2023 terdapat tambahan capaian penurunan luas genangan banjir seluas 197 Ha.

Kalimantan Timur mempunyai garis pantai sepanjang 3.925 Km yang terbentang dari Kabupaten Berau di bagian Utara dan Kabupaten Paser di wilayah Selatan. Dengan garis pantai yang sangat panjang maka potensi terjadinya pengikisan akibat gelombang dan arus laut yang bersifat destruktif atau merusak menjadi cukup tinggi. Sementara pembangunan infrastruktur pengaman pantai masih rendah capaiannya, tidak berbanding lurus dengan panjang pantai kritis yang ada. Berdasarkan data perhitungan tahun 2019 terdapat 13.600 meter pantai kritis yang berada di dalam WS. Kewenangan Provinsi (Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau), sementara itu pembangunan infrastruktur pengaman pantai sampai dengan tahun 2022, baru mencapai 455 meter. Sehingga kedepannya penanganan pantai kritis harus dilanjutkan setiap tahunnya, agar dapat meminimalisir daya rusak air terhadap pantai. Namun penanganan ke depan perlu juga dipikirkan penanganan alternatif selain pembangunan fisik seperti konservasi/vegetasi.

Berdasarkan hasil laporan capaian terhadap Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang

terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi tahun 2021 sebesar 35,29% dan tahun 2022 sebesar 46,47%.



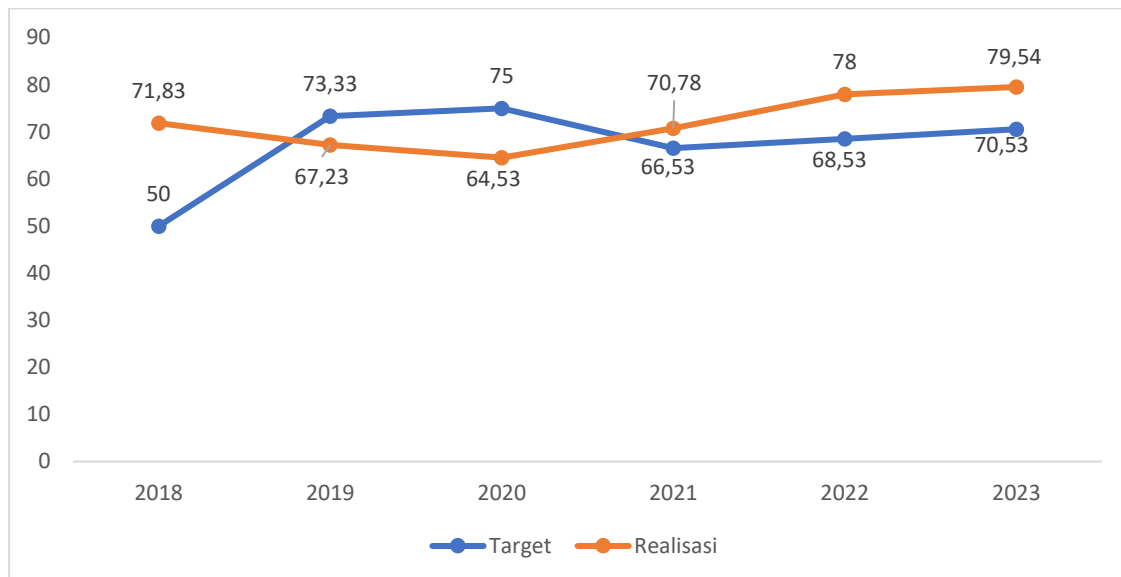
**Gambar II.75**  
**Penanganan Pantai Kritis**  
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022)

Pengelolaan pantai dan penanganan pantai kritis menjadi elemen yang sangat penting dalam pengelolaan daerah pesisir yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung kemandirian dan pertumbuhan perekonomian berbasis non migas. Pantai merupakan potensi pariwisata yang menjadi salah satu andalan Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Kabupaten Berau menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya Pulau Derawan yang mengedepankan pembangunan di sektor pariwisata. Penanganan pantai juga dilaksanakan dalam rangka mendukung masyarakat pesisir dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, yang mayoritas bergantung pada pemanfaatan hasil laut.

Selain upaya pencapaian target SPM air minum (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal), Kalimantan Timur memiliki target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak. Akses air minum layak merupakan kemudahan/kemampuan penduduk memperoleh kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari dari sumber terlindungi baik dari jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Persentase akses air minum layak merupakan rasio antara jumlah penduduk yang telah memperoleh suplai air minum dengan total jumlah penduduk. Dalam 5 tahun terakhir, capaian akses air minum layak menunjukkan kinerja yang baik. Walaupun



target tidak tercapai pada awal dan pertengahan tahun perencanaan (2019-2020), namun sejak tahun 2021, realisasi pemenuhan akses air minum layak telah melampaui target yang ditetapkan. Grafik target dan realisasi direpresentasikan pada gambar dibawah ini.



**Gambar II.76**

**Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak 2018-2023 (%)**

*Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2024*

Angka capaian merupakan agregat dari pencapaian 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki capaian di atas 50% kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu yang aksesnya baru mencapai 23,35% dan 14,40%. Sementara capaian tertinggi berada di Kota Balikpapan. Walaupun secara cakupan Kalimantan Timur menunjukkan layanan yang baik, perhatian perlu diberikan pada aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku. Hampir seluruh area perkotaan, terutama tiga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) utama, memiliki cakupan di atas 80%. Sayangnya, suplai air baku yang mendukung tingginya capaian ini masih berasal dari air tanah, terutama di Kota Bontang dan Balikpapan. Kondisi ini dapat dikatakan tidak ideal dan tidak berkelanjutan. Sehingga diperlukan upaya untuk menyediakan air baku yang memenuhi standar keandalan, yakni bersumber dari air permukaan.

**Tabel II.72**  
**Capaian Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2022-2023**

No	Kabupaten/Kota	2022	2023
1	Balikpapan	99.25	98,99
2	Penajam Paser Utara	30.90	23,35
3	Paser	70.14	84,25
4	Bontang	83.55	83.55
5	Kutai Timur	51.73	55,03
6	Berau	82.16	81,55
7	Samarinda	87.27	87,27
8	Kutai Kartanegara	72.85	78,33
9	Kutai Barat	86.02	86,02
10	Mahakam Ulu	66.06	14,40
Provinsi		78.00	79,54

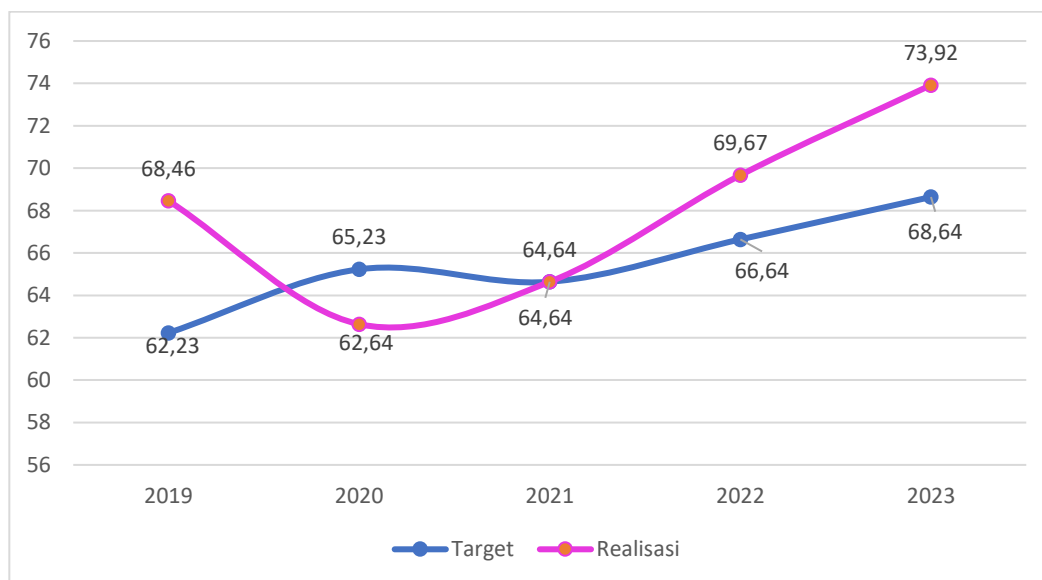
*Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024*

Dari sisi kualitas air yang digunakan oleh masyarakat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Data Susenas Kor (Maret 2022) menunjukkan bahwa terdapat 17.118 Rumah Tangga di Kaltim (1,3%) yang sumber air minumnya berasal dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung. Sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Sementara untuk keperluan domestik lainnya (memasak, mandi, mencuci, dll), terdapat sekitar 5.55% Rumah Tangga yang menggunakan air dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung dan sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Hal ini mengartikan bahwa terdapat penduduk yang sumber air bersihnya memiliki potensi terkontaminasi dengan air buangan/limbah domestik (termasuk tangki septik). Kondisi ini dapat membawa risiko negatif bagi kesehatan karena masyarakat berpotensi terpapar bakteri dari buangan air limbah.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target akses air minum layak secara nasional adalah 100% pada tahun 2024. Hingga tahun 2023, capaian air minum layak di Kaltim baru mencapai 79,54%. Oleh karena itu, masih terdapat gap yang cukup besar antara capaian Kalimantan Timur dengan target nasional. Pemerintah Provinsi tidak dapat sepenuhnya mengejar target tersebut mengingat kewenangan pemerintah provinsi terbatas pada suplai air baku untuk air minum pada cakupan regional atau lintas kabupaten/kota.

Dari 841 desa & kelurahan yang ada di Kaltim, rencana SPAM regional diperkirakan hanya mampu menyuplai air minum curah untuk kurang lebih 260 desa/kelurahan. Oleh karena itu, untuk mencapai target 100% cakupan layanan, diperlukan strategi penanganan khusus, salah satunya melalui mekanisme bantuan keuangan. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terutama untuk kompilasi data capaian di setiap kabupaten/Kota yang akan diagregat menjadi capaian provinsi.

Capaian layanan air minum layak melalui sistem perpipaan telah diterima oleh 73,92% dari jumlah penduduk Kaltim (Gambar II. 77) . Nilai ini adalah angka layanan baik sistem perpipaan PDAM maupun non-PDAM. Dalam konteks capaian berdasarkan dokumen RPJMD Kaltim 2019 – 2023, capaian air minum layak perpipaan tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan, yakni sebesar 66,64%. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, air minum layak perpipaan di Kaltim ditargetkan mencapai 71.75% pada tahun 2024, sehingga terdapat *gap* antara target nasional dengan kondisi saat ini, yakni berkisar 2.17%.



**Gambar II.77**

**Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Perpipaan Kaltim**

(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2024)

Penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur air limbah oleh provinsi yang dilakukan hingga saat ini belum secara langsung memperlihatkan manfaat/dampak yang nyata terkait pencapaian SPM air limbah skala provinsi. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan teknis sektor air limbah serta

pemberian pendampingan untuk implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Tahun 2022, pendampingan dilakukan untuk Kota Samarinda dan Kabupaten Berau sementara tahun 2023, pendampingan akan dilakukan untuk Kabupaten Paser, Mahulu, dan Kota Bontang. Nilai capaian sektor sanitasi yang digunakan sebagai indikator merupakan nilai capaian agregat 10 Kabupaten/Kota. Pada dimensi layak, sudah 83,84% penduduk mendapat layanan sanitasi. Namun, capaian masih sangat minim pada dimensi aman, yakni baru mencapai kurang dari 5%.

**Tabel II.73**  
**Capaian Sektor Air Limbah 2023**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Air Limbah	
		Layak (%)	Aman (%)
Balikpapan	718.423	91,40	9,18
Penajam Paser Utara	186.801	95,68	3,70
Paser	288.225	92,75	0,71
Bontang	185.928	100,00	7,63
Kutai Timur	424.743	89,10	2,70
Berau	263.150	90,55	3,35
Samarinda	838.935	78,02	7,95
Kutai Kartanegara	753.862	75,02	0,32
Kutai Barat	170.871	61,11	1,59
Mahakam Ulu	35.274	52,50	2,91
Kaltim 2022	3.866.212	83,84	4,71

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023. Agregasi capaian Kabupaten/Kota

Walaupun belum mencapai kondisi ideal dan masih jauh dari kondisi aman, secara nasional Kaltim memperlihatkan kemajuan penanganan sanitasi yang baik, terutama dari sisi tempat pembuangan tinja. Pada tahun 2022 (Maret), hampir seluruh Rumah Tangga di Kaltim atau 92,83 persen terlayani oleh tangki septik. Kondisi ini sudah berada di atas rata-rata nasional yakni 82,56 persen. Walaupun secara persentase terlihat baik, angka absolut untuk Rumah Tangga yang membutuhkan perhatian dapat dikatakan cukup signifikan. Pada tahun 2021, terdapat 75.956 Rumah Tangga yang masih membuang tinja secara langsung ke berbagai obyek geografis lingkungan alam, seperti kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun/dan lainnya.

Jumlah Penumpang yang terlayani dan jumlah barang yang diangkut terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2019 jumlah orang yang terlayani sebesar 10.721.656 orang penumpang, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak

7.150.906 orang penumpang sehingga menjadi 3.570.750 orang penumpang, kemudian mengalami peningkatan kembali sehingga menjadi 4.667.228 orang penumpang. Pada tahun 2019 jumlah barang yang diangkut sebesar 341.529.297 ton, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 47.041.900 ton sehingga menjadi 294.487.397 Ton. Hal ini disebabkan beberapa negara telah melakukan pembatasan penerbangan untuk mencegah wabah pandemi COVID-19 masuk ke negara tersebut. Pada tahun 2021, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian dikarenakan telah berkurangnya pandemi COVID-19 dan telah dilaksanakannya vaksinasi sehingga jumlah penumpang dan barang yang diangkut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 4.667.228 orang dan 323.233.820 ton. Pada tahun 2022 jumlah penumpang dan barang yang diangkut terus mengalami peningkatan, untuk jumlah penumpang menjadi 8.513.323 orang dan jumlah barang menjadi 513.031.229 ton. Pada tahun 2023 jumlah penumpang dan barang yang diangkut terus mengalami peningkatan, untuk jumlah penumpang menjadi 10.613.323 orang dan jumlah barang menjadi 605.744.460 ton.



**Gambar II.78**  
**Jumlah Penumpang yang terlayani dan Jumlah Barang**  
**Tahun 2017-2023**

*Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2024*

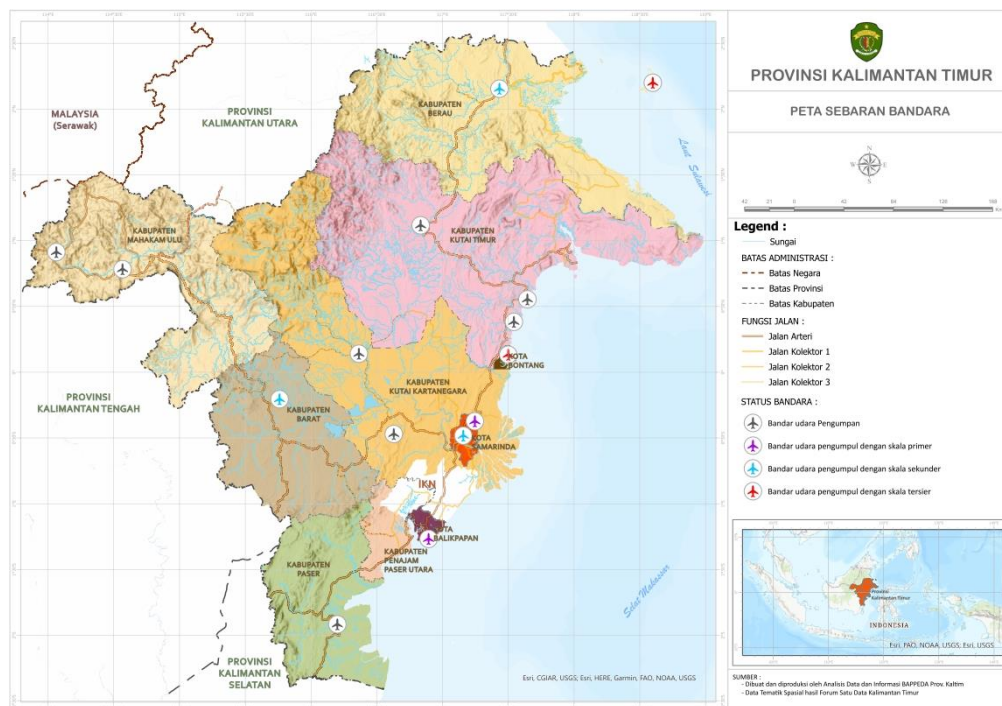
Ketersediaan prasarana perhubungan laut juga sudah cukup baik, upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pengembangan pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Terminal Peti Kemas Balikpapan dan Pelabuhan Maloy.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang yang terletak di Kota Balikpapan. Selain itu layanan transportasi udara yang cukup memadai juga difasilitasi oleh Bandara

Kalimarau di Berau dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Bandara-bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Meskipun kuantitas bandara dan maskapai tidak mengalami perubahan sejak tahun 2017, namun kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan perhubungan udara terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Di Kalimantan Timur terdapat 6 bandar udara yang terdiri dari 1 bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I dan 5 bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI. Secara khusus perkembangan bandara APT. Pranoto, saat ini telah beroperasi 7 (tujuh) maskapai dengan rute penerbangan yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Berau, Melak, Tanjung Selor, dan Datar Dawai.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang *runway* 1.600 m telah dilakukan di kawasan perbatasan yaitu kecamatan Data Dawai dan di Pulau kecil terluar yaitu Pulau Maratua. Selain itu, telah direncanakan pembangunan bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di daerah perbatasan, dan Bandara Paser di Kabupaten Paser pada wilayah Selatan Provinsi Kalimantan Timur.



**Gambar II.79**  
**Peta Bandara Kalimantan Timur**  
*Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021*

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 bahwa pendekatan multi-dimensi dalam perumusan kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana amanat undang-undang diharapkan mampu mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, membantu menciptakan konektivitas dan pola distribusi nasional yang handal (*reliable*) dan dinamis serta berkontribusi dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan hierarki pelabuhan, di Kalimantan Timur tahun 2017 telah ditetapkan 13 pelabuhan laut yang terdiri 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 3 (Tiga) Pelabuhan Regional. Selanjutnya pada tahun 2022 penetapan Pelabuhan tersebut mengalami perubahan menjadi 1 (satu) Pelabuhan Utama, 10 (Sepuluh) Pelabuhan Pengumpul dan 2 (Dua) Pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Mantaritip di Kabupaten Berau dan Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur.

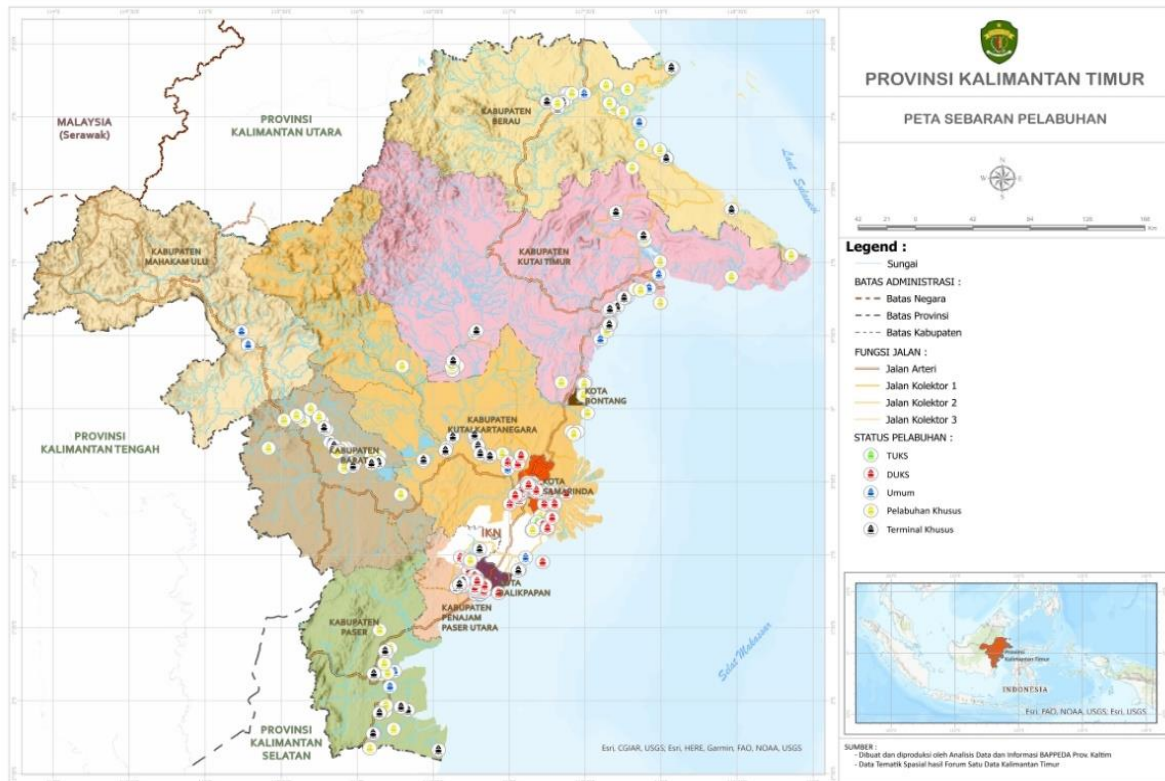
**Tabel II.74**  
**Rencana Induk Pelabuhan Nasional Di Kalimantan Timur Berdasarkan**  
**KP 432 Tahun 2017**

No.	Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan						
	Kab/Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
				2017	2022	2027	2037
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur							
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU
305	Berau	2	Mantaritip	PR	PR	PR	PR
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP
309	KUKAR	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP
310	KUKAR	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP
311	KUTIM	8	Maloy	PP	PP	PP	PP
312	KUTIM	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP
313	KUTIM	10	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP
315	PPU	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP

*Sumber: Kementerian Perhubungan Provinsi KALTIM*

Untuk pelayanan angkutan penyeberangan telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang terdapat di Kalimantan Timur yaitu 2 (dua) Pelabuhan Kelas I yang terdiri dari Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Penajam, 1 (satu) Pelabuhan Kelas II yaitu Pelabuhan Tenggarong, dan 4 (empat) Pelabuhan Kelas IV yang terdiri dari Pelabuhan Desa Sakka, Sungai Meriam, Handil I dan Gunung Tabur.





**Gambar II.80**  
**Peta Pelabuhan Kalimantan Timur**  
*Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022*

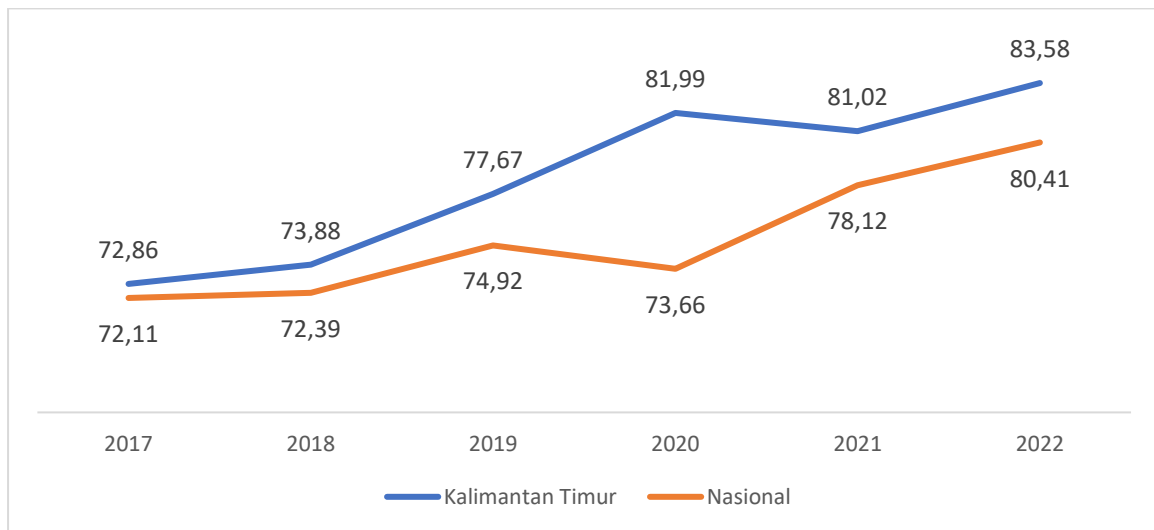
Untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Namun kondisi kedua terminal tersebut memerlukan peningkatan pelayanan fasilitas. Selanjutnya untuk melayani Antar Kota Dalam Provinsi ditetapkan 7 Terminal Tipe B yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota.

### 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

#### 1. Indeks Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksnya mencapai 83,58 persen pada tahun 2022 dan di level nasional berada pada peringkat ke Empat setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (85,62), Jawa Timur (84,92), dan Jawa Tengah (84.79). Nilai indeks ini mengalami peningkatan sebesar 2,56 Poin dibandingkan nilai pada

Tahun 2021. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur masuk dalam kategori “*high performing democracy*”. Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur masih tetap berada di atas IDI nasional yang mencapai 78,12.



**Gambar II.81**  
**Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017-2022**

*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023*

Perkembangan IDI Kalimantan Timur dari 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi, Capaian IDI terendah pada tahun 2017 sebesar 72,86 sedangkan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 81,99. Fluktuasi angka IDI mencerminkan dinamika situasi demokrasi di wilayah Kalimantan Timur.

Pada tahun 2021 Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan metode baru dimana pada metode lama fokus pada demokrasi politik yang hanya mengukur demokrasi politik yang memiliki porsi besar pada *institutional democracy* seperti Lembaga pemilu, DPRD, birokrasi, dll sedangkan pada metode baru fokus pada demokrasi yang lebih luas dimana mengurangi porsi ukuran *institutional democracy* dan melibatkan aspek ekonomi politik. Selain itu pada metode lama terdapat 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator sedangkan pada metode baru hanya ada 3 aspek dan 22 indikator.

Berdasarkan capaian IDI Tahun 2022 di Kalimantan Timur, masih terdapat 1 indikator yang nilainya masih dibawah 60, yaitu Indikator Lembaga Kinerja Legislatif dengan Nilai 57,14. Diperoleh dari persentase perda yang disahkan terhadap target Propemperda. Data dari sekretariat

DPRD Provinsi Kalimantan Timur diperoleh ada 8 perda yang disahkan dari 14 target yang masuk di Propemperda pada tahun 2022.

## 2. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang relatif aman dari konflik sosial. Walau demikian Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). Secara umum kondisi ketertiban dan ketenteraman sampai dengan tahun 2020 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap baik aparat pemerintah dan aparat keamanan. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Upaya penurunan peristiwa kejahatan dan pelanggaran ini memang terus diupayakan. Berdasarkan data yang ada, penurunan angka kejahatan dan pelanggaran saat ini masih belum optimal. Pada tahun 2017, persentase penurunan angka kejahatan dan pelanggaran sebesar 31 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 11 persen, hingga pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14 persen.

**Tabel II.75**  
**Angka Pelanggaran K3 dan Perlindungan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021**

Elemen Data	Tahun					Ket.
	2018	2019	2020	2021	Satuan	
Jumlah Aparat Satpol PP dan Linmas	23.026	23.028	23.811	23.812	Orang	Jumlah Aparat Satpol PP dan Satlinmas
Jumlah Aparat Satpol PP	493	441	1.224	1.225	Orang	Jumlah PNS dan Non PNS
1) Provinsi	143	145	172	173	Orang	Jumlah PNS dan Non PNS
2) Kab/Kota	1.502	1.502	1.052	1.052	Orang	Jumlah PNS dan Non PNS
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	22.587	22.587	22.587	22.587	Orang	Linmas Cadangan umum
Provinsi	30	30	30	30	Orang	Jumlah Non PNS
Kab/Kota	22.557	22.557	22.557	22.557	Orang	Jumlah Linmas

Elemen Data	Tahun					Ket.
	2018	2019	2020	2021	Satuan	
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 jam	2.793	2.793	2.793	2.793	Kali	24 Jam (1 Tahun)
Jumlah Pos Siskamling	1.927	1.927	1.927	12.293	Unit	Pos Jaga
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa	2	2	2	0,49		
Jumlah Pelanggaran K3	138	138	138	5.157	Kasus	
Jumlah penyelesaian Pelanggaran K3	365	365	365	4.508	Kasus	
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	264	264	264	41	%	
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	4	4	3	0,01		

Masih belum optimalnya penurunan angka kriminalitas disebabkan karena pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat juga kurang. Berdasarkan indikator persentase poskamling aktif, pada tahun 2016, jumlahnya hanya sebesar 2.242. Angka ini mengalami penurunan menjadi 1927 pada tahun 2020. Dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai upaya penurunan angka kriminalitas untuk jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 63 kali, tahun 2017 sebanyak 211 kali, tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 2.793 kali.

Saat ini total jumlah petugas linmas adalah 30 orang. Idealnya setiap pos kamling dijaga minimal 2 orang dengan asumsi penjagaannya selama 24 jam bukan hanya pada malam hari saja. Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020, karena keterbatasan tersebut, satlinmas diorientasikan untuk membantu pelaksanaan pengawasan Pilkada. Kurangnya jumlah petugas linmas ini karena aturan terdahulu belum memberikan insentif kepada petugas linmas yang berasal dari anggaran dinas. Mengikuti aturan terbaru dari Permendagri, program satlinmas ini nantinya berhak mendapatkan biaya operasional dari pemerintah. Diharapkan dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja bagi para petugas linmas.

Angka kriminalitas khususnya jumlah tindak pidana di Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir cenderung menurun. Ini terlihat dari jumlah

tindak pidana yang tercatat pada Polda Kaltim, yang pada tahun 2018 terdapat 6.715 tindak pidana, yang turun menjadi 5.253 tindak pidana pada 2019, dan turun kembali pada 2020 menjadi 4.368 tindak pidana.

Persentase penyelesaian kasus terhadap peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 85,00 persen, yang berarti mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 87,00 persen.

**Tabel II.76**  
**Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2023**

Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2017	11.705	1.591	8.622	73,66	33,39
2018	6.715	1.228	5.487	81,71	18,90
2019	5.253	670	4.583	87,25	14,47
2020	4.368	506	1.696	87,00	6,01
2021	4.184	506	1.696	85,00	6,01
2022	4.945	958	3.987	80,63	12,82
2023*)	3.270	1.300	1.970	60,24	8,36

\*) Data Sementara; Sumber: POLDA KALTIM, 2024

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir yakni Tahun 2018 s/d Tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan yang mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2022, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 115 dimana 20,00% (23 demonstrasi) terkait Ekonomi; 10,43% (12 demonstrasi) terkait Politik; 13,04% (15 demonstrasi) terkait Sosial; 46,09% (53 demonstrasi) terkait Hukum; 0,87% (1 demonstrasi) terkait Agama; 9,57% (11 demonstrasi) terkait Kamtibmas.

**Tabel II.77**  
**Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022**

Jenis Demo	Tahun					Jumlah
	2018	2019	2020	2021	2022	
Ekonomi	9	9	1	8	23	65
Politik	2	0	6	5	12	36
Sosial	22	15	14	15	15	119
Budaya	4	0	0	0	0	5
Pendidikan	0	0	0	0	0	2

Jenis Demo	Tahun					Jumlah
	2018	2019	2020	2021	2022	
Hukum	33	18	32	34	53	202
Agama	6	0	1	1	1	13
Hankam	0	0	0	0	0	1
Tapal Batas	0	0	0	0	0	0
Sengketa Lahan	0	8	14	2	0	24
Kamtibmas	0	4	2	2	11	19
Lingkungan	0	0	0	3	0	3
Jumlah	76	54	70	70	115	489

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi KALTIM, 2023

### 3. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia sangat dinamis. Ini menjadi salah satu potensi besar dalam keberagaman. Maka perlu upaya untuk meningkatkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan.

Indeks KUB adalah ruang diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia. Selain itu, riset ini pun memotret dinamika keagamaan aktual sekaligus mencari formula solusi untuk kebijakan keagamaan yang lebih baik. Kontribusi pemikiran dan hasil riset senantiasa penting dalam rangka membantu perumusan dan pengambilan kebijakan yang berbasis data dan fakta. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebesar 76,6 masuk dalam kategori baik.

### 4. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah adalah refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 mencapai 3,27.

#### 2.4 Aspek Pelayanan Umum

##### 1. Indeks Reformasi Birokrasi

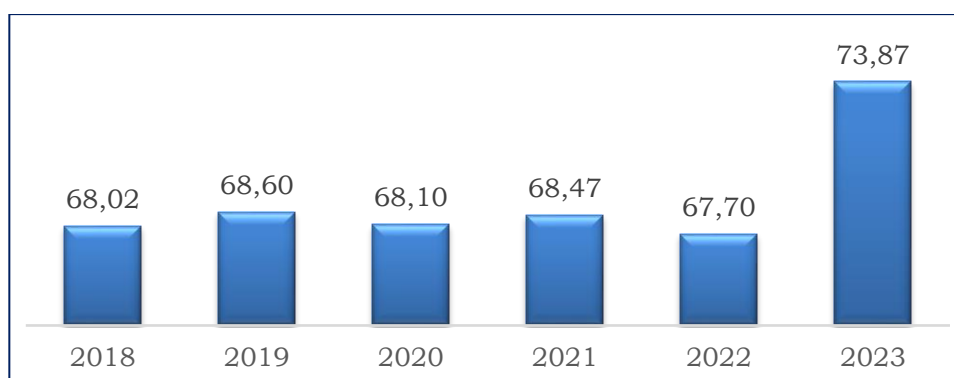
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui

RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Pembangunan.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy).

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode Road Map RB sejak Grand Design RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kota.

Progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Gambar II.4.1. disajikan grafik nilai Indeks RB selama enam tahun terakhir. Secara umum, Indeks RB Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mengalami peningkatan berada di angka 73,87 dengan predikat BB (**Sangat Baik**).



**Gambar II.82**

**Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur**

*Sumber: Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2024*

## 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada tahun 2021 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan nilai menjadi 2,22 dibandingkan tahun sebelumnya berada di angka 3,14. Hal ini disebabkan karena perubahan aspek penilaian dan evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2018 hingga 2020 pedoman evaluasi yang dilakukan menggunakan Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan tahun 2021 hingga saat ini menggunakan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**Tabel II.78**  
**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	2,89	3,04	3,14	2,22	2,11	2,91

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim

Pelaksanaan SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga diikuti dengan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan data 2023, terdapat 3 (enam) daerah yang memiliki SPBE dengan predikat Cukup, sedangkan 1 (satu) daerah masih berpredikat Kurang. Ini menunjukkan masih perlunya penyiapan dan peningkatan penerapan SPBE baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

**Tabel II.79**  
**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

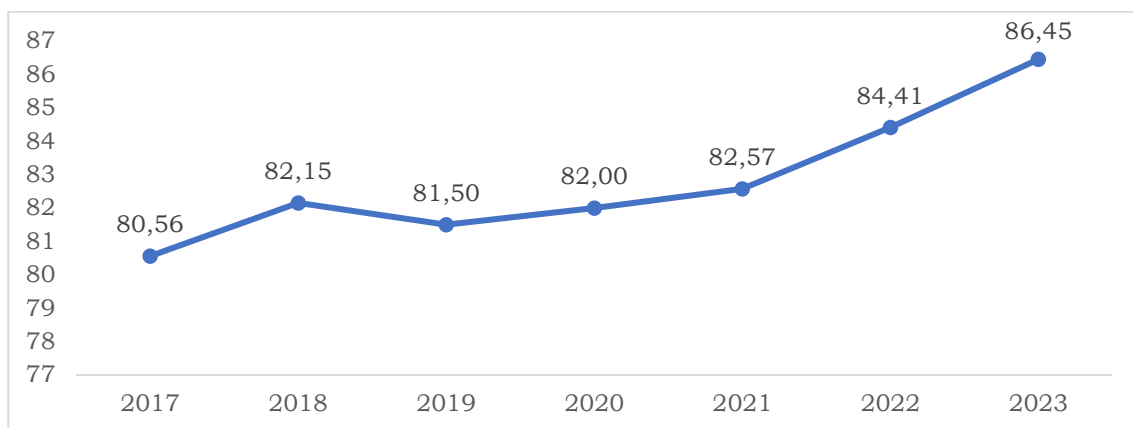
INSTANSI	INDEKS SPBE	PREDIKAT
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2,91	BAIK
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	2,54	CUKUP
Pemerintah Kab. Paser	2,90	BAIK
Pemerintah Kab. Berau	2,02	CUKUP
Pemerintah Kab. Kutai Barat	2,50	CUKUP
Pemerintah Kab. Kutai Timur	3,20	BAIK
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	2,85	BAIK
Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	1,11	KURANG
Pemerintah Kota Samarinda	3,14	BAIK
Pemerintah Kota Balikpapan	3,75	SANGAT BAIK
Pemerintah Kota Bontang	2,83	BAIK

Sumber : Kepmenpan RB No. 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023



### 3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah dan UPTD atau Cabang Dinas di Kalimantan Timur pada tahun 2023 meningkat di angka 86,45 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 84,41. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemajuan dalam kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur walaupun belum stabil sehingga terjadi fluktuasi pada angka IKM.



**Gambar II.83**  
**Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2017-2023**

*Sumber: Biro Organisasi Provinsi KALTIM*

Peningkatan ini berdasarkan dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah beserta UPTD atau Cabang Dinas pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nilai tersebut seharusnya dapat lebih meningkat dari seharusnya, dikarenakan keterlambatan pada beberapa Perangkat Daerah untuk menyampaikan hasil survey.

### 4. Nilai SAKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan nilai sebesar 77,89 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja

“Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

**Tabel II.80****Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Timur**

KOMPONEN DINILAI	YANG	BOBOT	NILAI					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
a. Perencanaan Kinerja		30	25.35	25.59	25.92	25.94	26,06	25,89
b. Pengukuran Kinerja		30	18.28	18.77	18.97	18.99	22,50	22,48
c. Pelaporan Kinerja		15	12.47	12.54	12.75	12.76	12,84	12,76
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		25	5.13	5.91	6.21	6.21	16,70	16,76
e. Capaian Kinerja		-	13.66	13.74	13.82	13.92	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,50	74,89	76,55	77,67	78,10	77,89
Predikat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber: Surat Kementerian PAN dan RB Nomor: B/497/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

Hasil evaluasi tahun 2022 “tidak dapat diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level Perangkat Daerah.

## 5. Opini BPK

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2012 sampai 2023. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan aset-aset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

## 6. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini merupakan Tahun keempat dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup urusan konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan dengan tujuan meningkatkan citra dan wibawa pemerintahan daerah.

LPPD memuat capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial), hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah dan Inovasi Daerah.

Peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Hasil Evaluasi Skor Kinerja Provinsi Kalimantan pada Tahun 2023 atas Dokumen LPPD Tahun 2022 mencapai skor 3,5178 dengan status kinerja “tinggi” dengan memperoleh peringkat ke enam nasional (dari 38 Provinsi).

## 7. Pengawasan

### 1) Tingkat Maturitas Sistem Intern Pemerintah (SPIP)

Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 berada pada Level 3 atau Tingkat Terdefinisi yang artinya pada tingkat ini, Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan

dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau Terdefinisi yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas Terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktik secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah sampel sebanyak 11 Perangkat Daerah, yaitu Inspektorat, Bappeda, BPSDM, BPKAD, Dinas Perindagkop UKM, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial. Pada tahun 2021 ini sebenarnya penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang harus dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan, namun belum dilaksanakan hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dan Bimtek SPIP kepada perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai *pilot project* Maturitas SPIP Terintegrasi. Pada tahun 2022 telah dilakukan *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada perangkat daerah yang pemangku penanggung jawab atas pencapaian RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dimana dari hasil *Quality Assurance* tersebut hasil sama dengan seperti pada tahun 2021 yang pada level 3 atau pada tingkat maturitas Terdefinisi. Penilaian Maturitas pada Tahun 2022 ini ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan atas peraturan Perka BPKP menggunakan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yaitu Penilaian Maturitas New SPIP Terintegrasi yang bertujuan agar penilaian Maturitas SPIP lebih berkaitan dengan Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan SPIP.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain:

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap:
  - (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas

implementasi peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/rekonsiliasi, (6) Pengamanan Aset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.

2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.
3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan *Whistle Blowing System* (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.
5. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan identifikasi dan Evaluasi atas pelaksanaan Benturan Kepentingan.
6. Pemprov Kaltim belum mempunyai Sistem Pengendalian Froud (*Fraud Control System*) dan Implementasinya.

**Tabel II.81**  
**Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	2	3	3	3	3

Sumber: Inspektorat Provinsi KALTIM, 2023

- 2) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP  
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam laporan tersebut ditemukan temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh obrik/entitas. Selama lima tahun terakhir, indikator ini menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2021 sempat sedikit mengalami penurunan akibat ada rekomendasi yang belum atau sulit dilaksanakan. Secara umum,

peningkatan ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan APIP semakin banyak yang ditindaklanjuti.

Target Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada tahun 2022 memang belum 100% sebab jumlah rekomendasi setiap tahun yang selalu bertambah sesuai laporan hasil pemeriksaan, masih terdapat rekomendasi temuan yang sudah lama dan berlarut-larut atau sulit untuk ditindaklanjuti. Selain itu, faktor lainnya adalah masih kurangnya kesadaran dan respons dari obrik untuk penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa ditindaklanjuti selama 60 hari setelah menerima LHP, masih kurangnya pemahaman obrik terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya, serta belum ada *reward and punishment*.

**Tabel II.82**

**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**

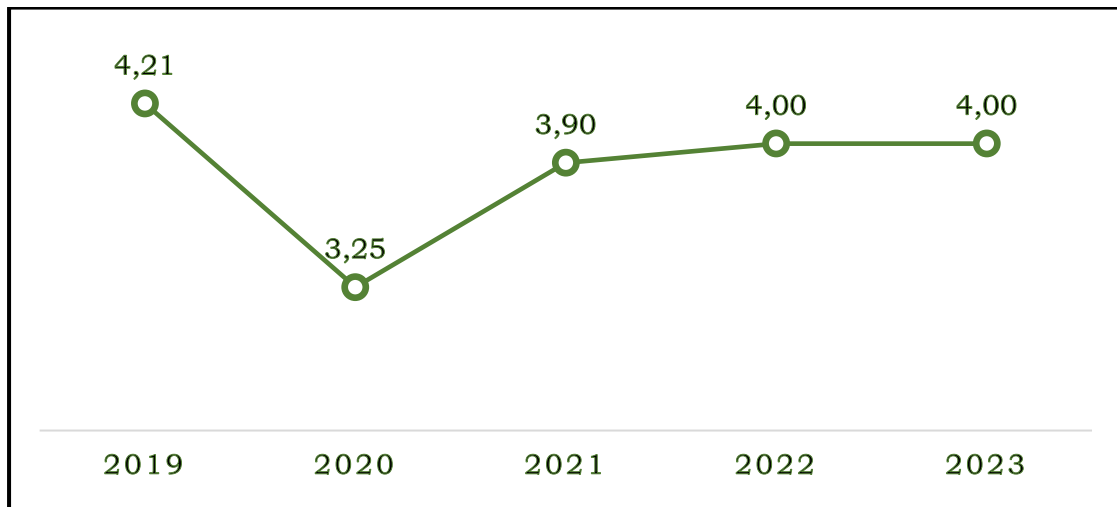
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (%)	75	80	81	80	85

Sumber: LkjIP Inspektorat Provinsi KALTIM Tahun 2019-2022

## 8. Indeks pelayanan publik

Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan). Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 mencapai 3,90. Nilai ini bertahan dari tahun 2021.



**Gambar II.84**  
**Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2019-2023**

*Sumber: Biro Organisasi Provinsi KALTIM*

## 9. Indeks inovasi daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 mencapai 49,23.

### 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 6002.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, maka Provinsi Kalimantan Timur untuk ini melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yang bersifat kualitatif yang kemudian diterjemahkan menjadi kuantitatif sesuai dengan Surat Edaran ini; Surat Edaran ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dalam rangka mencapai target pembangunan nasional

maupun daerah dilakukan koordinasi teknis pembangunan tahunan pada tahapan perencanaan (*ex-ante*), pelaksanaan (*on-going*), pengendalian dan evaluasi (*ex-post*).

Evaluasi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, dilakukan untuk mengetahui indikator kinerja makro dengan melihat capaian kinerja awal periode perencanaan tahun 2005 dan capaian kinerja pada tahun berjalan, sehingga apakah mengalami pertumbuhan atau terjadi penurunan, kemudian evaluasi pencapaian RPJPD dengan melihat arah kebijakan dan pencapaian pada masing-masing periode perencanaan, selanjutnya evaluasi capaian kinerja disertai penjelasan faktor penghambat dan faktor pendorongnya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur disusun dan telah dilaksanakan secara terpadu antar bidang, antar wilayah serta bertahap dalam 5 (lima) tahunan sesuai dengan tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Kelima periode tersebut yakni periode 1 tahun 2005-2008; periode 2 tahun 2009-2013; periode 3 tahun 2014-2018; periode 4 tahun 2019-2023; dan periode 5 tahun 2024-2025. Evaluasi terhadap pencapaian RPJPD yang pelaksanaannya dilakukan dalam lima periode tahap pelaksanaan dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Periode I (2005-2008)**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah periode 2005-2008 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Pembangunan Daerah yang berlaku sampai dengan Tahun 2008. Pelaksanaan pembangunan yang telah ditempuh selama ini menjadi pijakan dalam perencanaan pembangunan lima tahun pertama dengan prioritas pada penguatan dasar dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan kesadaran lingkungan yang semakin baik. Pembangunan jangka panjang pada tahap pertama diarahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi; pengembangan ekonomi diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat banyak; infrastruktur dasar lebih mendukung arah pengembangan kawasan prioritas; pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan lebih efisien dan efektif, dan hukum lebih diutamakan; serta penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan.



Pola ini diharapkan menjadi dasar pembentukan masyarakat yang sejahtera dengan dasar pembangunan yang berkeadilan.

Untuk menilai apakah arah kebijakan pembangunan tersebut dapat dikatakan tercapai atau tidak, beberapa indikator penilaian yang digunakan yakni: pertama, dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Gender, APK SLPT/MTS, dan penurunan angka buta aksara.

Kedua dalam hal pengembangan ekonomi yang diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat. Indikator yang digunakan yakni pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, pola pangan harapan, peningkatan produksi padi, peningkatan produksi perkebunan, perluasan area perkebunan, peningkatan populasi ternak, peningkatan produksi hasil ternak, peningkatan konsumsi hasil ternak, peningkatan produksi perikanan, peningkatan produksi batu bara, peningkatan produksi minyak bumi, dan peningkatan produksi gas bumi.

Ketiga dalam hal infrastruktur dasar yang lebih mendukung arah pengembangan kawasan prioritas. Indikator yang digunakan yakni pembangunan panjang jalan provinsi dan pembangunan sarana air bersih baik dalam konteks kapasitas produksi maupun jumlah sambungan rumah.

Keempat dalam hal pemerintahan yang berjalan dengan lebih efisien dan efektif serta mengedepankan hukum. Indikator yang digunakan yakni penurunan nilai kerugian keuangan negara, penurunan gangguan kamtibmas, penurunan jumlah kasus korupsi serta penambahan kebutuhan PNS se-Kaltim.

Kelima dalam hal penataan ruang, indikator yang digunakan adalah skoring penyelenggaraan penataan ruang. Sementara keenam dalam hal kelestarian alam dan lingkungan, indikator yang digunakan adalah rehabilitasi hutan dan lahan, skor rata-rata adipura kab/kota serta penanganan kasus lingkungan.

**Tabel II.83**  
**Capaian Indikator Arah Kebijakan RPJPD Periode I**

No	Periode I	Indikator	Capaian Awal	Target Akhir	Realisasi Akhir	Capaian
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	IPM (Peringkat Nasional)	5	5	5 (74,52)	100,00
		Tingkat Pengangguran Terbuka	167.024	141.354	157.376	88,67



No	Periode I	Indikator	Capaian Awal	Target Akhir	Realisasi Akhir	Capaian
		Angka Kemiskinan	10,66	9,51	9,51	100,00
		Indeks Pembangunan Gender (Peringkat Nasional)	30 (65,81)	30	30 (66,38)	100,00
		APK SLTP/MTS	89	94,57	87,53	92,56
		Penurunan Angka Buta Aksara	3,9	3,5	3,64	96,00
2	<b>Pengembangan ekonomi</b> diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat banyak;	Pertumbuhan Ekonomi	1,88	4,82	4,9	100,00
		PDRB Per kapita	73.844.436	101.099.177	103.206.871	100,00
		Pendapatan Per kapita	28.189.099	39.142.447	36.590.934	93,48
		Peningkatan Produksi Padi	567.502	624.833	324.785	51,98
		Peningkatan Produksi Perkebunan	2.159.434	529.733	1.747.771	100,00
		Perluasan Area Perkebunan	498.606	569.201	591.222	100,00
		Peningkatan Populasi Ternak (Ekor)	28.295.258	29.697.835	40.208.813	100,00
		Peningkatan Produksi Hasil Ternak (TON)	36.687,42	40.390,08	52.308,41	100,00
		Peningkatan Konsumsi Hasil Ternak	58.003,65	60.855,30	52.308,41	85,96
		Peningkatan Produksi Perikanan (TON)	204.419	219.931	185.839	84,50
		Peningkatan Produksi Batu Bara (TON)	97.333,395	136.000,000	118.853,758	87,39
		Peningkatan Produksi Minyak Bumi (Ribuan Barel)	52.809,530	55.936,630	55.936,630	100,00
		Peningkatan Produksi Gas Bumi (MMBTU)	1.072,815.900	1.080,709.510	1.080,709.510	100,00
3	<b>Infrastruktur dasar</b> lebih mendukung arah	Pembangunan Panjang Jalan Provinsi (Km)	1.762,07	1.762,07	1.627,87	92,38

No	Periode I	Indikator	Capaian Awal	Target Akhir	Realisasi Akhir	Capaian
	pengembangan kawasan prioritas	Pembangunan Sarana air Bersih Jumlah Sambungan Rumah	183.625	193.653	273.648	100,00
4	Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan lebih <b>efisien dan efektif</b> , dan <b>hukum</b> lebih diutamakan;	Penurunan Jumlah Kasus Korupsi	22	60%	NA	Tidak dapat diukur
5	Serta <b>penataan ruang</b> menjadi dasar kebijakan pembangunan	Dokumen Perda RTRW		Dokumen	Dokumen	100
6	<b>Kelestarian alam dan lingkungan</b> , dalam mendukung pembentukan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang berkeadilan	Penanganan Kasus Lingkungan	50	70	NA	Tidak dapat diukur

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa 6 arah kebijakan pembangunan daerah pada periode 1 (2005-2008) RPJPD dapat dinilai melalui 24 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut, 17 indikator kebijakan atau sebesar 71% memiliki capaian yang sangat tinggi. Diikuti sebanyak 4 indikator (17%) dengan capaian tinggi, dan 1 indikator (4%) dengan capaian rendah. Sementara terdapat 2 indikator (8%) yang tidak dapat dianalisis capaiannya oleh karena tidak terdapat data terhadap realisasi akhir dari capaian indikator tersebut. Berikut gambaran capaian indikator kebijakan pembangunan daerah pada periode 1 (2005-2008) RPJPD.

Lebih lanjut berkenaan dengan evaluasi terhadap pencapaian RPJPD pada periode 1 dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel II.84**  
**Penjabaran Capaian Arah Kebijakan RPJPD Periode I**

Periode Perencanaan	: Periode I (2005-2008)
Arah Kebijakan	<p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi; pengembangan ekonomi diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat banyak; infrastruktur dasar lebih mendukung arah pengembangan kawasan prioritas; pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan lebih efisien dan efektif, dan hukum lebih diutamakan; serta penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan, dalam mendukung pembentukan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang berkeadilan.</p>
Uraian Pencapaian	<p><b>Pertama:</b> Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan tercapai dan hal itu dapat terlihat dari capaian indikator arah kebijakan yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jika dilihat dalam sudut pandang pembangunan manusia misalnya, dapat diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur berada pada peringkat 5 nasional dengan angka IPM sebesar 74,52. Capaian tersebut mencapai target akhir yang telah ditentukan sebelumnya pada tahun 2008.</p> <p>Bagitupun dalam konteks pembangunan gender. Meskipun Provinsi Kalimantan Timur berada pada peringkat 30 nasional dengan angka indeks sebesar 66,38, namun setidaknya peringkat tersebut juga telah mencapai target akhir periode yang ditentukan sebelumnya.</p> <p>Tidak hanya itu, capaian penurunan angka buta aksara juga menunjukkan tren positif. Dari sebelumnya 3,9% di tahun 2004 menjadi 3,65% pada akhir periode. APK SLTP/MTS dari target 94,57% dengan realisasi 87,54%.</p> <p>Semua capaian tersebut berkorelasi terhadap capaian penurunan angka kemiskinan, dari sebelumnya 10,66% pada tahun 2004 menjadi 9,51 pada akhir periode. Capaian penurunan angka kemiskinan mencapai target yang akhir periode sebagaimana telah ditentukan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.</p> <p><b>Kedua:</b> Pengembangan ekonomi pada periode 1 RPJPD juga dapat terlihat telah diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat banyak. Hal ini dapat terlihat melalui capaian beberapa indikator makro maupun mikro terkait dengan pengembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada periode pertama menunjukkan capaian yang luar biasa. Dari capaian awal pada tahun 2004 yakni 1,88%, dengan target akhir periode adalah 3,5%, realisasinya justru melampaui target yakni 3,64%.</p> <p>PDRB Per kapita dan pendapatan per kapita juga menunjukkan capaian yang baik. Target akhir periode pendapatan Per kapita berada pada angka Rp.</p>



Periode Perencanaan	:	Periode I (2005-2008)
		<p>73.844.436, realisasinya sampai pada angka Rp. 103.206.871. Pendapatan per kapita dari target akhir Rp. 39.142.447, realisasi akhir mencapai 36.590.935.</p> <p>Dalam konteks berpihak kepada rakyat, hal ini dapat terlihat dari peningkatan berbagai macam produksi. Mulai dari produksi perkebunan (target akhir 529.201, realisasi akhir 1.747.771), produksi hasil ternak (target akhir 40.390,08, realisasi akhir 52.308,41), produksi perikanan (target akhir 219.931, realisasi akhir 185.839), produksi batu bara (target akhir 136.000.000, realisasi akhir 118.853.758), produksi minyak bumi (target akhir 55.936.630, realisasi akhir 55.936.630), maupun produksi gas bumi (target akhir 1.080.709.510, realisasi akhir 1.080.709.510).</p> <p>Selain itu, dapat diketahui bahwa terjadi pula perluasan area perkebunan dari tahun 2004 yakni 498.606 menjadi 591.222 pada akhir periode. Perluasan area perkebunan tersebut bahkan melampaui luasan 529.733 yang ditargetkan pada akhir periode yakni 529.733.</p> <p><b>Ketiga:</b> Capaian arah kebijakan infrastruktur dasar terbilang tinggi. Hal ini setidaknya dapat terlihat melalui indikator pembangunan panjang jalan provinsi yang capaiannya cukup mendekati target akhir, yakni 1.627,87 dari 1.762.07. Selain itu, pembangunan sarana air bersih dalam konteks jumlah sambungan rumah menunjukkan capaian yang sangat baik karena melampaui target akhir. Target akhir yang direncanakan adalah 193.653, sementara realisasi akhir mencapai 273.648.</p> <p><b>Keempat:</b> Terhadap kebijakan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan lebih efisien dan efektif, dan hukum lebih diutamakan, indikator yang digunakan untuk menilai capaiannya adalah penurunan jumlah kasus korupsi. Hanya saja capaian terhadap kebijakan tersebut tidak dapat diukur karena tidak terdapat data realisasi akhir dari indikator capaian.</p> <p><b>Kelima:</b> Terhadap kebijakan penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan, indikator yang digunakan untuk menilai capaian adalah ketersediaan dokumen Peraturan Daerah tentang RTRW. Oleh karena pada akhir periode terdapat satu dokumen Perda tentang RTRW, maka dapat diketahui bahwa capaian kebijakan penataan ruang dapat dikatakan sangat tinggi.</p> <p><b>Keenam:</b> Terhadap kebijakan pelestarian alam dan lingkungan, dalam mendukung pembentukan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang berkeadilan, capaian kebijakan tidak dapat diukur karena tidak ditemukan data realisasi akhir terhadap indikator yang digunakan untuk menilai capaian kebijakan tersebut.</p>

## 2. Periode II (2009-2013)

Bila pada tahap pertama berbagai landasan pembangunan jangka panjang telah dilakukan, maka program jangka menengah tahap ke-2



diarahkan pada pemantapan perubahan struktural secara sosial – ekonomi, sehingga pembangunan akan lebih diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir. Secara keseluruhan pembangunan telah menunjukkan pada arah peningkatan kesejahteraan secara global, lingkungan mulai terkendali, dan secara umum terjadi peningkatan daya saing daerah dalam kemandirian pembangunan. Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah, pelaksanaan pembangunan makin menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan partisipasi yang makin meningkat serta penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah. Kondisi lingkungan secara global juga menunjukkan adanya peningkatan yang ditandai oleh kesadaran masyarakat akan lingkungan yang makin membaik dan penegakan hukum lingkungan juga semakin baik. Secara keseluruhan dalam program jangka menengah telah mengarah pada pembentukan masyarakat sejahtera dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih adil dalam pengertian antar sektor dan antar wilayah, serta kegiatan unggulan daerah mulai dapat bersaing dalam skala nasional.

Untuk menilai apakah arah kebijakan pembangunan tersebut dapat dikatakan tercapai atau tidak, beberapa indikator penilaian yang digunakan yakni: pertama terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator yang digunakan IPM, tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, membaiknya angka indeks pemberdayaan gender, APK SMU/MTS, serta penurunan angka buta aksara.

Kedua dalam hal pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri. Indikator yang digunakan yakni peningkatan produksi padi, peningkatan produksi sayuran dan peningkatan produksi buah-buahan. Ketiga dalam hal pengembangan perekonomian serta peningkatan daya saing dalam produk unggulan daerah pada skala nasional, indikator yang digunakan yakni peningkatan produksi buah-buahan, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, pendapatan per kapita, peningkatan produksi padi, peningkatan produksi perkebunan, perluasan area perkebunan, peningkatan populasi ternak, peningkatan produksi hasil ternak, peningkatan konsumsi hasil ternak, peningkatan produksi perikanan dan peningkatan produksi batu bara.

Keempat dalam hal peningkatan kesejahteraan, indikator yang digunakan yakni angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, serta PDRB per kapita. Kelima dalam hal pengendalian lingkungan berbasis partisipasi masyarakat dan penegakan hukum, indikator yang digunakan yakni rehabilitasi hutan. Keenam, dalam hal penataan ruang sebagai dasar pijakan pembangunan daerah. Indikator yang digunakan yakni dokumen Perda RTRW.

**Tabel II.85**  
**Capaian Indikator Arah Kebijakan RPJPD Periode II**

No	Periode II	Indikator	Capaian Awal	Target Akhir	Realisasi Akhir	Capaian
1	Peningkatan <b>ku</b> alitas sumber <b>da</b> ya manusia	IPM (Peringkat Nasional)	5 (74,53)	3	3 (73,21)	100,00
		Tingkat Pengangguran Terbuka	157.376	124.317	142.058	85,73
		Angka Kemiskinan	9,51	7,00	6,06	100,00
		Membaiknya angka Indeks Pemberdayaan Gender	30 (66,38)	24	22 (63,12)	100,00
		APK SMU/MTS	69,89	90	90	100,00
		Penurunan Angka Buta Aksara	3,64	1,7	2,49	53,53
2	Pengembangan <b>pe</b> rtanian <b>be</b> rbasis <b>ag</b> ribisnis dan <b>ag</b> roindustri	Peningkatan Produksi padi (TON)	324.785	718.151	468.181	65,19
		Peningkatan Produksi Sayuran (Kw)	NA	67.097.715,70	3.612.170,00	5,38
		Peningkatan Produksi Buah-buahan (Kw)	NA	34.857.305,40	2.277.583	6,53
3	<b>Pengembangan perekonomian</b> dalam perbaikan struktur antara produk hulu-hilir serta peningkatan <b>da</b> ya saing dalam <b>pe</b> roduk <b>u</b> nggulan <b>da</b> erah pada skala nasional	Pertumbuhan Ekonomi	4,9	3,72	2,25	60,48
		Peningkatan Produksi padi (TON)	324.785	718.151	468.181	65,19
		Peningkatan Produksi Perkebunan	1.747.771	1.186.403	6.989.103	100,00
		Perluasan Area Perkebunan	591.222	1.000.000	1.102.622	100,00

No	Periode II	Indikator	Capaian Awal	Target Akhir	Realisasi Akhir	Capaian
		Peningkatan Populasi Ternak (Ekor)	40.208.813	37.772.651	41.564.696	100,00
		Peningkatan Produksi Hasil Ternak (TON)	52.308,41	50.102,42	74.725,26	100,00
		Peningkatan Produksi Perikanan (TON)	185.839	291.491	364.785	100,00
		Peningkatan Produksi Batu Bara (TON)	146.464.993,59	173.500.000	256.910.421,87	100,00
4	Peningkatan <b>kesejahteraan</b>	Angka Kemiskinan	9,51	7,00	6,06	100,00
		Tingkat Pengangguran Terbuka	157.376	124.317	142.058	86
		Pertumbuhan Ekonomi	4,90	3,72	2,25	60,48
		PDRB Per kapita	103.206.871	106.542.687	122.213.162,30	100,00
5	Pengendalian <b>lingkungan berbasis partisipasi masyarakat</b> dan <b>penegakan hukum</b>	Rehabilitasi Hutan (Ha)	NA	22.153	45.000	100,00
6	<b>Penataan ruang</b> sebagai dasar pijakan pembangunan daerah	Dokumen Perda RTRW		Dokumen	Dokumen	100

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa 6 arah kebijakan pembangunan daerah pada periode 2 (2009-2013) RPJPD dapat dinilai melalui 23 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut, 14 indikator kebijakan atau sebesar 61% memiliki capaian yang sangat tinggi. Diikuti sebanyak 2 indikator (8%) dengan capaian tinggi, 5 indikator (20%) capaian rendah, dan 2 indikator (9%) capaian sangat rendah. Berikut gambaran capaian indikator kebijakan pembangunan daerah pada periode 2 (2009-2013) RPJPD.

Lebih lanjut berkenaan dengan evaluasi terhadap pencapaian RPJPD pada periode kedua dijabarkan sebagai berikut:



**Tabel II.86**  
**Penjabaran Capaian Arah Kebijakan RPJPD Periode II**

Periode Perencanaan	:	Periode II (2009-2013)
Arah Kebijakan		<p>Penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri, pengembangan perekonomian dalam perbaikan struktur antara produk hulu-hilir, peningkatan kesejahteraan, pengendalian lingkungan berbasis partisipasi masyarakat dan penegakan hukum, daya saing dalam produk unggulan daerah pada skala nasional, pertumbuhan wilayah yang efisien dan efektif, dan penataan ruang sebagai dasar pijakan pembangunan daerah.</p>
Uraian Pencapaian		<p><b>Pertama:</b> Pada periode ke 2 RPJPD, capaian arah kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia terbilang sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat salah satunya dari peningkatan peringkat nasional indeks pembangunan pemuda. Pada periode sebelumnya, Provinsi Kalimantan Timur berada pada peringkat nasional. Pada periode kedua, realisasi akhir IPM Kaltim berada pada peringkat 3 nasional dengan angka indeks 73,21.</p> <p>Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari periode sebelumnya meskipun realisasi akhir belum mencapai target akhir yang ditentukan. Pada periode sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 157.376, target akhir 124.317 dan realisasi akhir adalah 142.058.</p> <p>Begitu pula dengan indeks pemberdayaan gender yang menunjukkan tren membaik dan mencapai target akhir yang ditentukan. Pada periode sebelumnya, indeks pemberdayaan gender Kaltim berada pada posisi 30 nasional, target akhir adalah peringkat 24 nasional dan realisasi akhir berada pada peringkat 22 nasional dengan angka indeks 53,12.</p> <p>Capaian APK SMU/MTS juga terbilang cukup baik karena target akhir capaian APK, yakni 90 tercapai dengan sangat baik.</p> <p>Namun begitu, kinerja capaian dalam upaya menurunkan angka buta aksara terbilang rendah. Dari target akhir penurunan sampai pada angka 1,7, tetapi realisasi akhir hanya berada pada angka 2,49.</p> <p><b>Kedua:</b> Rencana kebijakan dalam pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri menunjukkan rata-rata capaian yang sangat rendah. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian tiga indikator yang mewakili capaian pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri yang hanya mencapai 25,70%. Secara detail capaian masing-masing indikator tersebut dapat terlihat dari capaian produksi padi yang hanya mencapai 468.181 dari target 718.151 (65,19%), capaian produksi sayuran yang hanya mencapai 3.612.170,00 dari target 67.097.715,7 (5,38) dan capaian produksi buah-</p>



Periode Perencanaan	:	Periode II (2009-2013)
		<p>buah yang hanya mencapai 2.277.583 dari target 34.857.305,4 (6,53).</p> <p><b>Ketiga:</b> Capaian pengembangan perekonomian dalam perbaikan struktur antara produk hulu-hilir serta peningkatan daya saing dalam produk unggulan daerah pada skala nasional terbilang tidak maksimal. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang cukup jauh dari target, yakni hanya 2,25 (2013) dari target 3,75 (2008) atau capaiannya hanya sekitar 60,48%. Meskipun capaian kinerja tidak maksimal atau berada pada kategori sedang, namun jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari tahun 2008-2013 terlihat adanya pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun yang melebihi target (3,72), yakni tahun 2008 sebesar 4,90, tahun 2010 sebesar 5,10 dan tahun 2012 sebesar 5,26. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di akhir periode (2013) disebabkan oleh karena terjadinya kontraksi industri pengolahan migas, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran. Meskipun ketiga sektor tersebut mengalami kontraksi, pada sektor lainnya menunjukkan pertumbuhan yang baik. Hal tersebut terlihat dari kinerja produksi pertanian dalam arti luas dan produksi batubara. Produksi perkebunan mencapai 6989103 dari target 1.186.403. Perluasan area perkebunan 1.102.622 dari target 1.000.000. Peningkatan populasi ternak 41564696 dari target 37.772.651. Produksi hasil ternak 74.725,26 dari target 50.102,42. Produksi hasil perikanan 364.785 dari target 291.491. Peningkatan produksi batu bara 256.910.421,87 dari target 173.500.000.</p> <p><b>Keempat:</b> Peningkatan kesejahteraan para periode ke 2 menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari penurunan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, maupun PRDB per kapita. Angka kemiskinan pada periode ke 2 yakni 6.06 dari target 7.00 atau capaiannya adalah 100%. Tingkat pengangguran terbuka 142.058 dari target 124.317 atau 86%. Kemudian Pendapatan per kapita yakni 112.213.162,30 dari target 106.542.687 atau 100%.</p> <p><b>Kelima:</b> Capaian kebijakan pengendalian lingkungan berbasis partisipasi masyarakat dan penegakan hukum terbilang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan capaian rehabilitasi hutan yang mencapai 45.000 dari target 22.153 atau sebesar 100 %.</p> <p><b>Keenam:</b> Terhadap kebijakan penataan ruang sebagai dasar pijakan pembangunan daerah, indikator yang digunakan untuk menilai capaian adalah ketersediaan dokumen Peraturan Daerah tentang RTRW. Oleh karena pada akhir periode terdapat satu dokumen Perda tentang RTRW, maka dapat diketahui bahwa capaian kebijakan penataan ruang dapat dikatakan sangat tinggi.</p>

### 3. Periode III (2014-2018)

Pembangunan pada seluruh bidang yang dilakukan dengan konsisten selama dua periode telah menunjukkan pemantapan menuju masyarakat sejahtera, pemerataan hasil pembangunan telah dirasakan masyarakat.

Kualitas SDM semakin meningkat, kebergantungan ekonomi pada sumber daya alam yang tidak terbarukan mulai berkurang, sedangkan pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan semakin berkembang, dan struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman, pemerintahan berjalan makin efisien, efektif, dan transparan. Selanjutnya penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan secara global semakin terkendali dan terus meningkat kualitasnya. Secara umum tingkat perkembangan Kalimantan Timur dalam tahap ini setara dengan rata-rata Indonesia, berbagai kegiatan dan produk unggulan telah sampai atau setara dengan rata-rata ASEAN.

Untuk menilai apakah arah kebijakan pembangunan tersebut dapat dikatakan tercapai atau tidak, beberapa indikator penilaian yang digunakan yakni: pertama terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator yang digunakan yakni IPM, harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup. Kedua dalam hal peralihan struktur ekonomi yang berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke arah sumber daya alam terbarukan, indikator yang digunakan yakni pertumbuhan ekonomi dengan migas, pertumbuhan ekonomi tanpa migas, pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara, serta rasio pemenuhan beras.

Ketiga dalam hal pemetaan prasarana dan sarana dasar pembangunan. Indikator yang digunakan yakni indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar. Keempat dalam peningkatan kesejahteraan, indikator yang digunakan yakni indeks gini, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Kelima, dalam hal tata kelola pemerintahan. Indikator yang digunakan yakni Opini BPK, indeks persepsi korupsi, serta predikat akuntabilitas kinerja.

Keenam, dalam hal penataan ruang indikator yang digunakan adalah dokumen Perda RTRW. Ketujuh dalam pengendalian kualitas lingkungan, indikator yang digunakan adalah indeks kualitas lingkungan hidup dan penurunan intensitas emisi.

**Tabel II.87**  
**Capaian Indikator Arah Kebijakan RPJPD Periode III**

No	Periode III	Indikator	Capaian Awal	Target Akhir	Realisasi Akhir	Capaian
1	Peningkatan <b>kualitas sumber daya manusia</b>	Indeks Pembangunan Manusia	73,21	75,70	75,83	100,00
		Harapan Lama Sekolah	12,85	14	13,49	96,36

No	Periode III	Indikator	Capaian Awal	Target Akhir	Realisasi Akhir	Capaian
		Angka Rata-rata sekolah	8,87	12	9,36	78,00
		Angka Harapan Hidup	73,52	74	73,70	99,59
2	Peralihan struktur ekonomi yang berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke arah sumber daya alam terbarukan, serta peningkatan kualitas produk unggulan berdaya saing dalam lingkup ASEAN	Pertumbuhan ekonomi dengan migas	2,25	0,5+1	0,58	100,00
		pertumbuhan ekonomi tanpa migas	5,45	4+1	3,13	78,25
		Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara	5,99	4+1	5,24	100,00
		Rasio pemenuhan beras	72	85	62,82	73,91
3	pemerataan Prasarana dan sarana dasar pembangunan	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5	7	7	100,00
4	peningkatan kesejahteraan,	Indeks Gini	0,3341	0,32	0,342	93,13
		Tingkat Kemiskinan	6,06	6,00	6,03	99,50
		Tingkat Pengangguran Terbuka	8,90	7,00	6,41	100,00
5	tata kelola pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	68 ,00 (baik)	85,00 (sgt baik)	80,56	94,78
		Predikat Akuntabilitas Kinerja	70,75 (B+)	80,00 (A)	74,89 (BB)	93,61
6	penataan ruang	Perda RTRW	Dokumen	Dokumen	Dokumen	100
7	pengendalian kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,07	82,00	81,68	99,61
		Penurunan Intensitas Emisi	1.500	1.650	3.253	2,85

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa 7 arah kebijakan pembangunan daerah pada periode 3 (2014-2018) RPJPD dapat dinilai melalui 18 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut, 14 indikator

kebijakan atau sebesar 78% memiliki capaian yang sangat tinggi. Diikuti sebanyak 2 indikator (11%) dengan capaian tinggi, 1 indikator (5%) capaian sedang, dan 1 indikator (6%) capaian sangat rendah. Berikut gambaran capaian indikator kebijakan pembangunan daerah pada periode 1 (2005-2008) RPJPD.

Lebih lanjut berkenaan dengan evaluasi terhadap pencapaian RPJPD pada periode ketiga dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel II.88**  
**Penjabaran Capaian Arah Kebijakan RPJPD Periode III**

Periode Perencanaan	:	Periode III (2014-2018)
Arah Kebijakan		Peningkatan kualitas SDM, peralihan struktur ekonomi yang berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke arah sumber daya alam terbarukan, pemerataan Prasarana dan sarana dasar pembangunan, tata kelola pemerintahan, penataan ruang, pengendalian kualitas lingkungan, peningkatan kualitas produk unggulan berdaya saing dalam lingkup ASEAN
Uraian Pencapaian		<p><b>Pertama:</b> Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada periode ke 3 RPJPD menunjukkan capaian yang terbilang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari angka indeks pembangunan manusia yang melebihi target, yakni 75,83 dari 75,70. Tidak hanya itu, angka harapan lama sekolah juga berada diatas capaian periode sebelumnya (12,85) yakni 13,49. Begitu pun rata-rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan dari sebelumnya 8,87 menjadi 9,36. Tidak kalah penting, Angka harapan hidup juga menunjukkan peningkatan dari periode sebelumnya (73,52) menjadi 73,70.</p> <p><b>Kedua:</b> Kebijakan peralihan struktur ekonomi yang berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke arah sumber daya alam terbarukan serta peningkatan kualitas produk unggulan berdaya saing dalam lingkup ASEAN pada periode ke 3 menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dengan migas, pertumbuhan ekonomi tanpa migas pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara, rasio pertumbuhan beras. Pada akhir periode, dapat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dengan migas adalah 0,58 (116%) dari target 0,5±1. Dalam hal pertumbuhan ekonomi tanpa migas, capaian pada akhir periode adalah 3,13 (78,25%) dari target 4±1. Meskipun belum mencapai 100%, setidaknya capaian pertumbuhan ekonomi tanpa migas tersebut cukup menggambarkan bahwa telah terjadi peralihan struktur ekonomi ke arah sumber daya alam terbarukan. Terlebih jika dilihat dalam hal pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara yang mencapai 5,24 (131%) dari target 4±1.</p> <p><b>Ketiga:</b> Capaian kebijakan pemerataan prasarana dan sarana dasar pembangunan menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini dapat tercermin melalui angka indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar yang meningkat dari periode sebelumnya (5). Pada akhir periode, capaian</p>

Periode Perencanaan	: Periode III (2014-2018)
	<p>skor indeks kepuasan layanan infrastruktur berada pada angka 7. Hasil itu mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.</p> <p><b>Keempat:</b> Peningkatan Kesejahteraan pada periode ketiga menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat dari skor indeks gini di akhir periode yakni 0,342 yang hampir mencapai target yakni 0,32. Tidak hanya itu, tingkat kemiskinan juga dapat ditekan dari periode sebelumnya 6,06 menjadi 6,03. Demikian juga terhadap tingkat pengangguran terbuka yang berhasil ditekan dari 8,90 pada periode sebelumnya menjadi 6,41 pada akhir periode.</p> <p><b>Kelima:</b> Capaian tata kelola pemerintahan pada periode ketiga terbilang sangat tinggi. Hal ini tercermin melalui opini BPK dengan predikat WTP, indeks kepuasan masyarakat dengan predikat sangat baik (85,00), serta predikat akuntabilitas kinerja dengan predikat BB (74,89) yang melebihi dari capaian tahun sebelumnya yakni B+ (70,75).</p> <p><b>Keenam:</b> Terhadap kebijakan penataan ruang, indikator yang digunakan untuk menilai capaian adalah ketersediaan dokumen Peraturan Daerah tentang RTRW. Oleh karena pada akhir periode terdapat satu dokumen Perda tentang RTRW, maka dapat diketahui bahwa capaian kebijakan penataan ruang dapat dikatakan sangat tinggi.</p> <p><b>Ketujuh:</b> Kebijakan pengendalian Kualitas Lingkungan menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat melalui indeks kualitas lingkungan hidup. Meskipun masih sedikit dibawah target (82,00), capaian indeks kualitas lingkungan hidup jauh lebih baik dari periode sebelumnya (74,07) yakni 81,68.</p>

#### 4. Periode IV (2019-2023)

Berdasarkan pencapaian pembangunan selama tiga periode yang dilaksanakan secara konsisten, maka RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera di segenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dalam RPJM ke-4 ini dicirikan oleh mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah yang makin tinggi, tingkat perkembangan wilayah berada diatas rata-rata nasional dan secara

umum mampu bersaing dalam lingkup ASEAN bahkan pada beberapa bagian bahkan sudah mampu bersaing dalam skala Asia-Pasifik. Secara Umum kualitas SDM sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan ketrampilan yang memadai; perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang rendah; prasarana dan sarana dasar telah menjangkau ke segenap pelosok wilayah; pemerintahan yang berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabilitasnya tinggi diikuti penegakan hukum tanpa pandang bulu; serta penataan ruang menjadi acuan pengembangan wilayah dengan keseimbangan ekosistem yang baik dan terjaganya keanekaragaman hayati yang tinggi.

Untuk menilai apakah arah kebijakan pembangunan tersebut dapat dikatakan tercapai atau tidak, beberapa indikator penilaian yang digunakan yakni: pertama terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator yang digunakan yakni IPM, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pemberdayaan gender serta persentase penempatan tenaga kerja. Kedua terkait dengan ekonomi kerakyatan dan penguatan kualitas produk unggulan berdaya saing dalam lingkup ASEAN, indikator yang digunakan yakni laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, LPE Non Migas dan Batubara, serta nilai tukar petani.

Ketiga terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, indikator yang digunakan yakni indeks kepuasan masyarakat dan indeks gini. Keempat dalam hal tata kelola pemerintahan, indikator yang digunakan yakni indeks reformasi birokrasi, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), nilai akuntabilitas kinerja, serta tingkat maturitas sistem pengawasan intern pemerintah (SPIP).

Kelima terkait dengan tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi, indikator yang digunakan yakni indeks kualitas lingkungan hidup, persentase penurunan emisi dan BAU, indeks risiko bencana serta skoring penyelenggaraan penataan ruang. Berikut tabel capaian indikator arah kebijakan RPJPD periode 4.

**Tabel II.89**  
**Capaian Indikator Arah Kebijakan RPJPD Periode IV**

No	Periode IV	Indikator	Capaian Awal	Target	Realisasi Akhir	Capaian
1	<b>Peningkatan kualitas</b>	IPM	75,83	77,25	77,44	100,00
		Harapan Lama Sekolah	13,67	14,02	13,84	98,72



No	Periode IV	Indikator	Capaian Awal	Target	Realisasi Akhir	Capaian
	<b>sumber daya manusia</b>	Rata-rata Lama Sekolah	9,48	10,04	9,92	98,80
		Usia Harapan Hidup	73,96	74,6	74,62	100,00
		Tingkat Kemiskinan	6,03	5,9	6,31	93,05
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,41	6,75	5,71	100,00
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,73	65,64	66,64	100,00
		Persentase Penempatan Tenaga Kerja	22,74	31	31	100,00
2	<b>ekonomi kerakyatan dan</b> penguatan kualitas <b>produk unggulan</b> berdaya saing dalam lingkup <b>ASEAN</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,64	3,5+1	4,48	100,00
		PDRB per Kapita	174,16	172	238,7	100,00
		LPE Non Migas dan Batubara	5,24	2	6,11	100,00
		Nilai Tukar Petani	96,14	119	126,03	100,00
3	<b>peningkatan pelayanan dasar</b> bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,22	82,5	84,41	100,00
		Indeks Gini	0,342	0,313	0,327	95,53
4	<b>tata kelola pemerintahan</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	68,02 (B)	B (71,50)	B (67,70)	94,69
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,49	3,25	3,44	100,00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,55	77	78,1	100,00
		Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	100,00
5	<b>tata ruang wilayah</b> berbasis ekonomi dan ekologi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,68	76,05	74,46	97,91
		Persentase penurunan emisi dari BAU	5,6	28,5	70,68	100,00



No	Periode IV	Indikator	Capaian Awal	Target	Realisasi Akhir	Capaian
		Indeks Resiko Bencana	155,49	151,49	146,67	100,00
		Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	73,18	76,74	78,57	100,00

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa 5 arah kebijakan pembangunan daerah pada periode 4 (2019-2023) RPJPD dapat dinilai melalui 22 indikator. Seluruh indikator (100%) untuk menilai 5 kebijakan menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Berikut gambaran capaian indikator kebijakan pembangunan daerah pada periode 4 (2019-2023) RPJPD.

Lebih lanjut berkenaan dengan evaluasi terhadap pencapaian RPJPD pada periode keempat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel II.90**  
**Penjabaran Capaian Arah Kebijakan RPJPD Periode IV**

Periode Perencanaan	:	Periode IV (2019-2023)
Arah Kebijakan		Peningkatan kualitas sumber daya manusia, ekonomi kerakyatan, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, tata kelola pemerintahan, tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi, penguatan kualitas produk unggulan berdaya saing dalam lingkup ASEAN
Uraian Pencapaian		<p><b>Pertama:</b> Kebijakan peningkatan sumber daya manusia pada periode 4 menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini tercermin dari berbagai indikator arah kebijakan, mulai dari IPM, harapan lama sekolah hingga indeks pengangguran terbuka. Pada periode ke 4, indeks pembangunan manusia berada pada angka 77,44. Capaian tersebut diatas capaian pada periode sebelumnya dan bahkan diatas target yang telah ditentukan. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga menunjukkan tren positif. Meskipun capaian keduanya masih sedikit dibawah target, tetapi realisasi akhir periode berada diatas capaian pada periode sebelumnya. Harapan lama sekolah di akhir periode adalah 13,84. Sementara rata-rata lama sekolah di akhir periode adalah 9,92. Dalam sudut pandang yang lain, keberhasilan peningkatan sumber daya manusia juga terlihat dari usia harapan hidup yakni 74,62. Capaian tersebut melebihi target (74,6) dan diatas capaian periode sebelumnya (73,96).</p> <p><b>Kedua:</b> Seperti halnya capaian arah kebijakan peningkatan sumber daya manusia, kebijakan ekonomi kerakyatan dan penguatan kualitas produk unggulan berdaya saing dalam lingkungan ASEAN pada periode kedua juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Hal</p>

Periode Perencanaan	: Periode IV (2019-2023)
	<p>ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang melampaui target (3,5+1) yakni 4,48. Tidak hanya itu, capaian PDRB per kapita juga melampaui target (172) yakni 238,7. Dalam konteks kerakyatan, nilai tukar petani juga menunjukkan tren positif, yakni 126,03 diatas target yang ditentukan yakni 119.</p> <p><b>Ketiga:</b> Terhadap kebijakan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, capaian kebijakan juga terbilang sangat tinggi. Hal ini tergambar melalui capaian indeks kualitas kepuasan masyarakat dan indeks gini yang melebihi target yang telah ditentukan serta melampaui capaian periode sebelumnya. Pada akhir periode, capaian indeks kepuasan masyarakat adalah 84,41 (102,32%) dari target 82,5. Sementara indeks gini pada akhir periode adalah 0,327 (95,53%) dari target 0,313.</p> <p><b>Keempat:</b> Kebijakan tata kelola pemerintahan pada periode ke 4 menunjukkan capaian sangat tinggi. Capaian tersebut tidak terlepas dari capaian indeks reformasi birokrasi, indeks SPBE, nilai akuntabilitas kinerja, serta tingkat maturitas SPIP. Rata-rata capaian indikator kebijakan melampaui target yang telah ditentukan. Indeks reformasi birokrasi pada periode ke 4 ada pada peringkat B. Begitu pun indeks SPBE yakni 3,44, diatas target yang ditentukan yakni 3,25. Selain itu, nilai akuntabilitas pada periode ke 4 yakni 78,1, diatas target yakni 77.</p> <p><b>Kelima:</b> Kebijakan tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Hal ini tercermin melalui indeks kualitas lingkungan hidup, persentase penurunan emisi dari BAU seta indeks resiko bencana. Dalam konteks kualitas lingkungan hidup, meskipun capaiannya sedikit dibawah target, tetapi persentase capaian akhir mencapai 97,91%. Nilai indeks kualitas lingkungan hidup adalah 74,46 dari target 76,05. Terkait persentase penurunan emisi dari BAU, capaian penurunan adalah 70,68% dari target 28,5%. Selain itu, indeks resiko bencana juga menurun menjadi 146,67 dari target 151,49.</p>

## 5. Periode V (2024-2025)

Pencapaian pembangunan yang telah dicapai dalam empat periode, maka tahap ke-5 ditujukan untuk memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Kalimantan Timur yang ditandai oleh kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, struktur ekonomi yang mapan antar sektor dan antar wilayah dengan partisipasi masyarakat yang luas dan dominan, pelayanan dasar telah melayani masyarakat dengan mapan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dengan penegakan hukum yang sangat baik, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kaidah lingkungan hidup.

Dalam tahap ke-5 ini ditunjukkan oleh mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah tinggi dengan tingkat perkembangan diatas rata-rata nasional dan sudah mampu bersaing dalam lingkup ASEAN serta beberapa bagian telah bersaing dengan sangat sehat dalam skala Asia-Pasifik. Kualitas SDM sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan ketrampilan yang memadai dan dapat dipenuhi oleh wilayah setempat; perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang sangat rendah; prasarana dan sarana menjangkau ke segenap pelosok wilayah dan wilayah unggulan dan strategis telah memiliki prasarana yang unggul; pemerintahan berjalan dengan efisien, efektif, transparan dengan akuntabilitas yang tinggi serta penegakan hukum dilaksanakan dengan tegas sesuai aturan; serta penataan ruang menjadi acuan utama.

Untuk menilai apakah arah kebijakan pembangunan tersebut dapat dikatakan tercapai atau tidak, beberapa indikator penilaian yang digunakan yakni: pertama terkait dengan pemantapan kualitas sumber daya manusia, indikator yang digunakan yakni IPM. Kedua dalam hal pemantapan ekonomi kerakyatan daya saing dalam produk unggulan daerah pada skala nasional serta pemantapan kualitas produk unggulan berdaya saing dalam lingkup Asia-Pasifik, indikator yang digunakan yakni laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, serta indeks gini. Ketiga, dalam hal pemantapan pelayanan dasar bagi masyarakat, indikator yang digunakan yakni indeks kepuasan masyarakat.

Keempat terkait dengan pemantapan tata kelola pemerintahan, indikator yang digunakan yakni indeks reformasi birokrasi dan predikat akuntabilitas kinerja. Kelima dalam hal penguatan tata ruang wilayah berbasis lingkungan hirup, indikator yang digunakan yakni indeks kualitas lingkungan hidup dan persentase penurunan emisi dan BAU. Berikut tabel capaian indikator arah kebijakan RPJPD periode 5.

**Tabel II.115**  
**Capaian Indikator Arah Kebijakan RPJPD Periode V**

No	Periode V	Indikator	Capaian Awal	Target Akhir	Perkiraan Akhir	Capaian
1	Pemantapan kualitas sumber daya manusia	IPM	77,44	78,6	78,6	100,00

No	Periode V	Indikator	Capaian Awal	Target Akhir	Perkiraan Akhir	Capaian
2	<b>Pemantapan ekonomi kerakyatan, daya saing dalam produk unggulan daerah</b> pada skala nasional, serta <b>pemantapan kualitas produk unggulan</b> berdaya saing dalam <b>lingkup Asia-Pasifik</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,48	4,3-5,1	4,3-5,1	100,00
		Tingkat Kemiskinan	6,31	5,67	5,67	100,00
		Indeks Gini	0,327	0,31	0,31	100,00
3	<b>Pemantapan pelayanan dasar bagi masyarakat</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,41	85,5	85,5	100,00
4	<b>Pemantapan tata kelola pemerintahan</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	67,7	69,5 (B)	69,5 (B)	100,00
		Predikat Akuntabilitas Kinerja	78,10 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)	100,00
5	<b>Penguatan tata ruang</b> wilayah berbasis lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,46	75.20	75.20	100,00
		Persentase Penurunan Emisi dari BAU	70,73	31,89	31,89	100,00

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa 5 arah kebijakan pembangunan daerah pada periode 5 (2024-2025) RPJPD dapat dinilai melalui 9 indikator. Seluruh indikator (100%) untuk menilai capaian kebijakan menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Berikut gambaran capaian indikator kebijakan pembangunan daerah pada periode 5 (2024-2025) RPJPD.

Lebih lanjut berkenaan dengan evaluasi terhadap pencapaian RPJPD pada periode kelima dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel II.116**  
**Penjabaran Capaian Arah Kebijakan RPJPD Periode V**

Periode Perencanaan	:	Periode V (2024-2025)
Arah Kebijakan		Peningkatan kualitas sumber daya manusia, ekonomi kerakyatan, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, tata kelola pemerintahan, tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi, penguatan kualitas produk unggulan berdaya saing dalam lingkup ASEAN
Uraian Pencapaian		<p>Oleh karena penilaian terhadap pencapaian kebijakan RPJPD pada periode kelima baru dapat dinilai pada tahun 2025, maka sementara ini penilaian terhadap berbagai kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode kelima dilakukan dengan menggunakan asumsi. Berikut disajikan asumsi pencapaian rencana pembangunan jangka panjang pada periode kelima.</p> <p><b>Pertama:</b> Terhadap kebijakan pemantapan kualitas sumber daya manusia, indikator yang digunakan untuk menilainya adalah indeks pembangunan manusia. Asumsi capaian indeks pembangunan manusia pada tahun 2025 adalah 78,6 (100%) dari target 78,6.</p> <p><b>Kedua:</b> Terhadap kebijakan pemantapan ekonomi kerakyatan, daya saing dalam produk unggulan daerah pada skala nasional, serta pemantapan kualitas produk unggulan berdaya saing dalam lingkup Asia-Pasifik, indikator yang digunakan untuk menilainya adalah laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan indeks gini. Asumsi capaian laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 adalah 4,3-5,1 (100%) dari target 4,3-5,1.</p> <p><b>Ketiga:</b> Terhadap kebijakan pemantapan pelayanan dasar bagi manusia, indikator yang digunakan untuk menilainya adalah indeks kepuasan masyarakat. Asumsi capaian indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2025 adalah 85,5 (100%) dari target 85,5.</p> <p><b>Keempat:</b> Terhadap kebijakan pemantapan tata kelola pemerintah, indikator yang digunakan untuk menilainya adalah indeks reformasi birokrasi dan predikat akuntabilitas kinerja. Asumsi capaian indeks reformasi birokrasi pada tahun adalah 85,5 (100%) dari target 85,5. Sementara asumsi capaian predikat akuntabilitas kinerja adalah 69,5 (B) dari target 69,5 (B).</p> <p><b>Kelima:</b> Terhadap kebijakan penguatan tata ruang wilayah berbasis lingkungan hidup, indikator yang digunakan untuk menilainya adalah indeks kualitas lingkungan hidup dan persentase penurunan emisi dari BAU. Asumsi capaian indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2025 adalah 74,20 (100%) dari target 74,20. Sementara asumsi capaian persentase penurunan emisi dari BAU pada tahun 2025 adalah 31,89 (100%) dari target 31,89.</p>

## 6. Kesimpulan

- 1) **Kualitas Sumber daya Manusia**  
Kebijakan akselerasi dan penguatan layanan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur, namun masih diperlukan penguatan kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan kesenjangan taraf pendidikan, kesehatan dan pengangguran.
- 2) **Pertumbuhan ekonomi daerah**  
Perekonomian daerah Kalimantan Timur masih bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian, sehingga diperlukan kebijakan dalam upaya peningkatan dan percepatan hilirisasi untuk raihan nilai tambah produk-produk unggulan daerah non ekstraktif, serta perwujudan ekonomi inklusif berkelanjutan.
- 3) **Kualitas Pelayanan Dasar**  
Kebijakan Pelayanan dasar yang terintegrasi mampu meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat Kalimantan Timur, Namun masih diperlukan kebijakan dalam upaya perwujudan dan peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah berbasis tata ruang.
- 4) **Kinerja Reformasi Birokrasi**  
Kebijakan reformasi birokrasi mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, namun masih diperlukan kebijakan dalam upaya percepatan dan penguatan reformasi birokrasi.
- 5) **Kualitas Lingkungan Hidup**  
Kebijakan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan mampu mewujudkan pembangunan berbasis ekonomi dan ekologi, namun masih diperlukan kebijakan dalam upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan.

## 7. Rekomendasi

- 1) Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui program akreditasi sekolah dan layanan kesehatan secara non diskriminatif, program khusus beasiswa dan sertifikasi kompetensi serta

- peningkatan keterhubungan (*link and match*) antara dunia pendidikan dan Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU).
- 2) Transformasi ekonomi dari struktur ekonomi berbasis sumber daya alam ekstraktif ke arah ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui hilirisasi sektor industri unggulan, program peningkatan produktivitas dan nilai tambah pada sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, pariwisata, pemanfaatan teknologi digital untuk perluasan pasar serta peningkatan kapasitas BUMDES dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) di tingkat tapak sebagai penggerak utama klaster ekonomi lokal.
  - 3) Peningkatan kualitas, ketersediaan dan kapasitas layanan infrastruktur dasar serta konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui program pembangunan pemukiman layak huni dan sanitasi lingkungan, program peningkatan kapasitas elektrifikasi sektor industri dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) serta pengembangan sistem transportasi berbasis tata ruang ruang/kewilayahan.
  - 4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan efektif efisien melalui implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pengelolaan kepegawaian berbasis kompetensi.
  - 5) Peningkatan kualitas lingkungan melalui pembangunan berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim dan bencana yang berbasis kewilayahan serta pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati (Kehati).

## **2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik**

### **2.6.1 Proyeksi Demografi**

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan. Perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. Hasil sensus, survei, dan data administratif menyediakan informasi penduduk untuk kondisi saat pendataan tersebut dilakukan. Namun, penyusunan perencanaan dan kebijakan sesuai dinamika waktu di masa mendatang membutuhkan informasi proyeksi

penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk akan membantu pembuat kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta merancang kebijakan selanjutnya.

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Pembentukan asumsi untuk ketiga komponen tersebut dilakukan menggunakan data-data yang menggambarkan tren di masa lampau, faktor-faktor yang mempengaruhi dan hubungannya satu sama lain. Penerapan asumsi yang digunakan akan menentukan hasil proyeksi jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan.

Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan dengan mempertimbangkan aspek masa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dengan pemindahan IKN diperkirakan akan mengubah besaran migrasi penduduk di Kalimantan Timur.

**Tabel II.117**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk**

Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.909.740	4.267.600	5.197.920	5.741.830	6.116.320	6.437.780

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 6.437,78 ribu orang pada tahun 2045. Meningkatnya jumlah penduduk Kalimantan Timur yang cukup besar ini dipengaruhi adanya proyeksi jumlah populasi Ibu Kota Nusantara.

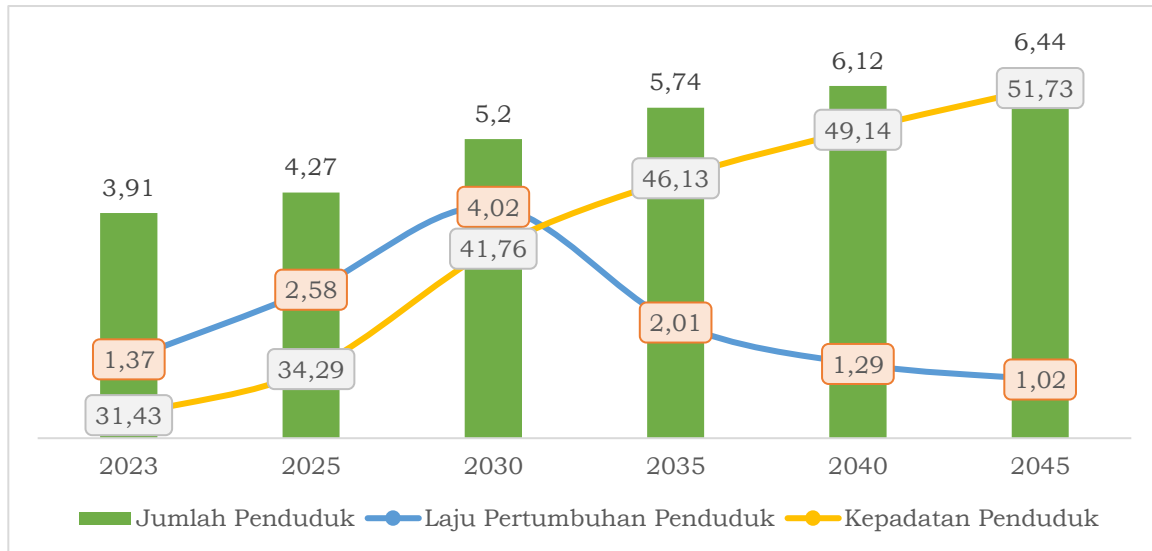
**Tabel II.118**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	2.027.110	2.204.410	2.664.010	2.923.660	3.095.250	3.238.590
Perempuan	1.882.670	2.063.190	2.533.920	2.818.160	3.021.070	3.199.180
Rasio	107,67	106,84	105,13	103,74	102,46	101,23

Sumber : Badan Pusat Statistik



Berdasarkan rasio jenis kelamin, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.



**Gambar II.85**  
**Proyeksi Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2045**

Sumber: BPS Provinsi KALTIM

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022, pada tahun 2025-2029 merupakan periode pemindahan penduduk tahap 2, sehingga jumlah penduduk diproyeksikan meningkat signifikan seiring pemindahan ASN selesai pada tahap ini. Sehingga Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan meningkat pada tahun 2030 sebesar 4,02 persen. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur dengan adanya pembangunan IKN sehingga kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga semakin tinggi diproyeksikan mencapai 51,73 per km<sup>2</sup> di tahun 2045 dengan laju pertumbuhan penduduk 1,02.

**Tabel II.117**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	952.800	991.860	1.148.460	1.259.560	1.336.860	1.334.490
15-64 Tahun	2.756.840	3.044.560	3.723.940	4.050.360	4.223.680	4.413.790
> 65 Tahun	200.110	231.190	325.530	431.920	555.790	689.490
Angka Ketergantungan	41,82	40,17	39,58	41,76	44,81	45,86

Sumber : Badan Pusat Statistik

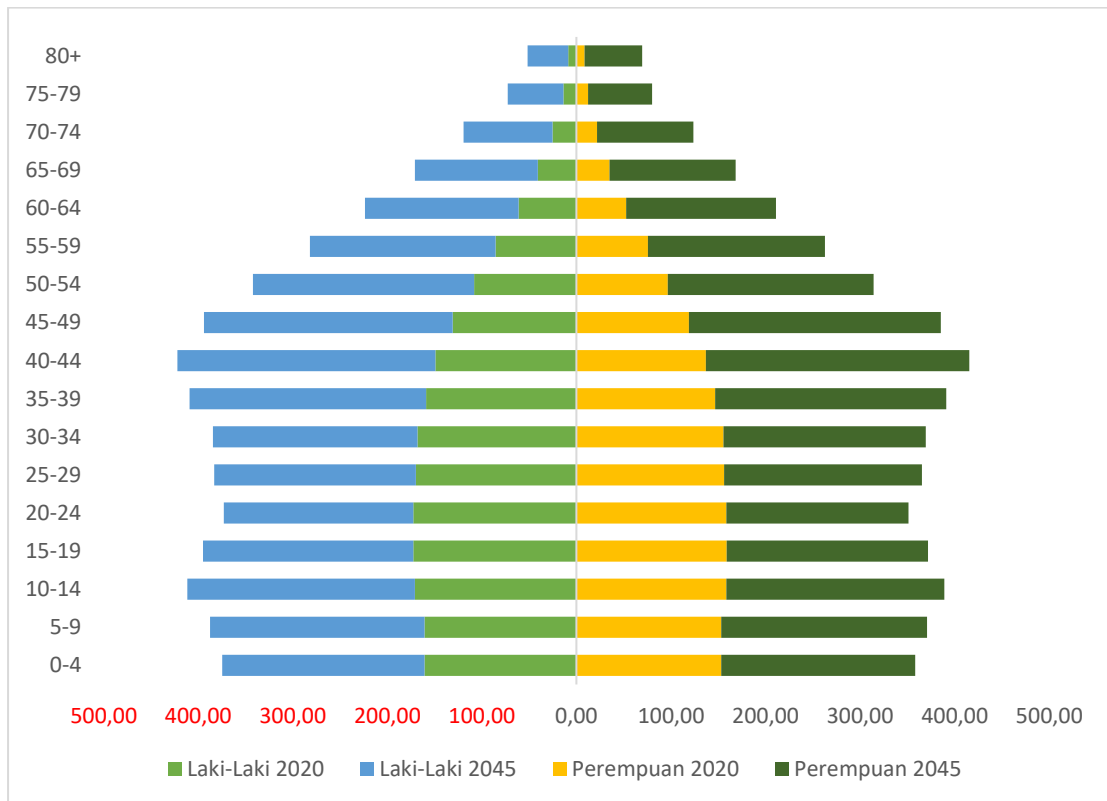
Hasil proyeksi memperlihatkan adanya peningkatan pada penduduk umur 0-14 tahun dari 952,80 ribu orang pada tahun 2023 menjadi 1.334,49 ribu orang pada tahun 2045. Pertambahan jumlah penduduk usia muda turut dipengaruhi oleh dinamika penduduk akibat pemindahan IKN yang berasal dari pola fertilitas perempuan pendatang dan jumlah penduduk dependen atau penduduk ikutan usia muda. Proporsi penduduk usia kurang dari 15 tahun mewakili 25,48 persen dari total populasi pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan turun menjadi 20,73 persen pada 2045.

Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) diproyeksikan bertambah sampai dengan tahun 2045 mencapai 4.413,79 ribu orang.

Penduduk yang berumur 65 tahun ke atas diproyeksikan akan meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2020 hingga tahun 2045. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi, jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas pada tahun 2045 sekitar 689,49 ribu orang atau sekitar 10,71 persen dari jumlah total penduduk di tahun 2045, meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 4,44 persen. Namun demikian, pertambahan jumlah penduduk lansia dan usia muda masih lebih kecil dibanding pertambahan penduduk usia produktif. Hal ini tentu saja menciptakan peluang bagi Provinsi Kalimantan Timur jika dikelola dengan baik.

Dalam kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur akan mengalami bonus demografi yang terlihat dari angka ketergantungan yang diproyeksikan sebesar 40,17 persen pada tahun 2030 dan meningkat menjadi 45,86 persen pada tahun 2045 dengan capaian dibawah 50 persen. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang tidak dan belum produktif.

Bonus demografi juga dapat diartikan bahwa setiap penduduk usia kerja menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif. Untuk mendapatkan bonus demografi tersebut, maka kualitas SDM harus ditingkatkan secara maksimal melalui pendidikan, pelayanan kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Ke depan kemiskinan yang menjadi simbol ketidakberdayaan dalam ekonomi akan semakin menghilang tergantikan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.



**Gambar II.86**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2045**

*Sumber: BPS Provinsi KALTIM*

Proyeksi penduduk Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan penambahan penduduk paling banyak pada usia produktif (15-64 tahun) dalam periode 2020-2045. Peningkatan ini merupakan dampak pemindahan penduduk ke IKN, sehingga piramida penduduk Kalimantan Timur cenderung tidak berubah bentuk, dengan proporsi penduduk produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia anak (0-14 tahun) dan usia lansia (60 tahun ke atas).

### 2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Perkembangan jumlah penduduk membawa perubahan besar pada kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan sarana dan prasarana beserta fasilitas penunjangnya. Kebutuhan dasar tersebut terus meningkat secara alamiah seiring kompleksitasnya kebutuhan hidup bermasyarakat, seperti kebutuhan untuk aktivitas sosial, aktivitas ekonomi dan aktivitas pelayanan umum. Dari fenomena tersebut menuntut pula pembangunan sarana dan prasarana guna menjaga kelangsungan hidup masyarakat.

## 1. Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Proyeksi kebutuhan rumah tahun 2025 sebanyak 1.110.500 unit dengan proyeksi jumlah penduduk sebanyak 4.267.600 orang dan pada tahun 2045 jumlah kebutuhan rumah/tempat tinggal diproyeksikan akan meningkat mencapai dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan rumah/tempat tinggal juga akan bertambah.

**Tabel II.118**  
**Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	3.909.740	4.267.600	5.197.920	5.741.830	6.116.320	6.437.780
Proyeksi Kebutuhan Rumah	1.086.500	1.110.500	1.165.700	1.223.640	1.284.460	1.348.310

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2024

## 2. Kebutuhan Air Bersih

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), kebutuhan rata-rata air bersih Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebanyak 206 liter/orang/hari. Pada tahun 2030 jumlah penduduk diproyeksi akan mengalami peningkatan akibat dari pemindahan ASN selesai di tahun 2030 dan daerah penyangga IKN akan menjadi kota metropolitan di Kalimantan Timur sehingga menggunakan asumsi per kapita dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yaitu sebesar 250 liter/orang/hari. Sehingga dapat diproyeksikan pada tahun 2045 Kebutuhan air bersih Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan meningkat menjadi 1.609.445 ribu liter/hari atau 18.628 liter/detik.

**Tabel II.119**  
**Proyeksi Kebutuhan Air Bersih**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	3.909.740	4.267.600	5.197.920	5.741.830	6.116.320	6.437.780
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih						
Liter/org/hari	206	238	245	250	250	250
Ribu liter/hari	805.406,44	1.015.688,80	1.273.490,40	1.435.457,50	1.529.080	1.609.445
liter/detik	9.322	11.756	14.739	16.614	17.698	18.628

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2024

### 3. Kebutuhan Listrik

Ketersediaan energi listrik merupakan aspek yang sangat penting dan bahkan menjadi parameter untuk mendukung keberhasilan pembangunan suatu daerah. Sebagai salah satu infrastruktur dasar, ketersediaan energi listrik yang memadai dan tepat sasaran akan memacu perkembangan pembangunan daerah seperti sektor industri, komersial, pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat, yang akan berdampak positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kebutuhan listrik rumah tangga diproyeksikan akan meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kalimantan Timur di tahun 2025-2045. Pada tahun 2023, dengan jumlah penduduk 3.909.740 jiwa kebutuhan listrik di Kalimantan Timur adalah sebesar 5.311,83 GWh/orang/tahun atau sebesar 1.358 KWh/orang/tahun. Dengan bertambahnya proyeksi penduduk di tahun 2025 menjadi 6.437.780 jiwa, dan dengan semakin meningkatnya kegiatan berbasis hilirisasi industri di Kaltim, maka proyeksi kebutuhan listrik tahun 2045 diperkirakan juga akan meningkat sebesar 33.308,54 GWh/orang/tahun.

**Tabel II.120**  
**Proyeksi Kebutuhan Listrik**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (orang)	3.909.740	4.267.600	5.197.920	5.741.830	6.116.320	6.437.780
Jumlah Rumah (unit)	1.086.500	1.110.500	1.165.700	1.223.640	1.284.460	1.348.310
Proyeksi Kebutuhan Listrik(GWh/orang/tahun)	5.311,83	13.367,98	26.034,46	28.427,22	30.954,49	33.308,54

Sumber: Dinas ESDM Provinsi KALTIM

Catatan :

- Proyeksi kebutuhan listrik didapat dari Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Proyeksi Jumlah rumah tangga tahun 2025–2030 didapat dari dokumen RUPTL, sedangkan tahun 2035–2045 didapat dari pengolahan Dinas ESDM (RUPTL hanya sampai 2030)

### 4. Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Sampah merupakan permasalahan klasik yang kerap timbul dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena setiap manusia dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti menghasilkan sampah. Volume timbulan sampah sejalan dengan pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebanyak 3.909.740, mengakibatkan jumlah volume sampah juga meningkat dengan jumlah timbulan sampah sebanyak 801.206 ton/tahun. Di sisi lain, sarana persampahan yang tersedia untuk pengelolaan dari sampah yaitu tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) ada 9 unit di tahun 2023. Proyeksi jumlah penduduk di tahun 2045 sebanyak 6.437.780 jiwa mengakibatkan proyeksi timbulan sampah juga meningkat menjadi 1.227.536 ton/tahun sehingga proyeksi jumlah kebutuhan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebanyak 85 unit.

**Tabel II.121**  
**Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	3.909.740	4.267.600	5.197.920	5.741.830	6.116.320	6.437.780
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)	801.216	853.951	1.023.724	1.124.702	1.198.017	1.227.536
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) (unit)	9	28	51	65	76	85

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi KALTIM

## 5. Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan merupakan sarana dan prasarana pelayanan publik yang harus diperhitungkan kebutuhannya dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada tahun 2045 diperkirakan jumlah Rumah Sakit akan bertambah sebanyak 69 unit, 192 puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sebanyak 10 unit. Fasilitas Kesehatan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal pada jumlah penduduk sebanyak 6.437.780 orang pada tahun 2045.

**Tabel II.122**  
**Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk (Jiwa)	3.909.740	4.267.600	5.197.920	5.741.830	6.116.320	6.437.780
Fasilitas Kesehatan						
- Rumah Sakit (unit)	58	58	62	62	67	69
- Puskesmas (unit)	188	188	189	189	190	192
- Labkesda (unit)	7	8	9	10	10	10

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM

## 6. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Sarana pendidikan memiliki fungsi yang cukup penting dalam menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sehubungan dengan proyeksi jumlah penduduk yang semakin bertambah dampaknya pada pemenuhan kebutuhan sarana Pendidikan, diharapkan sarana Pendidikan dasar dan menengah yang merata dan menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.

Kebutuhan jumlah sekolah pada tahun 2025 di Tingkat TK sebanyak 394 unit, SD/MI sebanyak 527 unit, SMP/MTS sebanyak 255 unit dan SMA/MA/SMK sebanyak 155 unit, jumlah ini semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk hingga di tahun 2045 kebutuhan jumlah sekolah di tingkat TK sebanyak 595 unit, SD/MI sebanyak 795 unit, SMP/MTs sebanyak 384 unit dan SMA/MA/SMK sebanyak 384 unit.

**Tabel II.123**  
**Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	3.909.740	4.267.600	5.197.920	5.741.830	6.116.320	6.437.780
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
• TK (unit)	361	394	480	531	565	595
• SD/MI (unit)	483	527	642	709	756	795
• SMP/MTs (unit)	233	255	310	343	365	384
• SMA/MA/SMK (unit)	142	155	189	209	222	234

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi KALTIM

### 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Cakupan Wilayah Perencanaan RTRW Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas Wilayah kurang lebih 15.344.552 (lima belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua) hektare. Wilayah Kabupaten/Kota dan Pulau Kecil meliputi 7 (tujuh) kabupaten yakni Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu dan 3 (tiga) kota yakni Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sedangkan Perairan Pesisir meliputi Garis Pantai dengan jarak 12 (dua belas) mil Laut ke arah Perairan Pesisir dan/atau Laut, serta batas kewenangan pengelolaan sumber daya Laut.

### 2.7.1. Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur

Struktur ruang memengaruhi bentuk ruang kota. Ini dikarenakan berbagai jaringan terutama jaringan transportasi yang dapat menentukan arah perkembangan kota dan pemanfaatan ruang yang berada di sekitarnya. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2023 RTRWP Kalimantan Timur, Sistem pusat permukiman terdiri atas:

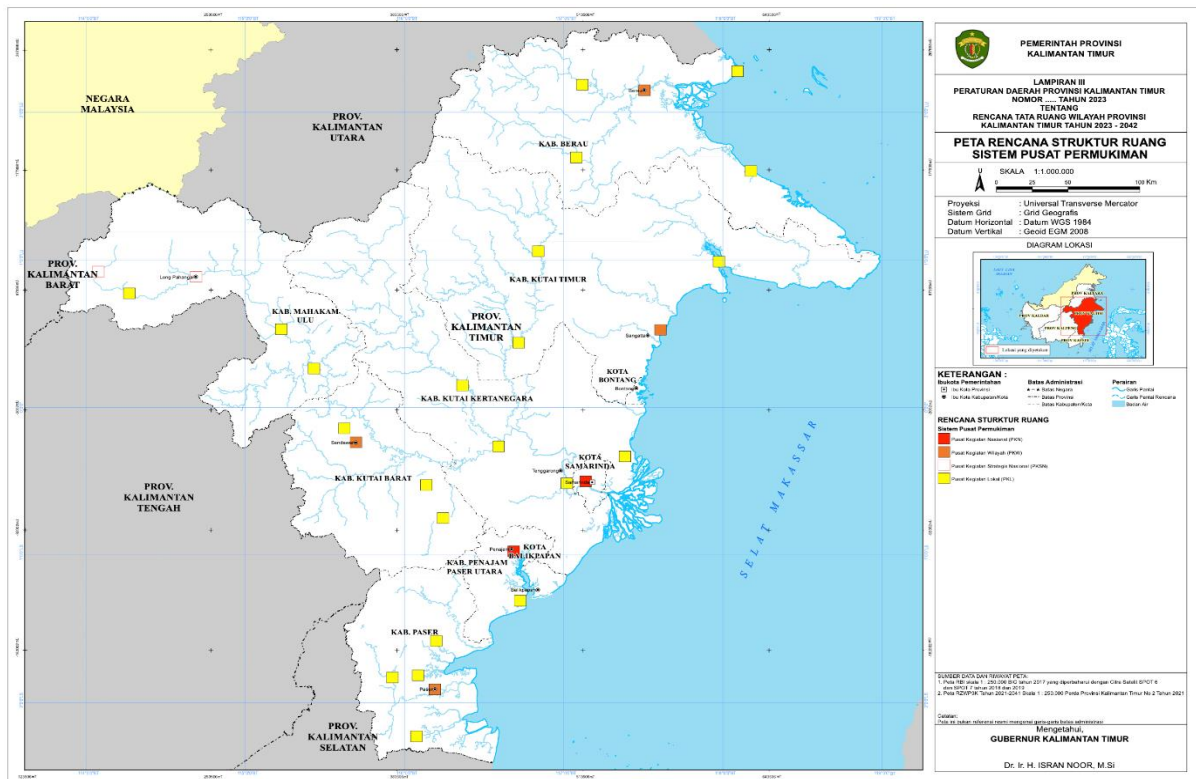
- a. PKN di Kalimantan Timur meliputi: Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang.
- b. PKW meliputi:
  - Tana Paser di Kabupaten Paser;
  - Sendawar di Kabupaten Kutai Barat;
  - Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan
  - Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.
- c. PKSN yang dimaksud meliputi Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu.
- d. PKL yang dimaksud meliputi:
  - Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser;
  - Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau;
  - Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat;
  - Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur;
  - Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
  - Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.

Sistem pusat permukiman terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kelautan terdiri atas:

- Pelabuhan perikanan di Kabupaten Berau dan IKN;
- Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan IKN; dan
- Sentra industri maritim di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.



Berikut ini merupakan Peta Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Kalimantan Timur.



**Gambar II.87**  
**Peta Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Kalimantan Timur**

### 2.7.2. Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur Kawasan Lindung

1. Badan air memiliki luas kurang lebih 75.793 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektare berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya memiliki luas kurang lebih 1.862.660 (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh) hektare terdiri atas:
  - a. kawasan hutan lindung di Kabupaten Paser,
  - b. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau,
  - c. Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur,
  - d. Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten
  - e. Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang; dan

- f. Kawasan Lindung gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Barat.
3. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya memiliki luas kurang lebih 43.144 (empat puluh tiga ribu seratus empat puluh empat) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (Holding Zone) meliputi:
  - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan hutan produksi yang selanjutnya disingkat PTB/KHP memiliki luas kurang lebih 20.911 (dua puluh ribu sembilan ratus sebelas) hektare berada di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu;
  - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat PTB/P memiliki luas kurang lebih 21.992 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang; dan
  - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PTB/PM memiliki luas kurang lebih 241 (dua ratus empat puluh satu) hektar berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Balikpapan
4. Kawasan perlindungan setempat memiliki luas kurang lebih 13.000 (tiga belas ribu) hektare berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.
5. Kawasan konservasi memiliki luas kurang lebih 680.630 (enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh) hektare meliputi:
  - a. Cagar Alam Padang Luway di Kabupaten Kutai Barat;
  - b. Cagar Alam Teluk Apar di Kabupaten Paser dan Perairan Pesisir Selat Makassar;
  - c. Cagar Alam Teluk Adang di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - d. Cagar Alam Muara Kaman Sedulang di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur;

- e. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Mahakam Hulu;
  - f. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Perairan
  - g. Pulau Semama di Kabupaten Berau;
  - h. Taman Nasional Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
  - i. Taman Nasional Betung Kerihun di Kabupaten Mahakam Ulu;
  - j. Taman Hutan Raya Lati Petangis di Kabupaten Paser;
  - k. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - l. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Perairan Pulau Sangalaki di Kabupaten Berau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - m. Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Berau;
6. Kawasan Konservasi Perairan Bontang di Kota Bontang meliputi Perairan Pulau Kedindingan dan Pulau Berasbasah, Perairan Pulau Melahing, dan Perairan Pulau Segajah di Kota Bontang; dan
  7. Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur.
  8. Kawasan konservasi memiliki luas kurang lebih 59.452 (lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua) hektar terdapat usulan Zona Tunda ( *Holding Zone* ) meliputi:
    - a. kawasan konservasi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KS/P memiliki luas kurang lebih 36.877 (tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektare berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten-Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang;
    - b. kawasan konservasi/kawasan perikanan yang selanjutnya disingkat KS/IK memiliki luas kurang lebih 21.400 (dua puluh satu ribu empat ratus) hektare berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang; dan
    - c. kawasan konservasi/Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat KS/PM memiliki luas kurang lebih 1.174 (seribu

seratus tujuh puluh empat) hektare berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

9. Kawasan pencadangan konservasi di Laut memiliki luas kurang lebih 233.082 (dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh dua) hektare terdiri atas:
  - a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Harapan, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Apar, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Telake- Tanjung Sembiling, serta Kawasan Konservasi Perairan Karang Tanjung Aru di Kabupaten Paser Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kecamatan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Bingkar, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Belanak, serta Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Karang Tigau Pulau Derawan di Kabupaten Berau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Sangatta Selatan,
  - c. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Tanjung Sangatta, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Bungalun, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Sangkulirang, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Sangkulirang-Tanjung Pagar, serta Kawasan Konservasi Perairan Pulau Miang Besar di Kabupaten Kutai Timur;
  - d. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Jumlai, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Balikpapan, serta Kawasan Konservasi Perairan Karang Tanjung Jumlai di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
  - e. Kawasan Konservasi Maritim Kapal Amagiri di Kabupaten Paser dan Kawasan Konservasi Maritim Kapal SS Sierra Cordoba di Selat Makassar pada Kabupaten Kutai Timur.
10. Kawasan hutan adat memiliki luas kurang lebih 1.088 (seribu delapan puluh delapan) hektare berada di kawasan Area Penggunaan Lain terdiri atas:
  - a. Kawasan Hutan Adat Hemaq Beniug, Kawasan Hutan Adat Bahau Uma Luhut, Kawasan Hutan Adat Anyaang Apoq,

Kawasan Hutan Adat Benuaq Telimuk, Kawasan Hutan Adat Teluyen Jarikng Lestari, Kawasan Hutan Adat Benuaq Madjaun, dan Kawasan Hutan Adat Gunung Menaliq di Kabupaten Kutai Barat; dan

b. Kawasan Hutan Adat Mului di Kabupaten Paser.

11. Kawasan Lindung geologi memiliki luas kurang lebih 14.438 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh delapan) hektare berupa Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat serta kawasan imbuhan air tanah di sekitarnya berada di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.
12. Kawasan ekosistem *mangrove* memiliki luas kurang lebih 93.718 (sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas) hektar berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang.

### **Kawasan Budidaya**

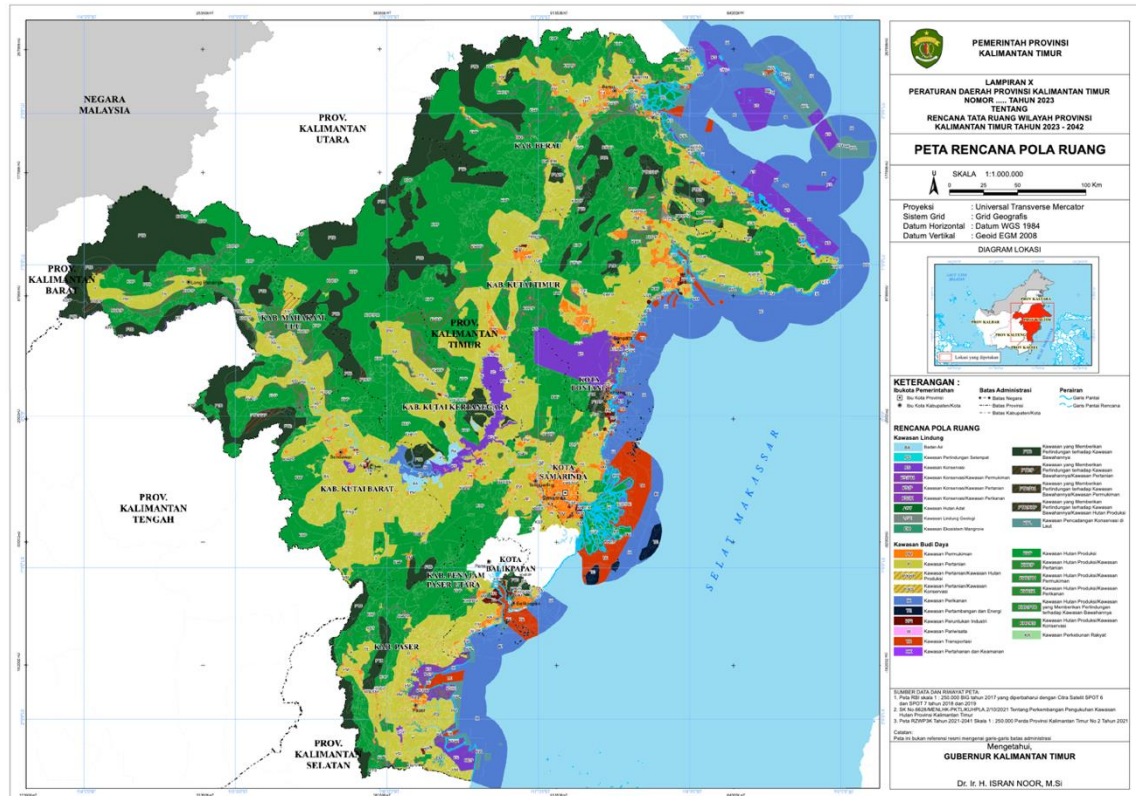
1. Kawasan hutan produksi memiliki luas kurang lebih 5.953.731 (lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu) hektare berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.
2. Kawasan hutan produksi memiliki luas kurang lebih 510.667 (lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh tujuh) hektar terdapat usulan Zona Tunda ( *Holding Zone* ) meliputi:
  - a. kawasan hutan produksi/kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang selanjutnya disingkat KHP/PTB- 66 - memiliki luas kurang lebih 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) hektare berada di Kota Balikpapan;
  - b. kawasan hutan produksi/kawasan konservasi yang selanjutnya disingkat KHP/KS memiliki luas kurang lebih 3.314 (tiga ribu tiga ratus empat belas) hektar berada di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - c. kawasan hutan produksi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KHP/P memiliki luas kurang lebih 502.831 (lima ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh satu) hektare berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten

- Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda;
- d. kawasan hutan produksi/kawasan perikanan yang selanjutnya disingkat KHP/IK memiliki luas kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau; dan
  - e. kawasan hutan produksi/Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat KHP/PM memiliki luas kurang lebih 2.439 (dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda.
3. Kawasan perkebunan rakyat memiliki luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektare berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
  4. Kawasan pertanian memiliki luas kurang lebih 3.469.408 (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan) hektare berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.
  5. Selain kawasan pertanian di atas juga terdapat usulan Zona Tunda ( *Holding Zone* ) meliputi:
    - a. kawasan pertanian/kawasan konservasi yang selanjutnya disingkat P/KS memiliki luas kurang lebih 14.890 (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh) hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu; dan
    - b. kawasan pertanian/kawasan hutan produksi yang selanjutnya disingkat P/KHP memiliki luas kurang lebih 206 (dua ratus enam) hektare berada di Kabupaten Berau.
  6. Kawasan perikanan memiliki luas kurang lebih 2.085.091 (dua juta delapan puluh lima ribu Sembilan puluh satu) hektare
  7. Kawasan pertambangan dan energi memiliki luas kurang lebih 48.853 (empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga) hektare terdiri atas:
    - a. Kawasan pertambangan minyak dan gas berada di Perairan Teluk Balikpapan, Perairan Muara Mahakam, serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
    - b. Kawasan pembangkitan tenaga listrik berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau,



- Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- c. Kawasan peruntukan industri memiliki luas kurang lebih 54.424 (lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat) hektare berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota serta Perairan Pesisir Selat Makassar di Kota Bontang.
  - d. Kawasan pariwisata memiliki luas kurang lebih 9.857 (sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh) hektar berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
  - e. Kawasan Permukiman memiliki luas kurang lebih 417.920 (empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh) hektare berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dan Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
  - f. Kawasan transportasi memiliki luas kurang lebih 330.804 (tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat) hektar berada di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
  - g. Kawasan pertahanan dan keamanan memiliki luas kurang lebih 7 (tujuh) hektare berada di Kabupaten Berau dan Perairan Pesisir Laut Sulawesi.

Berikut merupakan Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur:



**Gambar II.88**  
**Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur**

### 2.7.3. Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur

Selain penetapan hierarki sistem pusat pelayanan di atas, aspek lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah penetapan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah rencana tata Ruang yang bersifat umum dari Wilayah Provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

Kawasan strategis di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

- Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan
- Kawasan Strategis Provinsi.

KSN terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan:

- pertumbuhan ekonomi;

KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa:

- Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan
- Balikpapan.

- fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;



KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

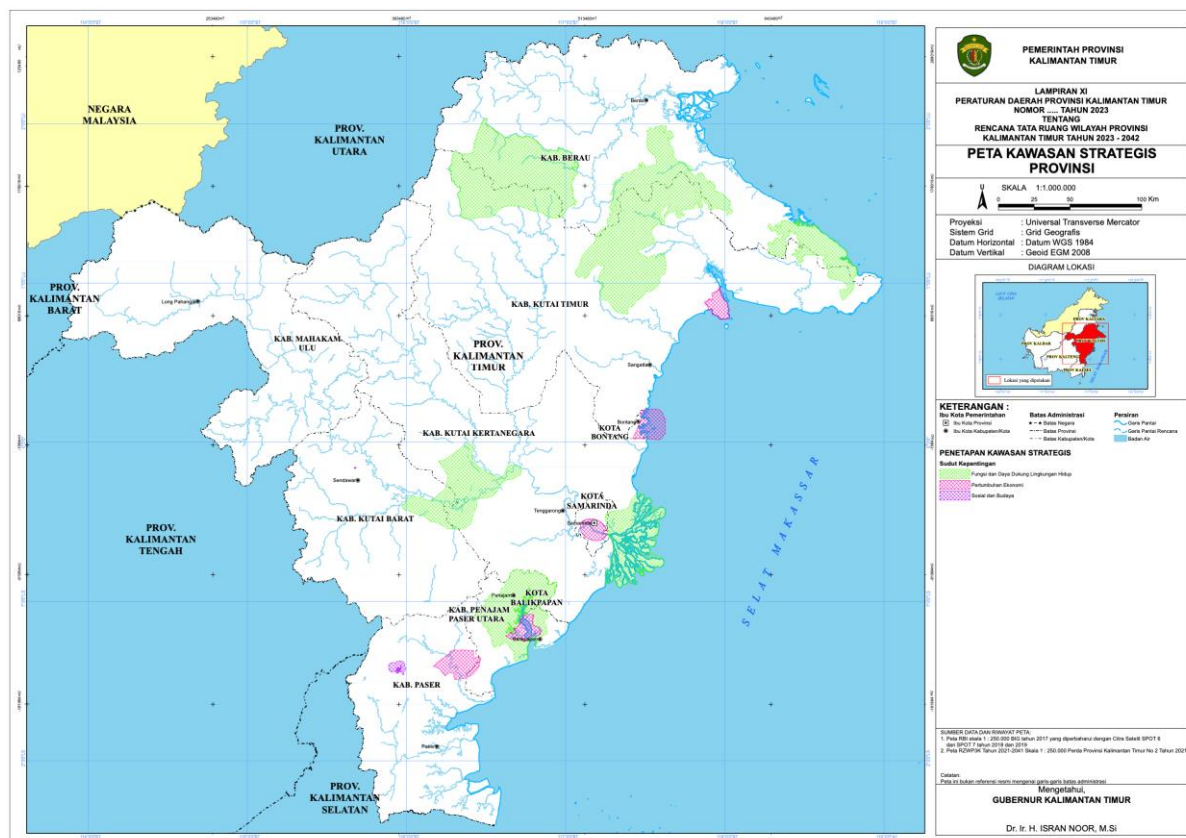
terdiri atas:

- Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*);
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu pengendalian lingkungan hidup meliputi: daerah cadangan karbon biru di Kepulauan Derawan dan Biduk-Biduk pada Kabupaten Berau; dan
- kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis di Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi pada Kabupaten Berau.

c. pertahanan dan keamanan.

KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

- Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan;
- Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara; dan
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu kedaulatan negara di Pulau Maratua dan Pulau Sambit pada Kabupaten Berau.



**Gambar II.41**  
**Peta Kawasan Strategis di Provinsi Kalimantan Timur**

KSP terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan:

- KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
  - kawasan industri Bontang di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - kawasan industri Maloy di Kabupaten Kutai Timur;
  - kawasan industri Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - kawasan sentra pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
  - kawasan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda.
- KSP dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas::
  - Kawasan Hutan Adat Hemaq Beniung di Kabupaten Kutai Barat; dan
  - Kawasan Hutan Adat Mului di Kabupaten Paser.
- KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
  - Danau Kaskade Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat;



- Kawasan Teluk Balikpapan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan;
- Kawasan Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau; dan
- Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Penyelenggaraan pembangunan daerah memiliki kompleksitas permasalahan dan tantangan di berbagai sektor. Capaian pembangunan yang belum maksimal menandakan adanya kendala dan permasalahan yang belum berhasil diidentifikasi dengan tepat. Sehingga, diperlukan penyusunan analisis permasalahan sebagai langkah esensial dalam mengidentifikasi berbagai hambatan yang dapat dijadikan simpulan sebagai "permasalahan utama" dalam proses pembangunan daerah. Analisis ini akan menjadi pijakan sentral untuk merancang perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan efektif.

Selain merumuskan permasalahan, juga perlu merumuskan isu-isu strategis daerah dengan memperhatikan isu-isu strategis di tingkat regional, nasional, dan internasional. Berdasarkan analisis strategis yang dilakukan, setiap peluang yang berpotensi mempercepat capaian pembangunan harus dimanfaatkan secara optimal, sementara itu ancaman yang bersifat sebagai hambatan harus diantisipasi sedini mungkin dan dijadikan sebagai upaya peringatan bagi capaian pembangunan. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah.

#### **3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Permasalahan pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya berikut dengan identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 diperoleh gambaran permasalahan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Masih adanya kesenjangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Masih lambatnya transformasi ekonomi dari basis SDA tidak terbarukan;
3. Belum meratanya infrastruktur dasar dan konektivitas yang belum terintegrasi;
4. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah;
5. Belum optimalnya tata pemerintahan dan birokrasi yang profesional dan akuntabel;
6. Penurunan kualitas lingkungan hidup di tengah upaya penurunan emisi GRK.

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik, berikut ini adalah penjabaran tentang permasalahan pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2045 :

**1. Masih adanya kesenjangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam upaya mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hubungan antara kesejahteraan dan kemiskinan memiliki dinamika yang erat dalam membentuk landasan utama bagi keadaan sosial-ekonomi suatu masyarakat. Kemiskinan, sebagai suatu kondisi yang terbatas pada sumber daya ekonomi, sering kali mengakibatkan akses yang terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur berada di Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,72 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 2,96 ribu jiwa dan di Kabupaten Kutai Barat sebesar 0,17 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 0,26 ribu jiwa. Kemiskinan ekstrem seringkali menjadi penghalang utama dalam mendapatkan akses pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas.

Berdasarkan data hasil *Long Form* Sensus Kependudukan 2020, mayoritas penduduk perkotaan yang berumur 15 tahun ke atas berpendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat dengan angka capaian sebesar 45,61 persen. Sedangkan, mayoritas penduduk pedesaan dalam rentang usia yang sama hanya berpendidikan Sekolah Dasar/Sederajat sebesar di angka sebesar 32,39 persen jika dibandingkan dengan total keseluruhan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan pendidikan yang masih dihadapi oleh masyarakat di daerah pedesaan.

Kondisi kemiskinan dan pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Kemiskinan dapat menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan karena akses terbatas terhadap pangan bergizi, lingkungan yang layak, dan layanan kesehatan, serta rentan terhadap penyakit menular dan kronis. Pada tahun 2023 angka prevalensi stunting mencapai angka 22,9 persen. Faktor-faktor seperti akses terbatas terhadap nutrisi yang memadai, pelayanan kesehatan yang kurang optimal, dan kondisi ekonomi dapat menjadi penyebab munculnya permasalahan ini.

Penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh pekerja tamatan SMA/Sederajat sebesar 27,84 persen dan tamatan SD ke Bawah sebesar 25,18 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 16,14 persen. Masih tingginya proporsi penduduk usia kerja tamatan SD ke Bawah perlu menjadi perhatian serius guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat Pendidikan

tenaga kerja dapat diasumsikan kualitas tenaga kerja semakin baik diharapkan kemampuan dan keterampilan pekerja semakin bertambah maka nilai tambah penghasilan pekerja juga semakin meningkat.

## **2. Masih lambatnya transformasi ekonomi dari basis SDA tidak terbarukan;**

Lambatnya transformasi ekonomi dari basis sumber daya alam tidak terbarukan disebabkan oleh ketergantungan struktur ekonomi pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan tersebut mengakibatkan dampak lingkungan yang serius dan ketidakberlanjutan ekonomi. Meskipun potensi ekonomi dari SDA melimpah, langkah-langkah transformatif dalam diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor lainnya masih terasa lamban. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,48 persen.

PDRB Provinsi Kalimantan Timur dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih merupakan kontributor utama. Ketergantungan pada sumber-sumber yang tidak dapat terbarukan harus dialihkan untuk mendukung transformasi ekonomi sebagaimana yang telah dicanangkan secara nasional. Lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, pertanian, serta perdagangan dan jasa selanjutnya dapat menjadi kontributor bagi PDRB Provinsi apabila transformasi ekonomi berjalan optimal.

Kesadaran akan pentingnya diversifikasi ekonomi sebagai respons terhadap ketergantungan pada sektor pertambangan tercermin dalam strategi pengembangan kawasan industri. Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), Kawasan Industri Kariangau (KIK), dan Buluminung sebagai *superhub* ekonomi IKN akan menjadi fokus utama untuk mewujudkan transformasi ekonomi.

## **3. Belum meratanya infrastruktur dasar dan konektivitas yang belum terintegrasi;**

Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah yang berdekatan dengan Ibukota Negara Nusantara memiliki posisi strategis sebagai penggerak perekonomian negara. Perlu ketersediaan infrastruktur dasar termasuk infrastruktur yang mendukung perekonomian, yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga dapat mendukung pembangunan daerah dan IKN. Masalah utama yang ditemui adalah ketersediaan infrastruktur yang belum merata, serta kondisi infrastruktur yang sebagian tidak dalam kondisi baik, menyebabkan pelayanan tidak optimal.

Permasalahan pemerataan dan kualitas infrastruktur membawa dampak signifikan terhadap ketimpangan sosial di berbagai wilayah. Selain itu, konektivitas yang belum terintegrasi dapat menciptakan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Dengan memastikan bahwa konektivitas setiap wilayah terintegrasi, seperti konektivitas jalan dan kemudahan akses terhadap pusat-pusat industri, serta jaringan telekomunikasi yang memadai dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan pembangunan antar-daerah di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara umum tetapi juga untuk meratakan peluang dan kesejahteraan di seluruh provinsi.

#### **4. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah**

Kesenjangan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur tergolong cukup tinggi dan masih menjadi permasalahan pembangunan daerah yang perlu dituntaskan. Dilihat dari kesenjangan pengeluaran penduduk Kalimantan Timur yang diukur dengan Indeks Gini menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Rasio gini di Kalimantan Timur tahun 2022 menunjukkan penurunan sebesar 0,327, namun capaian indeks gini tahun 2022 masih dibawah target sebesar 0,308. Sedangkan dari sisi kewilayahan, terlihat kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota. Pada tahun 2022 tercatat Kabupaten Berau merupakan kabupaten dengan indeks gini tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya yakni sebesar 0,352 dan disusul oleh Kota Samarinda dengan indeks gini sebesar 0,346.

Sementara itu, pengeluaran kelompok penduduk 40 persen berpendapatan rendah pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 21,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 21,28 persen menunjukkan bahwa tingkat disparitas ekonomi masih tinggi, dan berdasarkan kategori ketimpangan Bank Dunia, persentase ini masuk dalam standar rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan ketimpangan dalam hal redistribusi ekonomi dan juga persoalan akses terhadap pelatihan dan pekerjaan.

Gini Rasio yang tinggi, berkaitan dengan persoalan-persoalan konektivitas dalam infrastruktur suatu wilayah. Salah satu yang dapat digunakan sebagai indikator adalah kualitas jaringan internet di desa. Ketidaksetaraan akses terhadap teknologi informasi seperti jaringan internet, khususnya di desa, bisa menjadi pemicu tambahan terhadap kesenjangan ekonomi. Desa yang terpinggirkan dari jaringan internet berkualitas dapat kehilangan peluang untuk mengakses informasi, pendidikan *online*, serta peluang ekonomi digital. Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas jaringan internet di wilayah pedesaan

bukan hanya menjadi isu teknologi, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi yang tercermin dalam Gini Rasio yang tinggi.

Selanjutnya, berdasarkan penghitungan Indeks Williamson, kesenjangan antar wilayah dalam regional Kalimantan juga tercatat masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran angka Indeks Williamson yang selalu berada di atas angka 0,60, walaupun terdapat kecenderungan semakin menurun sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,594. Namun di tahun 2022 angka Indeks Williamson mengalami sedikit peningkatan yang mencapai 0,661. Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, Indeks Williamson di dalam wilayah Kalimantan Timur yang berada pada kisaran 0,40-0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ekonomi yang relatif homogen. Namun, disisi lain besaran yang relatif sama tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengindikasikan bahwa masih diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat yang dapat lebih menurunkan ketimpangan antara kabupaten/kota yang terjadi.

#### **5. Belum optimalnya tata pemerintahan dan birokrasi yang profesional dan akuntabel;**

Belum optimalnya tata pemerintahan dan birokrasi yang profesional serta akuntabel dapat memperlambat implementasi kebijakan, menimbulkan ketidakpastian, dan menciptakan celah untuk praktik korupsi. Selain itu, birokrasi yang tidak profesional cenderung kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kurang mampu mengelola sumber daya publik dengan efisien. Kurangnya akuntabilitas dalam tata pemerintahan dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan sulit untuk dipertanggungjawabkan atas kinerjanya, sehingga mengurangi transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tren IRB Kaltim selama 5 (lima) tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2023 naik 6,17 poin menjadi 73,87 dengan predikat BB (sangat baik). Capaian IRB berkaitan dengan dampak kinerja pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat yang akan dilihat dari beragam sektor yang termasuk ke dalam pelayanan publik.

Dilihat dari data hasil antara IRB menunjukkan bahwa nilai SPBE, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta kualitas pengelolaan arsip pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Secara umum, capaian kinerja yang ditunjukkan memang belum cukup baik dan memerlukan peningkatan yang signifikan. Beberapa nilai seperti kualitas pelayanan publik, kapabilitas APIP, dan maturitas SPIP juga mengalami nilai yang stagnan dan hal ini dapat dipandang sebagai sesuatu yang perlu untuk diperbaiki.



Mengingat, reformasi birokrasi mengandung tujuan efisiensi dan efektivitas dalam kinerja sehingga menyaratkan adanya progres yang positif di setiap tahunnya.

## **6. Penurunan kualitas lingkungan hidup di tengah upaya penurunan emisi GRK;**

Modifikasi terhadap struktur alamiah untuk kepentingan aktivitas manusia sejatinya mengharuskan pertimbangan yang mendalam terkait dampak lingkungan yang mungkin muncul. Pembangunan fisik yang dilakukan sering dilakukan tanpa mempertimbangkan secara holistik konsekuensi terhadap ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Provinsi Kalimantan Timur memiliki kekhususan dalam hal lingkungan hidup, di mana pelestarian lingkungan dan keberagaman hayati menjadi dua hal yang esensial. Berdasarkan kondisi khusus ini, tindakan pemerintah dan pihak-pihak terkait haruslah didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Termasuk dalam melakukan upaya perluasan infrastruktur harus diarahkan secara bijaksana dengan mempertimbangkan dengan serius isu-isu lingkungan agar masyarakat dapat menikmati hasil kemajuan tanpa mengorbankan aspek penting dari keberlanjutan lingkungan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKHL) Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Kondisi ini menandakan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur membutuhkan perhatian khusus sehingga dapat mengalami peningkatan lagi. Selain itu, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan penekanan yang besar pada penurunan emisi GRK dan intensitas emisi yang diprioritaskan pada sektor kehutanan dan lahan, sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.

### **3.2. TELAAH KLHS RPJPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Seperti disebutkan dalam Pasal 16 UU 32 Tahun 2009, dokumen KLHS ditujukan untuk memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 disusun dengan menggunakan pendekatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

### 3.2.1 Aspek Biogeofisik Kawasan

Karakteristik topografi Provinsi Kalimantan Timur ditandai dengan keberadaan area dengan kelerengan bervariasi dari lahan datar (kemiringan lereng 0-2%) yang umumnya terdapat di daerah pantai dan daerah paparan banjir dari sungai besar, area kemiringan landai (2-8%), perbukitan dan dataran bergelombang dengan kemiringan sedang (8-15%), agak curam (15- 25%) hingga curam (25-40%). Dengan kondisi topografi seperti ini, area yang datar dan landai yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan cukup terbatas, sementara pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki konfigurasi lapangan yang bergelombang hanya cocok untuk ditanami tanaman tahunan atau diselamatkan sebagai kawasan konservasi.

Penutupan lahan vegetasi alami provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1990 hingga 2015 menunjukkan pada vegetasi hutan mengalami penurunan luas setiap tahunnya, sedangkan semak belukar pada tahun 2000 hingga 2006 mengalami penambahan luas, pada tahun 2011 mengalami penurunan luas, dan pada tahun 2015 mengalami penambahan luas kembali.

**Tabel III. 1**  
**Data Penutupan Lahan Vegetasi Alami di Kalimantan Timur**

Tipe Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan (Ribu Ha)					
	1990	1996	2000	2006	2011	2015
Hutan	8.695,82	8.644,70	7.786,49	7.558,70	7.399,65	7.081,50
Semak Belukar	2.294,04	2.321,70	3.163,72	3.292,29	2.480,91	2.888,94
Perkebunan	286,16	302,77	255,06	338,81	528,79	1.107,17
Rawa	716,33	716,33	808,14	720,77	688,62	637,11
Pertanian	274,84	275,10	239,19	296,23	1010,25	367,41
Permukiman	67,76	67,74	69,24	74,06	77,54	80,13
Lahan Terbuka	171,93	178,54	180,08	221,53	308,09	322,02
Sawah	5,25	5,25	5,01	5,07	12,65	6,48
Tambak	69,31	69,31	76,21	103,88	104,85	117,36
Air	118,03	118,03	115,49	115,49	115,49	118,71
Jumlah	<b>12.726,83</b>	<b>12.726,83</b>	<b>12.726,83</b>	<b>12.726,83</b>	<b>12.726,83</b>	<b>12.726,83</b>

Sumber: Peta Penutupan Lahan 1990-2015, Dirjen PTKL Kemen LHK, 2016

Penutupan lahan pada tahun 1990 dan tahun 2015 mengalami perubahan yang cukup besar, jika dilihat pada 1990 pada tutupan hutan seluas 8695.82 Ha dan pada tahun 2015 menjadi seluas 7081.50 Ha. dan beralih yang dulunya hutan menjadi semak belukar, perkebunan, rawa, pertanian, pemukiman, lahan terbuka, sawah, tambak dan tubuh air.

### 3.2.2 Rumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)

Penjaringan isu dilakukan secara bertahap melalui data sekunder atau kajian terkait dengan isu pembangunan seperti dokumen kebijakan rencana pembangunan (RPJMD, dan RPJPD), kebijakan RTRW/RDTR, maupun dokumen kebijakan mengenai lingkungan (KLHS, RPPLH), yang selanjutnya diperkuat dengan forum konsultasi Publik yang kemudian dilakukan verifikasi data dan informasi secara langsung (diskusi/wawancara) untuk mendapatkan tambahan data yang bersifat Primer.

Berdasarkan hasil penjaringan isu pembangunan jangka Panjang di Provinsi Kalimantan Timur, telah dihasilkan 8 (delapan) isu pembangunan berkelanjutan yang perlu diarusutamakan dalam penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045.

**Tabel III. 2**

#### **Isu Strategis KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045**

No	Daftar Pendek Isu
1	Pengentasan Kemiskinan dan Kelaparan
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kesejahteraan, Pendidikan Berkualitas, dan Kesetaraan Gender
3	Pengembangan Industri, Inovasi, dan infrastruktur
4	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan
5	Ekosistem dan Perubahan Iklim
6	Peningkatan Pekerjaan Layak, Pengurangan Kesenjangan, Kemitraan, dan Pertumbuhan Ekonomi
7	Perwujudan Kota dan Permukiman Berkelanjutan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Energi Bersih, dan Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab
8	Dampak Pemindahan Ibukota Nusantara ke Pulau Kalimantan

### 3.2.3 Usulan Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 Berdasarkan KLHS

Terdapat beberapa rumusan usulan kebijakan yang perlu dimuat di dalam dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yang berdasarkan hasil KLHS. Usulan kebijakan ini didasarkan pada rumusan isu strategis yang telah disusun serta mempertimbangkan capaian TPB yang belum tercapai, sehingga perlu diusulkan kembali di tahun berikutnya. Beberapa usulan kebijakan RPJPD tersebut dapat dilihat tabel sebagai berikut.



Tabel III. 3

Rumusan Usulan Akomodasi Kebijakan Dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045

No	Belum/Perlu Capaian Program Pembangunan SDGs	Isu Strategis	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Rumusan Usulan Kebijakan RPJPD	Kesimpulan Tindak Lanjut	Bidang Berwenang
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>TPB 1 Tanpa Kemiskinan</li> <li>TPB 2 Tanpa Kelaparan</li> <li>TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera</li> </ul>	Pengentasan Kemiskinan dan Kelaparan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemiskinan di Kawasan daerah tertinggal saat ini sangat berdampak pada D3TLH dan efisiensi pemanfaatan SDA, karena salah satunya penyebab kemiskinan dapat disebabkan oleh krisis penyediaan kebutuhan pangan dan air. Selain itu rendahnya dalam pemanfaatan sumber daya alam pada suatu wilayah sehingga kecilnya nilai perekonomian pada sektor potensial sebagaimana dalam upaya meningkatkan pendapatan per kapita dengan adanya efisiensi pemanfaatan sumber daya alam</li> <li>Peningkatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur strategis yang melewati lahan-lahan jasa ekosistem penyedia (Lahan-lahan pangan)</li> <li>Meningkatkan manajemen prasarana sumber daya air dalam rangka mendukung penyediaan air dan ketahanan pangan</li> <li>Konversi lahan untuk pemenuhan pangan</li> <li>Pengembangan <i>agroforestry</i> untuk mendukung ketahanan pangan</li> <li>Perencanaan pembangunan kawasan pada lahan pertanian dengan mempertimbangkan: (1) aspek biofisik dalam suatu kawasan ekologi termasuk daya dukung dan potensi lahan; (2) aspek sosial- ekonomi; dan (3) aspek konservasi dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan, realisasi pencapaian</li> <li>Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas realisasi pencapaian 100%</li> <li>Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, 5%</li> <li>Persentase rumah tangga yang berpendapatan rendah mengakses rumah layak huni (kelompok penduduk 40% terbawah), Realisasi Pencapaian 60,78%</li> <li>Peningkatan usaha pencegahan Stunting</li> <li>Pengendalian Produktivitas Perekonomian Lokal dengan kajian ekonomis dan ekologis</li> </ul>	Program Pembangunan SDG's yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>Lingkungan Hidup</li> <li>Pertanian</li> <li>Sosial</li> <li>Kesehatan</li> <li>Pendidikan</li> <li>Swasta atau NGO/LSM</li> </ul>



No	Belum/Perlu Capaian Program Pembangunan SDGs	Isu Strategis	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Rumusan Usulan Kebijakan RPJPD	Kesimpulan Tindak Lanjut	Bidang Berwenang
			pemanfaatan lahan untuk kebutuhan pangan pada lokasi yang memiliki kemampuan lahan pangan	<p>kelestarian lingkungan untuk kelangsungan penggunaan di masa mendatang</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Meningkatkan SDM pada daerah tertinggal dalam hal penanggulangan kebencanaan serta meningkatkan kapasitas dan kemudahan akses pelayanan pemerintah daerah dalam hal penyuluhan maupun posko bantuan pada daerah tertinggal;</li><li>✓ Menerapkan inovasi dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam terutama sektor unggulan daerah tertinggal sebagai nilai tambah ekonomi wilayah;</li><li>✓ Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang memadai dengan ditunjang dengan teknologi ramah lingkungan dan tepat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menginisiasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan dalam perekonomian daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (potensi wilayah) pada masing-masing wilayah terutama untuk Kawasan daerah tertinggal</li><li>• Pengembangan pada Kawasan Daerah Tertinggal secara berkelanjutan dan disertai dengan pembangunan sarana prasarana pendukung seperti pembangunan akses jalan, pembangunan IPAL, dan sanitasi terpadu</li><li>• Penambahan kapasitas produksi secara bertahap sesuai rencana prioritas, penambahan kapasitas produksi akan mempengaruhi sistem penyediaan air baku untuk SPAM terutama pada pemerataan</li></ul>		



No	Belum/Perlu Capaian Program Pembangunan SDGs	Isu Strategis	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Rumusan Usulan Kebijakan RPJPD	Kesimpulan Tindak Lanjut	Bidang Berwenang
				guna	<ul style="list-style-type: none"> <li>pendistribusian kebutuhan air di Kawasan daerah Tertinggal</li> <li>Peningkatan pada sektor unggulan daerah tertinggal dan dapat bersaing dengan perekonomian wilayah lainnya</li> </ul>		
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera</li> <li>TPB 4 Pendidikan Berkualitas</li> <li>TPB 5 Kesetaraan Gender</li> </ul>	Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kesejahteraan, Pendidikan Berkualitas, dan Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya jaminan kualitas Kesehatan dan Pendidikan pada masyarakat setempat akan meningkatkan indeks kesiapsiagaan masyarakat (IKM) terhadap kebencanaan dalam meningkatkan SDM sehingga dapat meminimalisir tingkat risiko bencana tinggi di beberapa wilayah yang memiliki potensi bahaya bencana banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan</li> <li>✓ Memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses Pendidikan dan kesetaraan pelayanan Kesehatan</li> <li>✓ Menurunkan angka pengangguran terbuka dengan memberikan kemudahan lapangan kerja serta mengembangkan Pendidikan secara formal maupun non formal (<i>skill</i>) yang diprioritaskan pada dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja</li> <li>✓ Penerapan Pendidikan sejak dini terkait mitigasi bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokter/Dokter gigi, Tenaga kesehatan masyarakat yang direkrut dan ditingkatkan kompetensinya, 100%</li> <li>Peningkatan Angka partisipasi kasar (APK) SD/ sederajat, Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ sederajat</li> <li>Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah, 8,93 Tahun</li> <li>Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri</li> <li>Peningkatan persentase Lulusan SMK yang Terserap</li> </ul>	Program Pembangunan SDG's yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesehatan</li> <li>Pendidikan</li> <li>Ketenagakerjaan</li> <li>Sosial</li> <li>swasta atau NGO/LSM</li> </ul>



No	Belum/Perlu Capaian Program Pembangunan SDGs	Isu Strategis	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Rumusan Usulan Kebijakan RPJPD	Kesimpulan Tindak Lanjut	Bidang Berwenang
			longsor, dan gempa bumi ekstrim <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran perempuan dalam kebijakan pembangunan wilayah</li> </ul>	upaya dalam meningkatkan indeks kesiapsiagaan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memberikan peluang dan mendorong kelompok atau organisasi kepemudaan dan kewirausahaan pemuda mandiri dalam bersaing dengan pertumbuhan perekonomian saat ini</li> <li>✓ Menjamin kesejahteraan, kenyamanan, keamanan, keselamatan masyarakat.</li> </ul>	di Pasar Kerja, 40% <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan kesehatan</li> <li>• Peningkatan persentase Kabupaten / kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap</li> <li>• Penurunan angka Putus Sekolah SMA</li> <li>• Jumlah guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik</li> </ul>		
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TPB 9 Industri Inovasi dan Infrastruktur</li> </ul>	Pengembangan Industri, Inovasi, dan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdampak terhadap D3TLH sebagaimana daya tampung terhadap timbulan sampah/limbah dalam 20 tahun mendatang</li> <li>• Dampak dan risiko kerusakan lingkungan hidup</li> <li>• Mitigasi bencana pada kawasan peruntukan industri yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan Kawasan Permukiman berkelanjutan dengan terintegrasinya pembangunan sarana prasarana pendukung seperti pembangunan akses jalan, dan pembangunan IPAL serta inovasi teknologi ramah lingkungan pada pengelolaan limbah domestik</li> <li>✓ Peningkatan kualitas kebersihan daratan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sistem manajemen pengelolaan persampahan dan limbah industri yang terintegrasi</li> <li>• Antisipasi peningkatan timbulan limbah dengan meningkatkan unit penampungan dan pengelolaan limbah sesuai kapasitas timbulan limbah</li> </ul>	Program Pembangunan SDG's yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Rakyat</li> <li>• Lingkungan Hidup</li> <li>• Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>• swasta atau NGO/LSM</li> <li>• Perikanan dan Kelautan</li> </ul>



No	Belum/Perlu Capaian Program Pembangunan SDGs	Isu Strategis	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Rumusan Usulan Kebijakan RPJPD	Kesimpulan Tindak Lanjut	Bidang Berwenang
			melintasi wilayah risiko banjir • Mitigasi pengelolaan limbah industri pada kawasan pesisir	dan perairan kolam kawasan permukiman dan Industri dari limbah sampah, sanitari, dan B3 (termasuk minyak) ✓ Peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan peruntukan industri	dengan menyiapkan fasilitas koleksi terpisah • Pengembangan pada kriteria fisik lahan yang sesuai dengan peruntukan industri • Rencana pengembangan sistem manajemen pengelolaan persampahan di wilayah pesisir dengan memperhatikan rencana pengembangan daerah pelayanan yang didasarkan pada rencana pertumbuhan kota • Sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya kota berkelanjutan • Sistem transportasi yang dapat meningkatkan aksesibilitas pada Kawasan peruntukan industri		





No	Belum/Perlu Capaian Program Pembangunan SDGs	Isu Strategis	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Rumusan Usulan Kebijakan RPJPD	Kesimpulan Tindak Lanjut	Bidang Berwenang
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim</li> <li>TPB 14 Ekosistem Laut</li> <li>TPB 15 Ekosistem Daratan</li> </ul>	Ekosistem dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perubahan fungsi lahan sebagai Kawasan budidaya maka akan berdampak pada keberagaman anekaragaman hayati pada wilayah tersebut khususnya kegiatan pertambangan akan menurunkan potensi keanekaragaman hayati di wilayah tersebut, sementara dalam efisiensi pemanfaatan SDA dapat di tingkatkan sebagai nilai tambah pada sektor pertambangan</li> <li>Alih fungsi lahan pada kawasan akan berpengaruh terhadap penurunan produktivitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kajian lingkungan kawasan pertambangan</li> <li>✓ Mitigasi mengurangi pencemaran membuat kolam pengendapan (<i>settling pond</i>) dengan mempertimbangkan ukuran, bentuk butiran padatan, kecepatan aliran, persen padatan, dsb;</li> <li>✓ Memperketat pemberian izin usaha pertambangan (IUP)</li> <li>✓ Pelaksanaan peningkatan efisiensi energi melalui manajemen energi untuk pertambangan (<i>green building</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian lingkungan kawasan pertambangan</li> <li>Pengendalian produksi pertambangan dengan kajian ekonomis dan ekologis</li> <li>Menginisiasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan dalam sektor pertambangan</li> <li>Pemulihan kawasan bekas tambang, lahan krisis air, kawasan tercemar akibat sampah dan limbah, dan kawasan terkontaminasinya air dan udara yang ditimbulkan dari pengembangan Kawasan Pertambangan</li> <li>Memperketat perizinan pertambangan di Kawasan DAS dan Wilayah Pesisir</li> </ul>	Program Pembangunan SDG's yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kehutanan</li> <li>Lingkungan Hidup</li> <li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>Perindustrian</li> <li>ESDM/ Pertambangan</li> <li>swasta atau NGO/LSM</li> </ul>



No	Belum/Perlu Capaian Program Pembangunan SDGs	Isu Strategis	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Rumusan Usulan Kebijakan RPJPD	Kesimpulan Tindak Lanjut	Bidang Berwenang
			pertanian dan penurunan keberagaman konsumsi pangan, ketersediaan air dengan faktor limpasan, meningkatnya kerentanan perubahan iklim				
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak</li> <li>TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan</li> </ul>	Perwujudan Kota dan Permukiman Berkelanjutan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Energi Bersih, dan Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebutuhan air didominasi terlampaui;</li> <li>Kawasan perkotaan berada di Kawasan rawan bencana;</li> <li>Daya dukung dan daya tampung yang sudah terlampaui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, dan pengendalian pencemaran air</li> <li>✓ Pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk penyediaan air baku bagi rumah tangga, perkotaan, industri penyediaan air irigasi, pengendalian banjir</li> <li>✓ Pemanfaatan air bendungan yang adil untuk kepentingan irigasi dan air baku air minum</li> <li>✓ Pengembangan Kawasan Permukiman berkelanjutan dengan terintegrasinya pembangunan sarana prasarana pendukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya mengelola permintaan air dan menghemat/mengurangi pemakaian/penggunaan air (peningkatan efisiensi)</li> <li>Optimalisasi kapasitas produksi pengelolaan sumber air baku untuk SPAM, dengan pengawasan potensi pencemar air di lingkungan DAS</li> <li>Rehabilitasi sistem penyediaan air baku dengan optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan DAS</li> <li>Studi potensi sumber air tanah, hidrogeologi, dan keseimbangan air (<i>water balance</i>)</li> <li>Penambahan kapasitas produksi secara</li> </ul>	Program Pembangunan SDG's yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Rakyat</li> <li>Lingkungan Hidup</li> </ul>



No	Belum/Perlu Capaian Program Pembangunan SDGs	Isu Strategis	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Rumusan Usulan Kebijakan RPJPD	Kesimpulan Tindak Lanjut	Bidang Berwenang
				seperti pembangunan akses jalan, dan pembangunan IPAL serta inovasi teknologi ramah lingkungan pada pengelolaan limbah domestik	bertahap sesuai rencana prioritas, penambahan kapasitas produksi akan mempengaruhi sistem penyediaan air baku untuk SPAM, seperti adanya penambahan dimensi perpipaan, perluasan jaringan, dan bangunan fasilitas penunjang lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan sanitasi pada limbah domestik</li> <li>Cakupan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota</li> </ul>		
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>TPB 14 Ekosistem Laut</li> <li>TPB 15 Ekosistem Daratan</li> <li>TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan</li> <li>TPB 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan</li> </ul>	Dampak pemindahan Ibukota Nusantara ke Pulau Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan pemanfaatan ruang</li> <li>Daya dukung dan daya tampung</li> <li>Kawasan Ekosistem Pesisir dan Laut terdiri dari Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Perikanan Budidaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Paduserasi pemanfaatan ruang pada Kawasan perbatasan Kaltim-IKN</li> <li>✓ Intensifikasi lahan dengan teknologi baru</li> <li>✓ Konservasi lahan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung</li> <li>✓ Upaya-upaya perlindungan terhadap lahan Kawasan pesisir, dan kawasan perbatasan wilayah perkotaan terutama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelarasan pemanfaatan ruang pada Kawasan perbatasan Kaltim-IKN</li> <li>Memperketat perizinan Kawasan Budidaya di Kawasan DAS dan Wilayah Pesisir</li> <li>Peningkatan Produksi Kebutuhan Pangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam</li> <li>Menginisiasi penerapan</li> </ul>	Program Pembangunan SDG's yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>Lingkungan Hidup</li> <li>Perikanan dan Kelautan</li> </ul>



No	Belum/Perlu Capaian Program Pembangunan SDGs	Isu Strategis	Hasil Pengkajian KLHS	Alternatif	Rumusan Usulan Kebijakan RPJPD	Kesimpulan Tindak Lanjut	Bidang Berwenang
				<p>pada Kawasan yang memiliki fungsi penting dalam lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Perencanaan pembangunan Pengawasan pada lahan pertanian dan/atau perkebunan dengan mempertimbangkan: (1) aspek biofisik dalam suatu kawasan ekologi termasuk daya dukung dan potensi lahan; (2) aspek sosial-ekonomi; dan (3) aspek konservasi dan kelestarian lingkungan untuk kelangsungan penggunaan di masa mendatang</li><li>✓ Penyelenggaraan infrastruktur dan aksesibilitas yang terintegrasi secara kewilayahan</li><li>✓ Wilayah Kaltim sebagai daerah penyangga IKN</li></ul>	<p>instrumen ekonomi lingkungan dalam sektor Kelautan dan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemulihan lahan krisis air, kawasan tercemar akibat sampah dan limbah, dan kawasan terkontaminasinya air dan udara yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan di pesisir dan perbatasan wilayah perkotaan</li><li>• Infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah</li><li>• Peningkatan aksesibilitas antar wilayah.</li></ul>		



### **3.2.4 Rekomendasi Terhadap RPJPD Tahun 2025-2045**

Rekomendasi KLHS disusun untuk mengantisipasi beberapa isu strategis pembangunan berkelanjutan yang telah dirumuskan dengan memperhatikan indikator dengan upaya tambahan (DUT) dan permasalahan. Adapun rekomendasi yang diberikan dalam KLHS ini menyorot pada visi, misi, sasaran, arah kebijakan, dan tahapan pelaksanaan. Selain itu juga telah diberikan identifikasi Perangkat Daerah yang membidangnya. Secara rinci rekomendasi tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :



**Tabel III. 4**  
**Rekomendasi Terhadap RPJPD Provinsi Kalimantan Timur**

NO. TPB	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan	Indikator dengan upaya tambahan (DUT)	Permasalahan	Rekomendasi				Tahapan Pelaksanaan				Bidang Berwenang
				Visi	Misi	Sasaran	Arah kebijakan	5 Th I	5 Th II	5 Th III	5 Th IV	
1	Pengembangan Industri, Inovasi, dan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan dan pengembangan pembangunan industri yang terintegrasi dengan infrastruktur penunjang berbasis teknologi terbaru</li> <li>Adanya peningkatan pendanaan kebutuhan bidang ESDM 5,35% dengan penambahan selama 20 tahun mencapai Rp. 9,02 T</li> <li>Adanya proyeksi peningkatan secara linear terutama pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan proporsi mencapai 2,77% diproyeksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya SDM dalam Upaya meningkatkan kualitas pengembangan industri yang inovatif</li> <li>Masih rendahnya pendanaan dan arahan kebijakan mengenai bidang penelitian dan pengembangan</li> <li>Pendanaan saat ini terfokus pada bidang lainnya sehingga untuk peningkatan dan pengembangan pada bidang infrastruktur dan</li> </ul>	Visi perlu memasukkan kata lingkungan hidup berkelanjutan dan pelayanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan</li> <li>Mewujudkan pelayanan infrastruktur dasar yang prima</li> </ol>	Pengembangan Industri Hijau	Penerapan pembangunan kawasan industri berbasis ramah lingkungan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>Lingkungan Hidup</li> <li>ESDM</li> <li>Diskoperindag UKM</li> </ul>
						Meningkatkan SDM dalam pengelolaan industri hijau	Pengembangan dalam penelitian dan pelatihan tenaga kerja berdaya saing					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>Lingkungan Hidup</li> <li>ESDM</li> <li>Diskoperindag UKM</li> <li>Sosial dan Ketenagakerjaan</li> </ul>
						Meningkatkan pendapatan daerah dari pengembangan inovasi industri hijau	Penerapan peraturan/ regulasi terhadap dampak kegiatan industri berupa insentif dan disinsentif					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>Lingkungan Hidup</li> <li>ESDM</li> <li>Diskoperindag UKM</li> </ul>
						Mengembangkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi	Peningkatan Ketersediaan fasilitas Infrastruktur penunjang					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>Permukiman dan Perumahan Rakyat</li> </ul>



NO. TPB	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan	Indikator dengan upaya tambahan (DUT)	Permasalahan	Rekomendasi				Tahapan Pelaksanaan				Bidang Berwenang
				Visi	Misi	Sasaran	Arah kebijakan	5 Th 1	5 Th II	5 Th III	5 Th IV	
		dalam kurun 20 tahun peningkatan pendanaan tambahan mencapai Rp.4,67 T • Adanya tambahan pendanaan untuk bidang Disperindagkop UKM mencapai 0,77% dalam 20 tahun mencapai Rp. 1,30 T	pengembangan industri yang inovatif dan berkelanjutan cenderung rendah.			antar kawasan						• Lingkungan Hidup
2	Perwujudan Kota dan Permukiman Berkelanjutan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, Energi Bersih, dan Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	• Menyediakan infrastruktur terpadu, sanitasi yang memadai, layak, dan tepat guna di seluruh wilayah  • Adanya penambahan upaya dalam pendanaan daerah diproyeksikan pada bidang	• Rendahnya Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.  • Belum optimalnya upaya pengembangan potensi SDA dalam hal peningkatan	Visi perlu memasukkan kata lingkungan hidup	1. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Memperluas jaringan pelayanan air minum	Perluasan jaringan pelayanan air minum					• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Rakyat • Lingkungan Hidup
				Berkelanjutan dan pelayanan dasar	2. Mewujudkan pelayanan infrastruktur dasar yang prima	Memperluas jaringan pelayanan sanitasi	Perluasan jaringan sanitasi				• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Rakyat • Lingkungan Hidup	



NO. TPB	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan	Indikator dengan upaya tambahan (DUT)	Permasalahan	Rekomendasi				Tahapan Pelaksanaan				Bidang Berwenang
				Visi	Misi	Sasaran	Arah kebijakan	5 Th I	5 Th II	5 Th III	5 Th IV	
		pekerjaan umum dan penataan ruang selain itu bidang lainnya pada perumahan dan permukiman rakyat dapat mencapai mencapai Rp.4,67 T (2,77%) dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. • Adanya Penambahan pada bidang pangan TPH Rp.10,57 T (6,24%) dalam kurun waktu 20 tahun	Produksi berkelanjutan sedangkan tingkat konsumsi meningkat			Membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu	Penyediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Rakyat</li> <li>• Lingkungan Hidup</li> </ul>
						Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam efisiensi penggunaan utilitas serta konsumsi maupun produksi energi secara bijak	Penerapan kebijakan mengenai pengendalian penggunaan utilitas, konsumsi dan produksi energi secara tepat  Melakukan sosialisasi dan pengarahan serta pemberdayaan kepada masyarakat dalam menghemat penggunaan air dan energi					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Rakyat Lingkungan Hidup Sosial</li> <li>• LSM/Ormas</li> <li>• Perumahan dan Permukiman Rakyat Lingkungan Hidup Sosial</li> <li>• LSM/Ormas</li> </ul>





NO. TPB	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan	Indikator dengan upaya tambahan (DUT)	Permasalahan	Rekomendasi				Tahapan Pelaksanaan				Bidang Berwenang
				Visi	Misi	Sasaran	Arah kebijakan	5 Th 1	5 Th II	5 Th III	5 Th IV	
						Mengembangkan inovasi terbaru dalam pengelolaan utilitas dan produktivitas energi berkelanjutan	Peningkatan cakupan pelayanan utilitas, penyediaan air, dan energi yang terbarukan serta ramah lingkungan					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Rakyat Lingkungan Hidup</li> <li>• Sosial</li> </ul>
3	Dampak Pemindahan Ibukota Nusantara ke Pulau Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan, dan Mengembangkan Jaringan konektivitas antara dengan Wilayah Provinsi dan Fasilitas lainnya dalam menunjang Ibukota Negara</li> <li>• Adanya penambahan upaya dalam pendanaan daerah diproyeksikan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selain itu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor kesiapan sebagai wilayah penyangga masih belum baik, karena untuk kebutuhan infrastruktur penunjang diperlukan peningkatan persentase pendanaan dalam bidang pembangunan infrastruktur wilayah, seperti penyediaan proporsi pembangunan</li> </ul>	Visi perlu memasukkan kata lingkungan hidup berkelanjutan dan pelayanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan</li> <li>2. Mewujudkan pelayanan infrastruktur dasar yang prima</li> </ol>	Mengintegrasikan pemanfaatan ruang wilayah dengan kegiatan IKN	<p>Penyelarasan pemanfaatan ruang pada Kawasan perbatasan Kaltim-IKN</p> <p>Memperketat perizinan Kawasan Budidaya di Kawasan DAS dan Wilayah Pesisir</p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>• Lingkungan Hidup</li> </ul>
						Meningkatkan kebutuhan pelayanan dasar	Peningkatan Produksi Kebutuhan Pangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Lingkungan Hidup</li> <li>• Kelautan dan Pesisir</li> </ul>
												<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pangan, TPH Pertanian</li> <li>• Kelautan dan Pesisir</li> <li>• Diperindag UKM</li> </ul>



NO. TPB	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan	Indikator dengan upaya tambahan (DUT)	Permasalahan	Rekomendasi				Tahapan Pelaksanaan				Bidang Berwenang	
				Visi	Misi	Sasaran	Arah kebijakan	5 Th 1	5 Th II	5 Th III	5 Th IV		
		bidang lainnya pada perumahan dan permukiman rakyat dapat mencapai Rp.4,67 T (2,77%) dalam kurun waktu 20 tahun mendatang.	infrastruktur 2,77% • Dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan akan sangat berdampak baik dari kondisi wilayah, maupun peningkatan kondisi ekonomi, sosial, dll. Sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam menjaga kelestarian dan berkelanjutan				sumber daya alam						
							Infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah						• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup
							Peningkatan aksesibilitas antar wilayah						• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup
						Meningkatkan sosial-ekonomi wilayah	Menginisiasi penerapan instrumen ekonomi						• BAPPEDA • Pangan, TPH Pertanian • Kelautan dan Pesisir
							Lingkungan dalam sektor ekosistem darat						• Diperindag UKM
							Menginisiasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan dalam sektor laut						• Lingkungan Hidup Kelautan dan Pesisir



NO. TPB	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan	Indikator dengan upaya tambahan (DUT)	Permasalahan	Rekomendasi				Tahapan Pelaksanaan				Bidang Berwenang
				Visi	Misi	Sasaran	Arah kebijakan	5 Th 1	5 Th II	5 Th III	5 Th IV	
						Rehabilitasi lahan berdampak kegiatan IKN	Pemulihan lahan krisis air, kawasan tercemar akibat sampah dan limbah, dan kawasan terkontaminasi ya air dan udara yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan di pesisir dan perbatasan wilayah perkotaan					<ul style="list-style-type: none"><li>• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li><li>• Lingkungan Hidup</li></ul>

### 3.3 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merujuk merupakan persoalan yang memiliki dampak signifikan dan strategis terhadap berbagai aspek pembangunan suatu wilayah. Isu-isu ini dapat bersifat kompleks, melibatkan berbagai dimensi seperti ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan budaya. Identifikasi isu-isu strategis menjadi penting dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah untuk memastikan keterarahan upaya pembangunan secara efektif.

Identifikasi dan penanganan isu-isu ini dapat membantu merancang kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh suatu wilayah. Memberikan prioritas sebagai bentuk antisipasi terhadap isu-isu strategis akan memberikan keuntungan dalam meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Sebaliknya, mengabaikan isu-isu strategis berpotensi menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah.

Proses formulasi isu strategis daerah dilakukan melalui identifikasi isu-isu strategis internasional, nasional, dan regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Timur, penyusunan isu strategis harus mempertimbangkan konteks lokal, potensi, dan tantangan unik yang dihadapi Kalimantan Timur guna merumuskan langkah-langkah pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

#### 3.3.1 Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional merujuk pada permasalahan atau tantangan yang memiliki dampak signifikan dan melibatkan hubungan antarnegara, keamanan global, serta kesejahteraan masyarakat di tingkat internasional. Isu-isu ini bersifat kompleks, lintas sektor, dan memiliki implikasi yang luas terhadap dinamika hubungan antarbangsa. Dalam konteks internasional, isu-isu strategis akan dikelompokkan ke dalam empat dimensi pembangunan yaitu, dimensi sumber daya manusia, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi tata kelola.

##### 1. Isu-isu Strategis Global pada Dimensi Sumber Daya Manusia

Persoalan sumber daya manusia berkaitan dengan kondisi manusia di dalam suatu tatanan masyarakat, organisasi, dan konteks pembangunan. Di dunia internasional, persoalan sumber daya manusia berada dalam dimensi yang kompleks dan menyertai perkembangan global pada berbagai aspek. Isu-isu yang berkaitan dengan sumber daya manusia secara global akan melingkupi aspek kependudukan, penggunaan teknologi, dan kesehatan manusia.

**Jumlah penduduk dunia yang diperkirakan mencapai 9,45 miliar, menciptakan tantangan signifikan terkait distribusi sumber daya dan ketahanan pangan. Dengan lebih dari 55% dari total populasi dunia terkonsentrasi di kawasan Asia** berpotensi menciptakan ketidakseimbangan populasi sehingga menciptakan tekanan besar terhadap ketersediaan sumber daya seperti air, tanah, dan energi di beberapa wilayah, sementara wilayah lain mungkin menghadapi surplus yang tidak merata.

Tantangan terbesar dari kondisi ini adalah dalam menentukan dan memilih strategi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan sekaligus mempromosikan keberlanjutan. Pertambahan jumlah populasi ini akan membutuhkan keterlibatan banyak negara dalam mengelola distribusi sumber daya secara adil dan efektif, termasuk dalam memastikan tidak terjadinya dampak perubahan iklim.

**Urbanisasi yang terus meningkat menjadi poin kritis kedua, di mana 66% penduduk global kini tinggal di perkotaan.** Hal ini menggambarkan transformasi besar-besaran dalam pola pemukiman. Tren ini tidak hanya mencerminkan pergeseran besar dalam cara manusia hidup, tetapi juga mengakibatkan tuntutan mendesak terhadap pengembangan infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan. Selain itu, layanan publik di perkotaan perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang berkembang pesat, sementara keseimbangan lingkungan harus dijaga untuk mencegah dampak negatif urbanisasi terhadap ekosistem.

Urbanisasi bukan hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga menciptakan tantangan kompleks terkait dengan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Pertumbuhan cepat pada jumlah penduduk kota membutuhkan pemikiran strategis dalam merancang dan mengelola infrastruktur kota, seperti transportasi, air, dan energi, untuk menghindari tekanan berlebih pada sumber daya.

**Di sektor teknologi, dominasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bioteknologi, rekayasa genetik, dan kecerdasan buatan (AI) menjadi landasan revolusi industri 4.0 dan era industri 5.0.** Fenomena ini mengubah paradigma dasar dalam cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mengelola berbagai aspek kehidupan. Keberadaan teknologi ini tidak hanya membuka peluang inovasi yang luar biasa tetapi juga membawa dampak signifikan pada struktur pekerjaan, privasi, dan etika dalam masyarakat modern.

Dominasi teknologi informasi menciptakan tantangan dan dinamika yang kompleks. Perubahan cepat dalam dunia digital dan implementasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan memicu ketidakpastian terkait dengan dampak

pada lapangan pekerjaan yang masih bersifat tradisional. Selain itu, adopsi bioteknologi dan rekayasa genetik dalam konteks medis dan pertanian membuka pertanyaan etis terkait dengan manipulasi genetika dan konsekuensi jangka panjangnya bagi manusia dan lingkungan.

Terkait dengan upaya menyongsong era industri 5.0, konektivitas yang lebih mendalam akan terjadi antara manusia dan mesin, penggunaan data yang masif, dan sistem yang lebih adaptif, yang mengandung potensi permasalahan baru dalam hal privasi dan keamanan informasi. Dengan kata lain, dominasi teknologi ini menciptakan tantangan multidimensi yang membutuhkan pemahaman mendalam dan respons terhadap dinamika yang terus berubah dalam sektor teknologi modern.

**Terakhir, tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks dan global.** Salah satu permasalahan utama adalah munculnya pandemi-pandemi yang dapat menyebar dengan cepat dan melintasi batas-batas negara. Kejadian seperti ini menuntut kesiapan sistem kesehatan dan koordinasi internasional untuk menghadapi ancaman kesehatan yang tidak kenal batas. Selain itu, terjadi perubahan pola penyakit yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan gaya hidup, urbanisasi, dan lingkungan, yang menghadirkan tantangan baru dalam upaya pencegahan dan pengendalian.

Selain berbentuk fisi, masalah kesehatan mental juga menjadi fokus perhatian dalam masyarakat modern. Faktor-faktor seperti tekanan pekerjaan, isolasi sosial, dan ketidakpastian ekonomi dapat berkontribusi pada meningkatnya masalah kesehatan mental di berbagai lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya kompleksitas tantangan kesehatan masyarakat, perlu perhatian yang lebih serius terhadap penelitian, pendidikan, dan pengembangan kebijakan untuk menghadapi masalah-masalah ini dengan tepat dan efektif.

## **2. Isu-isu Strategis Global pada Dimensi Ekonomi**

Isu-isu strategis global pada dimensi ekonomi melibatkan dinamika yang kompleks dan saling terkait, mencerminkan perubahan signifikan dalam lanskap ekonomi dunia. Ekonomi telah menjadi dimensi atau sektor yang sangat penting selama bertahun-tahun. Dalam rencana pembangunan, indikator ekonomi merupakan salah satu indikator kunci atau makro. Oleh karena itu, mendapatkan perspektif khusus mengenai dimensi ini tentu saja sangat dibutuhkan.

**Pertama-tama, perubahan geopolitik menggambarkan peningkatan peran Cina dalam perekonomian dunia, mewakili pergeseran kekuatan ekonomi global.** Keterlibatan Cina dalam proyek-proyek infrastruktur dan investasi di berbagai negara telah mengubah dinamika ekonomi internasional,

menciptakan tantangan dan peluang baru bagi negara-negara lain. Dapat dikatakan bahwa Cina telah mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi utama dunia dengan cara melibatkan negaranya dalam proyek-proyek infrastruktur dan investasi di berbagai negara. Inisiatif seperti *Belt and Road Initiative* (BRI) menjadi katalisator pergeseran kekuatan ekonomi global. Dalam hal ini, Cina bukan hanya menjadi pesaing utama, tetapi juga mitra utama dalam proyek-proyek yang memengaruhi struktur ekonomi internasional.

**Dalam konteks perdagangan global, terlihat pertumbuhan yang signifikan sebesar 3,4% per tahun, di mana negara-negara berkembang menjadi poros perdagangan yang semakin dominan.** Pergeseran ini mencerminkan dinamika ekonomi yang berubah, di mana negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat memainkan peran yang semakin penting dalam perdagangan internasional. Fenomena ini menciptakan tekanan dan peluang baru terkait dengan regulasi perdagangan, keberlanjutan, dan distribusi keuntungan ekonomi.

Pergeseran poros perdagangan ini menandakan perubahan dalam pusat gravitasi ekonomi dunia. Negara-negara berkembang, dengan basis ekonomi yang kuat dan pertumbuhan yang pesat, semakin menjadi poros utama dalam arus perdagangan internasional. Mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik mereka sendiri, tetapi juga menjadi pemasok utama bagi pasar global. Hal ini menciptakan keseimbangan baru dalam keterlibatan ekonomi global, dengan negara-negara berkembang memiliki peran yang semakin penting dalam membentuk dinamika perdagangan dunia.

Selanjutnya adanya **ketidakpastian dalam rantai pasok global dan dampak bencana iklim menjadi hambatan serius dalam dimensi ekonomi dan berpotensi mengakibatkan gagal pangan.** Gangguan dalam rantai pasok dapat terjadi akibat peristiwa-peristiwa tak terduga, seperti pandemi global atau konflik geopolitik. Selain itu, bencana iklim seperti badai, kekeringan, dan banjir dapat mengakibatkan kerawanan pangan yang signifikan. Ketergantungan pada rantai pasok global dan ketidakpastian iklim menjadi tantangan serius bagi stabilitas ekonomi global.

**Fenomena stagflasi ekonomi dan inflasi tinggi menjadi hasil dari perang dagang dan penguasaan sumber daya.** Ketika negara-negara terlibat dalam perang dagang, pengaruhnya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, menghasilkan kombinasi stagnasi pertumbuhan dan inflasi yang tinggi. Sementara itu, penguasaan sumber daya oleh beberapa negara dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan gejolak harga yang berpotensi menghancurkan kestabilan ekonomi dunia.

Terakhir, terlihat **pergeseran kekuatan ekonomi ke negara-negara berkembang**. Peningkatan daya tawar ekonomi dari negara-negara seperti India, Brasil, dan negara-negara ASEAN menandai dinamika baru dalam distribusi kekuatan ekonomi global. Hal ini dapat menciptakan perubahan dalam dinamika politik ekonomi internasional, memaksa adaptasi dalam peraturan perdagangan dan kebijakan ekonomi global.

Peningkatan dominasi negara-negara berkembang dalam perdagangan global juga mencerminkan perkembangan ekonomi internal yang positif. Dengan meningkatnya eksportir utama dan penetrasi pasar internasional, negara-negara berkembang dapat memperkuat posisi mereka dalam tata kelola ekonomi global. Pada gilirannya, hal ini membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di negara-negara tersebut, menciptakan dampak positif dalam skala global.

Meskipun tantangan seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian perdagangan global masih ada, pergeseran ini menciptakan paradigma baru dalam perdagangan internasional. Negara-negara berkembang bukan lagi hanya penerima manfaat dari perdagangan global, tetapi mereka turut aktif membentuk dan memandu arah perdagangan dunia. Hal ini membawa implikasi besar dalam hal regulasi perdagangan, kemitraan ekonomi, dan struktur kekuasaan ekonomi global yang memerlukan adaptasi dan kerja sama antarnegara.

### **3. Isu-isu Strategis Global pada Dimensi Lingkungan**

Isu-isu strategis global pada dimensi lingkungan mencakup berbagai aspek, di antaranya adalah **komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan tantangan perubahan iklim**. Komitmen ini menjadi pokok pembahasan dalam konteks perlindungan lingkungan global, terutama seiring meningkatnya kekhawatiran akan dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Negara-negara di seluruh dunia bersatu dalam upaya untuk menetapkan target penurunan emisi GRK guna mengurangi pemanasan global. Persetujuan Paris menjadi landasan utama, di mana negara-negara berkomitmen untuk mencapai kesepakatan bersama guna menanggulangi perubahan iklim. Tindak lanjut dari kesepakatan Paris yang sangat relevan bagi Kalimantan Timur adalah hasil perundingan iklim Glasgow pada tanggal 13 November 2021 dimana 198 negara menyepakati penurunan penggunaan batu bara untuk ketenagalistrikan. Sejalan dengan kesepakatan ini, International Energy Agency (IEA) memproyeksikan penurunan permintaan batu bara global sebesar 15-45% pada tahun 2030 dan 40%-90% pada tahun 2050 dibandingkan tahun 2022 (IEA 2024). Tantangan utama dalam konteks ini adalah implementasi kebijakan penurunan emisi secara efektif,



memastikan bahwa langkah-langkah konkrit diambil untuk mencapai target-target tersebut.

Selanjutnya, **transisi energi menjadi isu krusial dalam mengatasi tantangan lingkungan global**. Isu ini menyoroti perlunya pergeseran dari sumber energi fosil menuju energi terbarukan sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dan memitigasi dampak perubahan iklim. Data dari lembaga internasional, seperti *International Energy Agency* (IEA), menunjukkan bahwa sektor energi adalah penyumbang utama emisi karbon di dunia. Oleh karena itu, transisi energi menjadi langkah strategis untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Negara-negara dan lembaga internasional perlu memprioritaskan investasi dalam teknologi energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung peralihan menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam perspektif lingkungan hidup, isu-isu strategis global ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh komunitas internasional. Analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan penurunan emisi GRK dan transisi energi memerlukan pemahaman yang cermat terhadap konteks politik, ekonomi, dan teknologi di berbagai negara. Selain itu, perlu juga dilakukan pembahasan yang cukup mendalam terkait dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan-kebijakan tersebut, termasuk dalam konteks ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan teknologi hijau. Pemahaman regulatif yang mendalam terhadap isu-isu ini menjadi kebutuhan esensial dalam merancang kebijakan dan strategi berbasis global yang efektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

#### **4. Isu-isu Strategis Global pada Dimensi Tata Kelola**

Isu-isu strategis global pada dimensi tata kelola **mencakup perubahan atau pergeseran kebijakan fiskal, yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara global**. Pergeseran kebijakan fiskal mencerminkan perubahan dalam pendekatan pemerintah terhadap manajemen keuangan dan alokasi sumber daya. Di tingkat global, isu ini menyoroti tantangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan keberlanjutan lingkungan dan kesetaraan sosial. Keputusan terkait tarif, pajak, dan pengelolaan utang negara menjadi pusat perdebatan, memerlukan koordinasi hubungan internasional untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Pergeseran kebijakan fiskal dalam tata kelola global dapat dilihat dari dampaknya terhadap stabilitas ekonomi global dan pembangunan berkelanjutan.

Keputusan pemerintah-pemerintah di dunia dalam pengelolaan keuangan tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara, tetapi juga memperlihatkan keterkaitan erat antara negara-negara dalam perekonomian global. Isu-isu seperti ketidaksetaraan ekonomi dan perubahan iklim semakin dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan fiskal, sehingga memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif dalam pengambilan keputusan.

Analisis mendalam terhadap pergantian kebijakan fiskal disyaratkan mencakup pemahaman terhadap dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, dan keberlanjutan lingkungan. Pembahasan yang berbasis empiris dan pemodelan ekonomi diperlukan untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari kebijakan fiskal tertentu. Selain itu, keterlibatan aktor-aktor global, seperti lembaga keuangan internasional dan organisasi multilateral, juga menjadi bagian integral dari analisis tata kelola keuangan global juga menjadi pendukung keberadaan isu ini. Pergeseran paradigmatik dalam kebijakan fiskal tidak hanya mencerminkan memengaruhi kondisi keuangan suatu negara, tetapi juga mengarah kepada evolusi sistem tata kelola ekonomi global yang semakin kompleks dan saling terkait.

### 3.3.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merujuk pada serangkaian masalah dan tantangan yang dianggap krusial bagi keamanan, keberlanjutan, dan kepentingan inti suatu negara. Pemahaman dan penanganan isu-isu ini melibatkan negara dalam upaya merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang dapat menjaga dan meningkatkan kedaulatan nasional. Isu-isu strategis nasional melibatkan ranah pertahanan, ekonomi, politik, dan sosial. Pertimbangan yang digunakan dapat diarahkan kepada segala sesuatu yang dipantik oleh kondisi internasional. Oleh karena itu, isu-isu strategis nasional juga melibatkan kondisi tata kelola dan stabilitas politik di tingkat domestik, termasuk pemeliharaan harmoni sosial dan penanganan konflik internal.

#### 1. Transformasi Ekonomi, Transformasi Sosial, dan Transformasi Tata Kelola

Transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola merupakan dimensi krusial dalam evolusi dan perkembangan suatu negara. **Terjadinya potensi transformasi ekonomi mengacu pada perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.** Kondisi ini melibatkan pergeseran paradigma dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis pengetahuan, atau dari sektor ekonomi tradisional ke sektor berbasis teknologi. Transformasi ekonomi selalu menjadi persoalan penting dalam

menyesuaikan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing global. Percepatan transisi energi berkeadilan sangat penting bagi Kalimantan Timur. Elemen paling penting dalam transisi energi adalah pengurangan penggunaan batu bara pada sektor ketenagalistrikan. Kebijakan penurunan penggunaan batu bara tersebut diatur pada Peraturan Presiden 112 tahun 2022 dan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan negara-negara anggota G7 yang tergabung dalam Internationaal Partners Group (IPG) dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diluncurkan pada tanggal 16 November 2022.

**Transformasi sosial merujuk pada perubahan dalam nilai-nilai, norma, dan perilaku masyarakat.** Transformasi ini melibatkan proses modernisasi, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi yang memengaruhi dinamika sosial suatu negara. Transformasi sosial juga terkait dengan kondisi akses pendidikan dan kesehatan, kesenjangan sosial, dan mempromosikan inklusivitas dalam masyarakat. Perubahan dalam transformasi sosial menciptakan tantangan kompleks yang memerlukan adaptasi kebijakan dan intervensi yang sesuai.

**Transformasi tata kelola mencakup perubahan dalam sistem pengelolaan pemerintahan dan kebijakan.** Ini mencakup reformasi tata kelola ekonomi, tata kelola politik, dan tata kelola publik secara umum. Transformasi ini mencakup upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan tata kelola juga seringkali menjadi kunci untuk mengatasi korupsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola saling terkait dan saling memengaruhi dalam membentuk masa depan suatu negara. Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi suatu bangsa serta keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dan positif.

## 2. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara baru di Provinsi Kalimantan Timur membawa dampak besar terhadap kebutuhan dan isu-isu yang muncul di wilayah ini. Pertama-tama, kebutuhan infrastruktur menjadi fokus utama seiring relokasi ibu kota. Dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya perencanaan yang matang untuk memastikan pengembangan infrastruktur yang memadai dan mampu menopang pertumbuhan kota serta kebutuhan penduduk yang semakin

bertambah. Dari sisi transportasi hingga sumber daya energi, pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Kalimantan Timur.

Isu lingkungan juga menjadi sorotan khusus dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Sebagai provinsi yang terkenal dengan kekayaan alamnya, terutama hutan hujan tropis yang mendukung keberlanjutan ekosistem global, pembangunan IKN membutuhkan langkah-langkah mitigasi dan perlindungan lingkungan yang kuat untuk menjaga keanekaragaman hayati serta keseimbangan ekosistem setempat.

Dalam konteks ekonomi, pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur akan mengubah wajah dan peluang serta tantangan seiring transformasi ekonomi yang diharapkan. Rencana pemanfaatan energi terbarukan secara masif di IKN dapat mempercepat transisi energi di Kalimantan Timur. Pengembangan ekonomi superhub akan membantu percepatan diversifikasi ekonomi Kalimantan Timur dalam rangka mengurangi ketergantungan pada batu bara dan bertransformasi menuju ekonomi berkelanjutan. Perluasan sektor ekonomi yang beragam, termasuk industri dan jasa, harus memperhatikan kebutuhan pekerja lokal dan menciptakan peluang kerja yang layak. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi manfaat ekonomi di tingkat lokal menjadi aspek penting yang harus diatasi. Di sisi lain, pembangunan IKN juga akan mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur serta menciptakan kesenjangan antarwilayah IKN dan Kalimantan Timur. Potensi dampak IKN (baik positif maupun negatif) perlu dikelola dengan baik.

### **3. Komitmen pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan dipandang sebagai isu strategis nasional karena mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang secara langsung mempengaruhi keberlanjutan dan stabilitas nasional. Pertama-tama, dalam aspek ekonomi, pembangunan berkelanjutan dapat dianggap sebagai isu strategis karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing global negara tersebut.

Selanjutnya, dari perspektif sosial, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dianggap sebagai isu strategis nasional karena mencakup aspek kesejahteraan dan keadilan sosial. Mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan akses pendidikan, dan memberikan layanan kesehatan yang merata menjadi prioritas dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan berkembang. Isu ini secara langsung terkait dengan stabilitas sosial dan kohesi

nasional, yang merupakan aspek krusial dari keamanan dan kesejahteraan suatu negara.

Dalam konteks lingkungan, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi isu strategis karena berkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan nasional. Melibatkan kebijakan dan tindakan yang mendukung perlindungan alam, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan penanggulangan perubahan iklim. Ketergantungan suatu negara pada sumber daya alam dan keseimbangan ekosistemnya menjadi faktor penting yang mempengaruhi ketahanan nasional dan keberlanjutan ekonomi.

#### **4. Potensi penurunan struktur penduduk usia produktif**

Potensi penurunan struktur penduduk usia produktif menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Persoalan ini berkaitan dengan perubahan dinamika demografi dalam suatu negara. Jika terjadi penurunan jumlah individu usia produktif, negara dapat mengalami dampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi, seperti menurunnya angkatan kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Isu ini dapat memicu perubahan dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan, mengingat populasi usia produktif merupakan tulang punggung keberlanjutan dan perkembangan ekonomi di Indonesia.

Penurunan struktur penduduk usia produktif menciptakan tantangan dalam hal keberlanjutan sistem jaminan sosial. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang menurun, beban penduduk lanjut usia yang bergantung pada sistem jaminan sosial dapat meningkat. Hal ini berpotensi menciptakan tekanan finansial pada negara, mengingat penduduk usia lanjut umumnya memerlukan pelayanan kesehatan dan dukungan finansial yang lebih besar. Oleh karena itu, isu penurunan struktur penduduk usia produktif juga berdampak pada keberlanjutan sistem kesejahteraan dan kesehatan nasional.

Penurunan jumlah individu usia produktif juga dapat berpengaruh terhadap dinamika pasar kerja dan kompetensi tenaga kerja. Dalam skenario di mana jumlah pekerja produktif menurun, perusahaan dan sektor industri mungkin menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan dan inovasi ekonomi. Terlebih lagi, kecenderungan ini dapat menciptakan persaingan yang lebih ketat dalam perebutan bakat, mempengaruhi strategi rekrutmen dan retensi di berbagai sektor industri.

## **5. Pemenuhan swasembada pangan nasional**

Pemenuhan swasembada pangan nasional menjadi fokus utama di Indonesia mengingat pentingnya ketahanan pangan sebagai aspek strategis untuk kesejahteraan rakyat. Di tengah potensi pertumbuhan sektor pertanian yang besar, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai swasembada pangan. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakmerataan distribusi sumber daya alam mempengaruhi produktivitas pertanian dan menyulitkan akses masyarakat terhadap pangan yang memadai.

Selain itu, perubahan pola konsumsi dan urbanisasi turut berkontribusi pada dinamika swasembada pangan di Indonesia. Peningkatan permintaan akan produk pangan yang lebih kompleks dan tingginya mobilitas penduduk dari pedesaan ke perkotaan menciptakan tekanan pada produksi dan distribusi pangan. Pemenuhan swasembada pangan membutuhkan transformasi struktural dalam pola konsumsi masyarakat dan mengakomodasi perubahan sosial-ekonomi yang terus berlangsung.

## **6. Percepatan penurunan kemiskinan**

Percepatan penurunan kemiskinan menjadi agenda penting bagi banyak negara, khususnya Indonesia. Kemiskinan bukan hanya berhubungan dengan masalah finansial, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Faktor-faktor kompleks seperti ketidaksetaraan akses dan distribusi sumber daya, serta ketidakpastian ekonomi, menjadi hambatan signifikan dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan. Upaya untuk meningkatkan inklusivitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi penting agar setiap lapisan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pembangunan ekonomi. Selain itu, perlu diperhatikan juga aspek ketahanan ekonomi rumah tangga, terutama di tengah dinamika global yang berubah dengan cepat dan fluktuasi ekonomi yang dapat berdampak pada kelompok-kelompok rentan.

Penurunan kemiskinan memunculkan kebutuhan kerjasama lintas sektor dan pemangku kepentingan. Kebutuhan ini tidak hanya terkait tanggung jawab pemerintah, namun juga perlu dukungan aktif dari sektor swasta, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil. Signifikansi utamanya adalah untuk mengakses pasar kerja yang layak, memperkuat infrastruktur sosial, dan membangun jaringan keselamatan sosial yang efektif.

## 7. Percepatan penghapusan stunting

Percepatan penghapusan stunting merupakan prioritas kesehatan masyarakat yang mendesak, khususnya di Indonesia. Stunting, yang merupakan kondisi gagalnya pertumbuhan anak karena kekurangan gizi kronis, memiliki dampak serius pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Di Indonesia, tingkat stunting masih cukup tinggi, menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam hal pemenuhan gizi dan kesehatan anak-anak.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat stunting di Indonesia melibatkan kompleksitas aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap gizi, pendidikan, dan layanan kesehatan di berbagai wilayah dan kelompok sosial menjadi salah satu kendala utama. Pemahaman mendalam tentang penyebab stunting yang melibatkan interaksi berbagai variabel, seperti ketersediaan pangan, sanitasi, dan praktek pemberian makan, menjadi penting untuk merancang intervensi yang efektif dan berkelanjutan.

Upaya percepatan penghapusan stunting memunculkan kebutuhan untuk kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Program kesehatan yang holistik, yang mencakup pemberian gizi yang baik sejak kehamilan, pemantauan pertumbuhan anak, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan berkualitas, menjadi esensial. Selain itu, peran aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi optimal untuk pertumbuhan anak juga diperlukan agar program-program tersebut dapat diimplementasikan dengan lebih efektif.

## 8. *Middle Income Trap*

*Middle Income Trap* (MIT) merujuk pada situasi di mana suatu negara mengalami kesulitan untuk melampaui kategori pendapatan menengah dan terjebak pada tingkat tersebut tanpa mampu maju ke kategori pendapatan tinggi. Fenomena ini melibatkan tantangan struktural dan ekonomi yang memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Terjebak di dalam kondisi MIT bisa menghambat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

MIT sering kali dihubungkan dengan perubahan struktural yang terbatas dalam perekonomian. Negara yang terjebak dalam MIT cenderung menghadapi kesulitan dalam mengalami diversifikasi ekonomi, yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Faktor-faktor seperti ketidakmampuan untuk memindahkan sumber daya dari sektor tradisional ke sektor-sektor yang lebih produktif dan inovatif dapat menjadi penyebab utama dari kondisi MIT.

Selain itu, MIT juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurangnya inovasi, ketidakpastian kebijakan, dan rendahnya daya saing di pasar global. Negara yang terjebak di dalam MIT mungkin menghadapi kesulitan untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi mereka dengan perubahan kondisi global dan terlibat dalam transformasi ekonomi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

### 3.3.3 Isu Strategis Regional

Pulau Kalimantan, sebagai pulau terbesar di Indonesia, menjadi fokus utama untuk menggalakkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah **penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Pulau Kalimantan agar dapat bersaing secara efektif di era modern**. Pembangunan SDM menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dan peluang global. Peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan keahlian, dan pemberdayaan masyarakat menjadi pilar-pilar strategis untuk mengatasi isu ini

Selain penguatan SDM, **konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Pulau Kalimantan memegang peranan penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi**. Infrastruktur transportasi yang handal dan efisien akan membuka akses ke daerah-daerah terpencil, meratakan pertumbuhan ekonomi, dan memastikan distribusi manfaat secara adil. Investasi yang tepat dalam sektor transportasi dan teknologi informasi akan mendukung terwujudnya konektivitas yang merata dan berkesinambungan di Pulau Kalimantan.

Pembagian peran wilayah **Kalimantan sebagai Mitra IKN membawa dampak strategis dalam mengarahkan pembangunan ekonomi di pulau Kalimantan**. Penetapan peran masing-masing wilayah memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan menjadi kunci untuk memastikan kesuksesan IKN. Selain itu, diperlukan perencanaan yang matang untuk memastikan pembagian peran ini sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat setempat.

**Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berskala nasional di Pulau Kalimantan menjadi strategi untuk mendiversifikasi ekonomi dan meningkatkan daya saing regional**. Identifikasi sektor-sektor unggulan yang dapat berkembang dengan pesat perlu didukung oleh kebijakan yang mendukung investasi, penelitian dan pengembangan. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan perencanaan wilayah terpadu, melibatkan pihak swasta, akademisi, dan masyarakat lokal untuk mencapai sinergi yang optimal.





**Penguatan peran Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya konservasi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.** Pulau Kalimantan memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan yang penting untuk keseimbangan ekologis global. Upaya perlindungan dan rehabilitasi lingkungan harus diintegrasikan dengan pembangunan ekonomi untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan lingkungan, melainkan mendukung keberlanjutan jangka panjang.

### **3.3.4 Isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur**

Isu-isu strategis dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 menjadi pondasi penentuan arah pembangunan di masa mendatang. Identifikasi isu-isu ini memperlihatkan urgensi dan dampak signifikan terhadap kondisi masyarakat serta perkembangan wilayah. Berdasarkan identifikasi dari permasalahan, isu strategis baik internasional, nasional maupun regional serta potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dapat ditentukan isu strategis untuk Provinsi Kalimantan Timur yang akan ditangani dalam 20 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Isu strategis pertama yang perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM). Salah satu tantangan penting adalah integrasi rencana pembangunan SDM sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan transformasi ekonomi daerah Kalimantan Timur. Kualitas SDM menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur. Kesenjangan-kesenjangan yang masih dijumpai perlu diatasi untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Peningkatan daya saing SDM juga berkaitan dengan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keahlian sesuai kebutuhan industri menjadi krusial untuk mengatasi isu ini. Perubahan struktur ekonomi dalam proses diversifikasi dan transformasi ekonomi berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat terdampak, misalnya hilangnya pekerjaan dan usaha. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan usaha memerlukan dukungan untuk mendapatkan pekerjaan atau usaha baru. Ini berarti dibutuhkan strategi mitigasi untuk meminimalisir dampak negatif dari kehilangan pekerjaan dan usaha.

Kesenjangan kualitas SDM dan meningkatkan daya saing juga harus dilihat dari perspektif ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai provinsi dengan potensi ekonomi yang besar, investasi dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor-sektor kunci di Kalimantan Timur. Penguatan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran.

Selain itu, mitigasi yang komprehensif terhadap isu kesenjangan kualitas SDM dan peningkatan daya saing memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Program-program pelatihan dan pendidikan perlu didesain sesuai dengan kebutuhan industri lokal, nasional dan global, dengan memperhatikan inovasi dan perkembangan teknologi. Provinsi Kalimantan Timur perlu mengambil contoh dan belajar dari praktik-praktik baik di tingkat nasional maupun internasional yang telah dilakukan. Studi banding dengan daerah atau negara yang telah berhasil mengatasi isu kesenjangan kualitas SDM dapat memberikan wawasan dan strategi implementasi yang lebih tepat. Selain itu, peran aktif lembaga riset dan akademisi dalam menyediakan data dan analisis mendalam juga akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Secara umum, perencanaan jangka panjang yang terintegrasi dan inklusif perlu diimplementasikan dalam naskah RPJDP ini untuk menangani isu kesenjangan kualitas SDM dan peningkatan daya saing. Kebijakan-kebijakan yang akan diambil mesti mencakup aspek-aspek seperti akses pendidikan yang merata, dukungan untuk penelitian dan inovasi, serta pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai. Dengan demikian, Provinsi Kalimantan Timur dapat memastikan bahwa SDM-nya siap bersaing dan berkontribusi secara optimal pada pembangunan ekonomi dan sosial di masa mendatang.

## **2. Pemerataan Pembangunan Wilayah**

Isu strategis kedua yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah pemerataan pembangunan wilayah. Kesenjangan antar wilayah di Kalimantan Timur masih cukup tinggi yakni mencakup disparitas ekonomi, infrastruktur, dan akses terhadap pelayanan publik di berbagai wilayah Kalimantan Timur. Fenomena ini memperlihatkan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat pembangunan, yang bisa berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk pemerataan antarwilayah menjadi esensial agar pembangunan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Upaya untuk menanggulangi kesenjangan antarwilayah dapat menggunakan perspektif inklusivitas pembangunan. Kesenjangan yang tinggi dapat menyebabkan sebagian wilayah terpinggirkan dan kesulitan mengakses peluang pembangunan. Suatu upaya perencanaan pembangunan yang berfokus pada pemerataan distribusi investasi, infrastruktur, dan pelayanan publik perlu untuk dilakukan. Perencanaan ini harus didasarkan kepada karakteristik, potensi, dan juga isu khusus di setiap wilayah. Selain itu, identifikasi penyebab utama dari kesenjangan antarwilayah dengan memerhatikan faktor aksesibilitas akan sangat membantu perencanaan yang baik.

### **3. Akselerasi Transformasi Ekonomi**

Isu strategis ketiga yang memerlukan perhatian dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah akselerasi transformasi ekonomi. Walaupun upaya transformasi ekonomi telah dimulai sejak tahun 2013, ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur terhadap sumberdaya tidak terbarukan masih tinggi. Kontribusi pertambangan batu bara terhadap PDRB pada periode 2013-2022 tidak pernah kurang dari 31%. Keberlanjutan dan resiliensi ekonomi Kalimantan Timur ditentukan oleh percepatan diversifikasi dan transformasi ekonomi daerah terutama untuk mengatasi dampak kebijakan transisi batu bara yang telah disepakati di tingkat internasional dan diadopsi oleh pemerintah pusat. Transformasi ekonomi yang lambat dapat menghambat kemampuan suatu daerah untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global, serta dapat mempengaruhi tingkat inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, perlunya memahami faktor-faktor yang memperlambat transformasi ekonomi dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan resiliensi, inklusivitas, dan keberlanjutan perekonomian daerah.

Faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya transformasi ekonomi antara lain belum optimalnya diversifikasi ekonomi, rendahnya investasi pada sektor non migas dan batubara, serta belum optimalnya kawasan-kawasan industri. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap hambatan-hambatan ini, pemerintah provinsi Kalimantan Timur dapat merancang strategi yang efektif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat transformasi sektor ekonomi.

Resiliensi ekonomi menjadi krusial untuk menghadapi tantangan eksternal, seperti krisis ekonomi global atau bencana alam. Provinsi Kalimantan Timur perlu membangun ketahanan ekonomi yang mampu mengatasi guncangan ekonomi dan memulihkan aktivitas ekonomi dengan cepat. Hal ini dapat dicapai melalui



diversifikasi sektor ekonomi, pengembangan kapasitas SDM yang tangguh, dan penyusunan kebijakan fiskal yang bijaksana.

Kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat dapat terjadi akibat lambatnya transformasi ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai inklusivitas, perlu diterapkan kebijakan yang memastikan bahwa manfaat ekonomi merata di seluruh lapisan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan akses terhadap peluang ekonomi menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan perekonomian yang inklusif.

Keberlanjutan ekonomi daerah juga harus diperhatikan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Provinsi Kalimantan Timur, sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, perlu mengelola eksploitasi sumber daya ini secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan perekonomian. Penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dan konservasi sumber daya alam menjadi penting untuk melindungi lingkungan dan mencegah kerusakan yang dapat merugikan sektor ekonomi di masa depan.

#### **4. Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Konektivitas dan Aksesibilitas yang Terintegrasi**

Isu strategis keempat yang memerlukan perhatian dalam konteks pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah pemenuhan infrastruktur dasar serta konektivitas dan aksesibilitas yang terintegrasi. Infrastruktur yang belum merata dapat menciptakan kesenjangan antarwilayah, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar. Selain itu, ketidakterintegrasiannya sistem konektivitas dapat mengurangi efisiensi dalam pergerakan barang dan orang, membatasi pertumbuhan ekonomi, dan melambatkan pengembangan wilayah.

Identifikasi wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dasar menjadi perlu untuk dilakukan. Data dan analisis yang komprehensif dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif perlu untuk dilakukan sehingga perencanaan-perencanaan proyek bisa menghasilkan kondisi perbaikan secara optimal. Persoalan konektivitas antarwilayah juga muncul karena belum optimalnya sistem transportasi yang terintegrasi, termasuk jalan, jembatan, dan transportasi publik. Intervensi terhadap persoalan ini akan meningkatkan mobilitas dan efisiensi distribusi daerah. Suatu skema yang memutlukkan upaya pemerintah dalam memastikan bahwa investasi dalam infrastruktur transportasi tidak hanya fokus pada kota-kota besar, tetapi juga mencakup wilayah-wilayah terpencil harus dimunculkan dalam seluruh naskah perencanaan.



Pembangunan infrastruktur teknologi informasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas digital di seluruh provinsi Kalimantan Timur. Akses internet yang cepat dan terjangkau dapat mempercepat pertukaran informasi, memfasilitasi bisnis *online*, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik.

## **5. Peluang Pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN**

Isu strategis kelima yang muncul dalam konteks pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah peluang pembangunan *superhub* ekonomi dan mitra IKN. Mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh IKN menjadi langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain itu, pengembangan Kawasan Strategis dan Industri dapat menjadi katalisator untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang strategis di Provinsi Kalimantan Timur.

Peluang pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan, energi, dan industri lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah di wilayah ini menjadi daya tarik utama bagi investasi dan pengembangan industri. Pengembangan Kawasan Strategis dan Industri tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu penilaian mendalam terhadap potensi risiko dan dampak dari setiap proyek pembangunan IKN.

Kolaborasi yang efektif dapat menciptakan sinergi antara berbagai pihak, memaksimalkan potensi peluang pembangunan, dan meminimalkan risiko yang mungkin muncul. Penting untuk memperhatikan aspek peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi peluang pembangunan IKN. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan dapat mendukung keterlibatan masyarakat setempat dalam industri-industri yang berkembang. Dengan demikian, peluang pembangunan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## **6. Kualitas Lingkungan Hidup serta Penurunan Emisi GRK**

Isu strategis keenam yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Perubahan struktur ekonomi daerah akibat diversifikasi dan transformasi ekonomi daerah akan mengubah dinamika tekanan terhadap lingkungan hidup. Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Oleh

karena itu, perlu adanya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap perubahan iklim melalui penurunan emisi GRK dan adaptasi perubahan iklim.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup mencakup berbagai aspek, termasuk pemeliharaan ekosistem alami, pengelolaan limbah, dan perlindungan sumber daya alam. Melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pelestarian lingkungan dan edukasi lingkungan hidup menjadi penting untuk menciptakan kesadaran kolektif terhadap perlunya menjaga keseimbangan alam. Selain itu, penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan kebijakan konservasi dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur.

Upaya penurunan emisi gas rumah kaca menjadi prioritas dalam menghadapi dampak perubahan iklim global. Upaya tersebut perlu difokuskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang berpotensi menjadi sumber utama emisi GRK Kalimantan Timur hingga tahun 2045 yaitu penggunaan energi fosil, alih fungsi lahan, dan kegiatan produksi yang berisiko meningkatkan emisi GRK. Transisi menuju energi bersih, perlindungan lahan berhutan dan lahan gambut, dan penerapan perkebunan dan produksi pangan berkelanjutan merupakan langkah kunci mencapai *net zero emissions* pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Target *net zero* dapat dicapai melalui kolaborasi yang solid antar pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya kolaboratif tersebut dapat mempercepat implementasi kebijakan, penerapan model-model usaha hijau inovatif yang produktif, proyek-proyek lingkungan dan menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi pelestarian lingkungan dan pengendalian emisi GRK. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program-program hijau dan kegiatan pelestarian lingkungan dapat meningkatkan efektivitas upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Penanganan isu ini juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat dan sektor ekonomi. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup tidak hanya berfokus pada pelestarian alam tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan keseimbangan pembangunan wilayah.

## **7. Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel menuju *World Class Government***

Isu strategis ketujuh yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah tata kelola pemerintahan yang profesional dan



akuntabel menuju *world class government*. Tata pemerintahan yang efektif dan berkualitas memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam struktur pemerintahan.

Pengembangan tata pemerintahan yang profesional melibatkan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM di sektor pemerintahan. SDM pemerintah perlu mendapatkan pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam merespons tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Sistem seleksi, pengangkatan, dan promosi pegawai juga perlu didasarkan pada meritokrasi untuk memastikan bahwa posisi-posisi strategis diisi oleh individu yang memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dari tata pemerintahan yang baik. Provinsi Kalimantan Timur perlu mengadopsi praktik-praktik baik dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan pemerintahan. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif juga harus diterapkan untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan juga harus diperhatikan. Masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Keterlibatan ini dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Transparansi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan terutama dalam proses transformasi ekonomi dan sosial.

Penggunaan teknologi informasi dan sistem *e-government* juga merupakan perkembangan yang perlu dipertimbangkan sebagai instrumen efektif dalam meningkatkan efisiensi birokrasi dan meningkatkan aksesibilitas layanan publik. Penerapan teknologi ini dapat membantu mengurangi birokrasi yang berbelit, meningkatkan transparansi, dan mempercepat penyelesaian berbagai proses administratif.

## **8. Pembangunan Jangka Panjang yang Berkesinambungan**

Pembangunan Jangka Panjang yang Berkesinambungan adalah isu strategis yang memerlukan penanganan untuk menghadapi kompleksitas perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan menjadi



fokus utama dalam merinci isu ini. Mitigasi yang diperlukan adalah dengan menggabungkan kepentingan sektor ekonomi dengan keberlanjutan sumber daya alam serta kelestarian ekosistem merupakan tantangan krusial. Menjaga integritas lingkungan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi memerlukan strategi yang cermat dan terintegrasi.

Partisipasi masyarakat memiliki peran krusial dalam membentuk dan mendukung kebijakan pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan menjadi langkah penting untuk menciptakan pemahaman bersama dan dukungan luas. Adopsi inovasi teknologi menjadi elemen kunci lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Percepatan teknologi yang ramah lingkungan serta penelitian dan pengembangan solusi berkelanjutan menjadi landasan untuk melangkah ke masa depan yang berwawasan lingkungan.

Ketahanan sosial dan ekonomi juga menjadi fokus dalam merinci isu ini. Bagaimana membangun masyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim, bencana alam, dan perubahan ekonomi global perlu diperhatikan lebih lanjut. Kolaborasi internasional menjadi aspek penting, di mana negara-negara perlu bersatu untuk mengatasi tantangan global yang melibatkan sumber daya dan dampak lingkungan. Pendidikan dan kesadaran publik juga memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan berkesinambungan, memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup dan sikap yang positif terhadap isu-isu keberlanjutan.

Isu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatasi dengan cermat dalam konteks pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan. Menjadi esensial untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, ketahanan pangan dan sumber daya alam perlu dikelola dengan bijak dalam menghadapi pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi. Dengan merinci aspek-aspek ini, diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas dan tantangan dalam mencapai pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan.





## BAB IV

### VISI DAN MISI KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan analisa terhadap gambaran umum kondisi daerah, perumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta penelaahan terhadap RPJP Nasional Tahun 2025-2045, maka visi dan misi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 selaras dengan upaya pencapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2045, yakni “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, berpotensi mencapai puncak keberhasilan sebagai kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi. Dengan wilayah Nusantara yang luas, Indonesia akan menjadi negara yang tangguh dan berdaulat, memegang kendali penuh terhadap segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mengarah ke masa depan, Indonesia pada tahun 2045 akan menempatkan dirinya sebagai negara maju dengan ekonomi yang menduduki peringkat kelima terbesar di dunia. Kemandirian ekonomi akan menjadi tonggak utama, memungkinkan Indonesia untuk memiliki ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global. Pencapaian ini akan didasarkan pada fondasi pengetahuan dan inovasi yang tumbuh dari akar budaya Nusantara yang kaya. Indonesia akan menjadi negara yang berdaya, modern, dan adil, menunjukkan daya saing yang tinggi di tingkat domestik maupun global. Di samping itu, keadilan sosial akan menjadi prinsip pokok, dijamin bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi diharapkan berjalan secara lebih inklusif sehingga seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari. Selanjutnya, berbagai cita-cita mulia di tahun 2045 ini perlu untuk diarusutamakan dalam penyusunan visi dan misi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

## 4.1 VISI DAN MISI

### 4.1.1 Visi

Cita-cita Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2045 sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Dengan memperhatikan visi nasional serta mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan tantangan yang dihadapi daerah maka visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur adalah :

**“KALTIM SEJAHTERA 2045:  
PENGGERAK SUPERHUB EKONOMI NUSANTARA  
YANG MAJU, ADIL DAN BERKELANJUTAN”**

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2045 merupakan perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan Masyarakat Kalimantan Timur. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat KALTIM yang Sejahtera dengan memperhatikan posisi Provinsi Kalimantan Timur sebagai *superhub* ekonomi IKN dan mitra IKN. Penjelasan makna visi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

a. Sejahtera

Konsep sejahtera dimaknai dengan maju masyarakatnya, adil pembangunannya, dan berkelanjutan sosial ekonominya. Ketiga aspek itu menjadi indikator penting yang harus dicapai agar Kalimantan Timur bisa sejahtera pada tahun 2045.

b. Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara

Provinsi Kalimantan Timur sebagai *superhub* ekonomi IKN menjadi pelaku utama perwujudan Pulau Kalimantan sebagai *superhub* ekonomi Nusantara, yang mengarah pada pengembangan pusat aglomerasi dan sektor ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

c. Maju

Kalimantan Timur yang mampu tumbuh beriringan dengan kemajuan IKN dan menjadi Mitra yang mampu memenuhi kebutuhan satu sama lain, baik dari aspek perekonomian, SDM, infrastruktur, dan lingkungan; Kalimantan Timur secara optimal menjalankan peran sebagai *Superhub* ekonomi IKN dan Mitra IKN; Masyarakat Kalimantan Timur mampu bersaing di era perkembangan teknologi dan modernisasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan; Kemajuan IPTEKIN tumbuh pesat dan diimplementasikan; Perekonomian di Kalimantan Timur digerakkan dari sektor sekunder dan tersier. Inklusivitas perekonomian

daerah meningkat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

d. Adil

Kehidupan yang memberi kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh masyarakat untuk dapat memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dalam rangka kehidupan yang lebih bermutu dan maju; seluruh masyarakat memperoleh layanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, lebih mudah dan bermutu; Disparitas pembangunan antar-wilayah berkurang; kemudahan memperoleh akses pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensi/kemampuan; serta mendapatkan hak layanan publik yang setara dan perlindungan yang sama di depan hukum.

e. Berkelanjutan

Jika transformasi ekonomi telah berjalan optimal, maka akan menghasilkan struktur perekonomian yang tidak lagi didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat ekstraktif; sektor industri bernilai tambah tinggi, jasa dan perdagangan mendominasi kontribusi struktur ekonomi Kaltim; Pelaksanaan aktivitas dilakukan secara lestari dan seimbang antara pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan; Menjadi kontributor utama dalam penurunan emisi GRK.

#### 4.1.2 Sasaran Visi

Terwujudnya Kalimantan Timur yang Maju, Adil dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu: meningkatnya pendapatan per kapita, menurunnya kemiskinan dan ketimpangan, meningkatnya peran Kaltim secara Nasional, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunnya emisi GRK menuju *net zero emission*.



**Tabel IV.1**  
**Lima Sasaran Utama Visi Kaltim Sejahtera 2045**

No	Sasaran Visi	Baseline 2025	Sasaran 2045
<b>1</b>	<b>Peningkatan pendapatan per kapita</b>		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	225,27-226,88	850,00-1.289,73
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	32,92	127,09
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	17,75 – 18,25	32,30 – 44,10
<b>2</b>	<b>Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan</b>		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,05 – 5,67	0,07 – 0,32
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,310-0,321	0,254 – 0,298
<b>3</b>	<b>Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah</b>		
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,28-6,58	5,98-7,45
	Indeks Daya Saing Daerah	3,40	4,08
<b>4</b>	<b>Peningkatan daya saing sumber daya manusia</b>		
	Indeks Modal Manusia	0,57	0,77
<b>5</b>	<b>Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i></b>		
	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	40,82	96,37

### 4.1.3 Misi

Kondisi akhir Provinsi Kalimantan Timur yang diharapkan hingga tahun 2045 merupakan suatu visi pembangunan yang harus diwujudkan melalui penetapan misi. Penetapan ini merupakan upaya umum yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi. Selanjutnya, dalam mewujudkan Visi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2045 maka ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

#### **1. Misi Kesatu: Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera**

Guna mencapai transformasi sosial yang menyeluruh, diperlukan kolaborasi semua pihak untuk membentuk manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Upaya pertama dimulai dengan peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses penuh untuk mencapai kesejahteraan fisik dan mental. Kedua, pendidikan diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang merangsang kreativitas dan pengembangan potensi individu, sehingga setiap warga dapat menjadi manusia yang cerdas dan kreatif. Ketiga, Perlindungan sosial dilaksanakan dengan cara memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki jaminan keamanan dan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Tahapan pelaksanaan dari transformasi sosial dimulai dari peningkatan pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Setelah layanan dasar terpenuhi maka dilakukanlah percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif. Tahapan selanjutnya yaitu penguatan daya saing manusia dan keberlanjutan kesejahteraan sehingga terwujudlah sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur yang unggul.

#### **2. Misi Kedua: Transformasi Ekonomi dengan Mengoptimalkan Peran sebagai Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara**

Misi transformasi ekonomi dapat dilakukan dengan cara peningkatan hilirisasi, pemantapan kawasan industri, penguatan komoditas unggulan, serta penyiapan kompetensi tenaga kerja. Tahapan ini penting karena menjadi dasar dari transformasi ekonomi. Setelah tercapainya tahapan awal, maka tahapan selanjutnya adalah peningkatan produktivitas secara masif, *shifting* struktur perekonomian, percepatan diversifikasi ekonomi pada sektor sekunder dan tersier, serta penerapan ekonomi berkelanjutan. Tahapan ketiga dilakukan dengan cara perwujudan peran sebagai pusat aglomerasi nasional didukung dengan stabilitas ekonomi-lingkungan serta penguatan jaringan rantai nilai global dan

domestik. Dengan begitu dapat tercapainya sasaran akhir yaitu perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

### **3. Misi Ketiga: Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional dan Berintegritas**

Misi transformasi tata kelola perlu diperhatikan karena berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Awal perbaikan yang bisa dilakukan adalah pemantapan sistem merit ASN, kelembagaan yang efektif dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan publik, penegakan regulasi, dan penguatan pemberdayaan. Setelah perbaikan ini dilakukan maka perlu tindak lanjut berupa ASN yang profesional, kelembagaan yang suportif, adanya kemudahan layanan publik, dan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Tahapan selanjutnya yaitu ASN yang kompetitif, kelembagaan yang adaptif, tercapainya kepuasan layanan publik, penyederhanaan regulasi birokrasi, serta masyarakat sipil mandiri dan berinteraksi sosial. Melalui beberapa tahapan ini yang kemudian tata kelola pemerintahan yang baik di dukung masyarakat sipil yang partisipatif bisa terwujud.

### **4. Misi Keempat: Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah**

Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi daerah menjadi landasan yang sangat penting dalam pelaksanaan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Perwujudannya dilaksanakan melalui penyelenggaraan hukum yang berkeadilan, menjaga ketahanan dan kondusifitas kehidupan bermasyarakat, pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi secara optimal, serta menjaga stabilitas ekonomi makro daerah. Keamanan daerah tangguh akan melindungi daerah dari berbagai ancaman baik yang bersifat internal maupun eksternal, serta menciptakan lingkungan yang aman. Demokrasi substansial akan menghasilkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan bertanggungjawab. Sedangkan stabilitas ekonomi daerah, yang meliputi fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan mendukung kebijakan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apabila ketiga aspek misi dilaksanakan dengan baik, maka daerah akan memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan daya tarik investasi, menciptakan pekerjaan yang layak, serta pengalokasian sumber daya secara efektif untuk mencapai keberhasilan pembangunan.

### **5. Misi Kelima: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal**

Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi perlu dilakukan agar tercapai masyarakat yang madani dalam lingkungan hidup yang lestari. Pola strategi

yang perlu dilakukan adalah penguatan kerukunan umat beragama, pembentukan keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, masyarakat inklusif, perbaikan lingkungan hidup agar berkualitas, ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim agar terbentuk sistem yang bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tekanan, gangguan, dan krisis.

#### **6. Misi Keenam: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**

Pembangunan yang merata dan berkeadilan adalah pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk mendistribusikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara adil di seluruh lapisan masyarakat dan wilayah, tanpa meninggalkan kelompok atau daerah tertentu. Dua hal yang menjadi perhatian utama yaitu keadilan sosial dan keseimbangan perkembangan regional. Pada ranah keadilan sosial yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan sosial, permasalahan ketidaksetaraan ekonomi, dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Ranah keseimbangan perkembangan regional adalah distribusi infrastruktur yang merata, pelestarian identitas dan budaya lokal, pemberdayaan ekonomi lokal, dan adanya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan masyarakat.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan perlu dilakukan agar terjadi kemudahan akses dan koneksi di seluruh wilayah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara perencanaan wilayah berbasis data, peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, adanya akses pendidikan dan pelatihan, penguatan sektor pertanian, perluasan akses keuangan, pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan, promosi wisata dan ekowisata, adanya kolaborasi antar pemerintah dan swasta, serta selalu dilakukan monitoring dan evaluasi.

#### **7. Misi Ketujuh: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**

Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan merujuk pada fasilitas fisik dan infrastruktur yang dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan standar tinggi dalam hal efisiensi, keberlanjutan, serta dampak positif terhadap lingkungan. Pemahaman ini mencakup dua dimensi utama: kualitas dan keberlanjutan lingkungan. Dari segi kualitas perlu diperhatikan Kesejahteraan Pengguna, Fungsi dan Kinerja, Inovasi dan Teknologi. Pada aspek Ramah Lingkungan perlu juga memperhatikan Efisiensi Energi, Manajemen Limbah, Konservasi Sumber Daya Alam, dan Penggunaan Material Ramah Lingkungan

Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan bisa diwujudkan dengan cara perencanaan berbasis kebutuhan dan lingkungan, adanya inklusi masyarakat dalam perencanaan, pemilihan material dan teknologi ramah lingkungan, desain yang efisien atas energi dan air, pengelolaan limbah dan sampah yang baik, transportasi ramah lingkungan, peningkatan akses yang universal, pemanfaatan *Smart Technology*, adanya pengelolaan air dan sumber daya alam yang baik, dan dilakukan pengawasan dan pemeliharaan berkala. Melalui strategi ini bisa mewujudkan infrastruktur yang andal.

#### **8. Misi Kedelapan: Mewujudkan Sinergitas dan Kestinambungan Pembangunan**

Kestinambungan pembangunan adalah upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan dalam jangka panjang tanpa mengorbankan kebutuhan dan hak generasi mendatang. Kestinambungan pembangunan bisa terwujud melalui pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dibutuhkan perencanaan jangka panjang dengan memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Inovasi dan penerapan teknologi perlu diperhatikan agar lebih efisien dan mengurangi dampak lingkungan. Dengan perencanaan jangka panjang maka terjadilah keberlanjutan pembangunan antar pemerintah.

Kestinambungan pembangunan melibatkan komitmen jangka panjang, koordinasi antar sektor, dan perhatian terus-menerus terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan tindakan sehari-hari menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini.





**VISI RPJPN 2025-2045  
INDONESIA EMAS 2045**

Negara Nusantara  
Berdaulat, Maju dan  
Berkelanjutan



**TUJUAN PENATAAN RUANG 2023-2042**

Mewujudkan Ruang yang maju, aman,  
nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna  
mewujudkan pusat Industri Hijau,  
pertanian, kelautan dan perikanan,  
pertambangan, dan IKN

VISI RPJPD 2025-2045

**KALTIM SEJAHTERA 2045:  
Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara  
Yang Maju, Adil Dan Berkelanjutan**

**TRANSFORMASI KALIMANTAN TIMUR**

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola

**LANDASAN TRANSFORMASI**

4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

**KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI**

6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Kestinambungan Pembangunan

**Gambar IV.1**  
**Kerangka Logis Rumusan Visi dan Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2025-2045**



## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

#### 5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR 2025-2045

##### 5.1.1. Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana upaya pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJPD dengan efektif dan efisien. Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada tahapan periode pembangunan Daerah Jangka Panjang. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi perencanaan pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 20 tahun masa perencanaan, dengan demikian diharapkan memberikan *tutup* hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan Kalimantan Timur dalam RPJPD tahun 2025-2045 merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap periode memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pulau Kalimantan diarahkan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara. Peran Kalimantan Timur sebagai **Superhub Ekonomi dan Mitra IKN** dapat mewujudkan superhub ekonomi nusantara yang dilaksanakan melalui 6 (enam) arah pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan manusia unggul melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan keilmuan, karakter, serta keterampilan secara merata dan berkualitas untuk mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan dan pelestarian budaya;
2. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi dan kolaborasi antarwilayah terutama antara superhub ekonomi IKN dengan daerah mitra IKN, pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan, pengembangan ekonomi kerakyatan, serta pengembangan destinasi wisata potensial;
3. Pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas, pembangunan sarana prasarana aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi di seluruh wilayah, terutama untuk mendukung pengembangan superhub ekonomi IKN dan daerah 3TP;



4. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung implementasi desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan terutama melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah, transformasi digital, peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan fungsi kawasan perbatasan negara untuk penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan negara, serta optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang;
5. Peningkatan kemandirian dan ketahanan pangan yang disertai dengan upaya peningkatan pelestarian lingkungan dan ekologi dalam seluruh aspek pembangunan;
6. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat terutama untuk mendukung pembangunan yang merata dan inklusif.

Arah pembangunan Kalimantan Timur diterjemahkan dan dibagi pada empat tahap dengan jangka waktu lima tahun di setiap tahapan. Secara rinci tercantum pada tabel sebagai berikut:



Tabel V. 1

**Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan RPJPD Kalimantan Timur Tahun 2025-2045**

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Kaltim Sejahtera 2045: Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil Dan Berkelanjutan		<b>Tahap 1 Perkuatan Fondasi Transformasi</b>	<b>Tahap 2 Akselerasi Transformasi</b>	<b>Tahap 3 Ekspansi Transformasi Daerah</b>	<b>Tahap 4 Perwujudan Kaltim Sejahtera</b>
		Pembangunan landasan transformasi sebagai Superhub Ekonomi dan Mitra IKN	Peningkatan daya saing daerah dalam upaya akselerasi transformasi dan peran sebagai Mitra IKN	Pemantapan peran daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi berkelanjutan Nusantara	Perwujudan pembangunan yang maju, adil, dan berkelanjutan menuju masyarakat Kaltim Sejahtera
	Misi 1: Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera	Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta penyiapan kompetensi tenaga kerja (upskilling dan reskilling)	Percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif, serta perluasan perlindungan sosial	Penguatan daya saing sumber daya manusia dan keberlanjutan kesejahteraan	Sumber daya manusia Kalimantan Timur yang unggul
	Misi 2: Transformasi Ekonomi dengan Mengoptimalkan Peran sebagai Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara	Peningkatan hilirisasi, pemantapan kawasan-kawasan industri, penguatan komoditas unggulan, serta penyiapan kompetensi tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif, <i>shifting</i> struktur perekonomian, percepatan diversifikasi ekonomi pada sektor sekunder dan tersier, serta penerapan ekonomi berkelanjutan	Perwujudan peran sebagai pusat aglomerasi nasional didukung dengan stabilitas ekonomi-lingkungan serta penguatan jaringan rantai nilai global dan domestik	Perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan
Misi 3: Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional dan Berintegritas	Pemantapan sistem merit ASN, Kelembagaan efektif dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan publik, penegakan regulasi, dan penguatan pemberdayaan masyarakat	ASN profesional, kelembagaan suportif, kemudahan layanan publik, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan	ASN kompetitif, kelembagaan adaptif, kepuasan layanan publik, penyederhanaan regulasi-birokrasi, serta masyarakat sipil mandiri dan berinteraksi sosial	Tata Kelola pemerintahan yang baik didukung dengan masyarakat sipil yang partisipatif	



Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Misi 4: Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah	Penguatan kerja sama daerah Keamanan Daerah, peningkatan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat infrastruktur ekonomi lokal secara inklusif	Peningkatan kapasitas kerja sama daerah dan antar daerah, penguatan dan transparansi dalam pengambilan kebijakan publik dan mendorong investasi daerah	Peningkatan kerja sama regional Kalimantan dalam kerangka keamanan daerah, kestabilan ekonomi, serta penguatan kebijakan daerah dalam memperkuat demokrasi	Mempertahankan kerja sama Keamanan Daerah, demokrasi dan stabilitas perekonomian daerah
	Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal	Penguatan sarana dan prasarana pendukung praktik kearifan tradisional dan sosial budaya dalam pembangunan lingkungan dan ekologi.	Penguatan kelembagaan sosial dan budaya, kemitraan dan kolaborasi dalam memperkuat kearifan tradisional dan pengembangan pengetahuan secara inklusi sosial	Pengembangan strategi adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial budaya melalui pendidikan formal dan informal secara inklusif dan berkelanjutan	Pemantapan ketahanan sosial budaya masyarakat dengan keseimbangan ekologi berbasis kearifan lokal, tradisional dan inklusifitas sosial
	Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pemenuhan infrastruktur dasar pemukiman berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan dan inklusifitas sosial	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, akses dan peluang perekonomian ke daerah-daerah 3T	Pengembangan perencanaan pembangunan wilayah berbasis bentang alam dan keseimbangan ekologi berbasis kewilayahan dan daerah 3T	Pemerataan pembangunan kewilayahan secara adil dan terintegrasi dengan pengembangan teknologi informasi.
	Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pemenuhan sarana dan prasarana berbasis teknologi hijau dan energi terbarukan yang meningkatkan kualitas lingkungan dan ekologi	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pemukiman dan fasilitas publik yang menggunakan energi dan sumberdaya secara efisien	Penguatan kapasitas infrastruktur hijau yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan berketahanan iklim	Pemantapan kualitas Sarana dan Prasarana yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
	Misi 8: Mewujudkan Sinergitas dan Kesenambungan Pembangunan	Peningkatan kapasitas antar pemangku dan pihak pelaksana pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusifitas sosial	Penguatan koordinasi antar sektor dan institusi Pemerintah, Perencanaan yang terintegrasi dengan perkembangan sistem teknologi informasi secara partisipatif dan inklusifitas sosial	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan, sistem pengawasan dan evaluasi terukur dan efektif dalam pencapaian pembangunan.	Pemantapan sinergi pembangunan berkelanjutan dan pengembangan sistem teknologi informasi



Pentahapan pembangunan sesuai tema dengan periode 5 (lima) tahun setiap tahap memiliki fokus masing-masing dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kalimantan Timur yaitu Tahap 1 (2025-2029) sebagai tahap Perkuatan Fondasi Transformasi, Tahap 2 (2030-2034) sebagai tahap Akselerasi Transformasi, Tahap 3 (2035-2039) sebagai tahap Ekspansi Daerah, dan Tahap 4 (2040-2045) sebagai tahap Perwujudan Kaltim Sejahtera.

Secara rinci setiap agenda pembangunan melalui tahap-tahap arah kebijakan Kalimantan Timur dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Agenda Pembangunan Tema I (2025-2029)**

Agenda Pembangunan Tema I Kalimantan Timur memiliki arah kebijakan pentahapan **PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI** yaitu **"Pembangunan Landasan Transformasi sebagai Superhub Ekonomi dan Mitra IKN"**. Tahapan pembangunan pada Tema I ini memastikan terwujudnya transformasi sosial melalui peningkatan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Pada aspek transformasi ekonomi melalui peningkatan hilirisasi, pemantapan kawasan-kawasan industri, penguatan komoditas unggulan, serta penyiapan kompetensi tenaga kerja. Sedangkan pada transformasi tata kelola didorong melalui pemantapan sistem merit ASN, kelembagaan efektif dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan publik, penegakan regulasi, dan penguatan pemberdayaan masyarakat.

#### **B. Agenda Pembangunan Tema II (2030-2034)**

Agenda Pembangunan Tema II Kalimantan Timur memiliki arah kebijakan pentahapan **AKSELERASI TRANSFORMASI** yaitu **"Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Upaya Akselerasi Transformasi dan Peran sebagai Mitra IKN"**. Tahapan pembangunan pada Tema II ini memastikan terwujudnya transformasi sosial melalui percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif. Transformasi ekonomi pada tahap ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas secara masif, *shifting* struktur perekonomian, percepatan diversifikasi ekonomi pada sektor sekunder dan tersier, serta penerapan ekonomi berkelanjutan. Adapun transformasi tata kelola dicapai melalui ASN profesional, kelembagaan suportif, kemudahan layanan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

#### **C. Agenda Pembangunan Tema III (2035-2039)**

Agenda Pembangunan Tema III Kalimantan Timur memiliki arah kebijakan **EKSPANSI TRANSFORMASI DAERAH** yaitu **"Pemantapan Peran Daerah Sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi berkelanjutan Nusantara"**. Tahapan

pembangunan pada Tema III ini memastikan terwujudnya transformasi sosial melalui penguatan daya saing sumber daya manusia dan keberlanjutan kesejahteraan. Transformasi ekonomi dilaksanakan melalui perwujudan peran sebagai pusat aglomerasi nasional didukung dengan stabilitas ekonomi-lingkungan serta penguatan jaringan rantai nilai global dan domestik. Sedangkan transformasi tata kelola dicapai melalui ASN kompetitif, kelembagaan adaptif, kepuasan layanan publik, penyederhanaan regulasi-birokrasi, serta masyarakat sipil mandiri dan berinteraksi sosial.

#### **D. Agenda Pembangunan Tema IV**

Agenda Pembangunan Tema IV Kalimantan Timur memiliki arah kebijakan **PERWUJUDAN KALTIM SEJAHTERA 2045** yaitu **“Perwujudan Pembangunan yang Maju, Adil, dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Kalimantan Timur Sejahtera”**. Tahapan Pembangunan pada Tema IV memastikan terwujudnya sumber daya manusia Kalimantan Timur yang unggul. Pada Transformasi ekonomi dicapai melalui perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan. Adapun pada transformasi tata kelola dicapai melalui tata kelola pemerintahan yang baik didukung dengan masyarakat sipil yang partisipatif.

### **5.2. UPAYA TRANSFORMATIF SUPER PRIORITAS (*GAME CHANGER*)**

Dalam upaya mewujudkan Kaltim Sejahtera 2045, terdapat 25 (dua puluh lima) upaya transformatif super prioritas (*game changer*), yaitu:

#### **Transformasi Sosial**

1. Akses wajib belajar 13 tahun kepada seluruh lapisan masyarakat;
2. Dominasi penduduk bekerja pada jenjang pendidikan tinggi (DI-DIV dan S1);
3. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan secara proporsional;
4. Tanpa stunting, eliminasi penyakit menular, dan kesadaran penerapan pola hidup bersih dan sehat;
5. Pengurangan penduduk miskin hingga dibawah 1% dan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat, terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
6. Pengangguran dibawah 4% dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi;



### **Transformasi Ekonomi**

7. Peningkatan kegiatan IPTEKIN berbasis konsep *green* dan *blue economy*
8. Pusat kegiatan industri Kawasan Timur Indonesia
9. 79% bauran energi baru terbarukan
10. Prioritas pengembangan talenta wirausaha berbasis pada UMKM dan ekonomi
11. Kemudahan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi hingga seluruh wilayah
12. Pengembangan superhub ekonomi IKN dan mitra IKN
13. Perluasan kerja sama perdagangan antar daerah dan antar negara dalam rangka memperkuat rantai nilai

### **Transformasi Tata Kelola**

14. Optimalisasi penerapan sistem merit pemerintahan
15. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan
16. Pelayanan publik pada kategori sangat baik
17. Digitalisasi seluruh layanan pemerintahan

### **Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah**

18. 0% kasus korupsi dan aduan masyarakat terhadap indikasi korupsi di lingkup provinsi
19. Pembuatan peraturan daerah yang responsif dan adaptif berorientasi pada omnibus, serta penguatan penegakannya
20. Perluasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
21. Keberadaan tokoh asal Kalimantan Timur dalam posisi eksekutif strategis di level pemerintah pusat

### **Ketahanan sosial budaya dan ekologi**

22. Penguatan karakter dan budaya asli daerah dalam kerangka NKRI
23. 100% cakupan pengelolaan sampah dan limbah, serta peningkatan daur ulang
24. Ketahanan energi, ketahanan air dan kemandirian pangan diatas 50%
25. Pemahaman dan penerapan kehidupan berwawasan lingkungan oleh seluruh lapisan masyarakat
26. Restorasi lahan bekas tambang untuk pemulihan ekologi dan pengembangan usaha hijau





### **5.3. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2045**

Sasaran Pokok dalam dokumen RPJPD memuat 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan hasil penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 serta target yang merupakan pencapaian keberhasilan dokumen jangka panjang, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel V. 2

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kalimantan Timur Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
					Tahap 1 2025-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045
<b>Misi 1 : Transformasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera</b>								
1	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat	1. Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,89	76,89	78,89	80,89	82,45
			2. Kesehatan ibu dan anak:					
			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	169	131	92	54	15
			b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	19,8	15,5	12,5	8,5	4,7
			3. Penanganan Tuberkulosis					
			a) Cakupan penemuan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)	85	87,5	90	92,5	95
b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	91	92,75	94,5	96,3	98			
			4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,5	99,63	99,75	99,88	100



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
					Tahap 1 2025-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045
		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. Hasil Pembelajaran: a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
			1) Literasi Membaca 2) Numerasi	20-40 0-10	50 15,00	60 30,00	70 45,00	80 60
			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
			i) Literasi Membaca ii) Numerasi	51,90-53,90 32,37-34,37	58,48-60,48 39,27-41,27	65,06-67,06 46,16-48,16	71,64-73,64 53,06-55,06	78,22-80,22 59,95-61,95
			c) Rata rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,23-10,55	11,10-11,28	11,81-12,10	12,60-12,74	13,39-13,47
			d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,12-14,13	14,50-14,51	14,87-14,89	15,25-15,27	15,63-15,66
			6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,33	12,52	12,90	12,90	12,50-13,09
			7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	65 – 71,37	68,75 – 74,78	72,50 – 78,20	76,25 – 81,60	80 – 85



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
					Tahap 1 2025-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045
	Meningkatnya kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%)	5,05-5,67	4,27 – 4,33	2,87 – 2,99	1,47 – 1,66	0,07 – 0,32
			9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	70,04	76,84	83,64	90,44	97,66
			10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	40	50	60	70	80
<b>Misi 2 : Transformasi ekonomi dengan mengoptimalkan peran sebagai superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara</b>								
2	Menguatnya kemajuan dan keberlanjutan perekonomian daerah	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	17,75-18,25	21,39 – 24,71	25,03 – 31,17	28,66 – 37,63	32,30-44,10
			12. Pengembangan Pariwisata					
			a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,03	1,25	1,47	1,68	1,90
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	30,66	61,32	92,00	122,66	153,33
			13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,29	0,48	0,66	0,85	1,03
14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD								
a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non	11,56	12,93	14,31	15,68	17,05			



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
					Tahap 1 2025-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045
			Pertanian pada Level Provinsi (%)					
			b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	3,33	5,00	6,67	8,33	10,00
			c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,37	4,33	5,30	6,26	7,22
			d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,33	2,20	3,10	3,90	4,80
			e) <i>Return on Asset (ROA) BUMD (%)**</i>	1,24	2,37	3,50	4,63	5,76
			15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,60-5,14	4,45 – 5,23	4,20 – 5,05	3,95 – 4,88	3,74 – 4,73
			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	48,50	54,55	57,00	59,45	61,90
			17. Tingkat Penguasaan IPTEK dan Inovasi					
			a) Indeks Inovasi Daerah	50,00	58,86	67,73	76,59	85,45
		5. Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
			a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	58,66	61,87	65,07	68,28	71,48
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	12,40	29,05	45,70	62,35	79,00
		6. Transformasi Digital	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,70	7,03	7,35	7,58	7,60-7,80



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target				
					Tahap 1 2025-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045	
	Meningkatnya interaksi ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,01	6,43	5,85	5,26	4,68	
			21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,72	33,10	33,40	33,90	34,08	
			22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	57,39	62,56	67,73	72,90	78,07	
		8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan						
			a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah perkotaan terhadap Kaltim (%)	24,00	26,11	28,23	30,34	32,45	
			b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	80,64	85,48	90,32	95,16	100	
c) Persentase Desa Mandiri (%)	3,92	7,63	11,35	15,10	18,79				
<b>Misi 3 : Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif, profesional, dan berintegritas</b>									
3	Meningkatnya kualitas layanan publik pemerintahan	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Reformasi Hukum	70	77,5	85	92,5	100	
			25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00	2,83	3,56	4,28	4,50-5,00	
			26. Indeks Pelayanan Publik	4,06	4,17	4,28	4,39	4,51-5,00	
			27. Indeks Integritas Nasional	75,84	79,72	83,60	87,48	91,36	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
					Tahap 1 2025-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045
<b>Misi 4 : Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi daerah</b>								
4	Meningkatnya kepastian hukum dan pelaksanaan demokrasi substansial	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial	28. Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM daerah	65	70	75	80	85
			29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	58,95	63,30	67,64	71,99	76,33
			30. Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	Meningkatnya ketangguhan daerah	11. Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,36	1,60	1,83	2,07	2,30
			32. Tingkat Inflasi (%)	2,5 <sub>±</sub> 1	2,5 <sub>±</sub> 1	2,5 <sub>±</sub> 1	2 <sub>±</sub> 1	1,0-2,9
			33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
			a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)**	19,02	34,24	49,46	64,68	79,90
			b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,22	1,88	3,54	5,20	6,87
			c) Nilai transaksi saham per kapita per provinsi (Rp per kapita)	4.469.000	13.540.750	22.612.500	31.684.250	40.756.000
			d) Total Kredit/PDRB (%)	10,6	25,8	41	56,2	71,4
12. Ketahanan dan Kondusifitas Daerah	34. Inklusi Keuangan (%)	95-98,43	98,77	99,12	99,46	99,8		
	35. Indeks Daya Saing Daerah	3,40	3,57	3,74	3,91	4,08		
		36. Jumlah kejadian tindak kriminal (kasus)	4574	3952	3330	2708	2087	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
					Tahap 1 2025-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045
<b>Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal</b>								
5	Menguatnya nilai-nilai sosial-budaya kemasyarakatan	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,80 – 58,84	61,18 – 61,31	63,55 – 63,77	65,92 – 66,24	68,30 – 68,71
			38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,82 – 77,87	79,67 – 79,72	81,52 – 81,57	83,37 – 83,42	85,23 – 85,74
		14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,79 – 71,81	73,05 – 73,10	74,32 – 74,40	75,58 – 75,69	76,84 – 76,98
			40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,393 – 0,392	0,341 – 0,336	0,289 – 0,279	0,237 – 0,200	0,185 – 0,167
	Meningkatnya pembangunan berwawasan lingkungan	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,533	0,569	0,605	0,641	0,677
			42. Kualitas Lingkungan Hidup					
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	80,19	81,92	82,25	82,57	83,56
b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)			6,5	26,50	45,75	65,35	85,00	
		c) Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	27	33,85	52,56	71,28	90,00	





No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
					Tahap 1 2025-2029	Tahap 2 2030-2034	Tahap 3 2035-2039	Tahap 4 2040-2045
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	68,58	76,44	84,29	92,15	100
	16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan	a) Ketahanan Energi - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)**	1.600-1.800	2.725	3.650	4.575	5.500
			- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)**	168	181	193	205,5	218
			b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%)	8,24	6,25	4,25	2,25	0,31
			c) Ketahanan Air - Kapasitas Air Baku (m <sup>3</sup> /detik)**	10,60	10,95	11,30	11,65	12,00
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	47,52	60,64	73,76	86,88	100
			17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Indeks Risiko Bencana (IRB)	45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
	a) Kumulatif	14,79			21,79	28,79	35,79	42,79
	b) Tahunan	27,53			41,74	55,96	70,17	84,38



Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan, oleh karena itu dirumuskan arah kebijakan kewilayahan pada tiga transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang didukung dengan dua landasan transformasi, yaitu keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial budaya dan ekonomi. Berikutnya, transformasi tersebut dilengkapi dengan implementasi transformasi dalam rangka mewujudkan pembangunan wilayah yang merata, menyediakan sarana dan prasarana, serta menjaga kesinambungan pembangunan. Adapun arah kebijakan transformasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

#### 1) Transformasi Sosial

1. Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan.

Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan dilaksanakan melalui pembudayaan perilaku hidup sehat dan pendidikan kesehatan sejak dini, termasuk eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

2. Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis.

Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis dilaksanakan melalui pendekatan integrasi multisektor, rekayasa lingkungan habitat vektor dan pemanfaatan teknologi informasi bidang kesehatan.

3. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan.

Pemenuhan dan pemerataan kuantitas serta kualitas tenaga kesehatan dilaksanakan melalui pemberian insentif, beasiswa pendidikan kedokteran, perawat, dan profesi kesehatan lainnya, serta afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di wilayah 3TP.

4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas.

Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan berbasis kewilayahan dan teknologi.

5. Percepatan wajib belajar 13 tahun.

Percepatan wajib belajar 13 tahun dilaksanakan melalui pemenuhan akses 1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah.



6. Pemerataan akses dan kualitas antar satuan pendidikan dan antardaerah.  
Pemerataan akses dan kualitas antar satuan pendidikan dan antardaerah dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan berbasis kewilayahan.
7. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi.  
Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dilaksanakan melalui pemberian kemudahan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan pemberian dukungan terhadap pengembangan perguruan tinggi serta pengadaan program studi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah.
8. Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik.  
Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif serta pemenuhan ketersediaan tenaga pendidik.
9. Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus.  
Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus dilaksanakan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global yang didasarkan pada lapangan usaha potensial masa depan dan mendukung pelaksanaan transisi energi, pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan, serta penurunan emisi GRK.
10. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi.  
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi dilaksanakan melalui revitalisasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam rangka menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, dengan memperhatikan sistem produksi dan tata niaga serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan berdasarkan skema *education to employment*.
11. Penyediaan afirmasi akses pendidikan.  
Penyediaan afirmasi akses pendidikan dilaksanakan melalui sistem pembelajaran jarak jauh, pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka terutama pada wilayah 3TP.



12. Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secara kolaboratif melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di wilayah 3TP dan kelompok marginal dengan peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

13. Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas.

Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pemberian perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, perluasan akses bekerja pada sektor formal untuk penyandang disabilitas serta pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur ramah lansia dan penyandang disabilitas.

14. Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat.

Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.

15. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi.

Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dilaksanakan melalui sertifikasi tenaga konstruksi, pengembangan media/sarana untuk peningkatan kapasitas tenaga jasa konstruksi, dan kerja sama *stakeholders* dalam pengembangan teknologi jasa konstruksi untuk mendukung penegakan standar keandalan bangunan.

2) Transformasi Ekonomi

1. Pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN dan daerah mitra yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.

Pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN dan daerah mitra yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing dilaksanakan melalui penguatan rantai pasok dan rantai nilai dengan memastikan kelancaran alur barang/jasa dari pusat produksi menuju kawasan industri dan *outlet*, mengoptimalkan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan struktur ekonomi yang berkelanjutan, efisiensi, inovasi dan pemerataan pembangunan.



2. Pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan.  
Pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan Industri Kariangau, Kawasan Industri Buluminung, dan KEK Maloy dan Kawasan industri lain sebagai bagian superhub ekonomi IKN.
3. Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan.  
Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan industri biokimia pangan, bioprospeksi/bioekonomi, herbal, nutrisi, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri yang didukung dengan ketersediaan bahan baku yang memadai.
4. Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting.  
Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting dilaksanakan melalui pengembangan industri berbasis oleokimia dan petrokimia.
5. Percepatan transisi energi berkeadilan.  
Percepatan transisi energi berkeadilan dilaksanakan melalui pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan menuju energi bersih, andal, cerdas dan terjangkau.
6. Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi.  
Pengembangan potensi sektor ekonomi baru berbasis inovasi dilaksanakan melalui pengembangan *biosimilar* dan vaksin, protein nabati, energi terbarukan.
7. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan.  
Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan berbasis agro-ekosistem untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.
8. Pengembangan destinasi wisata potensial berbasis kerakyatan dan ekowisata unggulan yang berkelas dunia.  
Pengembangan destinasi wisata potensial berbasis kerakyatan dan ekowisata unggulan yang berkelas dunia dilaksanakan melalui investasi infrastruktur pariwisata, pemasaran pariwisata terutama

dengan penyelenggaraan event-event pariwisata berskala nasional dan internasional, pelatihan pengembangan keterampilan dan pemberian insentif pelaku pariwisata, serta kerja sama antara sektor publik, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.

9. Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global.

Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global dilaksanakan melalui optimalisasi kawasan industri dan peningkatan daya saing komoditi unggulan daerah dengan memanfaatkan skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur dan Pasifik.

10. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman dilaksanakan melalui pelatihan *reskilling* dan *upskilling* serta transisi *school-to-work* dalam upaya memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah.

11. Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan.

Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penerapan *smart environment*, *smart infrastructure*, *smart governance*, *smart economy*, *smart people* dan *smart living* dalam setiap aspek pembangunan perkotaan.

12. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penguatan keterhubungan antar-kawasan 3 (tiga) kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda) dengan berbasis pada karakteristik wilayah serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

13. Industrialisasi koperasi.

Industrialisasi koperasi dilaksanakan melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, pemenuhan standar serta adopsi teknologi.

14. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global.

Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global dilaksanakan melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.



15. Peningkatan produktivitas BUMD.

Peningkatan produktivitas BUMD dilaksanakan melalui perbaikan regulasi, penguatan kapasitas pengelola dan akses pembiayaan, serta optimalisasi peluang *participating interest*.

16. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dilaksanakan melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, serta perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.

17. Penyediaan jaringan dan layanan listrik yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan.

Penyediaan jaringan dan layanan listrik yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan dilaksanakan melalui pengembangan teknologi digital guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik, serta pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik.

18. Pembangunan ekosistem digital.

Pembangunan ekosistem digital dilaksanakan melalui penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (perluasan jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok), peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas (peningkatan digitalisasi di sektor strategis), peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital (peningkatan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau *digital skill*).

19. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan.

Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa.

20. Pengembangan ekonomi maritim.

Pengembangan ekonomi maritim dilaksanakan melalui perlindungan dan pemanfaatan potensi sumber daya perairan laut, budidaya perikanan bernilai ekonomi tinggi, hilirisasi produk perikanan,



pengembangan industri berbasis pesisir, penguatan dan perluasan kawasan konservasi laut untuk *research and development* dan portofolio ekonomi karbon, *coastal tourism*, serta *marine services*, dengan mengedepankan penerapan *blue economy*.

### 3) Transformasi Tata Kelola

1. Optimasi regulasi daerah, termasuk proses pra-regulasi yang memadai. Optimasi regulasi daerah, termasuk proses pra-regulasi yang memadai dilaksanakan melalui pembuatan peraturan daerah yang responsif dan adaptif, peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah, pengembangan instrumen penegakan regulasi daerah.
2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.  
Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dilaksanakan melalui akomodasi aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, perluasan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan.
3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan kanal pengaduan masyarakat yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pemantauan penanganan laporan masyarakat.
4. Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga.  
Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dilaksanakan melalui peningkatan kualitas manajemen data dan keamanan informasi, penguatan kapasitas digital SDM ASN, percepatan digitalisasi layanan publik, optimalisasi pelaksanaan SPBE dan pengelolaan aset daerah berbasis digital.
5. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.  
Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang-jasa, transparansi layanan perizinan berbasis digital, optimalisasi *whistle blowing system*, serta membangun sistem manajemen anti penyuapan.





6. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja.  
Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dilaksanakan melalui penerapan sistem merit dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- 4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
  1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.  
Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas dilaksanakan melalui peningkatan dan fasilitasi penguatan Standar Pelayanan Minimal ketenteraman dan ketertiban umum, menerapkan sistem pusat layanan pengaduan masyarakat, pemetaan wilayah rawan trantibum, pencatatan masyarakat yang pindah domisili atau menetap sementara secara terintegrasi, serta kolaborasi dengan aparat kepolisian.
  2. Penyelesaian permasalahan *Outstanding Boundary Problems (OBP)*.  
Penyelesaian permasalahan *Outstanding Boundary Problems (OBP)* dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan perbatasan.
  3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.  
Peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal dilaksanakan melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional.
  4. Penguatan pengendalian inflasi daerah.  
Penguatan pengendalian inflasi daerah dilaksanakan melalui ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan ketersediaan barang substitusi.
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
  1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.



Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama dilaksanakan sejak usia dini melalui penanaman nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi, dan kerukunan antar etnis dan agama pada pendidikan formal dan informal.

2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.

Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat dilaksanakan melalui pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, pembentukan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak adat, penguatan lembaga adat dan peningkatan peran lembaga adat dalam proses pembangunan.

3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya.

Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya dilaksanakan melalui penguatan regulasi, pelestarian bahasa daerah, penyelenggaraan festival budaya, dan perlindungan masyarakat adat.

4. Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter.

Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter dilaksanakan melalui pengembangan kurikulum kebudayaan, pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial, pemberian penghargaan terhadap prestasi budaya, serta penguatan pendidikan moral dan akhlak khususnya generasi muda.

5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya.

Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur budaya yang representatif dan merata.

6. Pengembangan diversifikasi pangan.

Pengembangan diversifikasi pangan dilaksanakan melalui peningkatan produksi pangan lokal, promosi dan edukasi tentang nilai gizi dan keamanan pangan lokal, peningkatan variasi pengolahan pangan lokal, dan kebijakan pemerintah mendorong peningkatan konsumsi pangan lokal.

7. Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut.

Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut dilaksanakan melalui penghambatan laju deforestasi, peningkatan restorasi hutan

dan lahan gambut, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penguatan kebijakan pelestarian hutan, dan pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan dan ekosistem gambut.

8. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang.

Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang dilaksanakan melalui reklamasi pasca tambang, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan pemulihan sosial dan ekosistem serta pengembangan kegiatan ekonomi baru yang berkelanjutan.

9. Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.

Pelestarian bentang alam dilaksanakan melalui perlindungan bentang sungai, gunung, bukit dan hutan yang dapat membentuk identitas wilayah. Perlindungan keanekaragaman hayati dilaksanakan melalui konservasi potensi ekosistem rentan. Penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang didukung inisiatif lokal dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk melestarikan ekosistem.

10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies yang dilindungi.

Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies yang dilindungi dilaksanakan melalui identifikasi spesies yang dilindungi, karakteristik hubungan antar-spesies dan wilayah jelajahnya, serta perlindungan dan konservasi kawasan.

11. Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan.

Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.

12. Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana.

Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui mitigasi struktural dan non struktural, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi.

13. Pengembangan *Natural Based Solution* (NBS) untuk kebakaran hutan.

Pengembangan *Natural Based Solution* (NBS) untuk kebakaran hutan dilaksanakan melalui peningkatan pemahaman tentang nilai hutan,



peningkatan manajemen pengelolaan risiko kebakaran hutan, dan mendorong alokasi pendanaan penanganan kebakaran berbasis solusi alam.

14. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana.

Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dilaksanakan melalui peningkatan kesiapsiagaan, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, penerapan teknologi sistem peringatan dini yang andal, dan peningkatan respons adaptif terhadap bencana.

15. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.

Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pembangunan nilai-nilai keluarga yang kuat dan penguatan penerapan tradisi lokal yang dapat memperkuat ekonomi keluarga dan masyarakat.

16. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia.

Pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dilaksanakan melalui peningkatan fasilitas publik, pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

17. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lanjut usia serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan dilaksanakan melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

18. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan dilaksanakan melalui pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan peluang dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan.

19. Pembangunan bendung/bendungan.

Pembangunan bendung/bendungan diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan.

20. Pembangunan irigasi baru.

Pembangunan irigasi baru diutamakan pada wilayah sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan yang sesuai untuk tanaman pangan.

21. Pengendalian banjir.

Pengendalian banjir dilaksanakan melalui pengembangan *natural based solution* dan pengembangan area yang didedikasikan sebagai *retarding basin* (pemanfaatan cekungan/kolam retensi), terutama pada daerah mitra IKN.

22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dilaksanakan melalui optimalisasi penerapan prinsip *reduce*, *reuse* dan *recycle* serta penguatan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

23. Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem.

Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dilaksanakan melalui penguatan kerja sama antardaerah yang berada dalam satu kesatuan ekologi/ekosistem.

6) Implementasi Transformasi

1. Peningkatan kualitas penataan ruang.

Peningkatan kualitas penataan ruang dilaksanakan melalui penyusunan perencanaan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung, tertib pemanfaatan ruang sesuai pola dan struktur ruang, pengendalian konsistensi pemanfaatan ruang dan penuntasan RDTR kabupaten/kota.

2. Peningkatan pelaksanaan reformasi agraria.

Peningkatan pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan dalam bentuk legalisasi aset, mendorong redistribusi tanah dan perhutanan sosial.

3. Pengembangan pelabuhan laut.

Pengembangan pelabuhan laut diutamakan pada pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, utamanya dalam mendukung konsep *Economic Hub* tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda), di antaranya pada Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Samarinda yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai *hub* internasional).



4. Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.  
Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II ditujukan untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu.
5. Pembangunan dan pengembangan bandara.  
Pembangunan bandara ditujukan untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah dan percepatan pembangunan wilayah terutama di wilayah 3TP, sementara pengembangan bandara diutamakan pada bandara utama (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang di Balikpapan dan Bandara APT Pranoto di Samarinda) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah (termasuk *aerocity*) serta pengembangan bandara perairan dan *seaplane* (termasuk untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi).
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan.  
Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dilaksanakan melalui pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.
7. Pengembangan moda kereta api.  
Pengembangan moda kereta api ditujukan untuk angkutan logistik serta kereta api antar kota yang pengembangannya diselaraskan dengan pertumbuhan permintaan dan pengembangan wilayah.
8. Pengembangan angkutan sungai.  
Pengembangan angkutan sungai ditujukan untuk peningkatan kualitas distribusi logistik dan penumpang serta akses ke simpul utama transportasi.
9. Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi.  
Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi dilaksanakan melalui pengembangan sistem angkutan umum massal di kota-kota besar dan sedang yang andal, sesuai, modern dan terintegrasi antar simpul transportasi, sesuai dengan proyeksi perkembangan penduduknya.
10. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif.  
Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui penyediaan air siap minum jaringan perpipaan, peningkatan akses sanitasi, peningkatan kinerja lembaga



penyelenggara SPAM, peningkatan pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan IPTEK dalam pemenuhan akses air minum aman.

11. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dilaksanakan melalui pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, khususnya dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya mendukung pengurangan risiko bencana.

12. Pemerataan terhadap akses hunian layak.

Pemerataan terhadap akses hunian layak dilaksanakan melalui fasilitasi penyediaan akses perumahan layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan terutama untuk daerah kepulauan dan afirmasi, serta penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat.

13. Penanganan kawasan permukiman kumuh.

Penanganan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta penyediaan hunian vertikal yang terpadu dengan layanan dasar permukiman.

14. Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.

Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman dilaksanakan melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau SPALD-S maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALDT) atau SPALD-T.

15. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah dilaksanakan melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan mempedomani periodisasi dokumen perencanaan di tingkat pusat sebagai acuan penyelarasan lingkup waktu pelaksanaan pembangunan antar level pemerintahan.

16. Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.

Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi dilaksanakan melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam dokumen RPJPD dengan indikasi program utama pemanfaatan ruang (berbasis pola



ruang, struktur ruang, kawasan strategis provinsi) dalam RTRW Provinsi dengan mengacu pada lingkup waktu periodisasi RPJPD.

17. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah.  
Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah dilaksanakan melalui optimalisasi perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi kinerja yang mengacu pada pencapaian sasaran daerah.
18. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.  
Perkuatan pengendalian pembangunan dilaksanakan melalui penerapan SPIP terintegrasi dan penguatan manajemen risiko.
19. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.  
Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah, optimalisasi penyelenggaraan satu data, dan pengendalian pengembangan aplikasi bersifat khusus.
20. Pengembangan pembiayaan inovatif.  
Pengembangan pembiayaan inovatif dilaksanakan dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan dilaksanakan melalui inovasi pajak daerah, pemanfaatan dana abadi daerah, kerja sama Pembiayaan Badan Usaha (KPBU) dan *blended finance*.
21. Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah.  
Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan yang mengatur kewajiban internalisasinya ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah.





**Tabel V. 3**

**Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kalimantan Timur Tahun 2025-2045**

No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
1	Transformasi Sosial	1. Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan	Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan dilaksanakan melalui pembudayaan perilaku hidup sehat dan pendidikan kesehatan sejak dini, termasuk eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		2. Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis	Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis dilaksanakan melalui pendekatan integrasi multisektor, rekayasa lingkungan habitat vektor dan pemanfaatan teknologi informasi bidang kesehatan	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		3. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan	Pemenuhan dan pemerataan kuantitas serta kualitas tenaga kesehatan dilaksanakan melalui pemberian insentif, beasiswa pendidikan kedokteran, perawat, dan profesi kesehatan lainnya, serta afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di wilayah 3TP	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
		4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas	Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan berbasis kewilayahan dan teknologi	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		5. Percepatan wajib belajar 13 tahun	Percepatan wajib belajar 13 tahun dilaksanakan melalui pemenuhan akses 1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		6. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah	Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan berbasis kewilayahan	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		7. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi	Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dilaksanakan melalui pemberian kemudahan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan pemberian dukungan terhadap pengembangan perguruan tinggi serta pengadaan program studi yang sesuai	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
			dengan komoditas unggulan wilayah					
		8. Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif serta pemenuhan ketersediaan tenaga pendidik	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		9. Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus	Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus dilaksanakan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global yang didasarkan pada lapangan usaha potensial masa depan	v	v	v	v	Balikpapan, Samarinda, PPU, Bontang
		10. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi dilaksanakan melalui revitalisasi dan pengembangan pendidikan vokasi dalam rangka menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama perkebunan, pertambangan, industri dan	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
			pariwisata, dengan memperhatikan sistem produksi dan tata niaga serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui <i>skema education to employment</i> .					
		11. Penyediaan afirmasi akses pendidikan	Penyediaan afirmasi akses pendidikan dilaksanakan melalui sistem pembelajaran jarak jauh, pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka terutama pada wilayah 3TP	v	v	v	v	Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Paser
		12. Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secara kolaboratif melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di wilayah 3TP dan kelompok marginal dengan peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
		13. Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas	Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pemberian perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, perluasan akses bekerja pada sektor formal untuk penyandang disabilitas serta pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur ramah lansia dan penyandang disabilitas	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		14. Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat	Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		15. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi	'Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dilaksanakan melalui sertifikasi tenaga konstruksi, pengembangan media/sarana untuk peningkatan kapasitas tenaga jasa konstruksi, dan kerja sama <i>stakeholders</i> dalam pengembangan teknologi jasa konstruksi untuk mendukung	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
			penegakan standar keandalan bangunan					
2	Transformasi Ekonomi	1. Pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN dan daerah mitra yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing;	Pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN dan daerah mitra yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing dilaksanakan melalui penguatan rantai pasok dan rantai nilai dengan memastikan kelancaran alur barang/jasa dari pusat produksi menuju kawasan industri dan <i>outlet</i> , mengoptimalkan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan struktur ekonomi yang berkelanjutan, efisiensi, inovasi dan pemerataan pembangunan	v	v	v	v	Balikpapan, Samarinda, PPU, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Bontang, Berau
		2. Pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan	Pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan Industri Kariangau, Kawasan Industri Buluminung, dan KEK Maloy sebagai superhub ekonomi IKN	v	v	v	-	Balikpapan, Samarinda, PPU, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
		3. Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan industri biokimia pangan, bioprospeksi/bioekonomi, herbal, nutrisi, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri yang didukung dengan ketersediaan bahan baku yang memadai	v	v	v	v	Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur, Bontang, PPU, Paser
		4. Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting	Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting dilaksanakan melalui pengembangan industri berbasis oleokimia dan petrokimia	v	v	-	-	Bontang, Kutai Timur, Balikpapan, PPU
		5. Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan	Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dilaksanakan melalui pengembangan teknologi adaptif dan pengembangan industri energi terbarukan dalam upaya percepatan transisi energi menuju energi bersih dan terjangkau	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
		6. Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi	Pengembangan potensi sektor ekonomi baru berbasis inovasi dilaksanakan melalui pengembangan biosimilar dan vaksin, protein nabati, energi terbarukan	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		7. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan berbasis agro-ekosistem untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani	v	v	v	v	Paser, PPU, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau
		8. Pengembangan destinasi wisata potensial berbasis kerakyatan dan ekowisata unggulan yang berkelas dunia	Pengembangan destinasi wisata potensial berbasis kerakyatan dan ekowisata unggulan yang berkelas dunia dilaksanakan melalui investasi infrastruktur pariwisata, pemasaran pariwisata terutama dengan penyelenggaraan event-event pariwisata berskala nasional dan internasional, pelatihan pengembangan keterampilan dan pemberian insentif pelaku	v	v	v	-	Berau, Kutai Timur, Balikpapan, Samarinda, PPU, Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Bontang, Paser





No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
			pariwisata, serta kerja sama antara sektor publik, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.					
		9. Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global	Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global dilaksanakan melalui optimalisasi kawasan industri dan peningkatan daya saing komoditi unggulan daerah dengan memanfaatkan skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur dan Pasifik	v	v	v	v	Balikpapan, Samarinda, PPU, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Bontang, Berau
		10. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman	Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman dilaksanakan melalui pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> serta transisi <i>school-to-work</i> dalam upaya memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah.	v	v	v	v	Balikpapan, Samarinda, Bontang, Paser, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Berau
		11. Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penguatan keterhubungan antar-kawasan 3 (tiga) kota (IKN, Balikpapan, dan	v	v	v	v	Balikpapan, Samarinda, Bontang



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
			Samarinda) dengan berbasis pada karakteristik wilayah serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan					
		12. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penguatan keterhubungan antar-kawasan 3 (tiga) kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda) dengan berbasis pada karakteristik wilayah serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	v	v	v	v	Balikpapan, Samarinda
		13. Industrialisasi koperasi	Industrialisasi koperasi dilaksanakan melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	v	v	-	-	10 kabupaten/kota
		14. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global dilaksanakan melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
		15. Peningkatan produktivitas BUMD	Peningkatan produktivitas BUMD dilaksanakan melalui perbaikan regulasi, penguatan kapasitas pengelola dan akses pembiayaan, serta optimalisasi peluang <i>participating interest</i>	v	v	v	-	10 kabupaten/kota
		16. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dilaksanakan melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, serta perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		17. Penyediaan jaringan dan layanan listrik yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan	Penyediaan jaringan dan layanan listrik yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan dilaksanakan melalui pengembangan teknologi digital guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik, serta pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
		18. Pembangunan ekosistem digital	Pembangunan ekosistem digital dilaksanakan melalui penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (perluasan jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok), peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas (peningkatan digitalisasi di sektor strategis), peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital (peningkatan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> )	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		19. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan	Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
		20. Pengembangan ekonomi maritim	Pengembangan ekonomi maritim dilaksanakan melalui perlindungan dan pemanfaatan potensi sumber daya perairan laut, budidaya perikanan bernilai ekonomi tinggi, hilirisasi produk perikanan, pengembangan industri berbasis pesisir, penguatan dan perluasan kawasan konservasi laut untuk <i>research and development</i> dan portofolio ekonomi karbon, <i>coastal tourism</i> , serta <i>marine services</i> , dengan mengedepankan penerapan <i>blue economy</i>	v	v	v	v	Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, PPU, Paser
3	Transformasi Tata Kelola	1. Optimasi regulasi daerah, termasuk proses pra-regulasi yang memadai	Optimasi regulasi daerah, termasuk proses pra-regulasi yang memadai dilaksanakan melalui pembuatan peraturan daerah yang responsif dan adaptif, peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah, pengembangan instrumen penegakan regulasi daerah	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan,	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
		dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dilaksanakan melalui akomodasi aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, perluasan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan					
		3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan kanal pengaduan masyarakat yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pemantauan penanganan laporan masyarakat	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		4. Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dilaksanakan melalui peningkatan kualitas manajemen data dan keamanan informasi, penguatan kapasitas digital SDM ASN, percepatan digitalisasi layanan publik, optimalisasi	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
			pelaksanaan SPBE dan pengelolaan aset daerah berbasis digital					
		5. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang-jasa, transparansi layanan perizinan berbasis digital, optimalisasi <i>whistle blowing system</i> , serta membangun sistem manajemen anti penyuapan	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		6. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dilaksanakan melalui penerapan sistem merit dengan pemanfaatan teknologi informasi	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas dilaksanakan melalui peningkatan dan fasilitasi penguatan Standar Pelayanan Minimal ketenteraman dan ketertiban umum, menerapkan sistem pusat layanan pengaduan	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
			masyarakat, pemetaan wilayah rawan trantibum, pencatatan masyarakat yang pindah domisili atau menetap sementara secara terintegrasi, serta kolaborasi dengan aparat kepolisian					
		2. Penyelesaian permasalahan <i>Outstanding Boundary Problems (OBP)</i>	Penyelesaian permasalahan <i>Outstanding Boundary Problems (OBP)</i> dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan perbatasan	v	v	v	v	Mahulu dan Berau
		3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal	Peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal dilaksanakan melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional	v	v	v	v	10 kabupaten/kota





No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
		4. Penguatan pengendalian inflasi daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah dilaksanakan melalui ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan ketersediaan barang substitusi	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama dilaksanakan sejak usia dini melalui penanaman nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi, dan kerukunan antar etnis dan agama pada pendidikan formal dan informal.	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat dilaksanakan melalui pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, pembentukan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak adat, penguatan lembaga adat dan peningkatan peran lembaga adat dalam proses pembangunan	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
		3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya dilaksanakan melalui penguatan regulasi, pelestarian bahasa daerah, penyelenggaraan festival budaya, dan perlindungan masyarakat adat	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		4. Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter dilaksanakan melalui pengembangan kurikulum kebudayaan, pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial, pemberian penghargaan terhadap prestasi budaya, serta penguatan pendidikan moral dan akhlak khususnya generasi muda	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya;	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur budaya yang representatif dan merata	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
		6. Pengembangan diversifikasi pangan	Pengembangan diversifikasi pangan dilaksanakan melalui peningkatan produksi pangan lokal, promosi dan edukasi tentang nilai gizi dan keamanan pangan lokal, peningkatan variasi pengolahan pangan lokal, dan kebijakan pemerintah mendorong peningkatan konsumsi pangan lokal	v	v	v	v	7 kabupaten
		7. Rehabilitasi hutan dan penghambatan laju deforestasi	Rehabilitasi hutan dan penghambatan laju deforestasi dilaksanakan melalui peningkatan restorasi hutan dan lahan, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penguatan kebijakan pelestarian hutan, dan pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan	v	v	v	v	7 Kabupaten, 1 Kota
		8. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang	Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang dilaksanakan melalui reklamasi pasca tambang, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan pemulihan sosial dan ekosistem serta	v	v	v	v	7 Kabupaten, 1 Kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
			pengembangan kegiatan ekonomi baru yang berkelanjutan					
		9. Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;	<p>Pelestarian bentang alam dilaksanakan melalui perlindungan bentang sungai, gunung, bukit dan hutan yang dapat membentuk identitas wilayah. Perlindungan keanekaragaman hayati dilaksanakan melalui konservasi potensi ekosistem rentan. Penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang didukung inisiatif lokal dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk melestarikan ekosistem.</p>	v	v	v	v	7 Kabupaten, 1 Kota
		10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami sebagai tempat wilayah jelajah satwa ( <i>home range</i> ) dan konektivitas spesies yang dilindungi	<p>Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi dilaksanakan melalui identifikasi spesies yang dilindungi, karakteristik hubungan antar-spesies dan</p>	v	v	v	v	5 Kabupaten



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
			wilayah jelajahnya, serta perlindungan dan konservasi kawasan.					
		11. Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		12. Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui mitigasi struktural dan non struktural, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		13. Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk kebakaran hutan	Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk kebakaran hutan dilaksanakan melalui peningkatan pemahaman tentang nilai hutan, peningkatan manajemen pengelolaan risiko kebakaran hutan, dan mendorong alokasi pendanaan penanganan kebakaran berbasis solusi alam	-	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
		14. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dilaksanakan melalui peningkatan kesiapsiagaan, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, penerapan teknologi sistem peringatan dini yang andal, dan peningkatan respons adaptif terhadap bencana	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		15. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pembangunan nilai-nilai keluarga yang kuat dan penguatan penerapan tradisi lokal yang dapat memperkuat ekonomi keluarga dan masyarakat	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		16. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia.	Pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dilaksanakan melalui peningkatan fasilitas publik, pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan,	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
			termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang					
		17. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lanjut usia serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan dilaksanakan melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		18. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan dilaksanakan melalui peningkatan aksesibilitas dan kesetaraan peluang dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		19. Pembangunan bendung/ bendungan	Pembangunan bendung/bendungan diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan	v	v	v	v	*proses identifikasi
		20. Pembangunan irigasi baru	Pembangunan irigasi baru diutamakan pada wilayah sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan yang sesuai untuk tanaman pangan	v	v	v	v	*proses identifikasi



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
		21. Pengendalian banjir	Pengendalian banjir dilaksanakan melalui pengembangan <i>natural based solution</i> dan pengembangan area yang didedikasikan sebagai <i>retarding basin</i> (pemanfaatan cekungan/kolam retensi), terutama pada daerah mitra IKN	v	v	v	v	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar, Kutim, PPU
		22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dilaksanakan melalui optimalisasi penerapan prinsip <i>reduce, reuse</i> dan <i>recycle</i> serta penguatan pemilahan sampah sejak dari sumbernya	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		23. Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dilaksanakan melalui penguatan kerja sama antardaerah yang berada dalam satu kesatuan ekologi/ekosistem	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
6	Implementasi Transformasi	1. Peningkatan kualitas penataan ruang	Peningkatan kualitas penataan ruang dilaksanakan melalui penyusunan perencanaan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung, tertib pemanfaatan ruang sesuai pola dan struktur ruang, pengendalian konsistensi	v	v	v	v	10 kabupaten/kota





No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
			pemanfaatan ruang dan penuntasan RDTR kabupaten/kota					
		2. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan dalam bentuk legalisasi aset, mendorong redistribusi tanah dan perhutanan sosial	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		3. Pengembangan pelabuhan laut	Pengembangan pelabuhan laut diutamakan pada pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, utamanya dalam mendukung konsep <i>Economic Hub</i> tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda), di antaranya pada Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Samarinda yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai <i>hub</i> internasional)	v	v	v	v	Samarinda, Balikpapan
		4. Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II	Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II ditujukan untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan	v	v	v	v	Balikpapan, Paser, PPU, Bontang, Kutim, Berau, Kukar



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
			global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu					
		5. Pembangunan dan pengembangan bandara	Pembangunan bandara ditujukan untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah dan percepatan pembangunan wilayah terutama di wilayah 3TP, sementara pengembangan bandara diutamakan pada bandara utama (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang di Balikpapan dan Bandara APT Pranoto di Samarinda) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah (termasuk <i>aerocity</i> ) serta pengembangan bandara perairan dan <i>seaplane</i> (termasuk untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi)	v	v	v	v	Samarinda, Balikpapan, Paser, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau, Kutai Timur
		6. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dilaksanakan melalui pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
			transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah					
		7. Pengembangan moda kereta api	Pengembangan moda kereta api ditujukan untuk angkutan logistik serta kereta api antarkota yang pengembangannya diselaraskan dengan pertumbuhan permintaan dan pengembangan wilayah	v	v	v	v	PPU, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Paser
		8. Pengembangan angkutan sungai	Pengembangan angkutan sungai ditujukan untuk peningkatan kualitas distribusi logistik dan penumpang serta akses ke simpul utama transportasi	v	v	v	v	Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara
		9. Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi	Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi dilaksanakan melalui pengembangan sistem angkutan umum massal di kota-kota besar dan sedang yang andal, sesuai, modern dan terintegrasi antar simpul transportasi, sesuai dengan proyeksi perkembangan penduduknya	v	v	v	v	Balikpapan, Samarinda
		10. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman,	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui penyediaan air siap minum jaringan perpipaan, peningkatan	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
		berkelanjutan dan inklusif	akses sanitasi, peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM, peningkatan pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan IPTEK dalam pemenuhan akses air minum aman					
		11. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dilaksanakan melalui pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, khususnya dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya mendukung pengurangan risiko bencana	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		12. Pemerataan akses hunian layak	Pemerataan terhadap akses hunian layak dilaksanakan melalui fasilitasi penyediaan akses perumahan layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan terutama untuk daerah kepulauan dan afirmasi, serta penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
		13. Penanganan kawasan permukiman kumuh	Penanganan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta penyediaan hunian vertikal yang terpadu dengan layanan dasar permukiman	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		14. Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman	Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman dilaksanakan melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau SPALD-S maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALDT) atau SPALD-T	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		15. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah dilaksanakan melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan mempedomani periodisasi dokumen perencanaan di tingkat pusat	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
			sebagai acuan penyelarasan lingkup waktu pelaksanaan pembangunan antar level pemerintahan					
		16. Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi	Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi dilaksanakan melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam dokumen RPJPD dengan indikasi program utama pemanfaatan ruang (berbasis pola ruang, struktur ruang, kawasan strategis provinsi) dalam RTRW Provinsi dengan mengacu pada lingkup waktu periodisasi RPJPD	v	-	-	-	10 kabupaten/kota
		17. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah;	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah dilaksanakan melalui optimalisasi perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi kinerja yang mengacu pada pencapaian sasaran daerah	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		18. Perkuatan pengendalian pembangunan,	Perkuatan pengendalian pembangunan dilaksanakan melalui penerapan SPIP	v	v	v	v	10 kabupaten/kota



No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Tahap 1 2025–2029	Tahap 2 2030–2034	Tahap 3 2035–2039	Tahap 4 2040–2045	Lokus
		melalui penerapan manajemen risiko;	terintegrasi dan penguatan manajemen risiko					
		19. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah, optimalisasi penyelenggaraan satu data, dan pengendalian pengembangan aplikasi bersifat khusus.	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		20. Pengembangan pembiayaan inovatif	Pengembangan pembiayaan inovatif dilaksanakan dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan dilaksanakan melalui inovasi pajak daerah, pemanfaatan dana abadi daerah, kerja sama Pembiayaan Badan Usaha (KPBU) dan <i>blended finance</i> .	v	v	v	v	10 kabupaten/kota
		21. Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah	Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan yang mengatur kewajiban internalisasinya ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah	v	v	v	v	10 kabupaten/kota

## BAB VI PENUTUP

Visi pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yakni **Kaltim Sejahtera 2045 : “Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil, dan Berkelanjutan”** menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun ke depan, dimana dalam pelaksanaannya akan memerlukan dukungan kontribusi aktif, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh unsur pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD Kalimantan Timur 2025-2045 telah mengarah pada upaya pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan jangka Panjang daerah, RPJPD ini akan menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam dimensi lima tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam dimensi satu tahunan.

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya RPJPD periode berikutnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan untuk mengawal implementasi RPJPD Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

- 1) Kepala daerah terpilih berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini dengan menjabarkannya dalam visi dan misi RPJMD sesuai dengan tahapan pembangunan, serta mengakomodasi substansi RPJPD ke dalam seluruh dokumen perencanaan daerah yang disesuaikan dengan urusan dan kewenangan;
- 2) Dalam rangka implementasi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045, Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk menjabarkan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 ke dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan periode berkenaan yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda kepala daerah serta berbagai strategi, kebijakan, dan program secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur;





- 3) Peraturan Daerah tentang RPJPD disosialisasikan secara luas kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan untuk dapat memahaminya secara mendalam dan dapat menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- 4) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD, seluruh masyarakat dan swasta secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung konsistensi implementasi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen turunannya, terutama kaitan keselarasannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- 5) Unit satuan kerja vertikal setingkat maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang melakukan program dan kegiatan di Provinsi Kalimantan Timur serta berbagai komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewajiban melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelaraskan dan menjamin konsistensi terhadap RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045;
- 6) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045, meliputi antara lain :
  - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang melalui pemantauan, supervisi, dan penilaian hasil capaian kinerja pelaksanaan RPJPD secara periodik;
  - b. Menyusun dan melaksanakan manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

